

Laporan Kinerja

Badan Pengembangan
Infrastruktur Wilayah

Tahun Anggaran 2024





20
24

Laporan Kinerja

Badan Pengembangan
Infrastruktur Wilayah

Tahun Anggaran 2024





Yudha Mediawan

Kepala BPIW



Kata Pengantar

Menutup tahun 2024, Indonesia dihadapkan oleh beragam situasi global yang penuh dengan ketidakpastian dan dinamika yang rumit, menyisakan bermacam tantangan yang perlu dipenuhi untuk menjadi negara maju. Namun disisi lain, selama dua dekade terakhir melalui pelaksanaan RPJN Nasional Tahun 2005-2025, Indonesia telah mencapai kemajuan yang signifikan dalam berbagai bidang diantaranya yaitu, pendapatan per kapita yang tumbuh pesat, kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang, meningkatnya daya saing sumber daya manusia, serta stabilitas ketersediaan pangan yang semakin membak. Tentu kita patut berbangga, pembangunan infrastruktur konektivitas, prasarana dasar, perumahan dan permukiman, serta sumber daya air yang diperankan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) saat itu memainkan andil yang besar terhadap pencapaian target pembangunan yang tidak ringan tersebut. Kecepatan dan ketepatan yang disertai inovasi dalam tiap tahapan pengambilan keputusan, perencanaan, hingga pelaksanaan merupakan strategi kunci yang secara tepat digunakan dalam penyelenggaraan infrastruktur. Peris disinilah peranan BPIW dalam merajut program infrastruktur PUPR dengan pengembangan wilayah menjadi dorongan nyata atas perwujudan kinerja Kementerian.

Keberhasilan BPIW dalam merencanakan dan meramu program pembangunan infrastruktur tercermin dari produk berkualitas yang diadaptasi sebagai dasar pelaksanaan fungsi pembangunan, tidak hanya bagi Direktorat Jenderal teknis di lingkungan Kementerian PUPR, namun juga Kementerian lain serta Pemerintah Daerah khususnya dalam pengembangan kawasan-kawasan prioritas. Tidak hanya memerankan fungsi sentral sebagai perajut program, dalam dua tahun kebelakang, BPIW secara signifikan berkontribusi dalam memastikan infrastruktur terbangun benar-benar dapat berfungsi optimal agar memberikan manfaat langsung dan seluas-luasnya untuk kesejahteraan masyarakat, *delivered*, sebagaimana harapan bersama. Beragam upaya yang ditempuh semata-mata untuk merealisasikan pengembangan wilayah yang terintegrasi. Perjalanan BPIW dalam mendayagunakan sumber daya yang dimiliki dalam melaksanakan fungsinya, dipertanggungjawabkan secara akuntabel, terbuka, dan transparan untuk dapat dievaluasi secara luas baik oleh instansi pengampu, pihak eksternal, maupun masyarakat umum. Pertanggungjawaban semacam itu mwujud dalam bentuk Laporan Kinerja yang secara konkret menguraikan bagaimana BPIW menjalankan peran dan kewenangannya dalam memenuhi target-target kinerja yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja yang ditetapkan bersama.

Laporan Kinerja Tahun 2024, dimaknai sebagai momentum untuk mencerminkan tidak hanya kinerja satu tahun kebelakang tetapi juga selama satu periode jangka menengah yang telah dilalui. Di dalamnya, terinci mengenai fokus pendayagunaan sumber daya BPIW meliputi, perumusan perencanaan jangka panjang dan menengah Kementerian PUPR mendukung target perencanaan nasional, kebijakan teknis dan strategi perkotaan nasional, penetapan RPIW melalui Keputusan Menteri PUPR, pembangunan pariwisata terintegrasi dan berkelanjutan, penyelenggaraan keterpaduan dan sinkronisasi program tahunan infrastruktur PUPR, dukungan penanganan kemiskinan ekstrem dan stunting, kebermanfaatan dan keberfungsian infrastruktur PUPR terbangun, penguatan peran BPIW melalui perumusan SOTK, hingga optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung penyusunan rencana dan program pengembangan infrastruktur wilayah. Adapun, dalam kaitannya dengan perwujudan perbaikan berkesinambungan kinerja, berbagai langkah telah dilakukan untuk merespon permasalahan kinerja pada tahun sebelumnya serta menindaklanjuti rekomendasi evaluasi implementasi akuntabilitas kinerja Tahun 2023, antara lain perumusan perencanaan yang dapat menjadi percontohan nasional, mendorong pengukuran kinerja secara berjenjang dan mengungkapkan upaya-upaya efisiensi sumber daya dalam mencapai target kinerja.

Dengan sumber daya anggaran yang diterima BPIW pada tahun 2024 sebesar Rp223,26 Miliar, peroleh capaian kinerja menunjukkan hasil yang sangat baik, dengan catatan pada beberapa indikator kinerja yang masih memerlukan upaya lebih kedepannya. Pencapaian ini tidak terlepas dari kualitas dan kompetensi sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang dimiliki. Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan BPIW yang telah bekerja secara optimal dalam mencapai target kinerja menjadi nyata. Kami meyakini bahwa kinerja yang tersampaikan dalam Laporan ini dapat mendukung perbaikan kinerja yang berkesinambungan di Kementerian PU.

Jakarta, 20 Januari 2025

Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah



Yudha Mediawan

Ringkasan Eksekutif

Capaian Kinerja

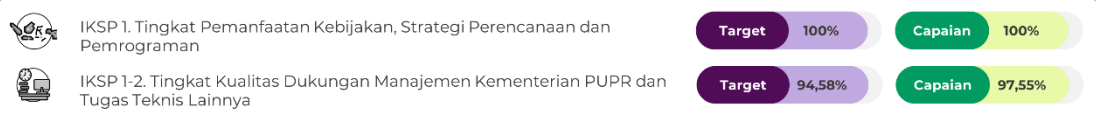
Pada tahun 2024, BPIW dapat memenuhi target kinerja dengan sangat baik untuk Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) Tingkat Keselarasan Dukungan Infrastruktur di Kawasan Strategis, Indikator Kinerja Sasaran Program 1-1 (IKSP 1-1) Tingkat Pemanfaatan Kebijakan, Strategi Perencanaan dan Pemrograman, seluruh Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) pada Sasaran Kegiatan 1 (SK-1) Meningkatnya Pelaksanaan Perencanaan dan Pemrograman Pembangunan Infrastruktur PUPR dan 4 (empat) dari 6 (enam) IKSK pada SK-2, Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan Pengembangan Infrastruktur Wilayah

IKSP 1-2 Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya, IKSK 2-2 Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum dan IKSK 2-5 Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran yang belum dapat memenuhi target sesuai dengan rencana yang tercantum pada Revisi Rencana Strategis BPIW dan Perjanjian Kinerja BPIW TA 2024. Ketidaktercapaian tersebut berhubungan erat dengan adanya perubahan fokus, kebijakan, serta peraturan, baik dari internal maupun eksternal BPIW yang mempengaruhi proses pencapaian target kinerja.

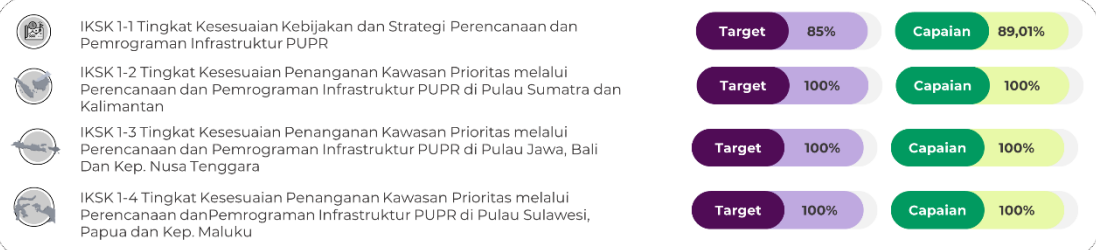
SS Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya



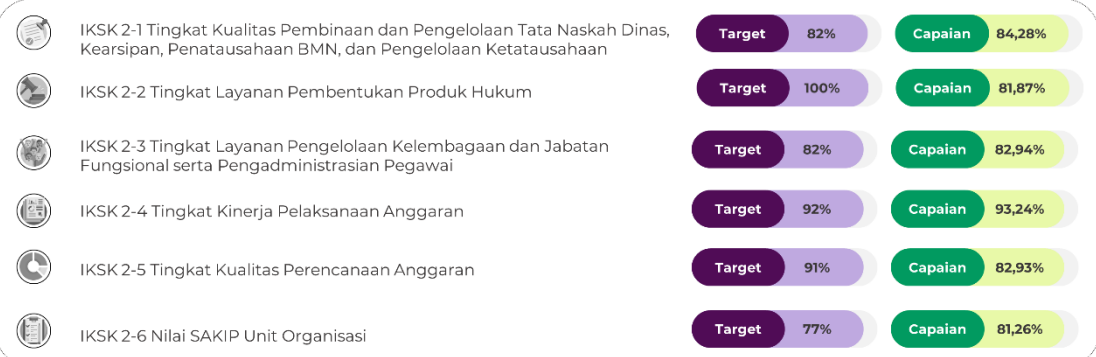
SP Meningkatnya Dukungan Manajemen Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya



SK-1 Meningkatnya Pelaksanaan Perencanaan dan Pemrograman Pembangunan Infrastruktur PUPR

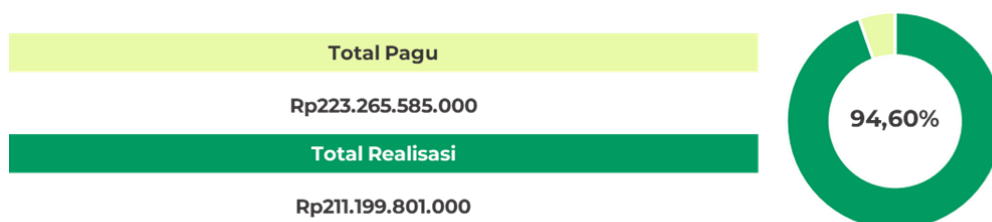


SK-2 Meningkatnya Pelaksanaan Perencanaan dan Pemrograman Pembangunan Infrastruktur PUPR



Realisasi Anggaran

Anggaran senilai Rp211.199.801.000 berhasil direalisasikan oleh BPIW sepanjang tahun 2024. Besaran nilai itu merupakan 94,60% dari total pagu yang diampu oleh BPIW sebesar Rp223.265.585.000, untuk digunakan dalam penyelesaian output-output strategis maupun rutin pada tahun tersebut. Apabila dibandingkan dengan realisasi pada tahun sebelumnya dengan realisasi sebesar Rp166.313.443.000 (96,51%), persentase realisasi 2024 lebih rendah namun secara total besaran tahun ini lebih besar. Hal ini disebabkan antara lain, adanya kenaikan pagu yang signifikan untuk percepatan kegiatan PHLN namun belum dapat terserap hingga akhir tahun sebesar Rp7.410.114.828 dan adanya *self-blocking* penghematan sisa perjalanan dinas sebesar Rp2.092.962.000.



Tantangan dan Langkah Tindak Lanjut

Dalam proses pencapaian kinerja BPIW selama tahun 2024, terdapat beberapa tantangan dan kendala yang menyertainya, baik yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi capaian kinerja BPIW. Tantangan dan kendala tersebut antara lain:

Kegiatan Pengembangan Infrastruktur Wilayah

- RPJMN 2025-2029 masih dalam proses penyusunan, sehingga belum ada arahan definitif sebagai acuan penyusunan program tahunan dan arahan prioritas kawasan tahunan pada periode kedepan yang dibutuhkan khususnya dalam pelaksanaan Rapat Koordinasi Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (Rakorbangwil). Selain itu, ketidakpastian di internal K/L dalam situasi transisi seringkali menyebabkan prioritas K/L bergeser.
- Beberapa K/L belum memiliki siklus perencanaan program sesuai kerangka waktu T-2 (dua tahun sebelum tahun pelaksanaan), menyebabkan ketersediaan data awal yang terbatas untuk kebutuhan sinkronisasi.
- Ketidakeragaman data program dari Rencana Aksi RPIW dan dokumen perencanaan di luar BPIW (perencanaan sektoral, nasional, dan daerah) yang memerlukan iterasi data terlebih dahulu, menghambat proses digitalisasi untuk kebutuhan penyusunan Memorandum Program.
- Belum tersedianya pedoman yang dapat menjadi acuan dalam perumusan Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah (RPIW) Kawasan Prioritas sebagai rincian dari RPIW Provinsi,
- Serangan siber terhadap Pusat Data Nasional sebagai *server* Kementerian PUPR berpengaruh terhadap proses perencanaan dan pemrograman yang berbasis aplikasi/*website*.

Kegiatan Dukungan Manajemen

- Terkait dengan tingkat kualitas penatausahaan BMN (IKSK 2-1), terhambatnya proses penghapusan BMN diakibatkan terdapat kendala pada proses penerbitan persetujuan dari Pengguna Barang (Sekretariat Jenderal) dan adanya periode migrasi data BMN yang dilakukan pada aplikasi SIMAN (Sistem Aplikasi Manajemen Aset Negara)
- Terkait dengan layanan pembentukan produk hukum (IKSK 2-2), terdapat 1 (satu) dari 3 (tiga) produk hukum yang menjadi target, tidak dapat terselesaikan hingga akhir tahun 2024, yaitu produk hukum terkait dengan standar kompetensi pengembangan infrastruktur wilayah (PIW). Proses penyusunan produk hukum standar kompetensi PIW belum dapat berjalan utamanya dikarenakan perlu terlebih dahulu dibentuk jabatan fungsional baru, yaitu jabatan fungsional bidang pengembangan infrastruktur wilayah, sebagai rujukkannya. Inisiasi jabatan fungsional baru tersebut telah dimulai pada tahun 2024 namun akan lebih difokuskan pada tahun 2025.
- Terkait dengan tingkat kualitas perencanaan anggaran (IKSK 2-5), belum terpenuhinya target kinerja pada tahun 2024 dikarenakan faktor eksternal yaitu adanya perubahan tata cara penilaian capaian

kinerja perencanaan anggaran dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan Serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran yang baru ditetapkan pada 23 Desember 2023, setelah penetapan DIPA TA 2024. Hal ini mengakibatkan RO yang memiliki SBK tidak seluruhnya memenuhi ketentuan.

Sebagai tindak lanjut dan upaya optimalisasi capaian kinerja tahun berikutnya, terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan oleh BPIW pada tahun 2025 sebagai berikut:

Kegiatan Pengembangan Infrastruktur Wilayah

- a. Memperkuat penyusunan rencana pembangunan jangka panjang infrastruktur PU oleh BPIW sehingga dokumen tersebut dapat menjadi acuan pada saat penyusunan program dan kawasan prioritas Rakorbangwil disaat belum ditetapkannya arahan definitif perencanaan nasional jangka menengah atau disaat kondisi transisi pemerintahan.
- b. Mendorong keterlibatan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan dalam Rapat Koordinasi lintas K/L yang memiliki peran penting sebagai pengarah dan koordinator utama dalam hal kebijakan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah. Keterlibatan tersebut, dalam Rapat Koordinasi lintas K/L diharapkan dapat mendorong koordinasi antar K/L berjalan lebih efisien dan efektif dan memastikan keputusan yang diambil mencerminkan kebutuhan strategis dari K/L yang terlibat.
- c. Meningkatkan koordinasi antara Kementerian PU dan K/L lain dalam perencanaan. Melalui koordinasi yang lebih intens dan memandu K/L yang belum siap untuk mengikuti kerangka waktu T-2. Sehingga data dan informasi yang dibutuhkan untuk sinkronisasi program dapat dikumpulkan tepat waktu pada saat proses sinkronisasi program yang dilakukan oleh BPIW.
- d. Standardisasi metadata program infrastruktur PU dalam dokumen perencanaan dan pemrograman BPIW termasuk perencanaan di luar BPIW (perencanaan sektoral, nasional, dan daerah) untuk mempermudah transformasi digital dan meningkatkan efektivitas pengolahan data. Terkait aplikasi/*website* yang terserang siber diperlukan peningkatan *backup* data dan pengamanan data perencanaan dan pemrograman BPIW.
- e. Menyusun pedoman untuk RPIW Kawasan Prioritas sebagai rincian dari RPIW Provinsi untuk mengurangi ketidakseragaman substansi antar pusat wilayah.

Dukungan Manajemen

- a. Melakukan koordinasi intensif dengan Tim Biro Pengelolaan BMN Sekretariat Jenderal untuk memantau progres usulan penghapusan BMN yang disampaikan oleh BPIW serta mengevaluasi penentuan nilai limit lelang.
- b. Merumuskan kerangka regulasi yang dibutuhkan oleh BPIW dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, memperkuat koordinasi dengan Unit Kerja yang terkait dengan substansi produk hukum yang direncanakan akan disusun pada tahun 2025, serta menyusun mekanisme pengendalian sebagai upaya mitigasi risiko dalam mengawal muatan produk hukum yang menjadi target kinerja.
- c. Menyesuaikan pagu Rincian Output (RO) yang termasuk dalam Standar Biaya Keluaran Umum/ Standar Biaya Keluaran Khusus (SBKU/SBKK) dengan Standar Biaya Keluaran (SBK) yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan pada tahun 2025 serta meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran untuk mencapai RO yang termasuk SBK dengan cara menghemat anggaran untuk beberapa pelaksanaan kegiatan terkait pencapaian RO tersebut.

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	i
Ringkasan Eksekutif.....	ii
Daftar Isi.....	v
Daftar Tabel.....	vii
Daftar Gambar.....	vii
Daftar Singkatan.....	viii
1 Pendahuluan	2
1.1 Latar Belakang.....	2
1.2 Tugas dan Fungsi.....	3
1.3 Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia.....	3
1.3.1 Stuktur Organisasi.....	3
1.3.2 Sumber Daya Manusia.....	7
1.4 Sarana dan Prasarana.....	10
1.4.1 Sarana dan Prasarana Fisik.....	10
1.4.2 Teknologi Informasi.....	12
1.5 Isu Strategis.....	14
1.6 Sistematika Laporan.....	19
2 Perencanaan Kinerja	22
2.1 Rencana Strategis.....	22
2.1.1 Visi dan Misi.....	22
2.1.2 Arah Kebijakan dan Strategi.....	22
2.1.3 Program dan Kegiatan.....	23
2.2 Perjanjian Kinerja BPIW.....	24
2.2.1 Perjanjian Kinerja Awal.....	24
2.2.1 Perjanjian Kinerja Akhir.....	24
2.2.2 Kronologi Perubahan PK.....	25
2.3 Metode Pengukuran Kinerja.....	25
2.4 Target Kinerja Tahun Pelaporan Menurut Rencana Strategis.....	29
2.4.1 Reviu Capaian Target Renstra.....	29
2.4.2 Target Kinerja TA 2024 Berdasarkan Rencana Strategis.....	31
3 Akuntabilitas Kinerja	34
3.1 Upaya Peningkatan Akuntabilitas.....	34
3.2 Capaian Kinerja BPIW.....	36
3.3.1 Capaian Kinerja Sasaran Strategis.....	36
3.3.2 Capaian Kinerja Sasaran Program.....	42
3.3.3 Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan.....	49
3.2.3.1. Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan 1.....	50
3.2.3.2. Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan 2.....	53
3.3 Analisis Perbandingan Kinerja.....	60
3.3.1 Analisis Perbandingan Kinerja dengan Tahun Sebelumnya.....	60
3.3.2 Analisis Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah.....	64
3.3.3 Analisis Perbandingan Kinerja dengan Standar Nasional (<i>Benchmarking</i>).....	65
3.4 Analisis Realisasi Anggaran.....	65
3.4.1 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.....	65
3.3.4 Realisasi Anggaran TA 2024.....	69
3.3.5 Perbandingan Realisasi Anggaran TA 2024 dengan Tahun Sebelumnya.....	71
3.5 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	72
3.6 Analisis Pemanfaatan Informasi dalam Laporan Kinerja.....	73
3.6.1 Analisis Perhatian Utama Pimpinan Terhadap Informasi Dalam Laporan Kinerja.....	73
3.6.2 Analisis Kepedulian Seluruh Pegawai Terhadap Informasi Dalam Laporan Kinerja.....	74
3.6.3 Analisis Penyesuaian Aktivitas Untuk Mencapai Kinerja Terhadap Informasi Dalam Laporan Kinerja Berkala.....	75

3.6.4	Analisis Penyesuaian Penggunaan Anggaran Untuk Mencapai Kinerja Terhadap Informasi Dalam Laporan Kinerja Berkala	75
3.6.5	Analisis Pencapaian Keberhasilan Kinerja Berdasarkan Informasi dalam Laporan Kinerja.....	76
3.6.6	Analisis Penyesuaian Perencanaan Kinerja Berdasarkan Informasi Dalam Laporan Kinerja	76
3.6.7	Analisis Perubahan Budaya Kinerja Organisasi Berdasarkan Informasi Dalam Laporan Kinerja	76
4	Penutup.....	78
4.1	Simpulan Umum.....	78
4.4.1	Faktor Pendukung Keberhasilan.....	79
4.4.2	Permasalahan dan Faktor Penyebab Kegagalan.....	81
4.2	Rekomendasi dan Tindak Lanjut	82

Daftar Tabel

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Awal BPIW 2024.....	24
Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Akhir BPIW 2024.....	24
Tabel 2.3 Kronologi Perubahan PK BPIW	25
Tabel 2.4 Metode Perhitungan Sasaran Kegiatan.....	26
Tabel 2.5 Kategorisasi Capaian Kinerja.....	29
Tabel 2.6 Reviu Capaian Target Renstra BPIW 2020-2024	29
Tabel 2.7 Sandingan Target Kinerja Rencana Strategis dengan Perjanjian Kinerja BPIW Tahun 2024	31
Tabel 3.1 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AKIP BPIW TA 2023.....	34
Tabel 3.2 Capaian Kinerja Sasaran Strategis.....	36
Tabel 3.3 Daftar Kawasan Capaian Sasaran Strategis.....	37
Tabel 3.4 Capaian Kinerja Sasaran Program	42
Tabel 3.5 Daftar Kawasan Capaian Sasaran Program.....	43
Tabel 3.6 Capaian Sasaran Kegiatan 1 BPIW	49
Tabel 3.7 Capaian Sasaran Kegiatan 2 BPIW	53
Tabel 3.8 Hasil Survei Kepuasan Pelayanan Bagian Kepegawaian dan Umum	56
Tabel 3.9 Rincian Nilai IKPA BPIW Tahun 2024	58
Tabel 3.10 Rincian Nilai Evaluasi AKIP BPIW TA 2023 per Komponen	60
Tabel 3.11 Perbandingan Capaian Kinerja BPIW Tahun 2020-2024	62
Tabel 3.12 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Target Renstra 2020-2024	64
Tabel 3.13 Kronologi Perubahan DIPA BPIW Tahun 2024.....	68
Tabel 3.14 Realisasi Anggaran BPIW Tahun 2024	69
Tabel 3.15 Realisasi Anggaran BPIW Per RO Tahun 2024.....	70
Tabel 3.16 Perbandingan Realisasi Anggaran dengan Tahun Sebelumnya.....	72
Tabel 3.11 Efisiensi Kebutuhan Pagu Klaster Kegiatan Perencanaan dan Pemrograman.....	73

Daftar Gambar

Gambar 1.1 Struktur Organisasi BPIW	4
Gambar 1.2 Jumlah SDM Berdasarkan Jenis.....	7
Gambar 1.3 Jumlah SDM Berdasarkan Golongan.....	8
Gambar 1.4 Jumlah SDM Berdasarkan Kelompok Jabatan.....	9
Gambar 1.5 Jumlah SDM Berdasarkan Pendidikan dan Usia.....	9
Gambar 2.1 Program dan Kegiatan BPIW.....	23
Gambar 3.1 Sandingan Pohon Anggaran Pagu Awal dan Akhir TA 2024.....	68
Gambar 3.2 Alokasi Anggaran BPIW 2020-2024	69
Gambar 3.3 Perbandingan Realisasi Anggaran BPIW 2020-2024	72
Gambar 3.4 Bukti Dukung Perhatian Utama Pimpinan Terhadap Informasi Dalam Laporan Kinerja	74
Gambar 3.5 Bukti Dukung Kepedulian Seluruh Pegawai Terhadap Informasi Dalam Laporan Kinerja.....	74
Gambar 3.6 Bukti Dukung Penyesuaian Aktivitas Untuk Mencapai Kinerja Terhadap Informasi Dalam Laporan Kinerja Berkala	75
Gambar 3.7 Bukti Dukung Penyesuaian Penggunaan Anggaran Untuk Mencapai Kinerja Terhadap Informasi Dalam Laporan Kinerja Berkala.....	75
Gambar 3.7 Bukti Dukung Perubahan Budaya Kinerja Organisasi Berdasarkan Informasi Dalam Laporan Kinerja	76

Daftar Singkatan

APBN	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
3T	:	tertinggal, terdepan, dan terluar
ASN	:	Aparatur Sipil Negara
BMN	:	Barang Milik Negara
BNBA	:	By Name By Address
BPIW	:	Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah
CPMU	:	Central Project Management Unit/CPMU
DIPA	:	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
EA	:	Executing Agency
IKPA	:	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran
IKSK	:	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan
IKSP	:	Indikator Kinerja Sasaran Program
IKSS	:	Indikator Kinerja Sasaran Strategis
ITDP	:	<i>Integrated Tourism Development Program</i>
ITMP	:	<i>Integrated Tourism Master Plan</i>
K/L	:	Kementerian/Lembaga
KEK	:	Kawasan Ekonomi Khusus
KI	:	Kawasan Industri
KPKNL	:	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
KPPN	:	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
KRO	:	Klasifikasi Rincian Output
KSPN	:	Kawasan Strategis Pariwisata Nasional
LHP	:	Laporan Hasil Pemeriksaan
MP/DP	:	Master Plan Development Plan
MRI	:	Manajemen Risiko Indeks
NUDP	:	National Urban Development Project
NUDS	:	National Urban Development Strategy
NUP	:	Nomor Urut Pendaftaran
OMSPAN-Monev	:	Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara – Monitoring dan Evaluasi
P3KE	:	enyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem
PDN	:	Pusat Data Nasional
PHLN	:	Pinjaman Hibah Luar Negeri
PIW	:	Pengembangan Infrastruktur Wilayah
PJM	:	Program Jangka Menengah
PK	:	Perjanjian Kinerja
PKE	:	Penanganan Kemiskinan Ekstrem
PKP	:	Perumahan dan Kawasan Pemukiman
PKSN	:	Pusat Kawasan Strategis Nasional
PNS	:	Pegawai Negeri Sipil
PPNPN	:	Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri
PPPK	:	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
PSN	:	Proyek Strategis Nasional
Renja	:	Rencana Kerja
RKA-KL	:	Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga
RO	:	Rincian Output
RPD	:	Rencana Penarikan Dana
RPIW	:	Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah
RPIW	:	Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah

RPIWJPN	:	Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah Jangka Panjang Nasional
RPJMN	:	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPJMN	:	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPJPN	:	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
RPJPN	:	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
SAKIP	:	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
SBKK	:	Standar Biaya Keluaran Khusus
SBKU	:	Standar Biaya Keluaran Umum
SI-PAKET	:	Sistem Informasi Penanganan Kemiskinan Ekstrem dan Stunting Terintegrasi
SIPro	:	Sistem Informasi Pemrograman
SK	:	Sasaran Kegiatan
SKP	:	Sasaran Kinerja Pegawai
SOTK	:	Struktur Organisasi dan Tata Kelola
SP	:	Sasaran Program
SPBE	:	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
SPIP	:	Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah
SS	:	Sasaran Strategis
TLRHP	:	Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan
UP/TUP	:	Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan
WWF	:	<i>World Water Forum</i>



20
24



1

Pendahuluan

1

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka penguatan akuntabilitas, diterapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih (*good governance and clean government*). SAKIP dilaksanakan dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya pelaksana kebijakan dan program. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP, penyelenggaraan SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan SAKIP di Lingkungan Kementerian PUPR mengamanatkan bahwa entitas penyelenggara SAKIP terdiri dari entitas di level kementerian, unit organisasi, unit kerja, dan satuan kerja. Maka, Penyelenggaraan SAKIP pada BPIW dilaksanakan oleh entitas akuntabilitas kinerja secara berjenjang sampai dengan tingkat Satuan Kerja. Adapun Lingkup penyelenggaraan SAKIP meliputi:

Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang menentukan arah pelaksanaan program serta menjadi landasan dalam penyelenggaraan SAKIP unit kerja. Renstra BPIW 2020-2024 menjadi acuan dalam menyusun Perjanjian Kinerja, Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKA-KL), Rencana Aksi Kinerja, Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Bulanan, dan Laporan Kinerja. Pada tahun 2024, disusun revisi Rencana Strategis Kementerian PUPR dan BPIW menyesuaikan arah kebijakan nasional dan target-target capaian kinerja.

Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan komitmen untuk mencapai target kinerja tahunan yang menjadi turunan dari dokumen Renstra dan dokumen pelaksanaan anggaran. Perjanjian Kinerja disusun dengan mencantumkan Target Kinerja dan Indikator Kinerja yang memenuhi kriteria spesifik, dapat terukur, dapat dicapai, berjangka waktu tertentu, serta dapat dipantau dan dikumpulkan.

Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara realisasi capaian kinerja dengan target kinerja yang dicantumkan pada dokumen Perjanjian Kinerja dalam rangka pelaksanaan anggaran tahun berjalan dan pencapaian sasaran kinerja dalam Renstra.

Pengelolaan Data Kinerja

Pengelolaan data kinerja dilakukan dengan cara mencatat, mengolah, dan melaporkan data kinerja. Pengelolaan data kinerja mencakup penetapan data dasar, penyediaan instrumen perolehan data berupa pencatatan dan registrasi, penatausahaan dan penyimpanan data, serta pengkompilasian dan perangkuman.

Pelaporan Kinerja

Setiap entitas menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Laporan kinerja berisi ringkasan keluaran dari kegiatan dan hasil yang dicapai paling sedikit menyajikan informasi pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, realisasi pencapaian target kinerja, penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja, serta perbandingan capaian kinerja kegiatan dan program sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Renstra.

Reviu dan Evaluasi Kinerja

Reviu dan evaluasi atas Laporan Kinerja dilakukan dalam rangka memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi. Reviu dan Evaluasi Kinerja BPIW dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal.

1.2 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PUPR, BPIW mempunyai tugas yaitu melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan rencana terpadu program pembangunan infrastruktur PUPR berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPIW menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan kebijakan teknis program keterpaduan pembangunan infrastruktur PUPR berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah;
2. Penyusunan rencana terpadu pembangunan infrastruktur PUPR berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah;
3. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program keterpaduan pembangunan infrastruktur PUPR berdasarkan pengembangan wilayah;
4. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana terpadu pembangunan infrastruktur PUPR berdasarkan pengembangan wilayah;
5. Pelaksanaan administrasi BPIW;
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Pada akhir tahun 2024, ditetapkan Peraturan Menteri PU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum, terdapat beberapa perubahan dan penguatan atas tugas dan fungsi BPIW. Penerapan kelembagaan sesuai dengan peraturan perundangan secara efektif akan dilaksanakan pada awal tahun 2025. Adapun rincian perubahan dan penguatan tugas dan fungsi BPIW adalah sebagai berikut:

1. Penambahan bidang di Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional berupa Bidang Perencanaan Strategis dan Evaluasi Kinerja untuk mendistribusikan fungsi penyusunan rencana yang sebelumnya pada Bidang Keterpaduan Program dan fungsi evaluasi yang sebelumnya pada Bidang Kepatuhan Intern;
2. Penambahan fungsi penganggaran untuk mengawal program keterpaduan Kementerian PU. Fungsi diampu oleh Bidang Keterpaduan Program dan Anggaran di Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional;
3. Penambahan fungsi koordinasi dan penyusunan rencana kawasan prioritas untuk mendorong penyusunan rencana yang lebih operasional, khususnya untuk kawasan yang diprioritaskan pada Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah I, II, dan III;
4. Penambahan fungsi penyiapan pedoman terkait penyusunan rencana, pemrograman dan penganggaran, serta evaluasi pada masing-masing bidang di Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional;
5. Pencantuman fungsi koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan SAKIP termasuk penyusunan Laporan Kinerja Kementerian PU;
6. Penyesuaian distribusi wilayah Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah II menjadi: 1) Bidang IIA: Provinsi Banten, Provinsi Daerah Khusus Jakarta, dan Provinsi Jawa Barat; 2) Bidang IIB: Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Provinsi Jawa Timur; 3) Bidang IIC: Pulau Bali dan Kepulauan Nusa Tenggara;
7. Penambahan fungsi pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kebermanfaatan pada masing-masing Pusat Wilayah;
8. Pencantuman fungsi penyelenggaraan kepatuhan intern dan manajemen risiko BPIW pada Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional;
9. Penyesuaian nomenklatur pada Bagian Hukum, Kerja Sama, Komunikasi Publik, dan Data dan Teknologi Informasi.

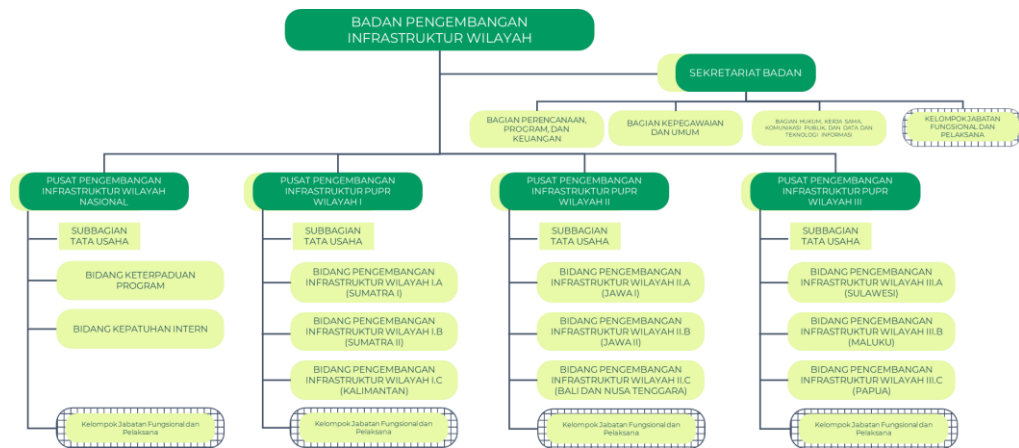
1.3 Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia

1.3.1 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PUPR, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, BPIW memiliki lima Unit Kerja yang meliputi Sekretariat BPIW, Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah I, Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah II, dan Pusat Pengembangan Infrastruktur PU Wilayah III.

Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional dalam menjalankan peran penyusunan rencana strategis, kebijakan dan strategi jangka panjang dan menengah, penyelenggaraan sinkronisasi program infrastruktur, serta Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko didukung oleh Bidang Keterpaduan Program dan Bidang Kepatuhan Intern. Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I, II, dan III masing-masing didukung oleh 3 (tiga) Bidang yang memiliki peran dalam melakukan penyusunan rencana, program dan anggaran pengembangan infrastruktur wilayah, serta evaluasi kebermanfaatannya sesuai wilayah kerja. Adapun Sekretariat BPIW didukung oleh 3 bagian yang memiliki tugas melaksanakan dukungan manajemen atas pelaksanaan tugas dan fungsi BPIW.

Gambar 1.1 Struktur Organisasi BPIW



Masing-masing Unit Kerja di BPIW memiliki tugas pokok dan fungsi spesifik yang menunjang pencapaian kinerja dari BPIW. Tugas pokok dan fungsi tersebut diuraikan dalam penjelasan sebagai berikut.

Sekretariat Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah

Sekretariat Badan mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit kerja di lingkungan Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat Badan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran badan;
2. Penyusunan rencana dan pengembangan strategi, serta rencana strategis badan;
3. Pelaksanaan dan pengelolaan urusan administrasi keuangan, perbendaharaan, dan pelaksanaan anggaran;
4. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan keuangan dan kinerja badan;
5. Pelaksanaan penyusunan laporan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan badan;
6. Pelaksanaan penatausahaan barang milik negara;
7. Pengelolaan urusan kepegawaian dan pembinaan jabatan fungsional, penataan dan evaluasi organisasi dan tata laksana, serta fasilitasi reformasi birokrasi;
8. Koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan, fasilitasi advokasi hukum, dan pemberian pertimbangan hukum;
9. Pelaksanaan administrasi kerja sama bidang pengembangan infrastruktur wilayah;
10. Pelaksanaan urusan komunikasi publik, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan sistem informasi, serta pelayanan data dan informasi di bidang pengembangan infrastruktur wilayah; dan
11. Pelaksanaan urusan tata usaha, dan rumah tangga badan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat BPIW didukung oleh 3 (tiga) bagian yang terdiri atas 1) Bagian Perencanaan, Program, dan Keuangan; 2) Bagian Kepegawaian dan Umum; dan 3) Bagian Hukum, Kerja Sama, dan Komunikasi Publik.

Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional

Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional mempunyai tugas untuk melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan rencana terpadu pembangunan infrastruktur PUPR, pelaksanaan koordinasi keterpaduan rencana dan sinkronisasi program, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana terpadu pembangunan infrastruktur PUPR pada wilayah nasional berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan kebijakan teknis dan strategi pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat pada wilayah nasional berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah;
2. Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kementerian;
3. Penyusunan rencana terpadu pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat jangka panjang dan jangka menengah pada wilayah nasional;
4. Koordinasi dan penyusunan rencana strategis kementerian;
5. Penyusunan indikasi pembiayaan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat jangka panjang dan jangka menengah pada wilayah nasional;
6. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi keterpaduan program pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah;
7. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana terpadu pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
8. Pengelolaan data pengembangan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat wilayah nasional; dan i) fasilitasi penyusunan program dan anggaran, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.

Dalam melaksanakan tugasnya, Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional didukung oleh 2 (dua) bidang dan satu Subbagian yang terdiri atas: 1) Bidang Keterpaduan Program; 2) Bidang Kepatuhan Intern; dan 3) Subbagian Tata Usaha.

Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I

Pusat Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana induk, sinkronisasi dan penyusunan prioritas program dan strategi pembiayaan jangka menengah dan tahunan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah di wilayah Pulau Sumatra dan Pulau Kalimantan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I menyelenggarakan fungsi:

1. Koordinasi dan penyusunan rencana induk pengembangan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat di Pulau Sumatra dan Kalimantan;
2. Koordinasi dan penyusunan program jangka menengah pengembangan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat di wilayah Pulau Sumatra dan Pulau Kalimantan;
3. Sinkronisasi dan penyusunan prioritas program dan strategi pembiayaan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat di wilayah Pulau Sumatra dan Pulau Kalimantan;
4. Pemantauan evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat di wilayah Pulau Sumatra dan Pulau Kalimantan;
5. Pengelolaan data pengembangan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat di wilayah Pulau Sumatra dan Pulau Kalimantan; dan
6. Fasilitasi penyusunan program dan anggaran, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.

Dalam melaksanakan tugasnya, Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I didukung oleh 3 (tiga) bidang dan satu Subbagian yang terdiri atas: 1) Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah I.A; 2) Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah I.B; 3) Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah I.C; dan 4) Subbagian Tata Usaha.

Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah II

Pusat Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana induk, sinkronisasi dan penyusunan prioritas program dan strategi pembiayaan jangka menengah dan tahunan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah di wilayah Pulau Jawa, Pulau Bali, dan Kepulauan Nusa Tenggara.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah II menyelenggarakan fungsi:

1. Koordinasi dan penyusunan rencana induk pengembangan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat di Pulau Jawa, Pulau Bali, dan Kepulauan Nusa Tenggara;
2. Koordinasi dan penyusunan program jangka menengah pengembangan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat di wilayah Pulau Jawa, Pulau Bali, dan Kepulauan Nusa Tenggara;
3. Sinkronisasi dan penyusunan prioritas program dan strategi pembiayaan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat di wilayah Pulau Jawa, Pulau Bali, dan Kepulauan Nusa Tenggara;
4. Pemantauan evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat di wilayah Pulau Jawa, Pulau Bali, dan Kepulauan Nusa Tenggara;
5. Pengelolaan data pengembangan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat di wilayah Pulau Jawa, Pulau Bali, dan Kepulauan Nusa Tenggara; dan
6. Fasilitasi penyusunan program dan anggaran, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.

Dalam melaksanakan tugasnya, Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah II didukung oleh 3 (tiga) bidang dan satu Subbagian yang terdiri atas: 1) Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah II.A; 2) Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah II.B; 3) Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah II.C; dan 4) Subbagian Tata Usaha.

Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah III

Pusat Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah III mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana induk, sinkronisasi dan penyusunan prioritas program dan strategi pembiayaan jangka menengah dan tahunan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah di wilayah Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah III menyelenggarakan fungsi:

1. Koordinasi dan penyusunan rencana induk pengembangan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat di Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua;
2. Koordinasi dan penyusunan program jangka menengah pengembangan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat di wilayah Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua;
3. Sinkronisasi dan penyusunan prioritas program dan strategi pembiayaan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat di wilayah Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua;
4. Pemantauan evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat di wilayah Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua;
5. Pengelolaan data pengembangan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat di wilayah Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua; dan
6. Fasilitasi penyusunan program dan anggaran, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.

Dalam melaksanakan tugasnya, Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah III didukung oleh 3 (tiga) bidang dan satu Subbagian yang terdiri atas: 1) Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah III.A; 2) Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah III.B; 3) Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah III.C; dan 4) Subbagian Tata Usaha.

1.3.2 Sumber Daya Manusia

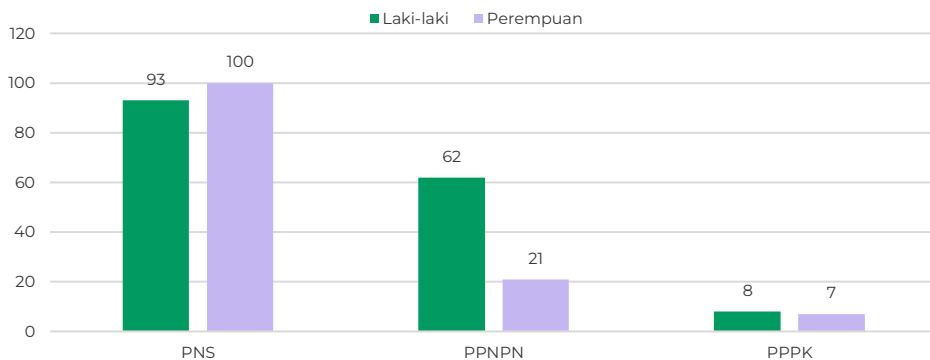
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, seluruh Unit Kerja di BPIW didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai pengelola program/kegiatan dalam berbagai jenjang dan klasifikasi. SDM ini merupakan salah satu variabel penting dalam konteks keberhasilan atau kegagalan organisasi. Produktivitas suatu organisasi tidak akan terlepas dari produktivitas SDM yang menjadi penggerak dari organisasi.

1.3.2.1 Jumlah SDM Berdasarkan Jenis

Pada tahun 2024, BPIW didukung oleh SDM sebanyak 291 orang yang terdiri atas 163 laki-laki dan 128 perempuan. Komposisi SDM BPIW berdasarkan jenis pegawai terdiri atas 193 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), 81 orang Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN), dan 15 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Apabila dibandingkan dengan jumlah pegawai pada tahun 2023 terdapat penurunan 1 orang PNS, dan 7 orang PPNPN, dan terdapat penambahan sebanyak 15 orang PPPK. Penambahan PPPK pada tahun 2024, merupakan upaya pemerintah untuk menghasilkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang profesional dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi.

Seluruh pegawai tersebut pada pada lima unit Eselon II. Unit Eselon II dibagi atas 1) Unit Kerja Proses Inti, yaitu yang secara langsung bertugas pada *core business* organisasi dalam konteks perencanaan dan pemrograman yang terdiri atas Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I, II, dan III; dan 2) Unit Kerja pendukung yang memiliki tugas terhadap manajemen umum organisasi, yaitu Sekretariat Badan. Secara berurutan jumlah pegawai pada masing-masing 54 orang Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, 53 orang Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I, 52 orang Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah II, 44 orang 53 orang Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah III, serta 87 orang Sekretariat Badan. Dari seluruh jumlah pegawai yang mendukung kinerja BPIW pada tahun berjalan terdapat 3 pegawai yang pensiun dan 3 pegawai mutasi. Jumlah SDM BPIW per jenis dapat dilihat pada **Gambar 1.2**Gambar 1.2.

Gambar 1.2 Jumlah SDM Berdasarkan Jenis



1.3.2.2 Jumlah SDM Berdasarkan Golongan dan Kelompok Jabatan

Komposisi pegawai berdasarkan golongan dan kelompok jabatan dihitung ada jenis pegawai PNS dan PPPK. Berdasarkan golongan, terdapat sebanyak 208 orang yang didominasi atas Golongan III sebanyak 139 orang (66,82%). Sementara, pegawai golongan II dan IV secara berurutan berjumlah 14 orang (6,73%) dan 40 orang (19,23%). Adapun PPPK dikategorikan sebagai Golongan IX sejumlah 15% (7,21%).

Sementara, berdasarkan kelompok jabatan, terdapat 24 pejabat struktural yang terdiri dari Eselon I, Eselon II, Eselon III, dan Eselon IV, serta 144 pejabat fungsional, dan 123 pejabat pelaksana. Pejabat fungsional BPIW terdiri atas, 1) Analisis Kebijakan; 2) Analis Pembiayaan Infrastruktur PU; 3) Pembina Jasa Konstruksi; 4) Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Pemukiman; 5) Penata Kelola Jalan dan Jembatan; 6) Penata Kelola Perumahan; 7) Arsiparis; 7) Penata Ruang; 8) Perancangan Perundang-

Undangan; 8) Perencana; 9) Pranata Humas; 10) Pranata Keuangan APBN; 11) Pranata Komputer; 12) Pustakawan; 13) Teknik jalan dan jembatan; 14) Teknik Pengairan; dan 15) Teknik Tata Bangunan dan Perumahan. Secara rinci jumlah pegawai BPIW berdasarkan golongan dan kelompok jabatan ditunjukkan pada Gambar 1.3 dan Gambar 1.4.

Jumlah SDM Berdasarkan Pendidikan dan Usia

Berdasarkan tingkat pendidikan, pegawai BPIW paling banyak merupakan sarjana (S1/D4) sebanyak 135 orang (46,39%) dan diikuti master (S2) 82 orang (28,17%), <D3 48 orang (16,49%), D3 16 orang (5,49%), dan S3 10 orang (3,45%). Dalam mendukung transformasi SDM melalui peningkatan kapasitas pegawai berbasis kompetensi, BPIW melakukan pengembangan pegawai melalui jalur pendidikan dalam bentuk pemberian tugas belajar. Pengembangan kompetensi melalui jalur pendidikan ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga yang memiliki keahlian atau kompetensi tertentu dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, peningkatan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan kepribadian profesional PNS sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pengembangan karier.

Sebagai salah satu hasil dari pengembangan tersebut, pada 2024 jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2024. Peningkatan tersebut adalah jenjang pendidikan doktor (S3) bertambah sebanyak 2 orang, penurunan jumlah master (S2) sebanyak 1 orang dan sarjana (S1/D4) sebanyak 2 orang. Pada tahun 2024, terdapat 9 pegawai yang melaksanakan karya siswa dengan 1 orang yang menempuh Pendidikan sarjana, 7 orang master, dan 1 orang doktor.

Berdasarkan kelompok usia, paling banyak pada kelompok usia 31-35 tahun yaitu 82 orang (28,17%) dan kelompok usia 36-40 tahun 52 orang (17,86%). Sementara secara berurutan kelompok usia 20-25 tahun, 26-30 tahun, 41-45 tahun, 46-50 tahun, 51-55 tahun, 56-60 tahun yaitu, 6 orang, 50 orang, 48 orang, 31 orang, 14 orang, dan 8 orang. Diharapkan SDM BPIW dapat mendukung produktivitas kinerja BPIW dalam melakukan tugas dan fungsinya. Secara rinci jumlah pegawai BPIW berdasarkan pendidikan dan usia ditunjukkan pada Gambar 1.5.

Gambar 1.3 Jumlah SDM Berdasarkan Golongan

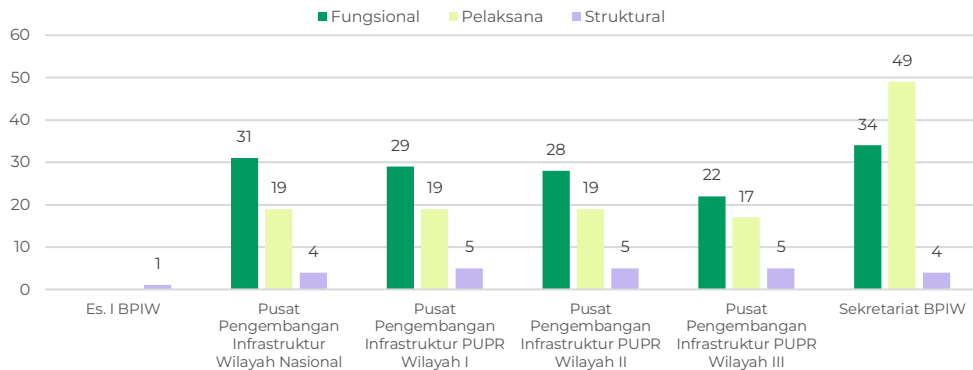


Tabel 1.1 Jumlah SDM berdasarkan Golongan

Golongan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
II/a	2		2
II/b	1	1	2
II/c	4	3	7
II/d	3		3
III/a	11	17	28
III/b	24	28	52
III/c	10	11	21
III/d	19	19	38

Colongan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
IV/a	7	13	20
IV/b	7	7	14
IV/c	4	1	5
IV/e	1		1
IX	8	7	15
Total	101	107	208

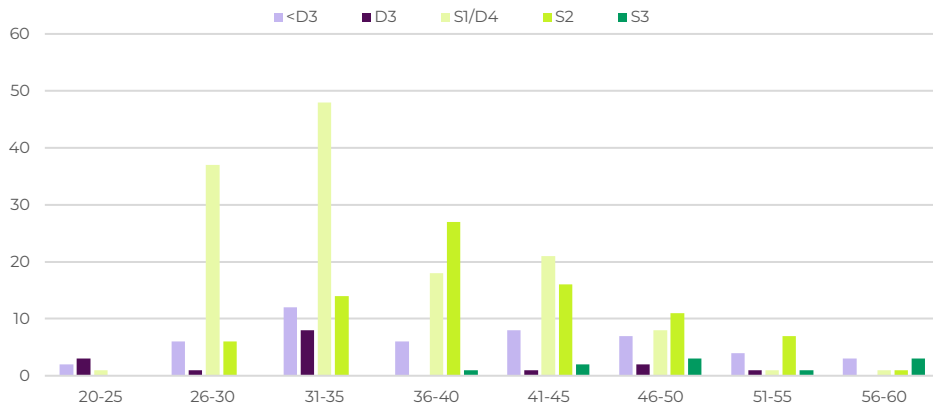
Gambar 1.4 Jumlah SDM Berdasarkan Kelompok Jabatan



Tabel 1.2 Jumlah SDM berdasarkan Jabatan

Jabatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Fungsional	64	80	144
Pelaksana	85	38	123
Struktural	14	10	24
Total	163	128	291

Gambar 1.5 Jumlah SDM Berdasarkan Pendidikan dan Usia



Tabel 1.3 Jumlah SDM berdasarkan Pendidikan

Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
<D3	43	5	48
D3	7	9	16
S1/D4	66	69	135
S2	41	41	82
S3	6	4	10
Total	163	128	291

1.4 Sarana dan Prasarana

1.4.1 Sarana dan Prasarana Fisik

Dalam melaksanakan tugasnya, seluruh unit kerja di lingkungan BPIW memerlukan sarana prasarana yang dapat mendukung pencapaian kinerja individu maupun unit organisasi. Sarana prasarana ini baik sarana prasarana fisik yang terdiri atas ruang kerja, Barang Milik Negara (BMN), maupun teknologi informasi berupa sistem/aplikasi penunjang kinerja yang dapat menunjang kinerja oleh seluruh SDM di lingkungan BPIW.

Total nilai BMN BPIW per sub kelompok barang 1) Tanah; 2) Peralatan dan Mesin; 3) Gedung dan Bangunan; 5) Aset Tetap Lainnya; dan 6) Aset tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi yaitu sebesar Rp57.034.915.055. Rincian sub kelompok barang dan besaran nilai masing-masing ditunjukkan sebagaimana neraca pada berikut.

Tabel 1.4 Laporan Barang Milik Negara dalam Neraca

Kode	Akun Neraca	Nilai (Rp)
	Uraian	
131111	Tanah	9.921.726.000
132111	Peralatan dan Mesin	27.031.385.635
133111	Gedung dan Bangunan	2.199.808.000
135121	Aset Tetap Lainnya	17.700.000
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi	17.864.295.420
	Total	57.034.915.055

Ruangan yang digunakan BPIW meliputi ruang kerja, ruang rapat, fasilitas ibadah, dan ruangan penyimpanan baik bagi Sekretariat BPIW, Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I, II, dan III. Daftar ruangan kerja yang digunakan oleh BPIW sebagaimana pada Tabel 1.5.

Tabel 1.5 Daftar Ruang di BPIW

Ruangan	Rincian
Sekretariat BPIW	
Ruang Kerja Pimpinan	Kepala BPIW
	Sekretaris BPIW
Ruang Kerja Pegawai	Bagian Perencanaan, Program, dan Keuangan
	Bagian Kepegawaian dan Umum
	Bagian Hukum, Kerjasama, dan Komunikasi Publik
Ruang Rapat	Coffee Room Lantai 2
	Ruang Rapat Lantai 2

Ruangan	Rincian
	Ruang Rapat Lantai 3
	Ruang Rapat Lantai 4
Ruang Penyimpanan	Gudang <i>Basement</i>
Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional	
Ruang Kerja Pimpinan	Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional
	Bidang Kepatuhan Internal
Ruang Kerja Pegawai	Bidang Keterpaduan Program
	Subbagian Tata Usaha
Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I	
Ruang Kerja Pimpinan	Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I
	Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah I.A
Ruang Kerja Pegawai	Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah I.B
	Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah I.C
	Subbagian Tata Usaha
Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah II	
Ruang Kerja Pimpinan	Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah II
	Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah II.A
Ruang Kerja Pegawai	Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah II.B
	Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah II.C
	Subbagian Tata Usaha
Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah III	
Ruang Kerja Pimpinan	Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah III
	Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah III.A
Ruang Kerja Pegawai	Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah III.B
	Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah III.C
	Subbagian Tata Usaha

Selain sarana dan prasarana ruangan, pelaksanaan tugas BPIW juga didukung oleh BMN yang seluruhnya berstatus digunakan sendiri, tidak ada yang sewa atau pinjam pakai. Berikut Tabel 1.6 yang merincikan daftar BMN yang telah dikelompokkan kategori jenis barangnya di BPIW beserta kuantitas dan kondisi

Tabel 1.6 Kondisi Barang Milik Negara di BPIW

No	Kategori Jenis Barang	Kuantitas	Kondisi	
			Baik	Rusak
1	A.C	93	6	87
2	Alat Rumah Tangga Lainnya	174	117	57
3	Kendaraan Mini Bus	4	1	3
4	Kendaraan Mobil	1	1	
5	Kendaraan Sepeda Motor	8	7	1
6	Lampu	19	7	12
7	Mesin Kantor	103	13	90
8	Meubelair	1495	1383	112
9	Peralatan Dapur	81	51	30
10	Peralatan Kebersihan	34	26	8
11	Peralatan Penyimpanan	35	22	13
12	Peralatan Studio Pemetaan	17	5	12

No	Kategori Jenis Barang	Kuantitas	Kondisi	
			Baik	Rusak
13	Perangkat Audio System	75	55	20
14	Perangkat Jaringan Komputer	157	22	135
15	Perangkat Kamera	165	75	90
16	Perangkat Keamanan Kantor	53	35	18
17	Perangkat Komputer	1775	517	1258
18	Perangkat Komunikasi	78	19	59
19	Perangkat Listrik	143	33	110
20	Perangkat Penyimpanan Data	125	66	59
21	Perangkat Rapat Lainnya	115	54	61
22	Perkakas Kantor Lainnya	8	1	7
23	Printer/Scanner	554	122	432
24	Projector	157	51	106
25	Rumah Negara	18	18	
26	Tanah Bangunan Rumah Negara	1	1	
27	Televisi	62	44	18
Total		5550	2752	2798

1.4.2 Teknologi Informasi

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya selama tahun 2024, BPIW mengelola dan memanfaatkan berbagai aplikasi/website penunjang yang tersedia di lingkungan Kementerian PUPR sebagai berikut.

SIPro (Sistem Informasi Pemrograman)

sipro.pu.go.id

Aktif Mulai : Tahun 2015
 Jenis Layanan : Internal dan Eksternal BPIW
 Lokasi Server : PDN Flou

Sistem Informasi Pemrograman (SIPro) merupakan sebuah sistem yang dirancang untuk membantu proses pemrograman infrastruktur PU, mulai dari perencanaan, pemrograman hingga evaluasi. SIPro berperan penting dalam mengelola data perencanaan pemrograman jangka menengah, jangka tahunan, dan evaluasi manfaat infrastruktur terbangun

Dalam implementasinya, SIPro digunakan dalam rangkaian kegiatan Rakorbangwil (Rapat Koordinasi Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah) untuk mengelola keterpaduan data pemrograman di Kementerian PUPR. Selain itu, SIPro juga digunakan dalam proses digitalisasi Rencana Pembangunan Infrastruktur Wilayah (RPIW) dan mendukung interoperabilitas data dengan sistem informasi pemrograman lainnya antar unit organisasi teknis.

SIPro digunakan oleh BPIW dengan melibatkan Unit Organisasi Teknis Kementerian PU serta menjadi input proses sinkronisasi program tahunan pada aplikasi Sikonreg yang dikelola oleh Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR.

SI-PAKET (Sistem Informasi Penanganan Kemiskinan Ekstrem dan Stunting Terintegrasi – Kementerian PU)

bpiw.pu.go.id/sipaket

Aktif Mulai : Tahun 2023
 Jenis Layanan : Internal dan Eksternal BPIW
 Lokasi Server : PDN Flou

SI-PAKET merupakan Sistem Informasi Penanganan Kemiskinan Ekstrem dan Stunting Terintegrasi Kementerian PUPR yang menampilkan informasi dan capaian program infrastruktur PU dalam penanganan kemiskinan ekstrem dan stunting. Sistem informasi menampilkan data berupa jenis-jenis program, capaian program, data penerima manfaat, dan juga sebaran program.

SI-PAKET menyediakan informasi umum, peran Kementerian PU, dan jenis program terkait Program Penanganan Kemiskinan Ekstrem dan Percepatan Penurunan Stunting. Selain itu juga ditampilkan detail informasi lokus/desa dan jumlah penerima manfaat, foto/video dokumentasi pelaksanaan program. Data dan informasi ini disajikan dalam bentuk spasial dan tabular.

Manfaat SI-PAKET bagi internal organisasi antara lain:

- 1) Alat bantu (*tools*) untuk mengolah data progres penanganan kemiskinan ekstrem dan percepatan penurunan stunting;
- 2) Memberikan informasi terkini baik untuk kalangan internal Kementerian PU; dan
- 3) Sebagai media monitoring capaian program Kementerian PU dalam rangka penanganan kemiskinan ekstrem dan percepatan penurunan stunting.

Adapun manfaat bagi eksternal organisasi antara lain:

- 1) Memberikan informasi terkini baik untuk kalangan umum;
- 2) Meningkatkan transparansi dalam pelaksanaan program pengentasan kemiskinan ekstrem dan ekstrem melalui akses terbuka terhadap informasi; dan
- 3) Mendukung reformasi birokrasi dalam hal digitalisasi dan transformasi digital

Bank Data BPIW

bpiw.pu.go.id/bankdata

Aktif Mulai : Tahun 2017
Jenis Layanan : Internal dan Eksternal BPIW
Lokasi Server : PDN Flou

Bank Data BPIW merupakan aplikasi *knowledge management* BPIW, digunakan sebagai media untuk menghimpun, mendokumentasikan, memvisualisasikan dan menyebarluaskan data dan informasi pengembangan infrastruktur wilayah yang berasal dari berbagai sumber, baik internal BPIW maupun data dari unit organisasi Kementerian PUPR, Kementerian/Lembaga, dan sumber lainnya.

Data dan informasi yang dihimpun pada bank data, dikelompokkan menjadi beberapa kategori, beberapa di antaranya adalah produk BPIW, arah kebijakan, arahan program pengembangan infrastruktur wilayah, data umum infrastruktur PUPR, publikasi, profil wilayah, tematik kegiatan, bahan tayangan, dan lain-lain. Selain sebagai media menghimpun data, Bank Data BPIW juga dilengkapi dengan fitur-fitur yang membantu pengguna, seperti Kamus Digital Istilah Pengembangan Wilayah, dashboard katalog data BPIW, kumpulan infografik dan dashboard BPIW, serta layanan permohonan data dan informasi BPIW.

Data dan informasi pada Bank Data terdiri dari 3 jenis yaitu *data public*, *requested*, dan *private detail* informasi lokus/desa dan jumlah penerima manfaat, foto/video dokumentasi pelaksanaan program. Data dan informasi ini disajikan dalam bentuk spasial dan tabular. Bagi internal organisasi, Bank Data BPIW dapat digunakan oleh internal BPIW untuk melihat dan mencari data-data yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Pegawai BPIW dapat melihat semua jenis data serta mengunduh data secara langsung melalui aplikasi Bank Data. Bank data BPIW juga dapat diakses oleh publik (eksternal BPIW tanpa *login*) untuk mencari data-data yang tersimpan di Bank Data. Pengguna eksternal BPIW juga dapat mengajukan permohonan data dan informasi pada form layanan yang telah disediakan, untuk mendapatkan data yang bersifat *requested*.

Website Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah

bpiw.pu.go.id

Aktif Mulai : Tahun 2017
Jenis Layanan : Internal dan Eksternal BPIW
Lokasi Server : PDN Flou

Website BPIW merupakan sarana penyebaran informasi pengembangan wilayah serta media publikasi informasi dan kegiatan di lingkungan BPIW. Informasi pada *website* BPIW dirangkum dalam menu profil, produk, galeri (foto dan video), publikasi (berita, buletin Sinergi BPIW, infografik, panel pameran dan poster, kliping berita, artikel, dan perpustakaan), dan informasi publik termasuk layanan data dan informasi serta layanan konsultasi. *Website* BPIW juga dimanfaatkan untuk mendukung

pengembangan *dashboard*/aplikasi yang mendukung operasionalisasi layanan BPIW, seperti SIPAKET, WebGIS BPIW, NUDP, dan SIPIRANG.

SIPIRANG (<https://bpiw.pu.go.id/SIPIRANG>) merupakan *dashboard* penjadwalan ruang rapat yang berfungsi untuk mempermudah dalam melakukan reservasi ruangan sekaligus meningkatkan efektivitas proses penjadwalan ruangan, meningkatkan akurasi pencatatan peminjaman ruangan, dan memberikan informasi ketersediaan ruangan secara *real-time*. Sedangkan WebGIS adalah platform yang digunakan untuk mengelola katalog data spasial/peta.

Website BPIW dapat dimanfaatkan sebagai media pencarian informasi yang termutakhir seputar profil, produk, dan publikasi BPIW. Selain itu juga dapat dijadikan media untuk layanan data dan informasi serta konsultasi terkait pengembangan infrastruktur wilayah.

Website NUDP (National Urban Development Project

bpiw.pu.go.id/nudp

Aktif Mulai : Tahun 2024

Jenis Layanan : Internal dan Eksternal BPIW

Lokasi Server : PDN Flou

National Urban Development Project (NUDP) merupakan kerja sama Pemerintah Indonesia dan Bank Dunia yang bertujuan untuk meningkatkan perencanaan dan pemrograman pembangunan kota yang terpadu serta perencanaan investasi (*capital investment*). NUDP terbagi dalam empat komponen, yaitu: 1) pengembangan kelembagaan dan kebijakan nasional perkotaan; 2) keterpaduan perencanaan untuk pembangunan perkotaan; 3) pengembangan kapasitas pengelolaan keuangan; dan 4) dukungan pelaksanaan proyek.

Sistem informasi NUDP dikembangkan sebagai platform menyebarkan informasi yang berkaitan dengan proses, output, dan hasil proyek. Selain itu, sistem ini juga digunakan sebagai alat pemantauan dan evaluasi internal pengelola proyek (*Central Project Management Unit/CPMU*) dalam mengelola kegiatan.

Sistem dikelola oleh BPIW sebagai *Executing Agency (EA)* NUDP serta digunakan oleh Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Dalam Negeri sebagai bagian dari pengelola NUDP untuk mengelola proyek. Sistem informasi dimanfaatkan oleh masyarakat luas untuk mengakses informasi terkait NUDP dan sebagai salah satu portal keluhan dan pengaduan.

1.5 Isu Strategis

Sepanjang tahun 2024, BPIW menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaan tugas, maka dalam subbab ini diuraikan isu strategis dan aspek strategis organisasi dan permasalahan utama yang dihadapi. Isu strategis merupakan permasalahan utama yang dihadapi dan hal strategis yang mencuat dalam pelaksanaan tahun anggaran oleh BPIW. Sedangkan aspek strategis menggambarkan kemampuan yang dimiliki oleh BPIW dalam menjawab isu strategis tersebut. Isu strategis dan aspek strategis BPIW tahun 2024 antara lain:

1. Perencanaan Jangka Panjang dan Menengah Kementerian PUPR Mendukung Target Perencanaan Nasional

Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 disusun untuk menetapkan tujuan dan aksi pembangunan Indonesia hingga tahun 2045. Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah Jangka Panjang Nasional (RPIWJPN) 2025-2045 dan Kebijakan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional 2025-2034 merupakan dokumen perencanaan dalam lingkup nasional sebagai pendetailan atas RPJPN. Dokumen tersebut, digunakan untuk mengoptimalkan proses perencanaan dan pemrograman sehingga infrastruktur PU dapat lebih merata, berkualitas, dan berkelanjutan dan sebagai acuan dalam pemutakhiran Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah (RPIW) Provinsi. Dalam lingkup jangka menengah, dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PU yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, serta program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian disinkronkan dengan muatan

Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Renstra Kementerian PU selanjutnya menjadi pendoman atas penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kementerian serta dalam penyusunan Renstra unit organisasi di bawahnya.

Dalam rentang waktu yang signifikan di tengah dinamika perubahan situasi politik serta perubahan fokus arahan pengembangan dari Presiden terpilih, RPIWJPN, Kebijakan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, serta Renstra Kementerian menghadapi proses adaptasi yang lebih kompleks. Restrukturisasi Kementerian PUPR menjadi Kementerian PU, yang turut berimbas pada perubahan SOTK juga mempengaruhi terhadap perubahan khususnya pada muatan Renstra Kementerian PU lima tahun mendatang. Merespon hal tersebut, BPIW melakukan penyesuaian substansi dengan arahan Prioritas Nasional Asta Cita Ranwal RPJMN 2025-2029 dan meningkatkan koordinasi dengan Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, juga Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP). Proses adaptasi arahan substansi juga dilakukan dengan diskusi intensif antara BPIW dengan Unit Organisasi terkait di Kementerian PU.

2. Kebijakan Teknis dan Strategi Perkotaan Nasional

National Urban Development Strategy (NUDS) adalah strategi pembangunan nasional untuk tahun 2045 yang bertujuan mendorong paradigma dan standar baru dalam pembangunan perkotaan. Strategi ini memberikan arahan pengembangan sistem perkotaan nasional, skenario, serta strategi untuk mewujudkan pembangunan perkotaan yang inklusif, berkelanjutan, dan tangguh.

Keberagaman karakter perkotaan, kesenjangan pembangunan antara kota besar dan kota kecil, ancaman perubahan iklim dan risiko bencana menjadi tantangan besar dalam menganalisis kebijakan yang relevan dan inklusif untuk seluruh wilayah. NUDS yang disusun dalam masa transisi pemerintahan juga harus dapat dengan cepat merespons tantangan perkotaan dengan kebijakan pembangunan baru. Selain itu, secara teknis pelaksanaan, terdapat kesulitan dalam mengintegrasikan berbagai sumber data yang memperlambat proses perencanaan yang menyeluruh dan keterlibatan tenaga ahli internasional yang memerlukan waktu untuk memahami konteks perkotaan Indonesia sering kali menghambat akselerasi proses perumusan strategi. Tantangan-tantangan ini menunjukkan perlunya pendekatan kolaboratif, adaptif, dan berbasis data dalam penyusunan NUDS-III untuk mewujudkan visi pembangunan perkotaan nasional tahun 2045.

Sejumlah langkah strategis telah diambil dalam mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam penyusunan NUDS. Menghadapi keberagaman karakter perkotaan, NUDS mengelompokkan wilayah ke dalam klaster berdasarkan karakteristik perkotaan, merancang program berbasis inklusi, serta mengintegrasikan mitigasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana ke dalam setiap tahap perencanaan. Dalam mengintegrasikan berbagai kebijakan nasional, NUDS memanfaatkan forum Tim Koordinasi Strategi Pengembangan Perkotaan Nasional (TKSPPN) di bawah koordinasi Kementerian Bappenas. Melalui TKSPPN, NUDS berhasil meningkatkan pemahaman dan sinergi lintas sektor. Sedangkan, dalam mengatasi keterbatasan data, dilakukan survei langsung di 205 kabupaten/kota, koordinasi melalui platform *One Map Policy* dan mengembangkan *web portal* data perkotaan.

3. Penetapan RPIW melalui Keputusan Menteri PUPR dan Pengembangan Rencana Kawasan Prioritas

Pada tahun 2024, RPIW 2025-2034 untuk 38 Provinsi telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri PUPR Nomor: 817/KPTS/M/2024 tentang Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah. Penetapan tersebut, merupakan proses yang panjang dari awal penyusunannya pada tahun 2021. RPIW selanjutnya, menjadi acuan kewilayahan dan penentuan kawasan prioritas dalam penyusunan Renstra dan sebagai dasar dalam proses pemrograman dan penganggaran pembangunan infrastruktur. Dari proses penyusunan hingga penetapan, BPIW terus berkoordinasi terutama dengan Ditjen Sumber Daya Air, Ditjen Bina Marga, Ditjen Cipta Karya, Ditjen Perumahan, dan Ditjen Pembiayaan Infrastruktur PUPR agar dapat merumuskan dokumen perencanaan yang komprehensif.

Setelah penetapan RPIW, BPIW pada tahun 2024 juga menyusun Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah untuk Kawasan Prioritas dengan skala perencanaan yang lebih rinci, terdapat 6 dokumen yang disusun meliputi 1) Kawasan Penajam Paser Utara; 2) KSPN Dieng, Pantai Selatan Yogyakarta, dan KSPN Karst Gunung Kidul; 3) Daerah Tertinggal Sumba Tengah (Pulau Sumba) dan Lembata (Pulau Flores); 4) Kawasan Industri Pomalaa dan Kawasan Industri Mongondow; 5) Kawasan Industri Obi dan Kawasan

Industri Buli; dan Kawasan Pusat Pemerintahan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua. Kawasan tersebut, merupakan Kawasan prioritas nasional yang dapat menjawab isu strategis wilayah.

Dalam perumusan terdapat permasalahan terutama dalam pengumpulan data hingga tingkat yang kecamatan yang lebih rinci dan keterbatasan informasi data spasial historis. Maka, dalam prosesnya dilakukan pembahasan yang mendalam dengan tenaga ahli maupun pemangku kepentingan daerah serta *desk study* melalui *best practice* yang relevan dengan isu dan permasalahan kawasan.

4. Pembangunan Pariwisata Terintegrasi dan Berkelanjutan

Integrated Tourism Development Program (ITDP) atau Proyek Pengembangan Pariwisata Indonesia 2018-2024 bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan akses terhadap infrastruktur dan layanan dasar yang relevan dengan pariwisata, memperkuat hubungan ekonomi lokal dengan pariwisata, dan menarik investasi swasta di destinasi wisata terpilih di Indonesia. Selama enam tahun pelaksanaan, salah satu hasil penting adalah terbentuknya program kerja lanjutan yang diusulkan di enam destinasi wisata, yaitu Borobudur-Yogyakarta-Prambanan, Bromo-Tengger-Semeru, Komodo/Labuan Bajo, Danau Toba, Lombok, dan Wakatobi. Selama periode 2025 hingga tahun 2045, Rencana Induk Pariwisata Terpadu (*Integrated Tourism Master Plan* (ITMP)) ditetapkan sebagai Peraturan Presiden telah mengidentifikasi lebih dari 10.000 subproyek yang dapat menjadi acuan program pariwisata bagi pemerintah di semua tingkatan.

ITDP diharapkan dapat mengatasi kendala koordinasi antara pemangku kepentingan dalam pengembangan pariwisata, terbatasnya akses infrastruktur, kurangnya keterampilan tenaga kerja pariwisata, lemahnya lingkungan investasi di kawasan pariwisata. Meskipun, ITDP telah berakhir, implementasi proyek masih harus dikawal dengan memastikan komitmen atas setiap pemangku kepentingan, menyusun KAK yang lebih rinci atas ITMP, hingga meninjau investasi dan kemajuan pengembangan kawasan bertahap.

5. Penyelenggaraan Keterpaduan dan Sinkronisasi Program Tahunan Infrastruktur PUPR

Sebagaimana amanat dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perencanaan dan Pemrograman Pembangunan Infrastruktur PUPR yaitu menghasilkan suatu Memorandum Program Infrastruktur PUPR yang digunakan dalam Rapat Koordinasi Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (Rakorbangwil). Memorandum Program merupakan arahan program keterpaduan infrastruktur PUPR di wilayah dan/atau kawasan sebagai acuan proses penyusunan program tahunan dan arahan prioritas kawasan tahunan untuk tahun 2026. Penyusunan Memorandum Program didukung Sistem Informasi Pemrograman (SIPro). Memorandum tersebut berfungsi sebagai acuan utama dalam pelaksanaan forum-forum perencanaan dan pemrograman lainnya, seperti Rapat Koordinasi Teknis Rencana Pembangunan (Rakortekrenbang) dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas). Forum-forum tersebut melibatkan kementerian/lembaga terkait serta pemerintah daerah untuk memastikan terciptanya sinkronisasi dan keterpaduan program pembangunan.

Pelaksanaan Rakorbangwil. mengalami beberapa hambatan akibat belum adanya arahan definitif dari RPJMN 2025-2029 yang menjadi acuan penyusunan program tahunan dan arahan prioritas kawasan tahunan pada periode selanjutnya. Dengan dilaksanakannya Rakorbangwil dilakukan pada masa transisi pemerintahan, mengakibatkan kurangnya partisipasi aktif dari K/L seharusnya terlibat disebabkan oleh ketidakpastian di internal K/L. Lebih lanjut, beberapa K/L belum memiliki siklus perencanaan program sesuai kerangka waktu T-2 (dua tahun sebelum tahun pelaksanaan), menyebabkan kurangnya data awal yang diperlukan untuk sinkronisasi. Secara teknis penyelenggaraan terdapat hambatan dalam pemutakhiran SIPro akibat masih diperlukannya iterasi terhadap Rencana Aksi RPIW antara lain penyeragaman nomenklatur kawasan prioritas dan satuan kegiatan.

Untuk mewujudkan keselarasan antara prioritas pembangunan infrastruktur PU, kebutuhan daerah, dan target pembangunan nasional agar menghasilkan perencanaan dan pemrograman yang terintegrasi, efektif, dan efisien, diperlukan langkah-langkah untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan Rakorbangwil antara lain, menjadikan hasil Rakorbangwil sebagai masukan dalam Rancangan RPJMN 2025-2029, membangun *database* yang mencatat setiap K/L yang terlibat dalam setiap forum perencanaan dan pemrograman untuk memastikan kontinuitas partisipasi dan mempercepat proses koordinasi antar pihak yang relevan, mendorong keterlibatan Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan dalam Rapat Koordinasi lintas K/L, koordinasi dengan K/L agar dapat

mengikuti kerangka waktu T-2. Adapun, sebagai upaya untuk menghindari permasalahan kembali pada penyusunan Memorandum Program, telah dilakukan pemutakhiran SIPro telah agar dapat akan mengakomodasi kebijakan direktif, aspirasi, maupun prioritas nasional menjadikan penyusunan Memorandum Program lebih fleksibel dan berkesinambungan dengan arahan nasional. Standardisasi metadata program infrastruktur PU.

6. Keterpaduan dan Sinkronisasi Program Pembangunan Infrastruktur PUPR dalam Mendukung Penanganan Kemiskinan Ekstrem dan Stunting

Keterpaduan dan sinkronisasi program pembangunan infrastruktur juga dilakukan oleh BPIW dalam mendukung Penanganan Kemiskinan Ekstrem (PKE) dan Stunting. BPIW secara khusus bertugas melakukan fasilitasi dukungan integrasi program penanggulangan PKE dan stunting melalui penyediaan dan validasi data dan informasi, dukungan penyusunan rencana pengembangan infrastruktur PUPR terpadu yang terkait dengan lokus PKE dan stunting serta dukungan penyediaan dokumen capaian kinerja untuk mendorong penurunan jumlah kantong kemiskinan melalui peningkatan akses terhadap layanan dasar dan konektivitas antar wilayah.

Sepanjang 2020-2024 dukungan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem Kementerian PUPR antara lain perbaikan 1) Program BSPS sebanyak 277.712 unit; 2) Penyediaan sanitasi melalui Program Sanimas pada 5.566 desa; 3) Penyediaan air minum melalui Program Pamsimas 9.242 desa; 4) Penanganan terintegrasi pada 54 lokus kemiskinan; 5) Penyediaan air sanitasi, dan persampahan pada 73.260 *By Name By Address* (BNBA). Dalam pelaksanaan pencapaian kinerja tersebut, terdapat kendala yang dihadapi oleh BPIW, antara lain, integrasi dan konvergensi program yang membutuhkan koordinasi intensif antar unit organisasi, antar K/L, dan pemerintah daerah, proses pengolahan data dan sinkronisasi data penerima manfaat program PUPR membutuhkan sumber daya yang tidak sedikit, dinamika sosial dan politik di lapangan.

Dalam menghadapinya, BPIW terlibat dalam Rapat Koordinasi Tim Satgas Konvergensi P3KE dan Tim Percepatan Penurunan Stunting dan secara aktif melaksanakan rapat koordinasi dengan Unit Organisasi di lingkungan Kementerian PUPR. Mendukung integrasi data, BPIW bersalam Pusdatin, Tim Data SIM SANIMAS dan PAMSIMAS mengembangkan Sistem Informasi Penanganan Kemiskinan Ekstrem Dan Stunting Terintegrasi Kementerian PU (SI-PAKET), hingga memperkuat koordinasi antara Kementerian PU dan K/L lain dalam perencanaan.

7. Kebermanfaatan dan Keberfungsian Infrastruktur PUPR Terbangun

Kementerian PUPR telah berperan signifikan dalam mendukung pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) sejak tahun 2015. Pembangunan tersebut, perlu dipastikan manfaatnya bagi masyarakat tidak hanya tercapai secara “*output*” pembangunan namun juga secara “*outcome*”, “*benefit*”, dan “*impact*”. Pada tahun 2024, BPIW telah melaksanakan kegiatan evaluasi manfaat terhadap 69 obyek infrastruktur PSN terpilih yang telah dibangun telah selesai pembangunannya tahun 2023. Evaluasi dilakukan terhadap *input*, *output*, *outcome*, hingga manfaat dari infrastruktur yang terbangun. Selain melakukan analisis terhadap kondisi eksisting infrastruktur, BPIW juga melakukan perbandingan dengan rencana awal pembangunan infrastruktur yang dievaluasi. Dengan demikian dapat terlihat kesesuaian atau ketidaksesuaian antara rencana dan realisasinya. Hasil dari kegiatan evaluasi manfaat ini diharapkan dapat meningkatkan tata kelola pembangunan infrastruktur PUPR dan mendorong kolaborasi dengan berbagai pihak guna mewujudkan sistem infrastruktur yang berfungsi dan bermanfaat secara optimal.

Pelaksanaan evaluasi kebermanfaatan yang dilaksanakan pada tahun 2024, masih terbatas hingga pada manfaat langsung pembangunan dan belum dapat mengevaluasi hingga tingkatan dampak. Pengembangan instrumen evaluasi manfaat hingga dampak infrastruktur dan SOP penyusunan laporan hasil evaluasi masih harus dikembangkan pada tahun berikutnya. Hasil evaluasi juga masih harus terus diperbaiki agar lebih implementatif dan dapat menjadi dasar pimpinan sebagai dasar pengambilan keputusan.

Sebagai upaya untuk mendukung analisis dalam evaluasi manfaat, pada tahun 2023 telah mulai dikembangkan model analisis manfaat dan dampak investasi infrastruktur berbasis spasial. Model tersebut digunakan untuk dapat memproyeksikan potensi kebermanfaatan dari berbagai rencana

intervensi infrastruktur (*ex-ante*). Pada tahun ini, model masih dikembangkan untuk evaluasi manfaat dan dampak dari infrastruktur yang telah terbangun (*ex-post*).

Pengembangan model terhambat akibat keterbatasan ketersediaan data spasial dengan kedetailan informasi dalam skala yang sama. Terlebih, tidak semua provinsi memiliki informasi spasial yang lengkap sehingga pengembangan pemodelan berbasis pada ketersediaan data yang ada. Model analisis manfaat dan dampak investasi infrastruktur berbasis spasial dikembangkan dengan berbagai pendekatan variabel yang terukur berbasis ketersediaan data dan memprioritaskan wilayah dengan data spasial yang memadai.

8. Penguatan Peran BPIW melalui Perumusan SOTK dan Struktur Kinerja

BPIW memiliki peran sentral dalam merancang dan melaksanakan kebijakan pembangunan infrastruktur yang efektif dan efisien. Selama lima tahun kedepan, BPIW dihadapkan pada tantangan besar dalam rangka mencapai target output utama infrastruktur PU periode 2025-2029. Tantangan dimaksud meliputi kebutuhan akan inovasi dalam perencanaan, efisiensi dalam pelaksanaan, serta peningkatan kapasitas untuk memastikan setiap pembangunan infrastruktur memiliki dampak signifikan bagi masyarakat.

Kebutuhan penguatan BPIW merupakan instrumen pokok dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kementerian PU. Sejalan dengan mandat BPIW yang meliputi tugas, fungsi, isu, tantangan, potensi dan permasalahan, maka BPIW harus diposisikan sebagai unit organisasi yang dapat menjalankan peran perencanaan, pemrograman, penganggaran dan evaluasi kebermanfaatannya bagi Kementerian PU. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam perumusan SOTK, meliputi penyesuaian struktur untuk menghindari tumpang tindih tugas dan fungsi antar-unit kerja, pengaturan ulang alur kerja yang memudahkan koordinasi antar-unit di lingkungan Kementerian PU, pembagian peran yang lebih jelas antara-unit teknis dan unit pendukung, memperjelas kedudukan dan fungsi BPIW. SOTK BPIW sebagaimana dimaksud kemudian ditetapkan melalui Peraturan Menteri PU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PU.

Sejalan dengan perumusan SOTK, penguatan peran dilakukan dengan merumuskan struktur kinerja melalui penyusunan Renstra BPIW 2025-2029 yang memperhatikan arahan dalam Rancangan Renstra Kementerian PU. Konsep struktur kinerja BPIW yang diusulkan memiliki 2 (dua) program, yaitu program Peningkatan Kualitas Pembinaan Penyelenggaraan, Keterpaduan, dan Pembiayaan Kreatif Infrastruktur dan program generik Dukungan Manajemen. Selain itu, perumusan struktur kinerja memperhatikan norma sebab-akibat, cascading kinerja dan keselarasan antar-tingkatan sasaran kinerja, serta jelas dan terukur dengan indikator dan target kinerja yang memenuhi kaidah SMART. Berbagai dinamika tersebut memerlukan proses perumusan struktur kinerja yang kontinu karena secara paralel. Keseluruhan proses perumusan struktur kinerja tersebut didukung oleh diskusi yang intensif dengan internal di BPIW dan Biro PAKLN Sekretariat Jenderal sebagai pengampu Program Dukungan Manajemen di Kementerian PU.

9. Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Mendukung Penyusunan Rencana dan Program Pengembangan Infrastruktur Wilayah

BPIW sejak beberapa kurun terakhir, telah mengembangkan Studio Geo-Infrastruktur yang berfungsi untuk 1) Mengolah data sebagai rujukan utama dalam perencanaan dan pemrograman infrastruktur PUPR; 2) Menjadi *think tank* bagi pimpinan BPIW dan Kementerian; 3) Mendukung implementasi Peraturan Menteri PUPR Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perencanaan dan Pemrograman Infrastruktur PUPR. Pengembangan Studio Geo-Infrastruktur masih terus berkesinambungan dengan mengembangkan SiPro sebagai *super-app* dengan modul-modul terkait Rakorbangwil, digitalisasi RPIW dan *Virtual Situation Room*.

Mendukung pengembangan Studio Geo-Infrastruktur, dilakukan 1) Pengelolaan data dan informasi melalui beberapa aplikasi dan sistem informasi, dimana pengelolaan data non spasial menggunakan Website dan Bank Data, sedangkan data peta/geospasial dikelola dengan *platform* WebGIS dan tools pendukung lainnya serta 2) Standarisasi data PIW dalam rangka menyelesaikan isu data dan informasi, diantaranya adalah inkonsistensi data, data yang tidak terstruktur, keterbatasan integrasi data, serta alur data dan transaksi data yang belum disepakati.

Transformasi teknologi dan informasi tersebut masih memerlukan pengembangan agar dapat memberikan penguatan dalam mendukung efektivitas dan efisiensi proses perencanaan dan

pemrograman, terlebih dengan adanya peran baru BPIW dalam aspek penganggaran dan evaluasi kebermanfaatannya.

10. Partisipasi BPIW dalam 10th World Water Forum

Dalam event *World Water Forum* ke-10, selain sebagai peserta pada berbagai *thematic session*, BPIW turut berpartisipasi dengan menggelar *Expo* yang bertujuan mempublikasikan peran BPIW kepada masyarakat tentang konsep perencanaan wilayah yang mendukung pembangunan wilayah yang inklusif terhadap air. Pembangunan infrastruktur PUPR berbasis wilayah yang inklusif terhadap air sangat penting untuk memastikan bahwa semua lapisan masyarakat mendapatkan akses yang adil dan merata terhadap layanan air bersih dan sanitasi. BPIW mengusung narasi perencanaan sebagai solusi yang mengarahkan untuk mewujudkan air untuk kesejahteraan bersama.

Pembangunan wilayah yang inklusif air itu diturunkan menjadi 4 (empat) aksi/komitmen yaitu: 1) BPIW membangun strategi yang integratif yang dijalankan sejak awal; 2) BPIW mengarahkan perencanaan yang inklusif dan resilien untuk perubahan holistik; 3) BPIW berperan membuka jalan/ mempersiapkan pembangunan wilayah yang inklusif air; dan BPIW menghadirkan solusi berbasis wilayah untuk tantangan kritis terkait air. Keempat aksi tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam 6 (enam) materi panel dalam *Expo WWF* sebagai berikut:

- 1) Perencanaan ramah air di kawasan industri;
- 2) Perencanaan untuk mendukung ketahanan pangan dan pertanian;
- 3) Dukungan akses air inklusif untuk semua;
- 4) Dukungan layanan air di perkotaan dan pemukiman padat di perkotaan;
- 5) Manajemen pencegahan banjir yang terintegrasi; dan
- 6) Manajemen dan pencegahan dari kekeringan

1.6 Sistematika Laporan

Sistematika penyusunan laporan ini mengacu pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 9 Tahun 2018 dan Panduan Penulisan Laporan Kinerja Kementerian PUPR. Secara rinci dijelaskan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini terdapat latar belakang penyusunan, isu dan aspek strategis, serta penjelasan umum organisasi mencakup tugas dan fungsi, struktur organisasi, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana yang dimiliki oleh BPIW.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini dijelaskan mengenai visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi, program/kegiatan dalam Rencana Strategis BPIW 2020-2024, kronologis Perjanjian Kinerja (PK), target kinerja Tahun 2024 dalam pemenuhan target renstra beserta metode pengukurannya.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini diuraikan mengenai evaluasi dan analisis kinerja serta realisasi anggaran BPIW Tahun 2024, yang disajikan melalui penjelasan mengenai upaya peningkatan akuntabilitas, capaian kinerja, perbandingan kinerja, pagu dan realisasi anggaran, pemanfaatan laporan kinerja, penghargaan, dan hasil survei kepuasan pemanfaatan Laporan Kinerja.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja, faktor pendukung keberhasilan, permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja, serta rekomendasi dan langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk memperbaiki kondisi dan meningkatkan kinerja.

An aerial photograph of a modern residential development. In the foreground, a multi-story apartment building with a distinctive checkered facade on one side is visible. Behind it, a long, curved residential building with balconies stretches across the middle ground. To the left, a complex highway interchange with multiple overpasses and ramps is situated. In the background, a large, calm lake is bordered by a stone dam or embankment. The surrounding landscape is a mix of greenery and developed areas. The overall scene is captured in a high-angle, wide shot.

20
24

An aerial photograph of a city, showing various buildings, roads, and green spaces, is overlaid with a semi-transparent green filter. The image serves as the background for the entire page.

2

Perencanaan Kinerja

2

Perencanaan Kinerja

2.1 Rencana Strategis

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsinya, BPIW menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai acuan dalam menyusun dokumen perencanaan, pemrograman dan penganggaran serta evaluasi, yaitu Perjanjian Kinerja, Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKA-KL), Rencana Aksi Kinerja, Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Bulanan dan Laporan Kinerja. Muatan Revisi Renstra BPIW 2020-2024 telah mengacu pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PUPR Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian PUPR Tahun 2020-2024, yang diturunkan ke dalam Keputusan Kepala BPIW Nomor: 16.1/KPTS/Kw/2024 tentang Rencana Strategis BPIW 2020-2024.

2.1.1 Visi dan Misi

Visi Kementerian PUPR sebagaimana dimuat dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 3 Tahun 2024 adalah “Kementerian PUPR yang Andal, Responsif, Inovatif, dan Profesional dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju, Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Misi Kementerian PUPR sebagaimana dimuat dalam Peraturan Menteri PUPR No. 23 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian PUPR 2020-2024 adalah:

1. Memberikan dukungan teknis dan administratif serta analisis yang cepat, akurat, dan responsif kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta penyelenggaraan infrastruktur PUPR;
2. Memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dalam menyelenggarakan pembangunan infrastruktur sumber daya air, konektivitas, pemukiman dan perumahan dalam suatu pengembangan infrastruktur wilayah yang terpadu;
3. Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang tata kelola, perencanaan, pengawasan, informasi, dan hubungan kelembagaan;
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, penyelenggaraan jasa konstruksi, dan pembiayaan infrastruktur dalam mendukung penyelenggaraan infrastruktur PUPR.

2.1.2 Arah Kebijakan dan Strategi

Arah kebijakan strategi berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian PUPR 2020 – 2024 adalah:

Kebijakan peningkatan kualitas penyusunan kebijakan teknis dan rencana terpadu pengembangan infrastruktur wilayah yang didukung oleh perangkat yang memadai termasuk mencakup panduan penyusunan rencana induk dan legalitas produk, dengan strategi antara lain:

1. Penyusunan Jakstra PIW (Perencanaan Pemrograman dan Pembiayaan) antara lain Kerangka Spasial Renstra PUPR, Rencana Pembangunan Infrastruktur Jangka Menengah (RPIJM) atau RPIW yang menurunkan arahan pengembangan wilayah dari RPJMN 2020-2024;
2. Penyusunan *database* untuk simulasi Kebijakan, antara lain SIPRO (Sistem Informasi Pemrograman);
3. Sinkronisasi Program Pengembangan Infrastruktur yang merupakan agenda rutin Pemrograman PUPR yang akan diinisiasi oleh BPIW setiap tahunnya; dan
4. Analisa Manfaat perencanaan dan pembangunan infrastruktur yang digunakan untuk mengukur kebermanfaatan pembangunan infrastruktur PUPR sesuai dengan karakteristik masing-masing wilayah di Indonesia sekaligus memproyeksikan kebermanfaatan ekonomi dan sosial dari pengembangan infrastruktur PUPR agar dapat menjawab Visi dan Misi Presiden untuk menjalankan RPJMN.

Kebijakan Peningkatan kualitas pemrograman pembangunan infrastruktur wilayah. Adapun Strategi yang dilakukan antara lain:

1. Perencanaan dan Pemrograman Infrastruktur PUPR berbasis Pengembangan Wilayah yang merupakan arahan Program Jangka Menengah (PJM)/(MP/DP) baik pada level Kawasan maupun level perkotaan yang dilakukan analisis prioritas kawasan dengan mengacu arahan RPJMN 2020-2024 (termasuk *Major Project 2020-2024*) serta dokumen perencanaan lainnya termasuk MP/DP yang telah disusun BPIW sejak 2015-2019;
2. Evaluasi Kinerja Kawasan sebagai alat ukur kebutuhan infrastruktur atau *gap* infrastruktur bidang PUPR; dan
3. Pengembangan *database* wilayah.

Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya:

1. Penyusunan NSPK dalam rangka Penyusunan Peraturan Perundangan Lingkup PIW;
2. Pengembangan SDM dan Ortala untuk penguatan sumber daya manusia perencanaan termasuk upaya kualitas fungsional;
3. Pemrograman peningkatan jabatan dan Monitoring dan Evaluasi yang merupakan agenda rutin tahunan untuk melakukan penyusunan program internal serta pemantauan dan evaluasi Pemrograman internal BPIW
4. Perencanaan sebagai perencanaan, Umum acuan penganggaran, evaluasi kinerja, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur BPIW pada tahun 2020-2024 dalam rangka menjalankan amanat RPJMN 2020 2024 dan Instrumen Fasilitasi Simulasi Kebijakan dalam bentuk studio peta atau Studio Geo-Infrastruktur;
5. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya termasuk, Layanan Umum, Keuangan dan BMN termasuk Penyelesaian BMN Tata Ruang (Aset tanah, bangunan, dan gedung/anjungan cerdas) serta tindak lanjut audit.
6. Kehumasan, dan layanan informasi untuk memperkenalkan eksistensi organisasi perencanaan pembangunan infrastruktur PUPR sekaligus menyajikan data dan informasi produk produk perencanaan pengembangan infrastruktur wilayah.

2.1.3 Program dan Kegiatan

BPIW melaksanakan program generik yaitu Program Dukungan Manajemen, program tersebut bersifat pelayanan internal untuk mendukung pelayanan aparatur atau administrasi pemerintahan di lingkungan BPIW. Dalam pelaksanaan program tersebut, terdapat 2 (dua) kegiatan yaitu, 1) Kegiatan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dengan Klasifikasi Rincian Output (KRO), yaitu Kebijakan Bidang Pengembangan Wilayah dan 2) Kegiatan Dukungan Manajemen Pengembangan Infrastruktur Wilayah dengan KRO yaitu, a) Kerja Sama; b) Layanan Dukungan Manajemen Internal; c) Layanan Sarana dan Prasarana Internal; d) Layanan Manajemen SDM Internal; dan e) Layanan Manajemen Kinerja Internal. Uraian program dan kegiatan BPIW ditunjukkan sebagaimana Gambar 2.1.

Gambar 2.1 Program dan Kegiatan BPIW



2.2 Perjanjian Kinerja BPIW

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen berupa pernyataan komitmen dalam mencapai target kinerja tertentu. Dokumen ini merupakan suatu kesepakatan kinerja antara pemberi amanah sebagai atasan langsung (dalam hal ini Menteri PUPR/ Menteri PU) dengan penerima amanah yang akan mewujudkannya sekaligus sebagai pimpinan (dalam hal ini Kepala BPIW). Perjanjian Kinerja juga menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola baik sumber daya manusia, sumber pendanaan, maupun sarana dan prasarana pendukung. Dokumen ini menjadi kontrak kinerja yang harus dipenuhi oleh Kepala BPIW selama satu tahun kepada Menteri. Perjanjian Kinerja harus disusun dengan memperhatikan dokumen pelaksanaan anggaran dan mencantumkan indikator serta target kinerja. Indikator kinerja yang disusun antara lain harus memenuhi kriteria spesifik, terukur, dapat dicapai, berjangka waktu tertentu, serta dapat dipantau dan dikumpulkan. Perjanjian Kinerja yang disusun harus dapat diturunkan sampai unit terkecil bahkan individu sehingga jenjang kinerja dapat diukur dengan jelas. Perjanjian Kinerja Unit Organisasi (Tingkat Eselon I) dan Unit Kerja (tingkat Eselon II) disusun dengan orientasi *outcome* agar tercipta *cascading* dalam pengukuran kinerjanya.

2.2.1 Perjanjian Kinerja Awal

Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PUPR Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian PUPR Tahun 2020-2024, yang diturunkan ke dalam Revisi Renstra BPIW serta dengan terbitnya SP DIPA-033.14-0/2024 pada tanggal 24 November 2023, maka BPIW menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dengan alokasi anggaran sebesar Rp143.564.190.000. Rincian target kinerja dan anggaran dalam PK Awal 2024 sebagai tabel berikut.

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Awal BPIW 2024

Sasaran Program/Indikator Sasaran Program	Target
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	
1. Tingkat Pemanfaatan Kebijakan, Strategi Perencanaan dan Pemrograman	100%
2. Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya	94,58%
Program Dukungan Manajemen	Anggaran Rp143.564.190.000

2.2.1 Perjanjian Kinerja Akhir

Pada Bulan Desember 2024, BPIW melakukan Revisi Akhir Perjanjian Kinerja dikarenakan adanya revisi DIPA, antara lain akibat pemenuhan kebijakan *Automatic Adjustment*, percepatan Pinjaman Luar Negeri (PLN) *National Urban Development Project* (NUDP) dan *Integrated Tourism Development Project* (ITDP), pemenuhan kebijakan blokir 50% sisa pagu perjalanan dinas, sehingga alokasi anggaran BPIW pada akhir tahun anggaran sebesar Rp223.265.585.000. Perubahan Perjanjian Kinerja juga diakibatkan adanya perubahan pejabat penandatanganan kesepakatan kinerja dari yang sebelumnya Menteri PUPR menjadi Menteri PU. Revisi dimaksud tidak mengubah target kinerja BPIW Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Revisi Renstra BPIW 2020-2024. Rincian target kinerja dan anggaran dalam PK Akhir 2024 sebagai berikut.

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Akhir BPIW 2024

Sasaran Program/Indikator Sasaran Program	Target
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	
1. Tingkat Pemanfaatan Kebijakan, Strategi Perencanaan dan Pemrograman	100%
2. Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya	94,58%
Program Dukungan Manajemen	Anggaran Rp223.265.585.000

2.2.2 Kronologi Perubahan PK

Selama tahun 2024, Sekretariat BPIW melakukan 2 (dua) kali revisi Perjanjian Kinerja. Revisi pertama pada Bulan Juli 2024 dikarenakan adanya perubahan perubahan nilai anggaran, yaitu dari semula sebesar Rp143.564.190.000 menjadi sebesar Rp184.261.356.000. Revisi kedua pada Bulan Desember 2024 dilakukan untuk mengakomodir perubahan akhir pagu anggaran, dari semula sebesar Rp184.261.356.000 menjadi sebesar Rp223.265.585.000 serta adanya perubahan Menteri PUPR menjadi Menteri PU. Kedua revisi tersebut tidak mengubah target kinerja Sasaran Program yang diampu oleh BPIW sepanjang Tahun 2024. Kronologi Perubahan PK dijelaskan pada Tabel 2.3. Adapun Dokumen Perjanjian Kinerja BPIW dan Unit Kerja BPIW Tahun 2024 beserta revisinya dapat dilihat pada Lampiran.

Tabel 2.3 Kronologi Perubahan PK BPIW

Sasaran Program/Indikator Sasaran Program	%	Target		
		PK Awal	PK Revisi	PK Akhir
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya				
1. Tingkat Pemanfaatan Kebijakan, Strategi Perencanaan dan Pemrograman	%	100	100	100
2. Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya	%	94,58	94,58	94,58
Jumlah Anggaran		Rp143.564.190.000	Rp184.261.356.000	Rp223.265.585.000

2.3 Metode Pengukuran Kinerja

Pengukuran Kinerja merupakan proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, serta sasaran strategis dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Pengukuran Kinerja tersebut dilakukan dengan membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana, atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Proses ini dilakukan dengan menilai pencapaian target setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran strategis. Pengukuran kinerja dilakukan dengan mengacu pada Dokumen Perjanjian Kinerja Unit Organisasi dan Unit Kerja.

Metode Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)

Sasaran Strategis 5 (SS-5), yaitu Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya merupakan sasaran yang didukung oleh beberapa indikator dari beberapa Unit Organisasi yang ada di lingkungan Kementerian PUPR. Terdapat 6 (enam) Indikator Kinerja yaitu, 1) Tingkat Tata Kelola Kementerian PUPR; 2) Tingkat Pemenuhan Investasi/Pembiayaan Infrastruktur PUPR yang didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif; 3) Persentase Kualitas Pengawasan Intern dalam Penyelenggaraan Infrastruktur; 4) Indeks Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur; 5) Tingkat Keselarasan Dukungan di Kawasan Strategis; 6) Tingkat Keandalan Sumber Daya Konstruksi.

Dari ke-6 Indikator Kinerja tersebut, BPIW mendukung 100% terhadap Indikator Kinerja-5 yaitu **Tingkat Keselarasan Dukungan Infrastruktur di Kawasan Strategis**. Capaian diperoleh dari jumlah kawasan yang disepakati untuk didukung bersama oleh K/L terkait dibandingkan dengan jumlah kawasan, rincian perhitungan sebagai berikut.

$$IKSS = \frac{a}{b} \times 100\%$$

Keterangan

IKSS : Indikator Kinerja Sasaran Strategis

a : Jumlah kawasan yang disepakati untuk didukung bersama oleh K/L terkait

b : Jumlah prioritas kawasan yang ditargetkan dalam dokumen perencanaan

Tipe perhitungan yang dilakukan dalam SS yaitu melalui perhitungan nilai rata-rata pencapaian (persen) setiap tahun, dengan asumsi jumlah kawasan yang menjadi target adalah target kawasan dalam RPJMN 2020-2024 sebesar 249 kawasan dan terdapat kesepakatan melalui penyusunan Kesepakatan Dukungan Infrastruktur terhadap Pengembangan Kawasan Prioritas antar K/L dalam forum Rakorbangwil.

Metode Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP)

Sasaran Program (SP) BPIW yaitu Meningkatnya Dukungan Manajemen Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya yang kemudian dijabarkan menjadi IKSP berupa **IKSP 1-1 Tingkat Pemanfaatan Kebijakan, Strategi Perencanaan dan Pemrograman**. Capaian diperoleh dari jumlah kawasan yang ditangani dengan perencanaan dan pemrograman infrastruktur PUPR dibandingkan dengan jumlah kawasan, rincian perhitungan sebagai berikut.

$$IKSP = \frac{a}{b} \times 100\%$$

Keterangan

IKSP : Indikator Kinerja Sasaran Program

a : Jumlah kawasan yang ditangani dengan perencanaan dan pemrograman infrastruktur PUPR

b : Jumlah prioritas kawasan yang ditargetkan dalam dokumen perencanaan

Tipe perhitungan yang digunakan dalam IKSP ini adalah perhitungan rata-rata pencapaian (persen) setiap tahunnya, dengan jumlah target sebanyak 249 kawasan dan capaian berupa penanganan kawasan prioritas melalui perencanaan dan pemrograman BPIW.

Adapun **IKSP 1-2 Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya** mendukung Indikator Sasaran Program Kesekretariatan Kementerian PUPR sehingga penetapan perhitungannya merujuk pada Sekretariat Jenderal.

Metode Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)

Metode penghitungan masing-masing IKSK untuk setiap sub indikator kinerja dijelaskan dengan lebih rinci pada berikut.

Tabel 2.4 Metode Perhitungan Sasaran Kegiatan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Jenis Indikator	Metode Perhitungan
SK1 Meningkatkan Pelaksanaan Perencanaan dan Pemrograman Pembangunan Infrastruktur PUPR	IKSK 1-1 Tingkat kesesuaian kebijakan dan strategi perencanaan dan pemrograman infrastruktur PUPR	Komposit dari Indikator-Indikator: 1. capaian Renstra dibandingkan dengan target Renstra Unor (ABCP) (30%); dan 2. persentase program Rakorbangwil yang disepakati menjadi Format Kegiatan Wajib dan Format Kegiatan Pembangunan Baru pada Konsultasi Regional (70%)	Tingkat Pemanfaatan Kebijakan, Strategi Perencanaan dan Pemrograman dikatakan tercapai apabila: <u>Sub Indikator-1 (30%):</u> $IKSK1 - 1 = \frac{a}{b} \times 100\%$ Ket: IKSK1-1= Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (Sub Indikator 1) a = capaian Renstra PUPR b = target Renstra Unor PUPR <u>Sub Indikator-2 (70%):</u> $IKSK1 - 2 = \frac{c}{d} \times 100\%$ Ket: IKSK1-2= Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (Sub Indikator 2) c = jumlah program arahan yang menjadi Format Kegiatan Wajib dan Format Kegiatan Pembangunan Baru pada Konsultasi Regional

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Jenis Indikator	Metode Perhitungan
	IKSK 1-2 Tingkat kesesuaian penanganan kawasan prioritas melalui perencanaan dan pemrograman infrastruktur PUPR di Pulau Sumatra dan Kalimantan	Tingkat kesesuaian penanganan kawasan prioritas melalui perencanaan dan pemrograman infrastruktur PUPR di Pulau Sumatra dan Kalimantan (Non Komposit)	<p>d = jumlah program Rakorbangwil</p> <p>Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 2 dihitung dari jumlah kawasan yang ditangani perencanaan dan pemrograman infrastrukturnya dibandingkan dengan jumlah kawasan, dikali 100%.</p> $IKSK2 = \frac{e1}{f1} \times 100\%$ <p>Ket: IKSK2 = Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (Wilayah I) $e1$ = Jumlah kawasan yang ditangani dengan perencanaan dan pemrograman infrastruktur PUPR di Pulau Sumatra dan Kalimantan $f1$ = Jumlah Kawasan Prioritas di Pulau Sumatra dan Kalimantan</p>
	IKSK 1-3 Tingkat kesesuaian penanganan kawasan prioritas melalui perencanaan dan pemrograman infrastruktur PUPR di Pulau Jawa, Bali, dan Kep. Nusa Tenggara	Tingkat kesesuaian penanganan kawasan prioritas melalui perencanaan dan pemrograman infrastruktur PUPR di Pulau Jawa, Bali, dan Kep. Nusa Tenggara (Non Komposit)	<p>Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 3 dihitung dari jumlah kawasan yang ditangani perencanaan dan pemrograman infrastrukturnya dibandingkan dengan jumlah kawasan, dikali 100%.</p> $IKSK2 = \frac{e2}{f2} \times 100\%$ <p>Ket: IKSK2 = Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (Wilayah II) $e2$ = Jumlah kawasan yang ditangani dengan perencanaan dan pemrograman infrastruktur PUPR di Pulau Jawa, Bali, dan Kep. Nusa Tenggara $f2$ = Jumlah Kawasan Prioritas di Pulau Jawa, Bali, dan Kep. Nusa Tenggara</p>
	IKSK 1-4 Tingkat kesesuaian penanganan kawasan prioritas melalui perencanaan dan pemrograman infrastruktur PUPR di Pulau Sulawesi, Papua, dan Kep. Maluku	Tingkat kesesuaian penanganan kawasan prioritas melalui perencanaan dan pemrograman infrastruktur PUPR di Pulau Sulawesi, Papua, dan Kep. Maluku (Non Komposit)	<p>Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 4 dihitung dari jumlah kawasan yang ditangani perencanaan dan pemrograman infrastrukturnya dibandingkan dengan jumlah kawasan, dikali 100%.</p> $IKSK2 = \frac{e3}{f3} \times 100\%$ <p>Ket: IKSK2 = Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (Wilayah III) $e3$ = Jumlah kawasan yang ditangani dengan perencanaan dan pemrograman infrastruktur PUPR di Pulau Sulawesi, Papua, dan Kep. Maluku $f3$ = Jumlah Kawasan Prioritas di Pulau Sulawesi, Papua, dan Kep. Maluku</p>

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Jenis Indikator	Metode Perhitungan
<p>SK 2 Meningkatkan efektifitas dan efisiensi tata kelola penyelenggaraan pengembangan infrastruktur Wilayah</p>	<p>Persentase peningkatan efektifitas dan efisiensi tata kelola pengembangan wilayah: IKSK 2-1. Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan IKSK 2-2. Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum IKSK 2-3 Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai IKSK 2-4 Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran IKSK 2-5 Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran IKSK 2-6 Nilai SAKIP Unit Organisasi</p>	<p>Merupakan indikator komposit/ gabungan dari indikator-indikator sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan 2. Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum 3. Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai 4. Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran 5. Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran 6. Nilai SAKIP Unit Organisasi 	<p>Indikator Kinerja Kegiatan dihitung dari penjumlahan dari indikator-indikator sbb:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Indikator 1 (15%): dihitung dari penjumlahan: <ol style="list-style-type: none"> a. Persentase Pembinaan Tata Naskah Dinas = Jumlah Unit Kerja yang Terbina Tata Naskah Dinas/Jumlah Seluruh Unit Kerja b. Persentase Pembinaan Kearsipan = Jumlah Unit Kerja yang Terbina Kearsipan/Jumlah Seluruh Unit Kerja c. Persentase Penyelesaian Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) = Jumlah Usulan Penghapusan BMN yang telah diselesaikan/ Total Usulan Penghapusan BMN. d. Persentase terselenggaranya Administrasi Korespondensi = Jumlah Koresponden yang Diselesaikan / Jumlah Seluruh Koresponden 2. Indikator 2 (15%): <ol style="list-style-type: none"> a. jumlah produk hukum yang diterbitkan dibagi dengan jumlah produk hukum yang seharusnya diterbitkan (dalam proleg Kemen PUPR) dikali 100%. b. Tingkat kesuksesan penyelenggaraan Komunikasi Publik. c. Tingkat kepuasan layanan data dan informasi serta layanan sistem informasi. d. Tingkat layanan fasilitas kerja sama. 3. Indikator 3 (15%): <ol style="list-style-type: none"> a. Survei Kepada Pegawai terkait ketepatan perencanaan pegawai, transparansi rekrutmen, ketepatan layanan administrasi Kepegawaian. b. Nilai SPIP Penjaminan Kinerja di BPIW. 4. Indikator 4 (20%): Dihitung berdasarkan nilai 8 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dari Kementerian Keuangan. 5. Indikator 5 (15%): Mengacu PMK No. 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian negara/Lembaga. 6. Indikator 6 (20%): Penilaian SAKIP Unor oleh tim evaluator Itjen.

Hasil pengukuran capaian sasaran kemudian dibandingkan dengan rencana capaian sehingga diperoleh besaran kinerja. Penilaian tersebut dilakukan untuk mengukur, serta mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di tahun 2024 dalam rangka memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran di akhir tahun anggaran. Hasil pengukuran kinerja kemudian dikategorisasi sesuai dengan tingkat capaian kinerja yang telah disepakati. Berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kategorisasi ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 2.5 Kategorisasi Capaian Kinerja

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1.	AA	>90 – 100	Sangat memuaskan
2.	A	>80 – 90	Memuaskan
3.	BB	>70 – 80	Sangat Baik
4.	B	>60 – 70	Baik, Perlu sedikit perbaikan
5.	CC	>50 – 60	Cukup (memadai), Perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar
6.	C	>30 – 50	Kurang, Perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar
7.	D	0 – 30	Sangat kurang, Perlu perbaikan yang sangat mendasar

2.4 Target Kinerja Tahun Pelaporan Menurut Rencana Strategis

2.4.1 Reviu Capaian Target Renstra

Selama periode Renstra 2020-2024, BPIW telah mampu mencapai target kinerja yang ditetapkan per tahunnya untuk masing-masing indikator kinerja baik pada tingkatan Sasaran Strategis, Sasaran Program, hingga Sasaran Kegiatan. Pada tingkat Sasaran Strategis utamanya BPIW telah mencapai 88,35% atas keselarasan dukungan infrastruktur melalui Rakorbangwil. Pada tingkatan Sasaran Program, BPIW telah mendorong pemanfaatan kebijakan, strategi, perencanaan dan pemrograman melalui tersusunnya 100% dokumen perencanaan pengembangan wilayah pada kawasan strategis yang ditargetkan. Meskipun demikian, pada akhir tahun perencanaan, capaian dukungan manajemen belum dapat tercapai sesuai target. Reviu atas target dan capaian Renstra 2020-2024 sebagai Tabel 2.6.

Tabel 2.6 Reviu Capaian Target Renstra BPIW 2020-2024

Sasaran/ Indikator kinerja	2020 (%)		2021 (%)		2022 (%)		2023 (%)		2024 (%)	
	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
SS Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya										
IKSS - Tingkat Keselarasan Dukungan Infrastruktur di Kawasan Strategis	60,00	69,48	65,00	80,32	70,00	81,12	82,00	87,55	82,50	88,35
SP Meningkatnya Dukungan Manajemen Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya										
IKSP 1-1. Tingkat Pemanfaatan Kebijakan, Strategi Perencanaan dan Pemrograman	60,00	69,48	65,00	83,53	70,00	98,80	100	100	100	100
IKSP 1-2. Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya	55,92	66,94	63,53	76,47	71,54	86,89	87,81	93,67	94,58	97,55

Sasaran/ Indikator kinerja	2020 (%)		2021 (%)		2022 (%)		2023 (%)		2024 (%)	
	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
SK 1. Meningkatnya Pelaksanaan Perencanaan dan Pemrograman Pembangunan Infrastruktur PUPR										
IKSK 1-1. Tingkat Kesesuaian Kebijakan dan Strategi Perencanaan dan Pemrograman Infrastruktur PUPR	60,00	55,25	65,00	71,39	70,00	79,22	80,00	80,48	85,00	89,01
IKSK 1-2. Tingkat Kesesuaian Penanganan Kawasan Prioritas melalui Perencanaan dan Pemrograman Infrastruktur PUPR di Pulau Sumatra dan Kalimantan	60,00	63,42	65,00	85,37	70,00	98,78	100	100	100	100
IKSK 1-3. Tingkat Kesesuaian Penanganan Kawasan Prioritas melalui Perencanaan dan Pemrograman Infrastruktur PUPR di Pulau Jawa, Bali dan Kep. Nusa Tenggara	60,00	48,57	65,00	72,86	70,00	98,57	100	100	100	100
IKSK 1-4. Tingkat Kesesuaian Penanganan Kawasan Prioritas melalui Perencanaan dan Pemrograman Infrastruktur PUPR di Pulau Sulawesi, Papua dan Kep. Maluku	60,00	89,69	65,00	89,69	70,00	98,97	100	100	100	100
SK 2. Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan Pengembangan Infrastruktur Wilayah										
IKSK 2-1. Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara dan Pengelolaan Ketatausahaan	80,00	95,40	80,00	85,19	81,00	91,60	82,00	91,64	82,00	84,28
IKSK 2-2. Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum	100	100	100	100	100	100	100	100	100	73,54
IKSK 2-3. Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai	80,00	70,09	80,00	80,03	81,00	81,39	82,00	83,76	82,00	82,94
IKSK 2-4. Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran	91,00	84,91	91,00	92,76	92,00	88,43	92,00	93,21	92,00	93,24
IKSK 2-5 Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran	90,50	89,88	90,50	97,08	91,00	90,91	91,00	91,11	91,00	82,93
IKSK 2-6. Nilai SAKIP Unit Organisasi	76,50	76,40	76,60	76,40	76,80	80,34	76,90	80,65	77,00	81,26

2.4.2 Target Kinerja TA 2024 Berdasarkan Rencana Strategis

Berdasarkan Revisi Renstra Kementerian PUPR 2020-2024 yang diturunkan ke dalam Revisi Renstra BPIW 2020-2024 dibandingkan dengan Perjanjian Kinerja BPIW Tahun Anggaran 2024, tidak terdapat perbedaan untuk seluruh target Sasaran Strategis, Sasaran Program, hingga Sasaran Kegiatan. Dalam mencapai target kinerja tersebut, BPIW menggunakan pagu anggaran tahun 2024 sesuai dengan Perjanjian Kinerja (Akhir), yaitu sebesar Rp223.265.585.000. Rincian target tersebut sebagaimana Tabel 2.7.

Tabel 2.7 Sandingan Target Kinerja Rencana Strategis dengan Perjanjian Kinerja BPIW Tahun 2024

Sasaran/ Indikator kinerja	Target 2024 (%)	
	Rencana Strategis	Perjanjian Kinerja
SS Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya		
IKSS - Tingkat Keselarasan Dukungan Infrastruktur di Kawasan Strategis	82,50	82,50
SP Meningkatnya Dukungan Manajemen Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya		
IKSP 1. Tingkat Pemanfaatan Kebijakan, Strategi Perencanaan dan Pemrograman	100	100
IKSP 2. Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya	94, 58	94, 58
SK 1. Meningkatnya Pelaksanaan Perencanaan dan Pemrograman Pembangunan Infrastruktur PUPR		
IKSK 1-1. Tingkat Kesesuaian Kebijakan dan Strategi Perencanaan dan Pemrograman Infrastruktur PUPR	85,00	85,00
IKSK 1-2. Tingkat Kesesuaian Penanganan Kawasan Prioritas melalui Perencanaan dan Pemrograman Infrastruktur PUPR di Pulau Sumatra dan Kalimantan	100	100
IKSK 1-3. Tingkat Kesesuaian Penanganan Kawasan Prioritas melalui Perencanaan dan Pemrograman Infrastruktur PUPR di Pulau Jawa, Bali dan Kep. Nusa Tenggara	100	100
IKSK 1-4. Tingkat Kesesuaian Penanganan Kawasan Prioritas melalui Perencanaan dan Pemrograman Infrastruktur PUPR di Pulau Sulawesi, Papua dan Kep. Maluku	100	100
SK 2. Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan Pengembangan Infrastruktur Wilayah		
IKSK 2-1. Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara dan Pengelolaan Ketatausahaan	82,00	82,00
IKSK 2-2. Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum	100	100
IKSK 2-3. Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai	82,00	82,00
IKSK 2-4. Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran	92,00	92,00
IKSK 2-5 Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran	91,00	91,00
IKSK 2-6. Nilai SAKIP Unit Organisasi	77,00	77,00

An aerial photograph of a large-scale residential or commercial development. In the foreground, there are several multi-story buildings with modern architectural features, including balconies and a prominent checkered facade on one of the structures. A complex network of roads and highways winds through the site. In the background, a large dam spans across a wide river, with a reservoir behind it. The surrounding landscape is a mix of developed areas and natural vegetation.

20
24



3

Akuntabilitas
Kinerja

3

Akuntabilitas Kinerja

3.1 Upaya Peningkatan Akuntabilitas

Berdasarkan Surat Inspektur Jenderal Nomor: PW0204-Ij/970 tanggal 2 Agustus 2024 hal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, implementasi AKIP BPIW dikategorikan Memuaskan (A) dengan nilai 81,26 dalam pengertian bahwa unit organisasi dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil. Tidak tercapainya nilai maksimal dalam implementasi AKIP tersebut disebabkan dengan masih adanya kelemahan dalam beberapa komponen/subkomponen AKIP. Dalam rangka peningkatan akuntabilitas, Inspektorat Jenderal menyampaikan rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh BPIW pada tahun 2024, adapun beberapa upaya yang dilakukan antara lain sebagai berikut Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AKIP BPIW TA 2023

No.	Catatan Hasil Evaluasi	Tindak lanjut
1.	Perencanaan Kinerja	
1.b	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyesuaian (cascading) di setiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting).	<p>Sebagai bentuk tindak lanjut untuk mengantisipasi keterlambatan pada periode berikutnya, Renstra Kementerian PUPR 2025-2029 perlu ditetapkan paling lambat 5 bulan setelah RPJMN ditetapkan dan Renstra Unor ditetapkan satu bulan setelah Renstra Kementerian yaitu paling lambat bulan Juli 2025.</p> <p>BPIW sebagai pengampu Renstra Kementerian mendorong agar Renstra Kementerian PU ditargetkan selesai lebih cepat pada April 2025, sehingga penetapan Renstra BPIW dipercepat menjadi Mei 2025.</p> <p>BPIW telah menyusun seluruh konsep bagian pada Renstra dan terus berkoordinasi atas penyesuaian pada Renstra Kementerian.</p>
	Mendorong tersusunnya Dokumen Renstra/Dokumen Perencanaan yang menjadi percontohan nasional	<p>BPIW menyusun RIDPN (Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional) melalui kegiatan ITDP yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden sebagai acuan pengembangan pariwisata berkelanjutan nasional</p> <p>RIDPN yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden yaitu</p> <ul style="list-style-type: none"> • Presiden Nomor 84 Tahun 2021 tentang RIDPN Lombok-Gili Tramena 2020-2044. • Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2024 tentang RIDPN Borobudur-Yogyakarta sebagai Prambanan 2024-2044. • Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2024 tentang RIDPN Danau Toba 2024-2044. <p>Dokumen Perencanaan Kinerja BPIW berupa RPIW, menjadi dasar untuk penyusunan Memorandum Program dalam Rapat Koordinasi Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (Rakorbangwil). Rakorbangwil selanjutnya menghasilkan Kesepakatan Program Keterpaduan yang menjadi acuan bagi Unit Organisasi teknis di Kementerian PU, K/L terkait, serta pemerintah daerah.</p> <p>Pada tahun 2024, Rakorbangwil melibatkan 35 perwakilan pemerintah daerah, 10 K/L, dan Unit Organisasi di Kementerian PU, pembahasan meliputi kesepakatan kawasan prioritas dan kebutuhan program dukungan Kementerian PU untuk Tahun Anggaran 2026.</p>

No.	Catatan Hasil Evaluasi	Tindak lanjut
2 Pengukuran Kinerja		
2.b	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan Menyusun Laporan Kinerja dan Laporan Monitoring dan Evaluasi Bulanan yang dilengkapi dengan verifikasi pimpinan secara berjenjang	Penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja telah dilengkapi dengan bukti reviu berjenjang pada TW III dan TW IV
2.c	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian <i>Reward and Punishment</i> , serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien Mengimplementasikan pengukuran kinerja dan capaian kinerja individu sebagai dasar pemberian tunjangan kinerja/penghasilan.	Pemberian tunjangan kinerja pegawai BPIW berdasarkan kinerja telah diterapkan mulai Bulan Januari 2024 berdasarkan hasil evaluasi kinerja pegawai per triwulan (SKP) Penghargaan apresiasi sebagai bentuk <i>reward</i> kinerja diberikan kepada pegawai yang telah memberikan kontribusi dalam pelaksanaan pekerjaan.
	Menyusun Laporan Monitoring dan Evaluasi Bulanan secara lengkap sesuai dengan Perjanjian Kinerja sebagai acuan kegiatan untuk mendukung capaian kinerja.	Penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Bulanan 2024 telah dilengkapi dengan rencana tindak lanjut atas permasalahan tiap bulan. Telah disusun Revisi Rencana Aksi sesuai dengan perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 pada Bulan Juli 2024.
3 Pelaporan Kinerja		
3.a	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja. Mendokumentasikan bukti bahwa penyusunan Laporan Kinerja telah dilaksanakan Reviu secara berjenjang dan diterima oleh pimpinan di atasnya.	Penyusunan Laporan Kinerja telah dilengkapi dengan bukti reviu berjenjang dan disampaikan kepada pimpinan di atasnya
3.b	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaannya. Dokumen Laporan Kinerja agar menampilkan inovasi dan dijadikan percontohan. Selain itu, upaya efisiensi atas anggaran agar disajikan secara rinci agar terlihat selaras dengan perjanjian kinerja.	Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024 telah dilengkapi dengan upaya efisiensi atas anggaran dan sumber daya yang dimiliki.
4 Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal		
4.a	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan Mendokumentasikan bukti keterlibatan pimpinan dalam melakukan evaluasi kinerja internal.	Pelaksanaan tindak lanjut akan dilakukan pada saat Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal BPIW TA 2024.
4.c	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi kinerja Mendokumentasikan bukti keterlibatan pimpinan dalam melakukan evaluasi kinerja internal	BPIW telah menindaklanjuti/ mengimplementasikan beberapa Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal BPIW TA 2023 pada pelaksanaan kegiatan Tahun 2024

Berdasarkan hasil evaluasi, terdapat 9 poin rekomendasi yang disampaikan oleh Inspektorat Jenderal untuk ditindaklanjuti oleh BPIW dalam pelaksanaan SAKIP BPIW TA 2024. 7 rekomendasi telah ditindaklanjuti agar dapat memberikan perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Terkait Pelaporan Kinerja, terdapat 2 (dua) poin rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti yaitu 1) Mendokumentasikan bukti bahwa penyusunan Laporan Kinerja telah dilaksanakan Reviu secara berjenjang dan diterima oleh pimpinan di atasnya; dan 2) Dokumen Laporan Kinerja agar menampilkan inovasi dan dijadikan percontohan. Selain itu, upaya efisiensi atas anggaran agar disajikan secara rinci agar terlihat selaras dengan perjanjian kinerja.

Sebagai bentuk tindaklanjut, telah disusun Lembar kendali revidi Laporan Kinerja BPIW 2024 yang dilakukan secara berjenjang sebagaimana hasil pembahasan oleh Tim Evaluator Inspektorat Jenderal. Pada Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024 telah dilengkapi dengan upaya efisiensi atas anggaran dan sumber daya yang dimiliki yang telah ditampilkan pada Bab 3.5 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.

3.2 Capaian Kinerja BPIW

Capaian kinerja BPIW menggambarkan kinerja BPIW pada Sasaran Strategis, Sasaran Program, dan Sasaran Kegiatan pada tahun 2024. Sasaran tersebut merupakan target BPIW sebagaimana yang tertuang pada Revisi Renstra BPIW 2020-2024. Dalam pelaksanaan pencapaian target sasaran tersebut, terdapat faktor-faktor yang menjadi penyebab keberhasilan dan kegagalan yang akan dijelaskan sebagai berikut.

3.3.1 Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Sasaran Strategis BPIW yaitu Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis dengan IKSS yaitu Tingkat Keselarasan Dukungan di Kawasan Strategis, merupakan capaian yang diperoleh dari kawasan yang disepakati untuk didukung bersama oleh K/L terkait. Penyepakatan kawasan tersebut dilakukan melalui kegiatan Rakorbangwil. Tabel 3.2 menunjukkan Capaian Kinerja Sasaran Strategis BPIW tahun 2024.

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Sasaran Strategis	Target (%)	Capaian (%)	Kinerja (%)
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya			
Tingkat Keselarasan Dukungan Infrastruktur di Kawasan Strategis	82,50	88,35	107,09

Sangat Memuaskan

Analisis Capaian Kinerja IKSS

Pada tahun 2024, pelaksanaan rangkaian Rakorbangwil dimulai pada bulan Oktober. Rangkaian kegiatan dimulai dari perumusan kawasan dan program prioritas tahun 2026. Pelaksanaan Rakorbangwil yang kemudian melibatkan 35 perwakilan pemerintah daerah, 10 K/L, dan Unit Organisasi di Kementerian PU dilakukan pada bulan November. Sebagaimana arahan Menteri PU, program dan prioritas diarahkan untuk fokus pada pembangunan swasembada pangan, pemerataan wilayah, mengoptimalkan pemanfaatan infrastruktur yang sudah terbangun, serta memperkuat kerja sama lintas kementerian dan pemerintah daerah.

Usulan rancangan kawasan dan program yang disusun terdiri dari kontribusi terhadap pemenuhan target indikator utama infrastruktur PU dalam RPJPN 2045, Asta Cita, Rancangan Awal RPJMN 2025-2029, dan RPIW, sehingga fokus program yang dirumuskan untuk pembangunan infrastruktur tahun 2026 antara lain dukungan terhadap 1) Swasembada Pangan, Air, dan Energi; 2) Hilirisasi dan Industrialisasi; 3) Pemerataan Wilayah; 4) Perkotaan; 5) Pariwisata Berkelanjutan; 6) Infrastruktur berketahanan iklim.

Pembahasan meliputi 141 kawasan dengan hasil kesepakatan program pembangunan infrastruktur PU tahun 2026 terdiri atas:

- 357 program Sumber Daya Air sebesar Rp38.503.983.720;
- 306 program Bina Marga sebesar Rp42.000.683.245;
- 197 program Cipta Karya sebesar Rp11.889.128.826.

Adapun dari 141 kawasan tersebut, terdapat 2 kawasan baru yang termasuk dari target 249 kawasan pada Renstra PUPR 2020-2024. Sehingga akumulasi kawasan capaian **Indikator Kinerja Sasaran Strategis BPIW sebesar 220 kawasan atau 88,35%**. Nilai tersebut melebihi dari target capaian yang telah ditetapkan yaitu 82,5% sehingga kinerja pada tahun 2024 adalah 107,98%. Daftar kawasan tersebut adalah sebagaimana Tabel 3.3.

Tabel 3.3 Daftar Kawasan Capaian Sasaran Strategis

No	Fungsi	Kluster Kawasan	Pulau	Tahun
1	KSPN	DPP/KEK Tanjung Kelayang	Sumatra	2020
2	Metropolitan	Patungraya Agung	Sumatra	2020
3	KEK	KEK Tanjung Api-api	Sumatra	2020
4	Kota Kecil	Sabang	Sumatra	2020
5	PKW	Langsa	Sumatra	2020
6	PKW	Lhokseumawe	Sumatra	2020
7	PKW	Pematang Siantar	Sumatra	2020
8	PKW	Sibolga	Sumatra	2020
9	PKN	Dumai	Sumatra	2020
10	PKN	Pekanbaru	Sumatra	2020
11	PKW	Bukittinggi	Sumatra	2020
12	PKN	Padang	Sumatra	2020
13	PKW	Tanjung Pinang	Sumatra	2020
14	PKN	Pangkal Pinang	Sumatra	2020
15	PKN	Bengkulu	Sumatra	2020
16	Pulau 3T	Pulau Enggano	Sumatra	2020
17	KI	KI Tanggamus	Sumatra	2020
18	PKN	Bandar Lampung	Sumatra	2020
19	PKW	Lubuk Linggau	Sumatra	2020
20	PKW	Prabumulih	Sumatra	2020
21	KEK	KEK Arun Lhokseumawe	Sumatra	2020
22	Metropolitan	Mebidangro	Sumatra	2020
23	KI	KI Kuala Tanjung	Sumatra	2020
24	KI	KEK/KI Sei Mangkei	Sumatra	2020
25	KSPN	DPP Danau Toba dan sekitarnya	Sumatra	2020
26	KSPN	DPP Baru Batam-Bintan	Sumatra	2020
27	PKN	Batam	Sumatra	2020
28	KEK	KEK Galang Batang	Sumatra	2020
29	KI	KI Bintan Aerospace	Sumatra	2020
30	KI	KI Galang Batang	Sumatra	2020
31	PKSN	PKSN Ranai	Sumatra	2020
32	Pulau 3T	Pulau Natuna	Sumatra	2020
33	PKN	Jambi	Sumatra	2020
34	KI	Kemingking	Sumatra	2020
35	PKSN	Jagoi Babang	Kalimantan	2020
36	PKN	Pontianak	Kalimantan	2020
37	Metropolitan	Banjarbakula	Kalimantan	2020
38	PKN	Palangkaraya	Kalimantan	2020
39	PKN	Samarinda	Kalimantan	2020
40	PKN	Balikpapan	Kalimantan	2020
41	KEK	KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan	Kalimantan	2020
42	PKW	Singkawang	Kalimantan	2020
43	KI	KI Jorong	Kalimantan	2020
44	KI	KI Batu Licin	Kalimantan	2020
45	PKN	Tarakan	Kalimantan	2020
46	Kota Baru	Kota Baru Tanjung Selor	Kalimantan	2020

No	Fungsi	Kluster Kawasan	Pulau	Tahun
47	KI	KI Tanah Kuning	Kalimantan	2020
48	PKSN	PKSN Nunukan	Kalimantan	2020
49	PKSN	PKSN Tou Lumbis	Kalimantan	2020
50	PKSN	PKSN Long Midang	Kalimantan	2020
51	PKSN	PKSN Long Nawang	Kalimantan	2020
52	KI	KI Ketapang	Kalimantan	2020
53	Kota Baru	Kota Baru Maja	Jawa	2020
54	KEK	KEK Tanjung Lesung	Jawa	2020
55	Metropolitan	Jabodetabekpunjur	Jawa	2020
56	KSPN	DPP Bandung-Halimun- Ciletuh	Jawa	2020
57	Metropolitan	Cekungan Bandung	Jawa	2020
58	Metropolitan	Kedungsepur	Jawa	2020
59	KEK	KEK Kendal	Jawa	2020
60	KSPN	DPP Borobudur dan sekitarnya	Jawa	2020
61	PKN	Yogyakarta	Jawa	2020
62	PKW	Magelang	Jawa	2020
63	Metropolitan	Gerbangkertosusila	Jawa	2020
64	KI	KI Madura	Jawa	2020
65	KSPN	DPP Bromo-Tengger-Semeru	Jawa	2020
66	KSPN	DPP Baru Banyuwangi	Jawa	2020
67	PKN	Cilegon	Jawa	2020
68	PKN	Cirebon	Jawa	2020
69	PKW	Pekalongan	Jawa	2020
70	Kabupaten	Cilacap	Jawa	2020
71	PKW	Probolinggo	Jawa	2020
72	Kawasan Bencana	Kab. Pandeglang	Jawa	2020
73	Kawasan Bencana	Kab. Serang	Jawa	2020
74	Metropolitan	Sarbagita	Bali-Nustra	2020
75	KSPN	DPP Lombok- Mandalika	Bali-Nustra	2020
76	KEK	KEK Mandalika	Bali-Nustra	2020
77	Metropolitan	Mataram Raya	Bali-Nustra	2020
78	Daerah Tertinggal	Lombok Utara	Bali-Nustra	2020
79	PKN	Kupang	Bali-Nustra	2020
80	PKSN	PKSN Atambua	Bali-Nustra	2020
81	PKSN	PKSN Kefamenanu	Bali-Nustra	2020
82	Daerah Tertinggal	Kupang	Bali-Nustra	2020
83	KSPN	DPP Labuan Bajo	Bali-Nustra	2020
84	Kawasan Bencana	Kota Bima	Bali-Nustra	2020
85	Daerah Tertinggal	Rote Ndao	Bali-Nustra	2020
86	Kawasan Bencana	Pulau Lombok	Bali-Nustra	2020
87	Metropolitan	Mamminasata	Sulawesi	2020
88	KSPN	DPP Baru Toraja- Selayar- Makassar dan sekitarnya	Sulawesi	2020
89	PKN	Palu	Sulawesi	2020
90	KEK	KEK Palu	Sulawesi	2020
91	KI	KI Palu	Sulawesi	2020
92	Kawasan Bencana	Kota Palu	Sulawesi	2020
93	Kawasan Bencana	Kab. Sigi	Sulawesi	2020

No	Fungsi	Kluster Kawasan	Pulau	Tahun
94	Kawasan Bencana	Kab. Donggala	Sulawesi	2020
95	KSPN	DPP Wakatobi	Sulawesi	2020
96	PKN	Kendari	Sulawesi	2020
97	KSPN	KEK/DPP Baru Manado- Likupang	Sulawesi	2020
98	Metropolitan	Bimindo	Sulawesi	2020
99	KI	KI Bitung	Sulawesi	2020
100	PKN	Gorontalo	Sulawesi	2020
101	PKN	Mamuju	Sulawesi	2020
102	KI	KI Takalar	Sulawesi	2020
103	PKW	Palopo	Sulawesi	2020
104	PKW	Parepare	Sulawesi	2020
105	Daerah Tertinggal	Tojo Una – Una	Sulawesi	2020
106	Pulau 3T	Pulau Muna	Sulawesi	2020
107	PKSN	PKSN Melonguane	Sulawesi	2020
108	Pulau 3T	Pulau Buton	Sulawesi	2020
109	Kota Baru	Kota Baru Sofifi	Maluku	2020
110	Daerah Tertinggal	Seram Bagian Barat	Maluku	2020
111	Daerah Tertinggal	Seram Bagian Timur	Maluku	2020
112	KSPN	DPP Morotai	Maluku	2020
113	KEK	KEK Morotai	Maluku	2020
114	PKSN	PKSN Daruba	Maluku	2020
115	Pulau 3T	Pulau Morotai	Maluku	2020
116	PKN	Ambon	Maluku	2020
117	PKW	Tual	Maluku	2020
118	Daerah Tertinggal	Buru Selatan	Maluku	2020
119	Pulau 3T	Pulau Wetar	Maluku	2020
120	Pulau 3T	Pulau Aru	Maluku	2020
121	Pulau 3T	Pulau Buru	Maluku	2020
122	Pulau 3T	Pulau Seram	Maluku	2020
123	Pulau 3T	Pulau Kei Besar	Maluku	2020
124	Pulau 3T	Pulau Moa	Maluku	2020
125	Daerah Tertinggal	Kepulauan Sula	Maluku	2020
126	PKN	Ternate	Maluku	2020
127	KI	Teluk Weda	Maluku	2020
128	Daerah Tertinggal	Kepulauan Aru	Maluku	2020
129	Pulau 3T	Pulau Babar	Maluku	2020
130	Daerah Tertinggal	Maluku Barat Daya	Maluku	2020
131	PKSN	PKSN Merauke	Papua	2020
132	Wilayah Adat	Laa Pago	Papua	2020
133	Wilayah Adat	Mee Pago	Papua	2020
134	Wilayah Adat	Saereri	Papua	2020
135	Wilayah Adat	Tabi	Papua	2020
136	Wilayah Adat	Anim Ha	Papua	2020
137	Daerah Tertinggal	Asmat	Papua	2020
138	Daerah Tertinggal	Boven Digoel	Papua	2020
139	Daerah Tertinggal	Deiyai	Papua	2020
140	Daerah Tertinggal	Dogiyai	Papua	2020

No	Fungsi	Kluster Kawasan	Pulau	Tahun
141	Daerah Tertinggal	Intan Jaya	Papua	2020
142	Daerah Tertinggal	Jayawijaya	Papua	2020
143	Daerah Tertinggal	Keerom	Papua	2020
144	Daerah Tertinggal	Lanny Jaya	Papua	2020
145	Daerah Tertinggal	Mamberamo Raya	Papua	2020
146	Daerah Tertinggal	Mamberamo Tengah	Papua	2020
147	Daerah Tertinggal	Mappi	Papua	2020
148	Daerah Tertinggal	Nabire	Papua	2020
149	Daerah Tertinggal	Nduga	Papua	2020
150	Daerah Tertinggal	Paniai	Papua	2020
151	Daerah Tertinggal	Pegunungan Bintang	Papua	2020
152	Daerah Tertinggal	Puncak	Papua	2020
153	Daerah Tertinggal	Puncak Jaya	Papua	2020
154	Daerah Tertinggal	Tolikara	Papua	2020
155	Daerah Tertinggal	Waropen	Papua	2020
156	Daerah Tertinggal	Yahukimo	Papua	2020
157	Daerah Tertinggal	Yalimo	Papua	2020
158	Daerah Tertinggal	Supiori	Papua	2020
159	Pulau 3T	Pulau Biak	Papua	2020
160	Kota Baru	Kota Baru Sorong	Papua	2020
161	KEK	KEK Sorong	Papua	2020
162	KSPN	DPP Raja Ampat	Papua	2020
163	KSPN	DPP Baru Biak-Teluk Cenderawasih	Papua	2020
164	KI	KI Teluk Bintuni	Papua	2020
165	Wilayah Adat	Domberay	Papua	2020
166	Wilayah Adat	Bomberay	Papua	2020
167	Daerah Tertinggal	Maybrat	Papua	2020
168	Daerah Tertinggal	Sorong	Papua	2020
169	Daerah Tertinggal	Sorong Selatan	Papua	2020
170	Daerah Tertinggal	Tambrauw	Papua	2020
171	Daerah Tertinggal	Teluk Bintuni	Papua	2020
172	Daerah Tertinggal	Teluk Wondama	Papua	2020
173	Daerah Tertinggal	Pegunungan Arfak	Papua	2020
174	Daerah Tertinggal	Manokwari Selatan	Papua	2020
175	PKN	Jayapura	Papua	2020
176	PKSN	PKSN Jayapura	Papua	2020
177	PKSN	PKSN Tanah Merah	Papua	2020
178	PKN	Banda Aceh	Sumatra	2021
179	PKSN	Sabang	Sumatra	2021
180	Pulau 3T	Pulau Nias	Sumatra	2021
181	KI	Sadai	Sumatra	2021
182	KI	Tenayan	Sumatra	2021
183	PKSN	Bengkalis	Sumatra	2021
184	KSPN	DPP Baru Padang-Bukittinggi	Sumatra	2021
185	PKSN	PKSN Paloh Aruk	Kalimantan	2021
186	IKN	Ibu Kota Negara	Kalimantan	2021
187	KI	Surya Borneo	Kalimantan	2021

No	Fungsi	Kluster Kawasan	Pulau	Tahun
188	KSPN	DPP Baru Sambas - Slingkawang	Kalimantan	2021
189	PKN	Serang	Jawa	2021
190	KSPN	DPP Revitalisasi Bali	Bali-Nustra	2021
191	Daerah Tertinggal	Belu	Bali-Nustra	2021
192	Daerah Tertinggal	Malaka	Bali-Nustra	2021
193	Daerah Tertinggal	Manggarai Timur	Bali-Nustra	2021
194	Daerah Tertinggal	Sumba Barat	Bali-Nustra	2021
195	Daerah Tertinggal	Sumba Barat Daya	Bali-Nustra	2021
196	Daerah Tertinggal	Sumba Timur	Bali-Nustra	2021
197	Daerah Tertinggal	Kalabahi Alor	Bali-Nustra	2021
198	Daerah Tertinggal	Lembata	Bali-Nustra	2021
199	Daerah Tertinggal	Sabu Raijua	Bali-Nustra	2021
200	Daerah Tertinggal	Kepulauan Mentawai	Sumatra	2022
201	PKW	KPPN Kediri (Lingkarwilis)	Jawa	2022
202	Pulau 3T	Pulau Simeulue	Sumatra	2023
203	Daerah Tertinggal	Nias	Sumatra	2023
204	Daerah Tertinggal	Nias Barat	Sumatra	2023
205	Daerah Tertinggal	Nias Selatan	Sumatra	2023
206	Daerah Tertinggal	Nias Utara	Sumatra	2023
207	Pulau 3T	Pulau Mentawai	Sumatra	2023
208	KI	Tanjung Enim	Sumatra	2023
209	KSPN	DPP Baru Derawan- Berau	Kalimantan	2023
210	Daerah Tertinggal	Sumba Tengah	Bali-Nustra	2023
211	KSPN	Prambanan	Jawa	2023
212	Metropolitan	Cirebon Raya/Rebana	Jawa	2023
213	PKN	Surakarta	Jawa	2023
214	KI	Morowali	Sulawesi	2023
215	Kawasan Pangan	Donggala	Sulawesi	2023
216	Kawasan Pangan	Sigi	Sulawesi	2023
217	Daerah Tertinggal	Kepulauan Tanimbar	Maluku	2023
218	Pulau 3T	Pulau Sumba	Bali-Nustra	2023
219	KI	KI Ladang/Banda Aceh dsk	Sumatra	2024
220	KSPN	Pansela DIY (Bantul)	Jawa	2024

Analisis Faktor Pendukung Keberhasilan dan Permasalahan IKSS

Target kinerja SS melalui rangkaian kegiatan Rakorbangwil dapat tercapai beberapa akibat faktor eksternal dan faktor internal antara lain sebagai berikut:

Faktor Eksternal IKSS

- Peran Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah yang mendorong sinergi dan kolaborasi K/L baik pusat maupun daerah dalam mendukung pembangunan infrastruktur yang tepat sasaran, efisien, produktif, dan berdampak.
- Peran Menteri PU dalam mendorong Rakorbangwil sebagai wadah untuk memperkuat kerja sama lintas K/L dalam mendukung target nasional dan optimalisasi infrastruktur terbangun.
- K/L mitra dalam memberikan dukungan data dan informasi dalam rangka penyusunan program keterpaduan infrastruktur PU pada kawasan prioritas. Serta Pemerintah Daerah dalam memberikan dukungan data dan informasi serta pendampingan kunjungan lapangan dalam rangka penyusunan program keterpaduan infrastruktur PU pada kawasan prioritas.
- Peran pimpinan unit organisasi Kementerian PU dalam mendukung penyusunan program keterpaduan infrastruktur PUPR melalui internalisasi dalam organisasi serta penyediaan data dan informasi untuk kepentingan analisis prioritas program.

Faktor Internal IKSS

- RPIW Provinsi yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri menjadi salah satu pertimbangan dalam penyusunan program keterpaduan infrastruktur PU pada kawasan prioritas. Sehingga penapisan program dan kawasan dapat lebih baik dengan dasar perencanaan yang komprehensif untuk mendukung skenario pembangunan.
- Optimalisasi pemanfaatan Sistem Informasi Pemrograman (SIPro) dalam membantu proses keterpaduan pemrograman infrastruktur PU, mulai dari perencanaan, pemrograman hingga evaluasi. Selain itu, SIPro juga digunakan dalam proses digitalisasi Rencana Pembangunan Infrastruktur Wilayah (RPIW) dan mendukung interoperabilitas data dengan sistem informasi pemrograman lainnya antar unit organisasi teknis.
- Peran seluruh pegawai, baik PNS, Non PNS, dan keterlibatan Tenaga Ahli (Kontrak Individu) dalam meningkatkan dan menjaga koordinasi penyusunan program keterpaduan infrastruktur PUPR antara BPIW dengan mitra internal PUPR (Biro PAKLN, Unit Organisasi Teknis) serta eksternal PUPR (Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Swasta).

Adapun permasalahan atau faktor yang menghambat tercapainya IKSS BPIW antara lain sebagai berikut:

Permasalahan IKSS

- Belum adanya arahan definitif dari RPJMN 2025-2029 yang menjadi acuan penyusunan program tahunan dan arahan prioritas kawasan tahunan pada periode kedepan.
- Terhambatnya pemutakhiran SIPro akibat serangan siber terhadap Pusat Data Nasional sebagai server Kementerian PU.
- Terlambatnya input Rencana Aksi RPIW sebagai dasar penyusunan Memorandum Program akibat masih perlunya dilakukan iterasi terhadap penyeragaman data serta konfirmasi prioritas.
- Pelaksanaan Rakorbangwil dilakukan pada masa transisi pemerintahan menghadapi berbagai tantangan. Salah satu kendala utamanya adalah kurangnya partisipasi aktif dari K/L yang seharusnya terlibat. Hal ini disebabkan oleh ketidakpastian di internal K/L dan situasi transisi seringkali menyebabkan prioritas K/L bergeser, sehingga fokus terhadap forum seperti Rakorbangwil menjadi kurang optimal.
- Beberapa K/L belum memiliki siklus perencanaan program sesuai kerangka waktu T-2 (dua tahun sebelum tahun pelaksanaan), menyebabkan kurangnya data awal yang diperlukan untuk sinkronisasi.

Meskipun terdapat permasalahan-permasalahan tersebut, capaian IKSS tahun 2024 tetap tercapai melebihi dari target yang ditetapkan.

3.3.2 Capaian Kinerja Sasaran Program

SP BPIW yang merupakan target *outcome* dari Kepala BPIW yang terdiri atas 2 (dua) IKSP yaitu 1) Tingkat Pemanfaatan Kebijakan, Strategi Perencanaan dan Pemrograman dan 2) Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya. Pencapaian IKSP 1 Tingkat Pemanfaatan Kebijakan, Strategi Perencanaan dan Pemrograman merupakan agregasi dari 3 (tiga) IKSK di Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I, Wilayah II, dan Wilayah III. Adapun IKSP 2 merupakan agregasi atas capaian IKSK Sekretariat BPIW. Capaian Kinerja SP BPIW Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.4 Capaian Kinerja Sasaran Program

Sasaran Strategis	Target (%)	Capaian (%)	Kinerja (%)
Meningkatnya Dukungan Manajemen Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya			
IKSP 1-1 Tingkat Pemanfaatan Kebijakan, Strategi Perencanaan dan Pemrograman	100	100	100
IKSP 1-2 Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya	94,58	97,55	103,14

 Sangat Memuaskan

1. IKSP 1-1 Tingkat Pemanfaatan Kebijakan, Strategi Perencanaan dan Pemrograman

Analisis Capaian Kinerja IKSP 1-1

Penanganan perencanaan dan pemrograman infrastruktur PUPR pada kawasan strategis pada periode 2015-2023 telah mencapai 249 kawasan yang merupakan seluruh target penanganan kawasan yang ditetapkan pada Renstra BPIW 2020-2024. Dengan demikian pada tahun 2024, BPIW mencapai capaian **Indikator Kinerja Sasaran Program 1-1 sebesar 100% (249 kawasan)** dengan kinerja 100%.

Pelaksanaan proses perencanaan pada tahun 2024 fokus pada penetapan RPIW 38 Provinsi sebagaimana telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri PUPR Nomor: 817/KPTS/M/2024 tentang Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah. Selain itu, BPIW berfokus pada Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah untuk Kawasan Prioritas dengan skala perencanaan yang lebih rinci, terdapat 6 dokumen yang disusun meliputi kawasan 1) Kawasan Penajam Paser Utara; 2) KSPN Dieng, Pantai Selatan Yogyakarta, dan KSPN Karst Gunung Kidul; 3) Daerah Tertinggal Sumba Tengah (Pulau Sumba) dan Lembata (Pulau Flores); 4) Kawasan Industri Pomalaa dan Kawasan Industri Mongondow; 5) Kawasan Industri Obi dan Kawasan Industri Buli; dan Kawasan Pusat Pemerintahan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua. Kawasan tersebut diantaranya telah disusun dokumen perencanaannya sehingga bersifat pemutakhiran dan perincian, serta sebagian kawasan lainnya yang bukan termasuk target dalam Renstra BPIW 2020-2024. Daftar lengkap kawasan untuk ditangani perencanaan dan pemrogramannya sebagaimana target SP adalah sebagai berikut.

Tabel 3.5 Daftar Kawasan Capaian Sasaran Program

No	Fungsi	Kluster Kawasan	Pulau	Tahun
Wilayah I (Pulau Sumatra dan Kalimantan)				
1	Metropolitan	Patungraya Agung	Sumatra	2015-2019
2	KEK	KEK Tanjung Api-api	Sumatra	2015-2019
3	Kota Kecil	Sabang	Sumatra	2015-2019
4	PKW	Langsa	Sumatra	2015-2019
5	PKW	Lhokseumawe	Sumatra	2015-2019
6	PKW	Pematang Siantar	Sumatra	2015-2019
7	PKW	Sibolga	Sumatra	2015-2019
8	PKN	Dumai	Sumatra	2015-2019
9	PKN	Pekanbaru	Sumatra	2015-2019
10	PKW	Bukittinggi	Sumatra	2015-2019
11	PKN	Padang	Sumatra	2015-2019
12	PKW	Tanjung Pinang	Sumatra	2015-2019
13	PKN	Pangkal Pinang	Sumatra	2015-2019
14	Pulau 3T	Pulau Enggano	Sumatra	2015-2019
15	PKN	Pontianak	Kalimantan	2015-2019
16	PKN	Palangkaraya	Kalimantan	2015-2019
17	PKN	Samarinda	Kalimantan	2015-2019
18	PKN	Balipapan	Kalimantan	2015-2019
19	KEK	KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan	Kalimantan	2015-2019
20	PKW	Singkawang	Kalimantan	2015-2019
21	KI	KI Jorong	Kalimantan	2015-2019
22	KI	KI Batu Licin	Kalimantan	2015-2019
23	PKN	Tarakan	Kalimantan	2015-2019
24	KEK	KEK Arun Lhokseumawe	Sumatra	2020
25	Metropolitan	Mebidangro	Sumatra	2020
26	KI	KI Kuala Tanjung	Sumatra	2020
27	KI	KEK/KI Sei Mangkei	Sumatra	2020
28	KSPN	DPP Danau Toba dan sekitarnya	Sumatra	2020

No	Fungsi	Kluster Kawasan	Pulau	Tahun
29	KSPN	DPP Baru Batam-Bintan	Sumatra	2020
30	PKN	Batam	Sumatra	2020
31	KEK	KEK Galang Batang	Sumatra	2020
32	KI	KI Bintan Aerospace	Sumatra	2020
33	KI	KI Galang Batang	Sumatra	2020
34	PKN	Jambi	Sumatra	2020
35	Kota Baru	Kota Baru Tanjung Selor	Kalimantan	2020
36	KI	KI Tanah Kuning	Kalimantan	2020
37	PKSN	PKSN Tou Lumbis	Kalimantan	2020
38	PKSN	PKSN Long Midang	Kalimantan	2020
39	PKSN	PKSN Long Nawang	Kalimantan	2020
40	KI	KI Ketapang	Kalimantan	2020
41	KI	Ladong	Sumatra	2021
42	PKN	Banda Aceh	Sumatra	2021
43	PKSN	Sabang	Sumatra	2021
44	Pulau 3T	Pulau Simeuleu	Sumatra	2021
45	PKW	Gunung Sitoli	Sumatra	2021
46	Daerah Tertinggal	Nias	Sumatra	2021
47	Daerah Tertinggal	Nias Barat	Sumatra	2021
48	Daerah Tertinggal	Nias Selatan	Sumatra	2021
49	Daerah Tertinggal	Nias Utara	Sumatra	2021
50	Pulau 3T	Pulau Nias	Sumatra	2021
51	Daerah Tertinggal	Kep. Mentawai	Sumatra	2021
52	Pulau 3T	Pulau Mentawai	Sumatra	2021
53	KI	Sadai	Sumatra	2021
54	KI	Pesawaran	Sumatra	2021
55	KI	Katibung	Sumatra	2021
56	KI	Kemingking	Sumatra	2021
57	KI	Tanjung Enim	Sumatra	2021
58	KI	Way Pisang	Sumatra	2021
59	PKN	Bengkulu	Sumatra	2021
60	PKN	Bandar Lampung	Sumatra	2021
61	PKW	Lubuk Linggau	Sumatra	2021
62	PKW	Prabumulih	Sumatra	2021
63	KI	KI Tanggamus	Sumatra	2021
66	PKSN	PKSN Ranai	Sumatra	2021
67	Pulau 3T	Pulau Natuna	Sumatra	2021
68	KSPN	DPP/KEK Tanjung Kelayang/Bangka Belitung	Sumatra	2021
64	PKSN	PKSN Nunukan	Kalimantan	2021
65	Metropolitan	Banjarbakula	Kalimantan	2021
69	PKSN	Paloh Aruk	Kalimantan	2021
70	PKSN	Jagoibabang	Kalimantan	2021
71	KI	Tenayan	Sumatra	2022
72	PKSN	Bengkalis	Sumatra	2022
73	KI	Tanjung Buton	Sumatra	2022
74	KSPN	DPP Baru Padang Bukittinggi	Sumatra	2022
75	PKW	Solok	Sumatra	2022

No	Fungsi	Kluster Kawasan	Pulau	Tahun
76	Daerah Tertinggal	Musi Rawas Utara	Sumatra	2022
77	Daerah Tertinggal	Pesisir Barat	Sumatra	2022
78	KSPN	DPP Baru Derawan-Berau	Kalimantan	2022
79	IKN	Ibu Kota Negara	Kalimantan	2022
80	KI	Surya Borneo	Kalimantan	2022
81	KSPN	Sambas Singkawang	Kalimantan	2022
82	Kawasan Lumbang Pangan	Tapin	Kalimantan	2023
Wilayah II (Pulau Jawa, Pulau Bali, dan Kepulauan Nusa Tenggara)				
1	Kota Baru	Kota Baru Maja	Jawa	2015-2019
2	KEK	KEK Tanjung Lesung	Jawa	2015-2019
3	Metropolitan	Cekungan Bandung	Jawa	2015-2019
4	KEK	KEK Kendal	Jawa	2015-2019
5	PKW	Magelang	Jawa	2015-2019
6	KI	KI Madura	Jawa	2015-2019
7	KSPN	DPP Baru Banyuwangi	Jawa	2015-2019
8	PKN	Cilegon	Jawa	2015-2019
9	PKN	Cirebon	Jawa	2015-2019
10	PKW	Pekalongan	Jawa	2015-2019
11	PKW	Probolinggo	Jawa	2015-2019
12	Metropolitan	Sarbagita	Bali-Nustra	2015-2019
13	KSPN	DPP Lombok - Mandalika	Bali-Nustra	2015-2019
14	KEK	KEK Mandalika	Bali-Nustra	2015-2019
15	Metropolitan	Mataram Raya	Bali-Nustra	2015-2019
16	Daerah Tertinggal	Lombok Utara	Bali-Nustra	2015-2019
17	PKN	Kupang	Bali-Nustra	2015-2019
18	Daerah Tertinggal	Kupang	Bali-Nustra	2015-2019
19	KSPN	DPP Labuan Bajo	Bali-Nustra	2015-2019
20	Kawasan Bencana	Kota Bima	Bali-Nustra	2015-2019
21	Daerah Tertinggal	Rote Ndao	Bali-Nustra	2015-2019
22	Kawasan Bencana	Kab. Pandeglang	Jawa	2020
23	Kawasan Bencana	Kab. Serang	Jawa	2020
24	Kawasan Bencana	Pulau Lombok	Bali-Nustra	2020
25	KEK	KEK Bekraf Karawang	Jawa	2021
26	Daerah Tertinggal	Timor Tengah Selatan	Bali-Nustra	2021
27	Daerah Tertinggal	Belu	Bali-Nustra	2021
28	Daerah Tertinggal	Malaka	Bali-Nustra	2021
29	KEK	KEK Bekraf Maja-Rangkas	Jawa	2021
30	PKN	Serang	Jawa	2021
31	Metropolitan	Jabodetabekpunjur	Jawa	2021
32	PKW	Sukabumi	Jawa	2021
33	PKW	KPPN Kediri (Lingkarwilis)	Jawa	2021
34	PKN	Malang	Jawa	2021
35	KSPN	DPP Bromo-Tengger-Semeru	Jawa	2021
36	Kabupaten	Cilacap	Jawa	2021
37	Metropolitan	KedungSepur	Jawa	2021
38	KSPN	DPP Borobudur dan sekitarnya	Jawa	2021
39	Metropolitan	Gerbangkertosusilo	Jawa	2021

No	Fungsi	Kluster Kawasan	Pulau	Tahun
40	KSPN	DPP Bandung-Halimun-Ciletuh	Jawa	2021
41	PKN	Yogyakarta	Jawa	2021
42	Daerah Tertinggal	Manggarai Timur	Bali-Nustra	2021
43	Daerah Tertinggal	Sumba Barat	Bali-Nustra	2021
44	Daerah Tertinggal	Sumba Barat Daya	Bali-Nustra	2021
45	Daerah Tertinggal	Sumba Tengah	Bali-Nustra	2021
46	Daerah Tertinggal	Sumba Timur	Bali-Nustra	2021
47	Pulau 3T	Pulau Sumba	Bali-Nustra	2021
48	KSPN	DPP Revitalisasi Bali	Bali-Nustra	2021
49	PKSN	Atambua	Bali-Nustra	2021
50	PKSN	Kefamenanu	Bali-Nustra	2021
51	KI	Sumbawa Barat	Bali-Nustra	2021
52.	PKW	Taban	Jawa	2022
53	PKW	Bojonegoro	Jawa	2022
54	PSN	Kulon Progo	Jawa	2022
55	Daerah Tertinggal	Kalabahi Alor	Bali-Nustra	2022
56	Daerah Tertinggal	Lembata	Bali-Nustra	2022
57	Kabupaten	Banjarnegara	Jawa	2022
58	PKN	Surakarta	Jawa	2022
59	PKW	Pasuruan	Jawa	2022
60	PKW	Wonosobo	Jawa	2022
61	KSPN	Prambanan	Jawa	2022
62	KPSN	Gunung Sewu (Kabupaten Gunung Kidul)	Jawa	2022
63	PKW	Trenggalek	Jawa	2022
64	PKL	Nganjuk	Jawa	2022
65	PKL	Ponorogo	Jawa	2022
66	PKW	Madiun	Jawa	2022
67	KSPN	Bantul	Jawa	2022
68	Kawasan Bencana	Pulau Sumbawa	Bali -Nustra	2022
69	Daerah Tertinggal	Sabu Raijua	Bali -Nustra	2022
70	Metropolitan	Rebana	Jawa	2023
Wilayah III (Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua)				
1	Daerah Tertinggal	Seram Bagian Barat	Maluku	2015-2019
2	Daerah Tertinggal	Seram Bagian Timur	Maluku	2015-2019
3	PKN	Palu	Sulawesi	2020
4	KEK	KEK Palu	Sulawesi	2020
5	KI	KI Palu	Sulawesi	2020
6	Kawasan Bencana	Kota Palu	Sulawesi	2020
7	Kawasan Bencana	Kab. Sigi	Sulawesi	2020
8	Kawasan Bencana	Kab. Donggala	Sulawesi	2020
9	PKN	Kendari	Sulawesi	2020
10	KSPN	KEK/DPP Baru Manado-Likupang	Sulawesi	2020
11	KI	KI Bitung	Sulawesi	2020
12	PKN	Gorontalo	Sulawesi	2020
13	PKN	Mamuju	Sulawesi	2020
14	KI	KI Takalar	Sulawesi	2020
15	PKW	Palopo	Sulawesi	2020

No	Fungsi	Kluster Kawasan	Pulau	Tahun
16	PKW	Parepare	Sulawesi	2020
17	Daerah Tertinggal	Tojo Una - Una	Sulawesi	2020
18	Pulau 3T	Pulau Muna	Sulawesi	2020
19	PKSN	PKSN Melonguane	Sulawesi	2020
20	KEK	KEK Morotai	Maluku	2020
21	PKSN	PKSN Daruba	Maluku	2020
22	Pulau 3T	Pulau Morotai	Maluku	2020
23	PKW	Tual	Maluku	2020
24	Daerah Tertinggal	Buru Selatan	Maluku	2020
25	Pulau 3T	Pulau Wetar	Maluku	2020
26	Pulau 3T	Pulau Aru	Maluku	2020
27	Pulau 3T	Pulau Buru	Maluku	2020
28	Pulau 3T	Pulau Seram	Maluku	2020
29	Pulau 3T	Pulau Kei Besar	Maluku	2020
30	Pulau 3T	Pulau Moa	Maluku	2020
31	Daerah Tertinggal	Kepulauan Sula	Maluku	2020
32	PKSN	PKSN Merauke	Papua	2020
33	Wilayah Adat	Mee Pago	Papua	2020
34	Wilayah Adat	Saereri	Papua	2020
35	Wilayah Adat	Tabi	Papua	2020
36	Wilayah Adat	Anim Ha	Papua	2020
37	Daerah Tertinggal	Asmat	Papua	2020
38	Daerah Tertinggal	Boven Digoel	Papua	2020
39	Daerah Tertinggal	Deiyai	Papua	2020
40	Daerah Tertinggal	Dogiyai	Papua	2020
41	Daerah Tertinggal	Intan Jaya	Papua	2020
42	Daerah Tertinggal	Jayawijaya	Papua	2020
43	Daerah Tertinggal	Keerom	Papua	2020
44	Daerah Tertinggal	Lanny Jaya	Papua	2020
45	Daerah Tertinggal	Mamberamo Raya	Papua	2020
46	Daerah Tertinggal	Mamberamo Tengah	Papua	2020
47	Daerah Tertinggal	Mappi	Papua	2020
48	Daerah Tertinggal	Nabire	Papua	2020
49	Daerah Tertinggal	Nduga	Papua	2020
50	Daerah Tertinggal	Paniai	Papua	2020
51	Daerah Tertinggal	Pegunungan Bintang	Papua	2020
52	Daerah Tertinggal	Puncak	Papua	2020
53	Daerah Tertinggal	Puncak Jaya	Papua	2020
54	Daerah Tertinggal	Tolikara	Papua	2020
55	Daerah Tertinggal	Waropen	Papua	2020
56	Daerah Tertinggal	Yahukimo	Papua	2020
57	Daerah Tertinggal	Yalimo	Papua	2020
58	Daerah Tertinggal	Supiori	Papua	2020
59	Pulau 3T	Pulau Biak	Papua	2020
60	Kota Baru	Kota Baru Sorong	Papua	2020
61	KEK	KEK Sorong	Papua	2020
62	KSPN	DPP Raja Ampat	Papua	2020

No	Fungsi	Kluster Kawasan	Pulau	Tahun
63	KI	KI Teluk Bintuni	Papua	2020
64	Wilayah Adat	Domberay	Papua	2020
65	Daerah Tertinggal	Maybrat	Papua	2020
66	Daerah Tertinggal	Sorong	Papua	2020
67	Daerah Tertinggal	Sorong Selatan	Papua	2020
68	Daerah Tertinggal	Tambrau	Papua	2020
69	Daerah Tertinggal	Teluk Bintuni	Papua	2020
70	Daerah Tertinggal	Teluk Wondama	Papua	2020
71	Daerah Tertinggal	Pegunungan Arfak	Papua	2020
72	Daerah Tertinggal	Manokwari Selatan	Papua	2020
73	PKSN	PKSN Tanah Merah	Papua	2020
74	KSPN	DPP Wakatobi	Sulawesi	2021
75	KSPN	DPP Baru Toraja-Selayar-Makassar dan sekitarnya	Sulawesi	2021
76	Metropolitan	Bimindo	Sulawesi	2021
77	Metropolitan	Mamminasata	Sulawesi	2021
78	PKN	Ternate	Maluku	2021
79	Kota Baru	Kota Baru Sofifi	Maluku	2021
80	KI	Teluk Weda	Maluku	2021
81	PKN	Ambon	Maluku	2021
82	KSPN	DPP Morotai	Maluku	2021
83	PKN	Jayapura	Papua	2021
84	PKSN	Jayapura	Papua	2021
85	Wilayah Adat	Laa Pago	Papua	2021
86	Wilayah Adat	Bomberay	Papua	2021
87	KSPN	DPP Baru Biak-Teluk Cenderawasih	Papua	2021
88	KI	KI Mongondow	Sulawesi	2022
89	KI	KI Morowali	Sulawesi	2022
90	Kawasan Pangan	Donggala	Sulawesi	2022
91	Kawasan Pangan	Sigi	Sulawesi	2022
92	Pulau 3T	Pulau Babar	Maluku	2022
93	Daerah Tertinggal	Kepulauan Aru	Maluku	2022
94	Daerah Tertinggal	Maluku Barat Daya	Maluku	2022
95	Daerah Tertinggal	Kab. Kepulauan Tanimbar	Maluku	2022
96	Pulau 3T	Pulau Buton	Sulawesi	2022
97	Pulau 3T	Pulau Selaru	Maluku	2023

Analisis Faktor Pendukung Keberhasilan dan Permasalahan IKSP 1-1

Target kinerja SP melalui penyusunan dokumen perencanaan dan pemrograman dapat tercapai beberapa akibat faktor eksternal dan faktor internal antara lain sebagai berikut:

Faktor Eksternal IKSP 1-1

- a. Peran pemerintah daerah dalam mendukung data dan informasi dalam penanganan kawasan. Pemerintah daerah termasuk dinas terkait baik di seluruh provinsi, kabupaten dan kota dapat melakukan komunikasi dan kerjasama yang baik untuk mendukung pelaksanaan kegiatan. Dukungan pelaksanaan kegiatan dapat terlihat pada saat pelaksanaan survei/kunjungan lapangan serta pengumpulan data pendukung analisis infrastruktur kawasan.
- b. Peran masyarakat di daerah menjadi penting dalam hal pelaksanaan survei lapangan dan pengumpulan data. Masyarakat dapat memberikan informasi yang baik dan membantu dalam hal memberikan informasi mengenai permasalahan yang dihadapi terkait dengan pemanfaatan

infrastruktur kawasan serta potensi-potensi yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan infrastruktur di wilayah tersebut di masa depan.

- c. Peran pihak swasta pada beberapa kawasan menjadi penting khususnya dalam dukungan data dan informasi. Beberapa kawasan khusus seperti kawasan industri atau kawasan pariwisata dikelola langsung oleh pihak swasta, namun tetap mendukung secara maksimal pada saat melakukan kunjungan lapangan serta dukungan data dan informasi yang dibutuhkan.
- d. Peran pimpinan unit organisasi khususnya Ditjen Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya, Perumahan, Pembiayaan Infrastruktur PUPR dalam memberikan masukkan substansi, pengumpulan data dan informasi penyusunan rencana infrastruktur PUPR. Serta Sekretariat Jenderal dalam mendorong penetapan RPIW menjadi Keputusan Menteri.

Faktor Internal IKSP 1-1

- a. Kebijakan Kepala BPIW dalam memberikan dukungan agar RPIW dapat memiliki *legal standing* yang lebih kuat dengan ditetapkan oleh Menteri PUPR sehingga dapat menjadi acuan bagi pembangunan infrastruktur kedepan.
- b. Penyusunan RPIW yang lebih rinci mendorong terwujudnya rencana yang lebih implementatif diterjemahkan dalam program pembangunan khusus kawasan-kawasan prioritas yang diyakini memiliki dampak yang signifikan bagi pengembangan wilayah.
- c. Peran seluruh pegawai baik PNS, Non-PNS, dan keterlibatan Tenaga Ahli (Kontrak Individu) dalam memberikan pelayanan dan kinerja yang maksimal.

Adapun faktor yang menghambat tercapainya IKSP 1-1 BPIW antara lain sebagai berikut:

Permasalahan IKSP 1-1

- a. Dalam penyusunan RPIW Kawasan Prioritas, terdapat permasalahan akibat belum adanya pedoman yang dapat diacu untuk membedakannya dengan RPIW Provinsi dan mengurangi ketidakteraturan substansi antar pusat wilayah.
- b. Pengumpulan data untuk RPIW Kawasan Prioritas terhambat akibat terbatasnya ketersediaan data dan informasi hingga tingkat yang kecamatan dan data spasial historis yang lebih rinci.

Meskipun terdapat permasalahan-permasalahan tersebut, capaian IKSP 1-1 tahun 2024 tetap tercapai sesuai target.

2. IKSP 1-2 Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya

Capaian **Indikator Kinerja Sasaran Program 1-2 Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya 97,55%** dengan kinerja 103,14%. Capaian nilai tersebut, merujuk atas capaian Sekretariat Jenderal, sebagaimana metode perhitungan yang ditetapkan pada Revisi Renstra Kementerian PUPR dan BPIW 2020-2024.

3.3.3 Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan

Sasaran Kegiatan (SK) 1 Meningkatnya Pelaksanaan Perencanaan dan Pemrograman Pembangunan Infrastruktur PUPR memiliki 4 (empat) indikator kinerja. Tiap indikator menggambarkan kinerja dari Unit Kerja Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I, Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah II dan Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah III. Capaian Kinerja SK 1 BPIW Tahun 2024 sebagai berikut.

Tabel 3.6 Capaian Sasaran Kegiatan 1 BPIW

Sasaran Strategis	Target (%)	Capaian (%)	Kinerja (%)
Meningkatnya Pelaksanaan Perencanaan dan Pemrograman Pembangunan Infrastruktur PUPR			
IKSK 1-1 Tingkat kesesuaian kebijakan dan strategi perencanaan dan pemrograman infrastruktur PUPR	85	89,01	104,7
IKSK 1-2 Tingkat kesesuaian penanganan kawasan prioritas melalui perencanaan dan pemrograman infrastruktur PUPR di Pulau Sumatra dan Kalimantan	100	100	100

Sasaran Strategis	Target (%)	Capaian (%)	Kinerja (%)
IKSK 1-3 Tingkat kesesuaian penanganan kawasan prioritas melalui perencanaan dan pemrograman infrastruktur PUPR di Pulau Jawa, Bali, dan Kep. Nusa Tenggara	100	100	100
IKSK 1-4 Tingkat kesesuaian penanganan kawasan prioritas melalui perencanaan dan pemrograman infrastruktur PUPR di Pulau Sulawesi, Papua, dan Kep. Maluku	100	100	100

 Sangat Memuaskan

3.2.3.1. Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan 1

1. IKSK 1-1 Tingkat Kesesuaian Kebijakan dan Strategi Perencanaan dan Pemrograman Infrastruktur PUPR

Analisis Capaian Kinerja IKSK 1-1

Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional mendukung capaian SK 1 Meningkatnya pelaksanaan perencanaan dan pemrograman pembangunan infrastruktur PUPR pada Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 1-1, yaitu 1-1 Tingkat kesesuaian kebijakan dan strategi perencanaan dan pemrograman infrastruktur PUPR. Capaian indikator tersebut dihitung dari kinerja 2 (dua) sub indikator.

Sub indikator-1 memiliki bobot 30% yang menggambarkan tingkat kesesuaian dokumen perencanaan strategis Kementerian PUPR dengan capaian Pembangunan teknis. Sub indikator-1 dihitung dari capaian Rencana Strategis Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jenderal Cipta Karya, dan Direktorat Jenderal Perumahan dibandingkan dengan target Rencana Strategis Kementerian PUPR untuk masing-masing Unit Organisasi teknis tersebut. Pada tahun 2023, **capaian sub indikator-1 tersebut sebesar 29,97%** yang merupakan 30% dari agregasi capaian Direktorat Jenderal Sumber Daya Air sebesar 100%, Direktorat Jenderal Bina Marga sebesar 100%, dan Direktorat Jenderal Cipta Karya sebesar 99,67%, dan Direktorat Jenderal Perumahan 99,92%.

Sub indikator-2 memiliki bobot 70% yang merupakan kinerja penyusunan program arahan yang menjadi *baseline* program dalam rangkaian pembahasan pada Konsultasi Regional. Nilai **capaian sub indikator-2 pada tahun 2024 adalah sebesar 59,04%** (70% dari 84,34%). Capaian ini berasal dari jumlah program arahan dalam Rakorbangwil yang menjadi program *baseline* dalam Konsultasi Regional (Konreg) Kementerian PUPR. Jumlah program arahan dalam Rakorbangwil untuk pemrograman tahun 2025 yaitu 679 program. Sedangkan program *baseline* diukur dari jumlah F-KW (Format Kegiatan Wajib) dan F-KB (Format Kegiatan Baru) yaitu 394 program, sementara 285 program lainnya belum terbahas.

Berdasarkan capaian Sub indikator-1 dan Sub indikator-2, maka capaian Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional pada **Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 1-1 sebesar 89,01%** dengan capaian kinerja 104,7%.

Analisis Faktor Pendukung Keberhasilan dan Permasalahan IKSK 1-1

Target kinerja IKSK 1-1 dapat tercapai beberapa akibat faktor eksternal dan faktor internal antara lain sebagai berikut:

Faktor Eksternal IKSK 1-1

- Peran unit organisasi Kementerian PUPR dalam mendukung ketercapaian target yang telah ditetapkan dalam Renstra Kementerian PUPR yang juga dilaksanakan dalam rangka memenuhi target pembangunan nasional.
- Peran K/L mitra dalam memberikan dukungan data dan informasi dalam rangka penyusunan program keterpaduan infrastruktur PUPR pada kawasan prioritas. Data dan informasi yang diberikan meliputi profil kawasan, kebutuhan dukungan infrastruktur PUPR, serta sinkronisasi penanganan kawasan dan pelaksanaan program PUPR dan non PUPR.

Faktor Internal IKSK 1-1

- Telah disusunnya RPIW Provinsi yang menjadi salah satu pertimbangan dalam penyusunan program keterpaduan infrastruktur PUPR pada kawasan prioritas. Sehingga penapisan program dan kawasan dapat lebih baik dengan dasar perencanaan yang komprehensif untuk mendukung skenario pembangunan.

Adapun faktor yang menghambat tercapainya IKSK 1-1 antara lain sebagai berikut:

Permasalahan IKSK 1-1

- a. Capaian IKSK sangat bergantung pada capaian kinerja organisasi, sehingga kontrol Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional terbatas dalam mengawal kinerja agar dapat terus sesuai dalam menjawab target yang telah ditetapkan dalam Renstra Kementerian PUPR 2020-2024

2. IKSK 1-2 Tingkat Kesesuaian Penanganan Kawasan Prioritas Melalui Perencanaan dan Pemrograman Infrastruktur PUPR di Pulau Sumatra dan Pulau Kalimantan

Analisis Capaian Kinerja IKSK 1-2

Pelaksanaan perencanaan dan pemrograman pembangunan infrastruktur PUPR pada Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 1-2, yaitu tingkat kesesuaian penanganan kawasan prioritas melalui perencanaan dan pemrograman infrastruktur PUPR di Pulau Sumatra dan Kalimantan. Indikator kinerja ini dihitung berdasarkan jumlah kawasan yang ditangani perencanaan dan pemrograman infrastrukturnya dibandingkan dengan jumlah kawasan yang menjadi target selama periode Renstra BPIW tahun 2020-2024 di Pulau Sumatra dan Kalimantan.

Pada periode 2020-2024, target kawasan prioritas di Wilayah I (Pulau Sumatra dan Kalimantan) yang akan ditangani melalui perencanaan dan pemrograman infrastruktur PUPR adalah sebanyak 82 kawasan. Seluruh target kawasan telah selesai disusun dokumen perencanaannya pada tahun 2024 sehingga realisasi capaian **Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 1-2 adalah sebesar 100% (82 kawasan)** dengan kinerja 100%.

Pada tahun 2024, Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I menyusun RPIW Kawasan Prioritas untuk Kawasan Penajam Paser Utara. Kawasan tersebut merupakan bagian dari kawasan penyangga IKN. Penyangga adalah kawasan sekitar kawasan inti IKN yang mempengaruhi fungsi kawasan inti atau dipengaruhi oleh kawasan inti, baik secara langsung maupun tidak langsung, pembagian kawasan ini sangat penting agar sistem kota – kota atau pemukiman dapat memberikan pelayanan untuk mempercepat akselerasi kawasan inti IKN yang diperkirakan akan menjadi *magnitude* ekonomi baru bahkan akan menjadi metropolitan baru.

Analisis Faktor Pendukung Keberhasilan dan Permasalahan IKSK 1-2

Analisis faktor pendukung keberhasilan baik eksternal maupun internal serta permasalahan IKSK 1-2 telah dijabarkan pada penjelasan analisis IKSP 1-1. Hal tersebut dikarenakan capaian Sasaran Program merupakan agregasi dari capaian IKSK 1-2, IKSK 1-3, dan IKSK 1-4.

3. IKSK 1-3 Tingkat Kesesuaian Penanganan Kawasan Prioritas Melalui Perencanaan dan Pemrograman Infrastruktur PUPR di Pulau Jawa, Bali, dan Kep. Nusa Tenggara

Analisis Capaian Kinerja IKSK 1-3

Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah II mendukung capaian SK 1 Meningkatnya pelaksanaan perencanaan dan pemrograman pembangunan infrastruktur PUPR pada Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 1-3, yaitu tingkat kesesuaian penanganan kawasan prioritas melalui perencanaan dan pemrograman infrastruktur PUPR di Pulau Jawa, Bali, dan Kepulauan Nusa Tenggara. Indikator kinerja ini dihitung berdasarkan jumlah kawasan yang ditangani perencanaan dan pemrograman infrastrukturnya dibandingkan dengan jumlah kawasan yang menjadi target selama periode Renstra BPIW tahun 2020-2024 di Pulau Jawa, Bali, dan Kepulauan Nusa Tenggara.

Pada periode 2020-2024, target kawasan prioritas di Wilayah II (Pulau Jawa, Bali, dan Kepulauan Nusa Tenggara) yang akan ditangani melalui perencanaan dan pemrograman infrastruktur PUPR adalah sebanyak 70 kawasan. Seluruh target kawasan telah selesai disusun dokumen perencanaannya pada tahun 2024 sehingga realisasi capaian **Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 1-3 adalah sebesar 100% (70 kawasan)** dengan kinerja 100%.

Pada tahun 2024, Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah II menyusun RPIW Kawasan Prioritas untuk 1) Kawasan Prioritas KSPN Dieng, Pantai Selatan Yogyakarta, dan KSPN Karst Gunung Kidul dan 2) Kawasan Prioritas mendukung Daerah Tertinggal Sumba Tengah (Pulau Sumba) dan Lembata (Pulau Flores). KSPN Dieng, KSPN Pantai Selatan DIY, dan KSPN Karst Gunungkidul merupakan kawasan wisata prioritas nasional yang menjadi satu-kesatuan pengembangan pariwisata Joglosemar.

Ketiga KSPN tersebut dapat dikembangkan secara terpadu untuk mendukung penyebaran/distribusi wisatawan di DPP Borobudur sesuai skenario dekonsentrasi dalam ITMP Borobudur–Yogyakarta–Prambanan.

Sementara, penyusunan rencana untuk Kawasan Prioritas mendukung Daerah Tertinggal Sumba Tengah (Pulau Sumba) dan Lembata (Pulau Flores) merupakan pendekatan untuk mendorong koridor pemerataan pertumbuhan. Pendekatan koridor tersebut disusun dengan mempertimbangkan hasil perhitungan keunggulan komparatif dan kompetitif daerah, serta pola persebaran pusat kegiatan lain di sekitarnya. Strategi yang disusun diharapkan dapat meningkatkan potensi wilayah, memenuhi standar pelayanan minimal infrastruktur, hingga meningkatkan perekonomian daerah tertinggal.

Analisis Faktor Pendukung Keberhasilan dan Permasalahan IKSK 1-3

Analisis faktor pendukung keberhasilan baik eksternal maupun internal serta permasalahan IKSK 1-3 telah dijabarkan pada penjelasan analisis IKSP 1-1. Hal tersebut dikarenakan capaian Sasaran Program merupakan agregasi dari capaian IKSK 1-2, IKSK 1-3, dan IKSK 1-4.

4. IKSK 1-4 Tingkat Kesesuaian Penanganan Kawasan Prioritas Melalui Perencanaan dan Pemrograman Infrastruktur PUPR di Pulau Sulawesi, Papua, dan Kepulauan Maluku

Analisis Capaian Kinerja IKSK 1-4

Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah III mendukung capaian SK 1 Meningkatnya pelaksanaan perencanaan dan pemrograman pembangunan infrastruktur PUPR pada Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 1-4, yaitu Tingkat kesesuaian penanganan kawasan prioritas melalui perencanaan dan pemrograman infrastruktur PUPR di Pulau Sulawesi, Papua, dan Kepulauan Maluku. Indikator kinerja tersebut dihitung berdasarkan jumlah kawasan yang ditangani perencanaan dan pemrograman infrastrukturnya dibandingkan dengan jumlah kawasan yang menjadi target selama periode tahun 2020-2024. Perencanaan dan pemrograman infrastruktur PUPR pada kawasan prioritas ini dilaksanakan melalui penyusunan perencanaan, program jangka menengah serta prioritas program untuk meningkatkan daya saing kawasan.

Sepanjang periode 2020-2024 target kawasan prioritas di wilayah III (Pulau Sulawesi, Papua, dan Kepulauan Maluku) yang ditangani melalui perencanaan dan pemrograman infrastruktur PUPR adalah sebanyak 97 kawasan. Seluruh target kawasan telah selesai disusun dokumen perencanaannya pada tahun 2024 sehingga realisasi capaian **Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 1-4 adalah sebesar 100% (97 kawasan)** dengan kinerja 100%.

Pada tahun 2024, Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah III menyusun RPIW Kawasan Prioritas untuk 1) Kawasan Industri Pomalaa dan Kawasan Industri Mongondow; 2) Kawasan Industri Obi dan Kawasan Industri Buli; dan 3) Kawasan Pusat Pemerintahan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua. PSN Kawasan Industri Pomalaa terletak di Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki kontribusi terbesar atas sektor pertambangan dan Industri Pengolahan dari PDRB Tahun 2023 di Provinsi Sulawesi Tenggara. Sementara, (KI) Mongondow di Kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara termasuk dalam RPJMD Sulawesi Utara tahun 2021-2026. Potensi Sumber Daya Alam dan industri pengolahan di Sulawesi Utara sangat berperan besar terhadap pertumbuhan ekonomi di Pulau Sulawesi.

Kawasan Industri (KI) Pulau Obi di Kabupaten Halmahera Selatan dan Kawasan Industri (KI) Buli di Kabupaten Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara termasuk dalam PSN. Dukungan infrastruktur PUPR pada 2 kawasan prioritas tersebut menjadi hal yang krusial agar kegiatan industri berjalan optimal dan kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat terpenuhi. Pengembangan infrastruktur PUPR juga perlu mempertimbangkan keseimbangan lingkungan dengan melihat daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di kawasan sekitar KI Obi dan KI Buli.

Kawasan Pusat Pemerintahan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua dilakukan mewujudkan pengembangan kawasan pendukung dan pengembangan yang terintegrasi dengan Kawasan Pusat pemerintah DOB di Provinsi Papua Pegunungan, Papua Selatan, Papua Tengah dan Papua Barat Daya. Perencanaan infrastruktur terpadu di Pulau Papua merupakan hal yang menjadi perhatian karena kebutuhan pemerataan Pembangunan infrastruktur di Indonesia serta optimalisasi potensi pengembangan wilayah dan perekonomian di Pulau Papua.

Analisis Faktor Pendukung Keberhasilan dan Permasalahan IKSK 1-4

Analisis faktor pendukung keberhasilan baik eksternal maupun internal serta permasalahan IKSK 1-3 telah dijabarkan pada penjelasan analisis IKSP 1-1. Hal tersebut dikarenakan capaian Sasaran Program merupakan agregasi dari capaian IKSK 1-2, IKSK 1-3, dan IKSK 1-4.

3.2.3.2. Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan 2

Sasaran Kegiatan (SK) Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan Pengembangan Infrastruktur Wilayah memiliki 6 (enam) indikator kinerja. Masing-masing indikator menggambarkan kinerja setiap kelompok kegiatan dalam tata kelola dukungan manajemen, yaitu tata naskah dinas, kearsipan, barang milik negara, tata usaha, produk hukum, kelembagaan, jabatan fungsional, administrasi pegawai, kualitas perencanaan anggaran, kinerja pelaksanaan anggaran, serta penyelenggaraan SAKIP organisasi. Capaian kinerja Sasaran Kegiatan tersebut dijabarkan sebagai berikut.

Tabel 3.7 Capaian Sasaran Kegiatan 2 BPIW

Sasaran Strategis	Target (%)	Capaian (%)	Kinerja (%)
Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan Pengembangan Infrastruktur Wilayah			
IKSK 2-1 Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan	82	84,28	102,77
IKSK 2-2 Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum	100	81,87	81,87
IKSK 2-3 Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai	82	82,94	101,14
IKSK 2-4 Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran	92	93,24	101,35
IKSK 2-5 Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran	91	82,93	91,13
IKSK 2-6 Nilai SAKIP Unit Organisasi	77	81,26	105,53
IKSK 2-1 Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan	82	84,28	102,77
IKSK 2-2 Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum	100	81,87	81,87

 Sangat Memuaskan Memuaskan

1. IKSK 2-1 Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan

Analisis Capaian Kinerja IKSK 2-1

IKSK 2-1 merupakan indikator yang menggabungkan kinerja kegiatan pengelolaan tata naskah dinas, kearsipan, barang milik negara, dan ketatausahaan. Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 2-1 ini merupakan gabungan dari sebagian kinerja 1 (satu) Unit Eselon III yang ada di lingkungan Sekretariat BPIW dan Subbagian Tata Usaha yang ada di setiap Unit Kerja di lingkungan BPIW. Penilaian indikator ini diperoleh dari penjumlahan 4 (empat) sub indikator dengan bobot masing-masing 25% sebagai berikut:

- Persentase Pembinaan Tata Naskah Dinas** diperoleh dari target Unit Kerja yang terbina terkait tata naskah dinas dibagi dengan jumlah seluruh Unit Kerja di BPIW. Terdapat 5 (lima) Unit Kerja yang telah terbina di BPIW selama tahun 2024, yaitu Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional,

Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I, Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah II, Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah III, dan Sekretariat BPIW. Pembinaan yang diberikan antara lain berupa sosialisasi dan pelatihan terkait penggunaan Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE) di setiap Unit kerja yang melibatkan Pejabat dan seluruh pegawai.

- b. **Persentase Pembinaan Kearsipan** diperoleh dari target Unit Kerja yang terbina terkait kearsipan dibagi jumlah seluruh Unit Kerja di BPIW. Terdapat 5 (lima) Unit Kerja yang telah terbina di BPIW selama tahun 2024, yaitu Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I, Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah II, Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah III, dan Sekretariat BPIW. Pembinaan yang diberikan antara lain berupa sosialisasi dan pelatihan terkait pengelolaan kearsipan kepada seluruh unit kerja. Selain itu, telah disusun arsip dinamis sesuai amanat Peraturan Menteri PUPR Nomor 23/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Arsip Dinamis Kementerian PUPR.
- c. **Persentase Penyelesaian Penghapusan Barang Milik Negara (BMN)** diperoleh dari realisasi dibagi usulan penyelesaian penghapusan BMN yang dilaksanakan oleh Sekretariat BPIW. Capaian sub indikator ini mengacu pada informasi pada Laporan BMN BPIW. Pada tahun 2024 telah diselesaikan penghapusan 3 (tiga) dari target sebanyak 8 (delapan) BMN. Berdasarkan status per 31 Desember 2024, rincian proses penghapusan BMN di BPIW adalah sebagai berikut:
 - i. Tiga usulan dengan jumlah total 633 NUP dengan nilai total sebesar Rp84.324.874.219 telah selesai proses penghapusan dan telah terbit SK Penghapusan BMN;
 - ii. Satu usulan dengan jumlah 124 NUP dengan nilai sebesar Rp1.037.655.690 dalam proses permohonan lelang ke Pengelola Barang (KPKNL Jakarta III Kementerian Keuangan);
 - iii. Empat usulan dengan jumlah total 466 NUP dengan nilai total sebesar Rp4.116.424.243 terbit persetujuan penghapusan melalui penjualan dari Sekretaris Jenderal Kementerian PU pada Desember 2024.
- d. **Persentase Terselenggaranya Administrasi Korespondensi** diperoleh dari jumlah capaian penyelesaian korespondensi yang diselesaikan dibagi dengan jumlah seluruh koresponden. Pada tahun 2024, capaian penyelesaian korespondensi mencapai 99,6%.

Berdasarkan metode perhitungan tersebut, maka agregasi capaian nilai **Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 2-1 adalah sebesar 84,28%** dari target sebesar 82%, sehingga capaian kinerja sebesar 102,77%.

Analisis Faktor Pendukung Keberhasilan dan Permasalahan IKSK 2-1

Faktor Eksternal IKSK 2-1

Penyelenggaraan pembinaan terhadap BPIW terkait Tata Persuratan dan Kearsipan oleh Sekretariat Jenderal, Kementerian PUPR sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola surat dan arsip yang tertib, dinamis, terpadu dan terintegrasi terutama dengan memanfaatkan teknologi informasi sebagai wujud implementasi SPBE.

Faktor Internal IKSK 2-1

Sosialisasi dan pelatihan secara intensif kepada seluruh unit kerja di lingkungan BPIW terkait tata naskah dinas, kearsipan dan ketatausahaan dengan melibatkan para pejabat dan pegawai. Selain itu, secara BPIW telah menyusun Laporan Rekapitulasi Status Tindak Lanjut Tata Persuratan melalui TNDE bulanan.

Permasalahan IKSK 2-1

Kurang optimalnya capaian kinerja IKSK 2-1 disebabkan oleh kendala pada sub indikator Penyelesaian Penghapusan BMN akibat adanya proses yang belum selesai. Hal tersebut dikarenakan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Waktu penerbitan persetujuan penghapusan BMN dari Pengguna Barang (Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR) yang belum sesuai dengan target.
- b. Adanya pembaharuan Aplikasi SIMAN dari V1 ke V2 menghambat proses usulan penghapusan BMN dikarenakan adanya periode migrasi data yang mengakibatkan tertundanya seluruh proses pengelolaan BMN yang harus diusulkan melalui aplikasi SIMAN.
- c. Komitmen pemenang lelang atas BMN yang diusulkan untuk dihapus sangat menentukan terlaksana atau tidaknya proses penghapusan. Apabila pemenang lelang wanprestasi/tidak melunasi kewajiban pembayaran hasil lelang, maka BMN yang diusulkan penghapusan harus dilelang ulang dengan menyusun kembali dokumen permohonan penghapusan BMN.

2. IKSK 2-2 Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum

Analisis Capaian Kinerja IKSK 2-2

IKSK 2-2 Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum merupakan indikator yang menggambarkan kinerja Bagian Hukum, Kerja Sama, dan Komunikasi Publik, yaitu terkait tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, penyelenggaraan komunikasi publik, kepuasan layanan data dan informasi serta layanan sistem informasi, dan layanan fasilitas kerja sama. Penilaian indikator ini diperoleh dari penjumlahan kinerja 4 (empat) sub indikator dengan bobot masing-masing 25% sebagai berikut:

- a. **Jumlah produk hukum yang diterbitkan** dibagi dengan jumlah produk hukum yang seharusnya diterbitkan (dalam proleg Kementerian PUPR) dikali 100%. Berdasarkan Revisi Renstra BPIW 2020-2024, terdapat 3 (tiga) produk hukum yang ditargetkan untuk tahun 2024, yaitu: 1) Rancangan Keputusan Menteri PUPR tentang Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah; 2) Petunjuk Teknis Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah; dan 3) Standar Kompetensi Pengembangan Infrastruktur Wilayah. Dari ketiga target tersebut, terdapat 2 (dua) produk yang telah selesai disusun yaitu Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 817/KPTS/M/2024 tentang Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah yang ditetapkan pada tanggal 17 April 2024 dan Petunjuk Teknis Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah. Sedangkan untuk 1 (satu) produk hukum lainnya tidak dapat terselesaikan tepat waktu dikarenakan adanya perubahan kebijakan untuk terlebih dahulu mendorong dibentuknya Jabatan Fungsional Pengembangan Infrastruktur Wilayah.
- b. **Tingkat kesuksesan penyelenggaraan Komunikasi Publik** diperoleh dari hasil Survei Kepuasan Masyarakat Bidang Komunikasi Publik. Survei dilakukan kepada masyarakat penerima informasi melalui media sosial selama tahun 2024. Berdasarkan hasil pengolahan data, secara umum Pengelolaan Media Sosial BPIW dinilai Sangat Baik oleh para responden, dengan nilai 95,63. Rata-rata responden menilai informasi terkait pengembangan wilayah, keseimbangan konten substansi dan non substansi, tata bahasa, ukuran dan jenis huruf, kualitas gambar dan estetika desain sudah sesuai yang diharapkan.
- c. **Tingkat kepuasan layanan data dan informasi serta layanan sistem informasi** diperoleh dari hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Layanan Publik BPIW terkait Layanan Data dan Informasi di BPIW. BPIW telah melaksanakan survei dimaksud untuk melakukan pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat terkait layanan data dan informasi di BPIW. Pelaksanaan SKM menggunakan kuesioner online yang disebarakan kepada pengguna layanan sesuai dengan 9 (sembilan) unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Berdasarkan hasil pengolahan data survei, diketahui bahwa secara umum nilai pelayanan publik BPIW terkait Layanan Data dan Informasi dinilai Baik dengan nilai 85,19. Unsur persyaratan sistem, mekanisme dan prosedur, waktu penyelesaian, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan, dan sarana/prasarana merupakan unsur yang mendapat nilai baik.
- d. **Tingkat layanan fasilitasi kerja sama** diperoleh dari progres layanan fasilitasi kerja sama BPIW yang dilaksanakan oleh Bagian Hukum, Kerja Sama dan Komunikasi Publik. BPIW telah melakukan *sharing knowledge* dengan lembaga akademis mendukung pelaksanaan kegiatan *Integrated City Planning* (ICP) dan penyusunan RPIW. Selain itu, BPIW juga melanjutkan kerja sama dengan Kementerian PMK dan BKKBN dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem. BPIW saat ini sedang melakukan peninjauan kerja sama lanjutan dengan BKKBN tentang Pemanfaatan Hasil Pendataan Keluarga dan Pemutakhirannya dalam Mendukung Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum, Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem, dan Penurunan Stunting. Di tahun 2024, BPIW juga sedang menjajaki kerja sama dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Penyelenggaraan Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Desa, Kawasan Perdesaan, Daerah Tertinggal dan Kawasan Transmigrasi. Beberapa kerja sama yang masih perlu ditindaklanjuti, yaitu kerja sama BPIW dengan lembaga akademis (peninjauan dengan ITS), kelanjutan kerja sama dengan Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) menunggu kesepakatan mengenai modul pengembangan Jabatan Fungsional Pengembangan Infrastruktur Wilayah, serta kelanjutan kerja sama dengan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) menunggu kesepakatan dalam pelatihan dan kunjungan lapangan terkait contoh pelaksanaan proyek KPBU infrastruktur bidang PU.

Berdasarkan metode perhitungan tersebut, maka agregasi capaian nilai **Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 2-2 sebesar 81,87%** dari target sebesar 100%, sehingga capaian kinerja sebesar 81,87%.

Analisis Faktor Kegagalan IKSK 2-2

Secara umum, beberapa realisasi kinerja sub indikator pada IKSK 2-2 Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum belum mencapai target yang disebabkan oleh faktor internal dan eksternal sebagai berikut:

Faktor Eksternal IKSK 2-2

- Gangguan Layanan Pusat Data Nasional: Serangan siber menyebabkan gangguan pada PDN 2 sehingga berdampak pada seluruh aplikasi dan sistem informasi yang ada pada server PDN 2, termasuk seluruh aplikasi dan *website* di BPIW;
- Proses pamarafan yang membutuhkan waktu melebihi ketentuan dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Evaluasi Produk Hukum (10 hari kerja);
- Beberapa narasumber eksternal kurang responsif dalam menjawab kebutuhan materi publikasi sesuai tenggat waktu yang ditentukan.

Faktor Internal IKSK 2-2

- Proses pembahasan muatan/substansi peraturan perundang-undangan yang disusun terkadang membutuhkan waktu yang cukup lama;
- Perubahan kebijakan untuk terlebih dahulu mendorong dibentuknya Jabatan Fungsional Pengembangan Infrastruktur Wilayah;
- Dukungan unit kerja dalam hal ketersediaan data belum optimal sehingga terdapat data yang belum lengkap serta kesulitan dalam pengolahan data;
- Perubahan kebijakan baik dari pimpinan maupun kebijakan terkait anggaran sehingga menghambat pelaksanaan kegiatan.

3. IKSK 2-3 Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai

Analisis Capaian Kinerja IKSK 2-3

IKSK 2-3 Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai merupakan indikator yang menggambarkan kinerja terkait layanan kepegawaian dan pengendalian intern di BPIW. Penilaian indikator ini diperoleh dari penjumlahan kinerja 2 (dua) sub indikator dengan bobot masing-masing 50% sebagai berikut:

- Survei kepada Pegawai terkait ketepatan perencanaan pegawai, transparansi rekrutmen, ketepatan layanan administrasi kepegawaian.** BPIW melalui Bagian Kepegawaian dan Umum, Sekretariat BPIW telah melakukan survei dimaksud terhadap SDM di lingkungan BPIW pada Bulan Desember 2024. Dengan total responden sebanyak 133 pegawai, didapatkan nilai pada tahun 2024 adalah sebesar 83,87%. Berdasarkan hasil konversi IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) Unit Pelayanan, nilai yang didapatkan tergolong dalam kategori "Baik". Unsur pelayanan dengan nilai terendah adalah pada Organisasi dan Tata Laksana dengan nilai 81,00 (bernilai 83,75 pada tahun 2023) dan Kelembagaan dengan nilai 81,81 (bernilai 83,08 pada tahun 2023). Sedangkan nilai tertinggi didapatkan pada unsur pelayanan Tata Usaha Kepegawaian dengan nilai 86,58 (bernilai 84,05 pada tahun 2023). Secara keseluruhan, pelayanan Kepegawaian dan Umum dinilai sudah Baik. Semua unsur pelayanan (Tata Usaha Kepegawaian, Disiplin Pegawai, Pengembangan Pegawai, Diklat dan Tugas Belajar, Jabatan Fungsional, Ketatalaksanaan, Kelembagaan, Umum dan Kerumahtanggan, Tata Naskah Dinas dan Kearsipan, dan Barang Milik Negara) telah mendapatkan nilai rata-rata diatas 80%. Adapun rincian hasil penilaian survei sebagai berikut.

Tabel 3.8 Hasil Survei Kepuasan Pelayanan Bagian Kepegawaian dan Umum

No.	Nilai Unsur Pelayanan Tahun 2024										
	N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8	N9	N10	
1	86,58	83,27	84,92	84,67	83,39	81,00	81,81	85,06	84,89	83,08	838,67
Hasil Konversi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Unit Kepegawaian dan Umum											83,87

No.	Unsur Pelayanan	Nilai Rata-Rata
N1	Tata Usaha Kepegawaian	84,052
N2	Disiplin Pegawai	84,016
N3	Pengembangan Pegawai	83,728
N4	Diklat dan Tugas Belajar	84,113
N5	Jabatan Fungsional	78,396
N6	Ketatalaksanaan	80,115
N7	Kelembagaan	79,722
N8	Umum dan Kerumahtanggaan	82,288
N9	Tata Naskah Dinas dan Kearsipan	80,530
N10	Barang Milik Negara	78,788

- b. **Nilai SPIP Penjaminan Kinerja di BPIW** yang diperoleh dari hasil penilaian Tingkat Maturitas SPIP. Pada tahun 2024, hasil penilaian Tingkat Maturitas SPIP tidak lagi diberikan parsial untuk tingkat Unor namun penilaian akan dikompilasi dan diberikan untuk tingkat Kementerian. Hal ini disebabkan karena ada beberapa sub unsur yang dinilai secara akumulasi ditingkat Kementerian. Adapun, hasil penilaian Tingkat Maturitas SPIP tingkat Kementerian akan dipergunakan hasil penilaian Tingkat Maturitas SPIP tingkat Unit Organisasi. Nilai untuk Maturitas Penyelenggaraan SPIP tahun 2024 adalah 4,180 (dari maksimal 5,0) atau telah memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Level 4 (Terkelola dan Terukur). Dimana, nilai untuk Manajemen Risiko Indeks (MRI) adalah 4,423 dan nilai untuk Indeks Efektivitas pengendalian Korupsi (IEPK) adalah 4,188. Nilai untuk Maturitas Penyelenggaraan SPIP tahun 2024 naik dibandingkan di tahun 2023 dimana nilai Maturitas SPIP sebesar 3,90.

Berdasarkan metode perhitungan tersebut, maka agregasi capaian nilai **Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 2-3 sebesar 82,94 %** dari target sebesar 82%, sehingga capaian kinerja sebesar 101,14%.

Analisis Faktor Pendukung Keberhasilan IKSK 2-3

Secara umum, realisasi kinerja sub indikator pada IKSK 2-3 Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai telah melebihi target yang didukung oleh faktor internal dan eksternal sebagai berikut:

Faktor Eksternal IKSK 2-3

- Koordinasi dan komunikasi yang terjaga dengan Biro Kepegawaian, Sekretariat Jenderal dan BPSDM sebagai pengampu administrasi dan pengembangan pegawai sehingga berbagai kebijakan dan informasi terkait kepegawaian dapat diimplementasikan di BPIW dengan optimal;
- Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR berkoordinasi dengan BPKP secara aktif dan rutin melaksanakan pembinaan melalui sosialisasi/pelatihan/workshop terkait SPIP;
- Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR bersama Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR serta berkoordinasi dengan BPKP secara intensif melakukan pemantauan serta evaluasi pemenuhan *Area of Improvement (AoI)* guna meningkatkan penilaian Tingkat Maturitas SPIP baik tingkat Unit Organisasi maupun tingkat Kementerian.

Faktor Internal IKSK 2-3

- Sebagian besar responden survei menilai bahwa telah dilakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berlaku, pegawai pelaksana juga melayani secara sopan, ramah, dan kompeten di bidangnya serta tidak memungut biaya apapun untuk memproses dan melaksanakan tugas dan fungsinya. Saran perbaikan agar kecepatan pelayanan Kepegawaian dan Umum dapat lebih ditingkatkan sehingga dapat melayani pegawai dengan lebih prima;
- Melaksanakan rapat koordinasi dengan Unit Kerja di lingkungan BPIW untuk melakukan pengisian bukti dukung serta penilaian mandiri (PM) Tingkat Maturitas SPIP Unit Organisasi;
- Sekretariat BPIW bersama Bidang Kepatuhan Intern, Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk mempercepat pemenuhan *Area of Improvement (AoI)* guna meningkatkan penilaian Tingkat Maturitas SPIP Unit Organisasi.

4. IKSK 2-4 Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Analisis Capaian Kinerja IKSK 2-4

IKSK 2-4 Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran merupakan indikator yang menggambarkan kesesuaian antara pelaksanaan anggaran BPIW selama tahun 2024 dengan perencanaan yang ditetapkan dalam DIPA. Kinerja IKSK 2-4 ditentukan oleh capaian nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) sesuai ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor: PER-5/PB/2022 tanggal 18 Maret 2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L. Capaian nilai IKPA diperoleh dari data pada aplikasi OMSPAN-Monev. Capaian **Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 2-4 (Nilai IKPA BPIW TA 2024) sebesar 93,23%** (status data per 8 Januari 2025). Dengan target pada tahun 2024 sebesar 92%, maka capaian kinerja IKSK 2-4 sebesar 101,34%.

IKPA mengukur kualitas pelaksanaan anggaran dari aspek perencanaan pelaksanaan anggaran, aspek implementasi pelaksanaan anggaran dan aspek kualitas hasil pelaksanaan anggaran dengan 8 (delapan) indikator penilai meliputi revisi DIPA, deviasi halaman III DIPA, penyerapan anggaran, belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, pengelolaan UP/TUP, capaian output dan dispensasi SPM (sebagai pengurang nilai). Berdasarkan penilaian IKPA BPIW tahun 2024, indikator yang perlu menjadi perhatian untuk ditingkatkan pada periode selanjutnya adalah pada sub indikator Deviasi Halaman III DIPA dan Penyerapan Anggaran. Adapun capaian nilai IKPA BPIW tahun 2024 secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.9 Rincian Nilai IKPA BPIW Tahun 2024

No	Satuan Kerja	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Pengurang Nilai IKPA	Nilai IKPA
		Revisi DIPA	Deviasi Hal III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP/TUP	Capaian Output	Dispensasi SPM	
		10%	15%	20%	10%	10%	10%	25%		
1	Sekretariat BPIW	100	93,09	95,85	94,91	98,41	98,14	100	0	97,28
2	Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah III	100	68,59	99,07	100	100	92,33	100	0	94,34
3	Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I	100	74,96	89,53	100	100	82,49	100	0	92,40
4	Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah II	100	40,03	99,91	100	100	100	100	0	90,99
5	Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional	100	58,35	78,59	100	100	91,24	100	0	88,59
	BPIW	100	75,69	91,45	94,91	99,35	91,66	100	0	93,24

Analisis Faktor Pendukung Keberhasilan IKSK 2-4

Realisasi kinerja IKSK 2-4 Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran telah melebihi target yang didukung oleh faktor internal dan eksternal sebagai berikut:

Faktor Eksternal IKSK 2-4

- Kementerian Keuangan mengadakan *workshop* melalui daring guna peningkatan pemahaman unit kerja ataupun sosialisasi peraturan baru terkait penilaian/pengukuran IKPA.
- Sekretariat Jenderal dalam hal ini Biro Keuangan terus melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi terkait pengelolaan keuangan, perbendaharaan dan pelaksanaan anggaran unit kerja.

Faktor Internal IKSK 2-4

- a. Upaya seluruh Unit Kerja di lingkungan BPIW dalam mendorong peningkatan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku pada pelaksanaan anggaran belanja.
- b. Penyampaian Hasil Evaluasi dan Pemantauan Penilaian IKPA Satuan Kerja di lingkungan BPIW secara triwulanan.
- c. Komunikasi dan koordinasi yang baik dengan seluruh unit kerja di lingkungan BPIW.

5. IKSK 2-5 Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran

Analisis Capaian Kinerja IKSK 2-5

IKSK 2-5 Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran merupakan indikator yang menggambarkan kinerja perencanaan anggaran BPIW. Nilai capaian Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran merupakan amanat dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Salah satu bagian dalam PMK 62 Tahun 2023 khususnya Bab VIII mengatur mengenai Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran. Hal ini mengubah tata cara penilaian yang sebelumnya merupakan amanat dari PMK Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Evaluasi Kinerja Anggaran Kementerian/Lembaga.

Hal ini mengubah dasar perhitungan penilaian yang sebelumnya terdiri dari 7 (tujuh) indikator yaitu Capaian Sasaran Program, Penyerapan Anggaran, Konsistensi Penyerapan, Capaian Output Program, Efisiensi, Nilai Efisiensi, dan Rata-rata NKA Satker menjadi 4 (empat) indikator yaitu Indikator Kinerja Program (Efektivitas Unit Eselon I 30%), Capaian Rincian Output (Efektifitas Satker 45%), Penggunaan SBK 10%, dan Efisiensi SBK 15%. Berdasarkan perubahan yang cukup mendasar pada indikator dan cara perhitungan capaian kinerja, maka pada TA 2024 nilai capaian indikator kinerja kegiatan **Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 2-5 adalah 82,93%** dari target sebesar 91,00% sehingga capaian kerjanya sebesar 91,13%.

Berdasarkan tata cara perhitungan yang baru, indikator dengan nilai rendah dari capaian tersebut adalah penggunaan SBK yaitu 62,5 dan efisiensi SBK yaitu 11,2 dari nilai penuh 100. Nilai penggunaan SBK merupakan nilai kesesuaian SBK pada RO yang termasuk dalam SBK sedangkan nilai efisiensi SBK merupakan perbandingan hasil pengurangan antara besaran indeks RO SBK dan indeks realisasi per RO SBK dengan indeks RO SBK. Nilai efisiensi SBK penuh dapat diraih apabila nilai selisih antara Indeks SBK dan Indeks Realisasi Anggaran masing-masing RO adalah 20% dari Indeks SBK untuk masing-masing RO tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada efisiensi anggaran dalam RO tersebut walaupun hal ini berarti tingkat penyerapan anggaran untuk RO tersebut tinggi.

Analisis Faktor Penyebab Kegagalan 2-5

Realisasi kinerja IKSK 2-5 Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran belum mencapai target yang disebabkan oleh faktor internal dan eksternal sebagai berikut:

Faktor Eksternal IKSK 2-5

Adanya perubahan acuan penilaian angka capaian, dimana Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan Serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran baru ditetapkan pada 23 Desember 2023 dimana pada saat itu telah ditetapkan DIPA TA 2024. Hal ini mengakibatkan RO yang memiliki SBK tidak seluruhnya memenuhi ketentuan, sehingga capaian kinerja belum optimal.

Faktor Internal IKSK 2-5

- a. Penyusunan jadwal rencana pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perencanaan dan pelaksanaan agar Capaian Rincian Output dapat terpenuhi secara maksimal.
- b. Penyusunan target masing-masing output (progres capaian output dan realisasi volume output) sesuai kemampuan masing-masing kegiatan pada setiap Satker.
- c. Penggunaan SBKU/SBKK dalam proses perencanaan anggaran untuk masing-masing Rincian Output.
- d. Upaya seluruh Unit Kerja di lingkungan BPIW dalam menghemat penggunaan anggaran pada setiap pelaksanaan kegiatan untuk mencapai Rincian Output secara efisien, terutama pada Rincian Output yang termasuk dalam SBKU/SBKK.

6. IKSK 2-6 Nilai SAKIP Unit Organisasi

Analisis Capaian Kinerja IKSK 2-6

IKSK 2-6 Nilai SAKIP Unit Organisasi merupakan indikator yang menggambarkan kinerja seluruh Unit Kerja di lingkungan BPIW terkait penyelenggaraan SAKIP yang diampu oleh Bagian Perencanaan, Program dan Keuangan. Penilaian indikator ini berdasarkan pada hasil evaluasi implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Unit Organisasi yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR. Evaluasi AKIP dilaksanakan pada tahun n+1 sehingga untuk pelaporan Tahun 2024, disepakati untuk menggunakan nilai hasil evaluasi AKIP TA 2023. Berdasarkan Surat Inspektur Jenderal Kementerian PUPR Nomor: PW0204-lj/970 tanggal 2 Agustus 2024 hal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, implementasi AKIP BPIW TA 2023 atau sebagai **capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 2-6 sebesar 81,26%** dengan dikategorikan A (Memuaskan) dari target sebesar 77%, sehingga capaian kinerjanya sebesar 105,53%.

Capaian nilai SAKIP BPIW tersebut meningkat dibandingkan tahun sebelumnya (80,65%) yang didukung oleh perbaikan pada aspek Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal. Tidak tercapainya nilai maksimal implementasi AKIP BPIW disebabkan masih adanya kelemahan pada subkomponen terkait ketepatan waktu penetapan dan publikasi dokumen perencanaan, belum adanya bukti peran pimpinan dalam pemantauan dan pengukuran kinerja secara berjenjang, pengukuran kinerja pegawai belum dijadikan sebagai dasar pemberian tunjangan kinerja dan penempatan/penghapusan jabatan, serta belum adanya bukti terkait efisiensi anggaran. Rincian nilai evaluasi AKIP BPIW Tahun 2023 sebagai berikut.

Tabel 3.10 Rincian Nilai Evaluasi AKIP BPIW TA 2023 per Komponen

No.	Komponen	Bobot/Nilai Maksimal (%)	Nilai Evaluasi TA 2022 (%)	Nilai Evaluasi TA 2023 (%)
1	Perencanaan Kinerja	30	25,80	24,30
2	Pengukuran Kinerja	30	24,60	23,70
3	Pelaporan Kinerja	15	11,25	12,00
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	19,00	21,25
Nilai Akuntabilitas Kinerja		100	80,65	81,26

Analisis Faktor Pendukung Keberhasilan IKSK 2-6

Realisasi kinerja IKSK 2-6 Nilai SAKIP Unit Organisasi telah melebihi target yang didukung oleh faktor internal dan eksternal sebagai berikut:

Faktor Eksternal IKSK 2-6

- Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR yang terus mengawal perbaikan implementasi SAKIP Kementerian PUPR melalui berbagai diskusi dan perumusan kebijakan melibatkan seluruh unit organisasi.
- Hasil evaluasi AKIP Kementerian PUPR oleh Kementerian PAN dan RB yang menghasilkan rekomendasi yang berdampak pada perbaikan kinerja unit organisasi termasuk BPIW.

Faktor Internal IKSK 2-6

- Upaya seluruh Unit Kerja di lingkungan BPIW dalam mendorong peningkatan implementasi SAKIP terutama melalui upaya perbaikan atas rekomendasi hasil evaluasi tahun 2023.
- Perbaikan dalam ketersediaan dan kualitas dokumen perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja, serta evaluasi kinerja internal.

3.3 Analisis Perbandingan Kinerja

3.3.1 Analisis Perbandingan Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Perbandingan realisasi kinerja Sasaran Strategis, Sasaran Program, Sasaran Kegiatan BPIW Tahun 2020-2024 dalam rentang periode Renstra 2020-2024 menunjukkan persentase kinerja yang konsisten selalu

berada di atas 100%, namun pada IKSP Dukungan Manajemen dan IKSK 2-2 tahun 2024, terdapat penurunan kinerja akibat adanya perubahan berdasarkan Revisi Renstra BPIW 2020-2024 dengan bertambahnya beberapa indikator dalam metode perhitungan yang belum pernah diukur sebelumnya atau adanya perubahan peraturan pada salah satu indikator. Perbandingan kinerja ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 3.11 Perbandingan Capaian Kinerja BPIW Tahun 2020-2024

Sasaran/Indikator Kinerja		Perbandingan Kinerja Berdasarkan Target PK														
		2020			2021			2022			2023			2024		
		Target	Capaian	Kinerja (%)	Target	Capaian	Kinerja (%)	Target	Capaian	Kinerja (%)	Target	Capaian	Kinerja (%)	Target	Capaian	Kinerja (%)
SS-5	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya															
IKSS-1	Tingkat Keselarasan Dukungan Infrastruktur di Kawasan Strategis	60,00	69,48	115,80	65,00	80,32	123,57	70,00	81,12	115,89	82,00	87,55	106,77	82,50	88,35	107,09
SP	Meningkatnya Dukungan Manajemen Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya															
IKSP-1	Tingkat Pemanfaatan Kebijakan, Strategi Perencanaan dan Pemrograman	60,00	69,48	115,80	65,00	83,53	128,51	70,00	98,80	141,14	100	100	100	100	100	100
IKSP-2	Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya	55,92	66,94	119,71	63,53	76,47	120,37	71,54	86,89	121,46	87,81	93,67	106,67	94,58	97,55	103,14
SK-1	Meningkatnya Pelaksanaan Perencanaan dan Pemrograman Pembangunan Infrastruktur PUPR															
IKSK1-1	Tingkat Kesesuaian Kebijakan dan Strategi Perencanaan dan Pemrograman Infrastruktur PUPR	60,00	55,25	92,08	65,00	71,39	109,83	70,00	79,22	113,17	80,00	80,48	100,60	85,00	89,01	104,7
IKSK1-2	Tingkat Kesesuaian Penanganan Kawasan Prioritas melalui Perencanaan dan Pemrograman Infrastruktur PUPR di Pulau Sumatra dan Kalimantan	60,00	63,42	105,70	65,00	85,37	131,34	70,00	98,78	141,11	100	100	100	100	100	100
IKSK1-3	Tingkat Kesesuaian Penanganan Kawasan Prioritas melalui Perencanaan dan Pemrograman Infrastruktur PUPR di Pulau Jawa, Bali	60,00	48,57	80,95	65,00	72,86	112,09	70,00	98,57	140,81	100	100	100	100	100	100

Sasaran/Indikator Kinerja		Perbandingan Kinerja Berdasarkan Target PK														
		2020			2021			2022			2023			2024		
		Target	Capaian	Kinerja (%)	Target	Capaian	Kinerja (%)	Target	Capaian	Kinerja (%)	Target	Capaian	Kinerja (%)	Target	Capaian	Kinerja (%)
dan Kep. Nusa Tenggara																
IKSK 1-4	Tingkat Kesesuaian Penanganan Kawasan Prioritas melalui Perencanaan dan Pemrograman Infrastruktur PUPR di Pulau Sulawesi, Papua dan Kep. Maluku	60,00	89,69	149,48	65,00	89,69	137,98	70,00	98,97	141,39	100	100	100	100	100	100
SK-2		Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan Pengembangan Infrastruktur Wilayah														
IKSK 2-1	Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara dan Pengelolaan Ketatausahaan	80,00	95,40	119,25	80,00	85,19	106,49	81,00	91,60	113,09	82,00	91,64	111,76	82,00	84,28	102,77
IKSK 2-2	Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	81,87	81,87
IKSK 2-3	Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai	80,00	70,09	87,61	80,00	80,03	100,04	81,00	81,39	100,48	82,00	83,76	102,15	82,00	82,94	101,14
IKSK 2-4	Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran	91,00	84,91	93,31	91,00	92,76	101,93	92,00	88,43	96,12	92,00	93,21	101,32	92,00	93,23	101,34
IKSK 2-5	Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran	90,50	89,88	99,31	90,50	97,08	107,27	91,00	90,91	99,90	91,00	91,11	100,12	91,00	82,93	91,13
IKSK 2-6	Nilai SAKIP Unit Organisasi	76,50	76,40	99,87	76,60	76,40	99,74	76,80	80,34	104,61	76,90	80,65	104,88	77,00	81,26	105,53

Sangat Memuaskan
 Memuaskan

3.3.2 Analisis Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Berikut merupakan perbandingan antara capaian kinerja BPIW tahun 2024 dengan target jangka menengah (Renstra) 2020-2024. Capaian akhir pada Sasaran Strategis, Sasaran Program IKSP 1-1, Sasaran Kegiatan 1 menunjukkan capaian akhir atas akumulasi capaian yang diperoleh sepanjang tahun perencanaan jangka menengah. Capaian Sasaran Strategis menunjukkan bahwa BPIW berhasil mendorong penyepakatan program keterpaduan infrastruktur untuk disepakati bersama sebagaimana target yang ditetapkan. Adapun pada Sasaran Program IKSP 1-1, Sasaran Kegiatan 1 menunjukkan kinerja BPIW dalam menyusun dokumen perencanaan dan pemrograman sebagai acuan pembangunan infrastruktur di kawasan strategis yang telah direncanakan pada Renstra BPIW 2020-2024.

Sementara, capaian Sasaran Program IKSP 2 dan Sasaran Kegiatan 2 berupa capaian atas Dukungan Manajemen yang diukur setiap tahun yang bukan merupakan akumulasi dari tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2024, target IKSP 2 dan IKSK 2-2 tidak dapat tercapai. Pada tahun 2023, dilaksanakan revisi Renstra BPIW 2020-2024, revisi tersebut mendorong keseragaman perhitungan sasaran dukungan manajemen di lingkungan Kementerian PUPR, atas revisi tersebut terdapat perubahan perhitungan dengan adanya penambahan indikator pada IKSK 2-2 yang diperhitungkan sebagaimana yang telah dijelaskan secara rinci pada Sub Bab 3.2.3.2.

Tabel 3.12 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Target Renstra 2020-2024

Sasaran/Indikator Kinerja		Target Renstra 2020-2024 (%)	2024		Perbandingan Capaian 2024 dengan Target Renstra 2020-2024 (%)
			Target	Capaian	
SS-5	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya				
IKSS-1	Tingkat Keselarasan Dukungan Infrastruktur di Kawasan Strategis	82,5	82,5	88,35	107,09
SP	Meningkatnya Dukungan Manajemen Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya				
IKSP-1	Tingkat Pemanfaatan Kebijakan, Strategi Perencanaan dan Pemrograman	100	100	100	100
IKSP-2	Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya	94,58	94,58	97,55	103,14
SK-1	Meningkatnya Pelaksanaan Perencanaan dan Pemrograman Pembangunan Infrastruktur PUPR				
IKSK 1-1	Tingkat Kesesuaian Kebijakan dan Strategi Perencanaan dan Pemrograman Infrastruktur PUPR	85	85	89,01	104,7
IKSK 1-2	Tingkat Kesesuaian Penanganan Kawasan Prioritas melalui Perencanaan dan Pemrograman Infrastruktur PUPR di Pulau Sumatra dan Kalimantan	100	100	100	100
IKSK 1-3	Tingkat Kesesuaian Penanganan Kawasan Prioritas melalui Perencanaan dan Pemrograman Infrastruktur PUPR di Pulau Jawa, Bali dan Kep. Nusa Tenggara	100	100	100	100
IKSK 1-4	Tingkat Kesesuaian Penanganan Kawasan Prioritas melalui Perencanaan dan Pemrograman Infrastruktur PUPR di Pulau Sulawesi, Papua dan Kep. Maluku	100	100	100	100
SK-2	Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan Pengembangan Infrastruktur Wilayah				
IKSK 2-1	Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara dan Pengelolaan Ketatausahaan	82	82	84,28	102,77

Sasaran/Indikator Kinerja	Target Renstra 2020-2024 (%)	2024		Perbandingan Capaian 2024 dengan Target Renstra 2020-2024 (%)
		Target	Capaian	
IKSK 2-2	Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum	100	100	81,87
IKSK 2-3	Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai	82	82	82,94
IKSK 2-4	Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran	92	92	93,23
IKSK 2-5	Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran	91	91	82,93
IKSK 2-6	Nilai SAKIP Unit Organisasi	77	77	81,26

Sangat Memuaskan
 Memuaskan

3.3.3 Analisis Perbandingan Kinerja dengan Standar Nasional (*Benchmarking*)

Salah satu perbandingan capaian kinerja yang dilakukan adalah terhadap standar atau target nasional. Dalam Renstra BPIW tahun 2020-2024 terdapat 249 kawasan prioritas yang akan dan telah ditangani berdasarkan arahan RPJMN 2020-2024. Berdasarkan konsepsi pengembangan wilayah, penanganan dilaksanakan melalui sistem klaster di pusat pertumbuhan dengan memaksimalkan keunggulan aglomerasi, menggali potensi dan keunggulan daerah dan peningkatan efisiensi dalam penyediaan infrastruktur dalam kawasan, antar kawasan, maupun antar wilayah. Capaian kinerja dalam penanganan kawasan yang telah dilakukan BPIW sampai dengan tahun 2024 berdasarkan arahan RPJMN 2020-2024 yang diturunkan pada Renstra BPIW 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 3.5 terkait daftar kawasan tertangani di Wilayah I (Pulau Sumatra dan Pulau Kalimantan), Wilayah II (Pulau Jawa, Pulau Bali, dan Kepulauan Nusa Tenggara), dan Wilayah III (Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua).

3.4 Analisis Realisasi Anggaran

3.4.1 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Induk Nomor: SP DIPA-033.14-0/2024 pada tanggal 24 November 2023, alokasi anggaran BPIW TA 2024 adalah sebesar Rp143.564.190.000 (Seratus Empat Puluh Tiga Miliar Lima Ratus Enam Puluh Empat Juta Seratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) yang bersumber dari Rupiah Murni dan Pinjaman Luar Negeri. Selama Tahun Anggaran 2024, BPIW melakukan revisi DIPA sebanyak 36 kali dengan pagu akhir sebesar Rp223.265.585.000. Nilai tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan pagu akhir tahun sebelumnya.

Revisi DIPA BPIW sepanjang tahun 2024 terdapat pada seluruh komponen belanja, baik Belanja Pegawai, Belanja Barang maupun Belanja Modal. Seluruh revisi tersebut berasal baik dari pergeseran pagu internal maupun dari percepatan penarikan Pinjaman Luar Negeri (PLN).

Revisi *Automatic Adjustment* TA 2024

Sehubungan dengan Surat Menteri PUPR Nomor: KU 0101-Mn/53 Tanggal 25 Januari 2024 Hal *Automatic Adjustment* Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat TA 2024 menindaklanjuti Surat Menteri Keuangan Nomor: 1082/MK.02/2023 tanggal 29 Desember 2023 hal *Automatic Adjustment* Belanja Kementerian/Lembaga TA 2024, terdapat beberapa hal sebagai berikut:

- a. Target *Automatic Adjustment* (AA) Kementerian PUPR adalah sebesar Rp5.059,90 miliar.
- b. Berdasarkan lampiran surat tersebut, BPIW memiliki target *Automatic Adjustment* sebesar Rp750.000.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
- c. *Automatic Adjustment* tersebut dilakukan melalui langkah-langkah blokir pada:
 - i. Belanja barang, antara lain bersumber dari belanja honorarium, perjalanan dinas, paket meeting, serta operasional dan operasional lainnya.

- ii. Belanja modal, antara lain pada kegiatan yang diperkirakan belum dapat dimulai dan/atau belum dapat diserap pada semester I TA 2024 dan pada beberapa kegiatan direktif.
- iii. Kegiatan telah terblokir yang diperkirakan belum dapat dimulai pada semester I TA 2024.

Percepatan Penarikan Pinjaman Luar Negeri terkait *National Urban Development Strategy (NUDS)*

Sesuai dengan Nota Dinas Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional Hal Permohonan Persetujuan Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah terhadap Usulan Revisi Percepatan PHLN di lingkungan Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional TA 2024 Tanggal 4 Maret 2024, terdapat pertimbangan urgensi pelaksanaan revisi anggaran dalam hal percepatan penarikan PHLN yaitu penambahan alokasi anggaran dalam rangka membiayai kegiatan *National Urban Development Strategy (NUDS)* yang memiliki nilai kontrak sebesar Rp45.343.251.510,00.

Hingga TA 2023, telah dilakukan realisasi anggaran untuk pembebanan uang muka sebesar Rp5.169.130.672 sehingga terdapat sisa kebutuhan anggaran sebesar Rp40.174.120.838 atau Rp40.174.121.000 (dengan pembulatan keatas). Sesuai data OM-SPAN pada 13 Maret 2024, masih terdapat sisa alokasi sebesar Rp2.200.000.000 pada pagu Satuan Kerja Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional untuk pelaksanaan kegiatan NUDS sehingga perlu dilakukan percepatan sebesar Rp37.974.121.000.

Berkaitan dengan hal tersebut, Satuan Kerja Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional (400821) (DIPA No. DIPA-033.14.1.400821/2024) mengajukan usulan revisi anggaran TA 2024 berupa percepatan pinjaman sebesar Rp37.974.121.000.

Pergeseran Anggaran untuk Pemenuhan Pelaksanaan Kegiatan *World Water Forum (WWF)*

Sehubungan dengan adanya kebutuhan pergeseran anggaran terkait Dukungan Pelaksanaan *World Water Forum* di BPIW, disampaikan persetujuan Usulan Revisi Anggaran BPIW TA 2024 untuk keperluan sebagai berikut:

- a. Revisi dimaksud adalah pergeseran anggaran dalam hal pagu tetap dan revisi administrasi. Mekanisme revisi yang dilakukan adalah pergeseran anggaran belanja antar-Satker, antar-Kegiatan, dan antar-KRO, dalam 1 wilayah Kanwil Perbendaharaan, perubahan rencana penarikan dana pada halaman III DIPA, serta revisi administrasi untuk BPIW di TA 2024 pada Satuan Kerja Sekretariat BPIW, Satuan Kerja Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I, dan Satuan Kerja Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah III.
- b. Pergeseran anggaran antar-Satker, antar-Kegiatan, dan antar-KRO, dalam 1 wilayah Kanwil Perbendaharaan sebesar Rp324.000.000.
- c. Pertimbangan perlunya revisi anggaran adalah Pemenuhan kebutuhan anggaran untuk Dukungan Pelaksanaan *World Water Forum*, Penyesuaian Rencana Penarikan Dana pada Halaman III DIPA, dan Pemutakhiran Operasional Kegiatan untuk mengakomodasi pelaksanaan kegiatan di masing-masing Satuan Kerja.

Pergeseran Anggaran terkait Pemenuhan Belanja Pegawai (*Tunjangan Kinerja*)

Untuk mengakomodasi nilai baru tunjangan kinerja, BPIW memerlukan tambahan pagu belanja pegawai sebesar Rp6.702.265.000. Kebutuhan tambahan pagu tersebut juga telah memperhitungkan 100% tunjangan kinerja THR dan Gaji ke-13 bagi seluruh PNS dan PPPK di lingkungan BPIW.

Sesuai dengan Nota Dinas Kepala Biro PAKLN No. 56/ND/Sr/2024 tanggal 7 Februari 2024 tentang Pemenuhan Kebutuhan Belanja Pegawai KemenPUPR TA 2024, pemenuhan belanja pegawai akibat adanya kenaikan nilai tunjangan kinerja agar dipenuhi melalui optimalisasi anggaran masing-masing Unit Organisasi terutama dari Belanja Lembur, Belanja Honorarium Output Kegiatan, Belanja Perjalanan Dinas, serta Belanja Perjalanan Dinas Paket *Meeting*.

Sehubungan dengan pemenuhan belanja pegawai, Satuan Kerja Sekretariat BPIW, Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I, II, dan III mengajukan usulan revisi anggaran TA 2024 berupa pergeseran anggaran sebesar Rp3.641.148.000.

Percepatan Penarikan Pinjaman Luar Negeri pada terkait *Project Management Support (PMS) NUDP*

Pada TA 2024, telah dilakukan kontrak untuk paket Project Management Support (PMS) for National Urban Development Project (NUDP) sebesar Rp26.770.097.285 untuk dikerjakan selama 9 bulan dengan jenis kontrak waktu penugasan (*time based*). Pada DIPA Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, terdapat anggaran sebesar Rp300.000.000 untuk pelaksanaan PMS, sehingga masih terdapat

selisih kebutuhan anggaran sebesar Rp26.470.097.285. Akan tetapi, mempertimbangkan progres pekerjaan hingga saat ini, sisa waktu pelaksanaan pekerjaan, dan jenis kontrak berupa waktu penugasan, serta mempertimbangkan kebutuhan anggaran untuk pembayaran remunerasi dan *reimbursable* hingga masa akhir kontrak, maka percepatan yang perlu dilakukan hingga saat ini adalah sebesar Rp21.517.557.766 atau sebesar Rp21.517.558.000 (dengan pembulatan ke atas).

Berkaitan dengan dua hal tersebut, Satuan Kerja Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional (400821) (DIPA No. DIPA-033.14.1.400821/2024) mengajukan usulan revisi anggaran TA 2024 berupa percepatan pinjaman sebesar Rp21.517.558.000.

Pergeseran Anggaran terkait Pemanfaatan Sisa Alokasi Anggaran Dukungan Pelaksanaan WWF dan Pemenuhan Belanja Pegawai (Tunjangan Kinerja) Tahap II

Sehubungan dengan pemenuhan belanja pegawai, Satuan Kerja Sekretariat BPIW dan Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional mengajukan usulan revisi anggaran TA 2024 berupa pergeseran anggaran sebesar Rp1.416.100.000.

Sehubungan dengan adanya sisa alokasi anggaran dukungan pelaksanaan *World Water Forum* dan mempertimbangkan kebutuhan pelaksanaan kegiatan di Sekretariat BPIW, Satuan Kerja Sekretariat BPIW mengajukan usulan revisi anggaran TA 2024 berupa pergeseran anggaran sebesar Rp1.908.000.000. Rincian pergeseran adalah sebagai berikut:

- a. Pergeseran anggaran pada internal Satuan Kerja Sekretariat BPIW untuk pemenuhan belanja operasional sebesar Rp1.582.800.000.
- b. Pergeseran anggaran pada internal Satuan Kerja Sekretariat BPIW dari KRO EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal ke KRO AEC-Kerja sama untuk pemenuhan kebutuhan pelaksanaan seminar sebesar Rp254.872.000.
- c. Pergeseran anggaran pada internal Satuan Kerja Sekretariat BPIW dari KRO EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal ke KRO EBC-Layanan Manajemen SDM Internal untuk pemenuhan kebutuhan pelaksanaan kegiatan terkait pemutakhiran data eHRM sebesar Rp70.328.000.

Revisi Anggaran terkait Buka Blokir Automatic Adjustment (AA) dan Percepatan Penarikan Pinjaman Luar Negeri terkait *Tourism Development Program Management Support* pada kegiatan ITDP

Sesuai dengan Nota Dinas Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah II Nomor: 111/Nd/Wt/2024 Tanggal 5 Agustus 2024 Hal Percepatan PHLN Tahun Anggaran 2024, terdapat pertimbangan urgensi pelaksanaan revisi anggaran dalam hal percepatan penarikan PHLN yaitu penambahan alokasi anggaran dalam rangka membiayai kegiatan *Tourism Development Program Management Support* (TDPMS).

Pada DIPA TA 2024, alokasi untuk kegiatan TDPMS adalah sebesar Rp11.723.045.000,00 dan masih terdapat kebutuhan anggaran sebesar Rp11.565.925.613,00 dan US\$358.833,00 dalam rangka pemenuhan seluruh kegiatan TDPMS ITDP hingga akhir TA 2024. Dengan asumsi nilai tukar US\$1 adalah Rp16.500,00 maka dibutuhkan adanya tambahan alokasi PHLN dalam DIPA Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp17.486.671.000. (dengan pembulatan ke atas).

Revisi Anggaran terkait Blokir 50% Sisa Pagu Perjalanan Dinas

Menindaklanjuti Surat Menteri Keuangan Nomor S-1023/MK.02/2024 tanggal 7 November 2024 hal Langkah-Langkah Penghematan Anggaran Belanja Perjalanan Dinas Kementerian/Lembaga TA 2024 dan Surat Direktur Pelaksanaan Anggaran Nomor S-446/PB.2/2024 tanggal 10 November 2024 hal Penyampaian Rincian Target Penghematan Belanja Perjalanan Dinas Kementerian/Lembaga TA 2024, dilakukan analisis terkait beberapa hal sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Surat tersebut, belanja perjalanan dinas yang diperhitungkan untuk dilakukan penghematan adalah sisa belanja perjalanan dinas Kementerian/Lembaga hingga tanggal 7 November 2024. Adapun target penghematan sisa perjalanan dinas BPIW sebesar Rp2.092.962.000.
- b. Sesuai dengan target tersebut, telah dilakukan *exercise* berdasarkan data dari OM-SPAN tanggal 11 November 2024 hanya pada akun 524113 (Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota), 524114 (Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota), dan 524119 (Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota) sesuai dasar perhitungan Kementerian Keuangan.

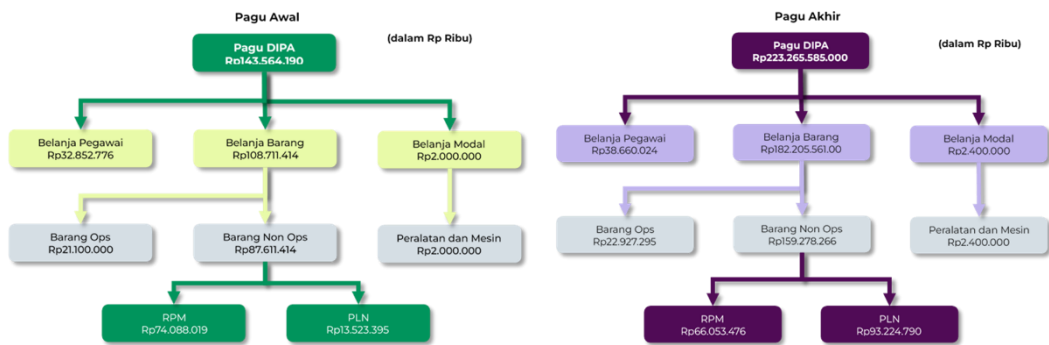
Rekapitulasi kronologi perubahan DIPA BPIW sebagaimana dijelaskan di atas ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 3.13 Kronologi Perubahan DIPA BPIW Tahun 2024

Rincian Revisi	Nilai (Rp)	Sumber Dana
Automatic Adjustment TA 2024 di BPIW	750.000.000	Internal BPIW
Percepatan Penarikan Pinjaman Luar Negeri terkait <i>National Urban Development Strategy</i> (NUDS)	37.974.121.000	PLN
Pergeseran Anggaran untuk Pemenuhan Pelaksanaan Kegiatan <i>World Water Forum</i> (WWF)	324.000.000	Internal BPIW
Pergeseran Anggaran terkait Pemenuhan Belanja Pegawai (Tunjangan Kinerja)	3.641.148.000	Internal BPIW
Percepatan Penarikan Pinjaman Luar Negeri pada terkait <i>Project Management Support</i> (PMS) NUDP	21.517.558.000	PLN
Pergeseran Anggaran terkait Pemanfaatan Sisa Alokasi Anggaran Dukungan Pelaksanaan WWF dan Pemenuhan Belanja Pegawai (Tunjangan Kinerja) Tahap II	1.416.100.000	Internal BPIW
Revisi Anggaran terkait Buka Blokir <i>Automatic Adjustment</i> (AA) dan Percepatan Penarikan Pinjaman Luar Negeri terkait <i>Tourism Development Program Management Support</i> pada kegiatan ITDP	17.486.671.000	Internal BPIW dan PLN
Revisi Anggaran terkait Blokir 50% Sisa Pagu Perjalanan Dinas	2.092.962.000	Internal BPIW

Komposisi belanja BPIW juga mengalami perubahan, dimana pada pagu awal tahun 2024 sebanyak 22,88% dialokasikan untuk belanja pegawai, 75,72% untuk belanja barang, dan 1,39% untuk belanja modal. Setelah revisi akhir pagu dilakukan, terjadi penurunan porsi belanja pegawai menjadi 17,32% dan belanja modal menjadi 1,07%, sedangkan porsi belanja barang mengalami peningkatan menjadi 81,61%. Perubahan Pagu DIPA awal tahun anggaran dan akhir tahun anggaran 2024 ditunjukkan sebagaimana gambar berikut.

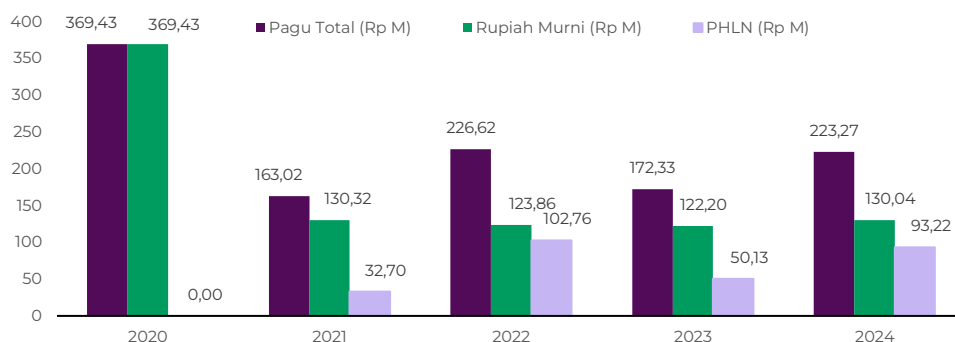
Gambar 3.1 Sandingan Pohon Anggaran Pagu Awal dan Akhir TA 2024



Pagu DIPA BPIW sepanjang tahun 2020-2024 mengalami fluktuasi diakibatkan adanya perubahan lingkungan strategis, seperti Covid-19, *refocusing* prioritas anggaran, perubahan target dan arah pembangunan tahun, serta perubahan fokus kegiatan dari sebelumnya hanya mendorong tersusunnya

produk perencanaan dan pemrograman, menjadi fokus juga terhadap evaluasi kebermanfaatan infrastruktur. Perubahan Pagu DIPA tersebut ditunjukkan pada gambar berikut.

Gambar 3.2 Alokasi Anggaran BPIW 2020-2024



3.3.4 Realisasi Anggaran TA 2024

Pada tahun 2024, BPIW mengelola pagu anggaran sebesar Rp223.265.585.000 untuk pelaksanaan kegiatan Kegiatan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dengan Klasifikasi Rincian Output (KRO), yaitu Kebijakan Bidang Pengembangan Wilayah dan 2) Kegiatan Dukungan Manajemen Pengembangan Infrastruktur Wilayah dengan KRO yaitu, a) Kerja Sama; b) Layanan Dukungan Manajemen Internal; c) Layanan Sarana dan Prasarana Internal; d) Layanan Manajemen SDM Internal; dan e) Layanan Manajemen Kinerja Internal. Berdasarkan data pada Aplikasi i-eMonitoring PUPR, capaian kinerja penyerapan anggaran BPIW tahun 2024 sebesar Rp211.199.801.000 (94,60%). Berdasarkan jenis belanja, persentase realisasi anggaran terbesar terdapat pada komponen Belanja Pegawai, diikuti oleh Belanja Modal dan Belanja Barang.

Tabel 3.14 Realisasi Anggaran BPIW Tahun 2024

Jenis Belanja	Tahun Anggaran 2024		
	Pagu (Rp Ribu)	Realisasi	
		Rp Ribu	%
Pegawai	38.660.024	38.378.124	99,27
Barang	182.205.561	170.423.642	93,53
- Operasional	22.927.295	22.886.888	99,82
- Non Operasional	159.278.266	147.536.754	92,63
Modal	2.400.000	2.398.035	99,92
Total	223.265.585	211.199.801	94,60

Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai BPIW tahun 2024 sebesar Rp38.378.124.000 (99,27% dari Rp38.660.024.000). Belanja tersebut meliputi kebutuhan untuk pembayaran gaji dan tunjangan, tunjangan kinerja bagi PNS dan PPPK di lingkungan BPIW. Pagu awal untuk belanja tersebut sebesar Rp32.852.776.000, namun untuk mengakomodasi nilai baru tunjangan kinerja, BPIW menambahkan pagu belanja pegawai sebesar Rp6.702.265.000.

Belanja Barang

Belanja Barang BPIW meliputi Barang Operasional dan Non Operasional. Besaran realisasi Barang Operasional yaitu Rp22.886.888.000 (99,82% dari 22.927.295.000) dan Non Operasional yaitu Rp147.536.754.000 (92,63% dari 159.278.266). Belanja Operasional meliputi Layanan Perkantoran, Administrasi di Satker Sekretariat BPIW, Layanan Operasional dan Administrasi Satker serta Pengawasan Internal Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional/Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR

Wilayah I/ Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah II/ Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah III. Sementara, Belanja Barang Non Operasional merupakan belanja atas pelaksanaan kegiatan substansi dengan KRO yang meliputi 1) Kerjasama; 2) Layanan Dukungan Manajemen Internal; 3) Layanan Sarana dan Prasarana Internal; 4) Layanan Manajemen SDM Internal; 5) Layanan Manajemen Kinerja Internal; dan 6) Pengembangan Infrastruktur Wilayah.

Belanja Modal

Belanja Modal BPIW merupakan belanja untuk memenuhi kebutuhan Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran. Realisasi anggaran tahun 2024 sebesar 2.398.035.000 (99,92% dari 2.400.000.000).

Adapun Realisasi BPIW berdasarkan Program, Kegiatan, RO dan, KRO BPIW adalah sebagai berikut.

Tabel 3.15 Realisasi Anggaran BPIW Per RO Tahun 2024

No	Program Kegiatan/KRO/RO	Pagu (Rp Ribu)	Realisasi (Rp Ribu)	Progres (%)		Nilai Efisiensi (%)
				Keuangan	Fisik	
	Program Dukungan Manajemen	223.265.585.000	211.199.801.147	94,6	99,78	105,48
	Dukungan Manajemen Pengembangan Infrastruktur Wilayah	83.675.043.000	82.415.328.760	98,49	100	101,53
	Kerja sama	1.607.872.000	1.393.147.002	86,65	100	115,41
1	Kesepakatan Kerja Sama Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah	615.872.000	510.111.450	82,83	100	120,73
2	Potensi Kerja Sama dalam Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah pada Kawasan Industri Strategis	992.000.000	883.035.552	89,02	100	112,33
	Layanan Dukungan Manajemen Internal	70.006.976.000	69.642.589.880	99,48	100	100,52
3	Layanan BMN	463.502.000	460.696.556	99,39	100	100,61
4	Layanan Hukum	405.442.000	403.706.006	99,57	100	100,43
5	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	3.563.058.000	3.553.310.700	99,73	100	100,27
6	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	786.000.000	781.545.477	99,43	100	100,57
7	Layanan Umum	1.328.050.000	1.310.261.470	98,66	100	101,36
8	Layanan Data dan Informasi	1.873.605.000	1.868.057.424	99,7	100	100,30
9	Layanan Perkantoran	61.587.319.000	61.265.012.247	99,48	100	100,52
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	2.400.000.000	2.398.035.001	99,92	100	100,08
10	Layanan Sarana Internal	2.400.000.000	2.398.035.001	99,92	100	100,08
11	Layanan Manajemen SDM Internal	2.065.297.000	1.931.220.799	93,51	100	106,94
12	Layanan Manajemen SDM	2.065.297.000	1.931.220.799	93,51	100	106,94
	Layanan Manajemen Kinerja Internal	7.594.898.000	7.050.336.078	92,83	100	107,72
13	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	2.236.898.000	2.032.489.527	90,86	100	110,06
14	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	2.019.000.000	1.987.966.835	98,46	100	101,56
15	Layanan Manajemen Keuangan	1.689.000.000	1.533.423.867	90,79	100	110,14
16	Layanan Audit Internal	1.650.000.000	1.496.455.849	90,69	100	110,27
	Pengembangan Infrastruktur Wilayah	139.590.542.000	128.784.472.387	92,26	99,65	108,01
	Kebijakan Bidang Pengembangan Wilayah	139.590.542.000	128.784.472.387	92,26	99,65	108,01
17	Kebijakan Teknis dan Strategi Perkotaan Nasional	65.565.074.000	58.154.959.172	88,7	99,26	111,91
18	Manajemen Proyek ITDP	30.409.716.000	28.398.189.701	93,39	100	107,08
19	Renstra Kementerian PUPR 2025-2029	1.100.000.000	1.039.781.824	94,53	100	105,79
20	Kebijakan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional dan Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah Jangka Panjang 2025-2045	4.634.400.000	4.442.305.601	95,86	100	104,32
21	Program Infrastruktur PUPR Terpadu	2.953.000.000	2.931.645.201	99,28	100	100,73
22	Kinerja Pengembangan Infrastruktur PUPR	1.700.000.000	1.649.701.665	97,04	100	103,05
23	Model Analisis Manfaat dan Dampak Infrastruktur PUPR Berbasis Spasial	525.500.000	423.806.762	80,65	100	123,99
24	Program Tahunan Wilayah Pulau Sumatra Bagian Utara	657.487.000	656.847.224	99,9	100	100,10
25	Program Tahunan Wilayah Pulau Sumatra Bagian Selatan	599.285.000	598.446.868	99,86	100	100,14

No	Program Kegiatan/KRO/RO	Pagu (Rp Ribu)	Realisasi (Rp Ribu)	Progres (%)		Nilai Efisiensi (%)
				Keuangan	Fisik	
26	Program Tahunan Wilayah Pulau Kalimantan	587.750.000	582.499.565	99,11	100	100,90
27	Telaahan Strategis Pengembangan Infrastruktur PUPR Pulau Sumatra dan Kalimantan	7.744.583.000	7.742.881.460	99,98	100	100,02
28	Dukungan Integrasi Penanganan Kemiskinan Ekstrem dan Stunting	1.292.683.000	1.268.638.256	98,14	100	101,90
29	Rencana Pengembangan Infrastruktur untuk Kawasan Penajam Paser Utara	449.324.000	442.132.202	98,4	100	101,63
30	Program Tahunan Wilayah Pulau Jawa	678.000.000	652.659.713	96,26	100	103,89
31	Program Tahunan Wilayah Pulau Bali dan Provinsi Jawa Timur	700.000.000	669.365.164	95,62	100	104,58
32	Program Tahunan Wilayah Kepulauan Nusa Tenggara	1.000.000.000	963.040.726	96,3	100	103,84
33	Telaahan Strategis Pengembangan Infrastruktur PUPR Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara	3.944.210.000	3.752.821.693	95,15	100	105,10
34	Rencana Pengembangan Infrastruktur Kawasan Prioritas KSPN Dieng, Pantai Selatan Yogyakarta, dan KSPN Karst Gunung Kidul	1.500.000.000	1.419.957.493	94,66	100	105,64
35	Rencana Pengembangan Infrastruktur Kawasan Prioritas mendukung Daerah Tertinggal Sumba Tengah (Pulau Sumba) dan Lembata (Pulau Flores)	1.268.000.000	1.267.078.708	99,93	100	100,07
36	Program Tahunan Wilayah Pulau Sulawesi	1.100.000.000	1.097.775.739	99,8	100	100,20
37	Program Tahunan Wilayah Kepulauan Maluku	974.400.000	974.129.931	99,97	100	100,03
38	Program Tahunan Wilayah Pulau Papua	1.214.540.000	1.001.132.057	82,43	100	121,32
39	Telaahan Strategis Pengembangan Infrastruktur PUPR Pulau Sulawesi, Maluku, dan Papua	4.351.976.000	4.134.844.937	95,01	100	105,25
40	Rencana Pengembangan Infrastruktur untuk Kawasan Industri Pomalaa dan Kawasan Industri Mongondow	1.562.300.000	1.558.324.520	99,75	100	100,25
41	Rencana Pengembangan Infrastruktur untuk Kawasan Industri Obi dan Kawasan Industri Buli serta Kawasan Pusat Pemerintahan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua	3.078.314.000	2.961.506.205	96,21	100	103,94
Total		223.265.585.000	211.199.801.147	94,6	99,78	105,48

Berdasarkan tabel di atas, nilai efisiensi anggaran BPIW tahun 2024 sebesar 1051,48%. Angka ini diukur dari perbandingan output fisik dengan penyerapan anggaran. Hal tersebut menunjukkan bahwa dengan lebih rendahnya realisasi anggaran dibandingkan target/prognosis (98,56%), output prioritas yang ditargetkan tetap dapat dipenuhi (fisik 100%). Persentase realisasi KRO paling tinggi yaitu Program Tahunan Wilayah Pulau Sumatra Bagian Utara yaitu 99,99% dan sementara paling rendah pada kegiatan Model Analisis Manfaat dan Dampak Infrastruktur PUPR Berbasis Spasial yaitu 80,65%. Penyebab rendahnya capaian kegiatan tersebut antara lain diperlukannya dukungan lisensi aplikasi landuseSIM dan GraviGIS serta peningkatan model analisa jangka panjang untuk dapat menghasilkan skenario prioritas kawasan yang lebih komprehensif. Secara total belum tercapainya 100% realisasi anggaran BPIW tahun 2024, di antara lain disebabkan belum terserapnya seluruh pagu untuk RO Kebijakan Teknis dan Strategi Perkotaan Nasional yang belum terserap sebesar Rp7.410.114.828 dan akibat adanya *self-blocking* sebesar Rp2.092.962.000.

3.3.5 Perbandingan Realisasi Anggaran TA 2024 dengan Tahun Sebelumnya

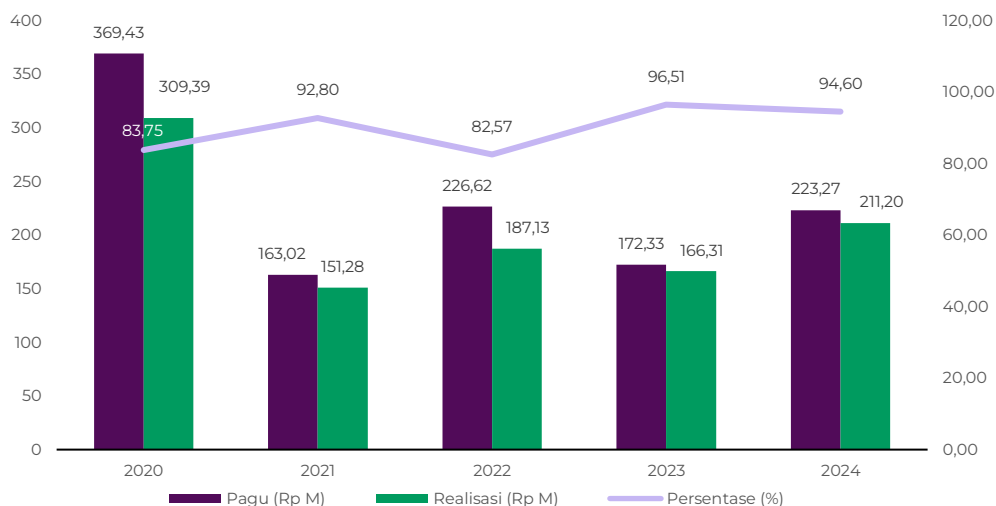
Apabila diperbandingkan persentase realisasi anggaran BPIW tahun 2024 dengan tahun 2023, persentase realisasi pada tahun ini lebih kecil yaitu 94,6% dibandingkan 96,51% pada tahun 2023. Meskipun secara persentase lebih kecil, namun secara jumlah anggaran, realisasi tahun 2024 lebih besar yaitu Rp211.199.801.000. Kenaikan anggaran cukup signifikan terutama pada pagu Belanja Pegawai dan kebutuhan PHLN dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Realisasi belanja Non Operasional pada tahun 2024 memiliki persentase yang paling rendah diantara belanja lainnya dan apabila diperbandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan adanya *self-blocking* penghematan sisa perjalanan dinas pada akun 524113 (Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota), 524114 (Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota), dan 524119 (Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota) sebesar Rp2.092.962.000. Rincian perbandingan pagu dan realisasi anggaran BPIW tahun 2024 dengan tahun sebelumnya sebagai berikut.

Tabel 3.16 Perbandingan Realisasi Anggaran dengan Tahun Sebelumnya

Jenis Belanja	Tahun Anggaran 2023			Tahun Anggaran 2024		
	Pagu (Rp Ribu)	Realisasi		Pagu (Rp Ribu)	Realisasi	
		Rp Ribu	%		Rp Ribu	%
Pegawai	29.370.000	28.841.192	98,20	38.660.024	38.378.124	99,27
Barang	140.455.983	135.060.240	96,16	182.205.561	170.423.642	93,53
- Operasional	22.500.000	22.392.522	99,52	22.927.295	22.886.888	99,82
- Non Operasional	117.955.983	112.667.718	95,52	159.278.266	147.536.754	92,63
Modal	2.500.000	2.412.011	96,48	2.400.000	2.398.035	99,92
Total	172.325.983	166.313.443	96,51	223.265.585	211.199.801	94,60

Perbandingan realisasi anggaran juga dilakukan atas pelaksanaan anggaran pada tahun perencanaan tahun 2020-2024. Persentase realisasi tertinggi yaitu pada tahun 2023, diikuti 2024, 2021, 2020, dan 2022. Rincian perbandingan realisasi ditunjukkan gambar berikut.

Gambar 3.3 Perbandingan Realisasi Anggaran BPIW 2020-2024



3.5 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Kebijakan efisiensi penggunaan sumber daya yang dilaksanakan oleh BPIW selama tahun 2024 sebagai berikut:

- Menindaklanjuti Surat Menteri Keuangan Nomor S-1023/MK.02/2024 tanggal 7 November 2024 hal Langkah-Langkah Penghematan Anggaran Belanja Perjalanan Dinas K/L TA 2024 dan Surat Direktur Pelaksanaan Anggaran Nomor S-446/PB.2/2024 tanggal 10 November 2024 hal Penyampaian Rincian Target Penghematan Belanja Perjalanan Dinas Kementerian/Lembaga TA 2024, BPIW melakukan *self-blocking* penghematan sisa perjalanan dinas pada akun 524113 (Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota), 524114 (Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota), dan 524119 (Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota) sebesar Rp2.092.962.000.
- Efisiensi kebutuhan pagu anggaran sebagai juga ditunjukkan dengan adanya penyesuaian kebutuhan pagu atas pelaksanaan kegiatan perencanaan dan pemrograman sebagaimana ditunjukkan tabel berikut.

Tabel 3.17 Efisiensi Kebutuhan Pagu Klaster Kegiatan Perencanaan dan Pemrograman

Klaster Kegiatan	Kebutuhan Pagu (Rp.000)		Efisiensi Anggaran (Rp.000)
	2023	2024	
Perencanaan	10.778.908	7.857.938	2.920.970
Pemrograman	10.978.754	10.464.462	514.292
Total	21.757.662	18.322.400	3.435.262

Seiring dengan pelaksanaan perencanaan dan pemrograman yang dilaksanakan oleh BPIW setiap tahun, BPIW mulai dapat merumuskan besaran pagu yang optimal untuk mencapai kuantitas dan kualitas *output* yang diharapkan. Pelaksanaan kegiatan yang sebelumnya hanya dilaksanakan secara luring, kunjungan dan permintaan kebutuhan data secara langsung ke daerah, juga kegiatan sinkronisasi yang dilaksanakan di luar kantor saat ini semakin dapat disesuaikan sehingga dapat dilaksanakan secara *hybrid* antara luring dan daring. Besaran efisiensi anggaran terhitung sebesar Rp3.435.262.000.

- c. Dalam pelaksanaan tugas BPIW terkait perencanaan dan pemrograman pembangunan infrastruktur PUPR, BPIW membuat SIPro yang menjadi *tools database* keterpaduan program pembangunan infrastruktur PUPR pada kegiatan Rakorbangwil. Aplikasi ini dimanfaatkan selama pembahasan program dalam Rakorbangwil, melibatkan BPIW, Unit Organisasi teknis PUPR, Kementerian/Lembaga terkait, serta Pemerintah Daerah. Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pada kegiatan-kegiatan yang terkait dengan perencanaan dan pemrograman, yaitu Sinkronisasi Program Infrastruktur PUPR, Sinkronisasi dan Penyusunan Prioritisasi Program Tahunan Wilayah, Penyusunan Rencana Pengembangan Infrastruktur untuk Kawasan Prioritas serta Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur PUPR.
- d. Pelaksanaan berbagai rapat dilakukan di dalam kantor atau secara daring dengan memaksimalkan utilisasi Ruang Rapat yang dimiliki BPIW. Sepanjang tahun 2024, terdapat 273 kali rapat (diluar rapat internal) yang dilaksanakan di ruang rapat kantor BPIW, baik di *coffee room* lantai 2, Ruang Rapat Lantai 2, 3, dan 4. Dengan pemanfaatan ruang tersebut, BPIW telah melakukan efisiensi sebesar Rp764.000.000.

3.6 Analisis Pemanfaatan Informasi dalam Laporan Kinerja

Sebagai salah satu langkah pemantauan dan evaluasi kinerja, muatan dalam Laporan Kinerja dimanfaatkan oleh pimpinan dan pegawai BPIW sebagai bahan diskusi dan masukan terhadap peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Muatan dimaksud antara lain mencakup target dan rencana kerja, capaian realisasi kinerja dan anggaran, isu dan aspek strategis serta rekomendasi tindak lanjut kedepan. Uraian pemanfaatan substansi Laporan Kinerja sebagai berikut

3.6.1 Analisis Perhatian Utama Pimpinan Terhadap Informasi Dalam Laporan Kinerja

Target dan capaian realisasi baik kinerja maupun anggaran menjadi perhatian pimpinan, dimana secara berkala dipantau melalui Rapat Pimpinan, baik di tingkat Unit Kerja maupun di level Eselon I. BPIW secara rutin mengadakan rapat pembahasan progres kinerja dengan para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama lainnya. Informasi-informasi yang dibahas oleh para pimpinan mencakup isu strategis yang dihadapi oleh masing-masing Unit Kerja, progres kinerja baik anggaran maupun substansi kegiatan, prognosis anggaran, serta permasalahan dan rekomendasi yang menjadi dasar pengambilan keputusan.

Salah satu kegiatan di BPIW yang mendukung poin informasi dalam laporan kinerja telah menjadi perhatian utama pimpinan adalah adanya Rapat Pimpinan (Rapim), baik di level *Board of Director* (BOD) dalam BPIW maupun di level eselon 1 Kementerian PUPR yang dilaksanakan secara rutin. Informasi-informasi yang dibahas oleh para pimpinan dalam forum ini mencakup isu-isu strategis yang dialami oleh unit organisasi/unit kerja, capaian kinerja, rencana kerja, capaian kinerja, realisasi anggaran, serta permasalahan dan rekomendasi. Rapat-rapat pimpinan tersebut merupakan dasar dari pengambilan keputusan di BPIW. Selain dalam Rapat Pimpinan perhatian pimpinan atas informasi kinerja juga selalu dibahas dengan melibatkan seluruh pegawai BPIW dalam pelaksanaan Rapat Kerja.

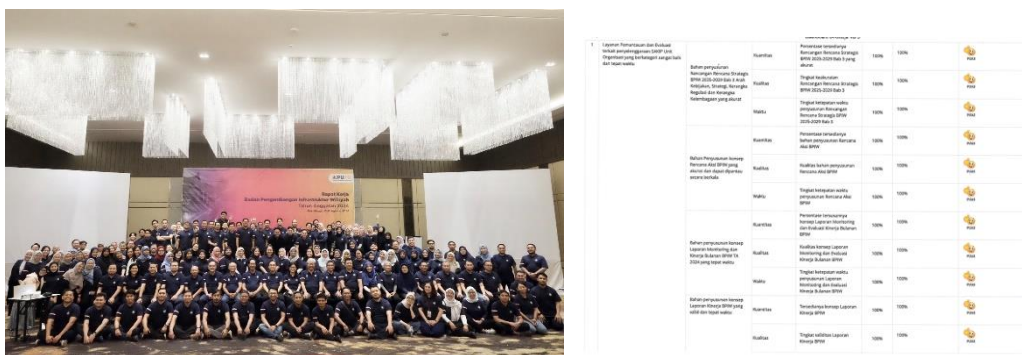
Gambar 3.4 Bukti Dukung Perhatian Utama Pimpinan Terhadap Informasi Dalam Laporan Kinerja



3.6.2 Analisis Kepedulian Seluruh Pegawai Terhadap Informasi Dalam Laporan Kinerja

Muatan Laporan Kinerja juga menggambarkan keterlibatan seluruh pegawai BPIW, tidak hanya dalam penyusunan laporan, namun juga dalam pencapaian kinerja yang menjadi target unit kerja. Selama tahun 2024, pegawai BPIW telah melakukan berbagai upaya dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi terkait layanan dukungan manajemen kepada seluruh Unit Kerja di BPIW sesuai dengan peran masing-masing pegawai yang tercantum dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). Seluruh pegawai menyusun rencana aksi dan mengisi capaian kinerja masing-masing dalam SKP yang kemudian dievaluasi oleh pimpinan per triwulan. Selain itu, informasi terkait progres dan rencana kinerja organisasi juga disampaikan oleh pimpinan kepada seluruh pegawai dalam forum Rapat Kerja yang dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali selama tahun 2024.

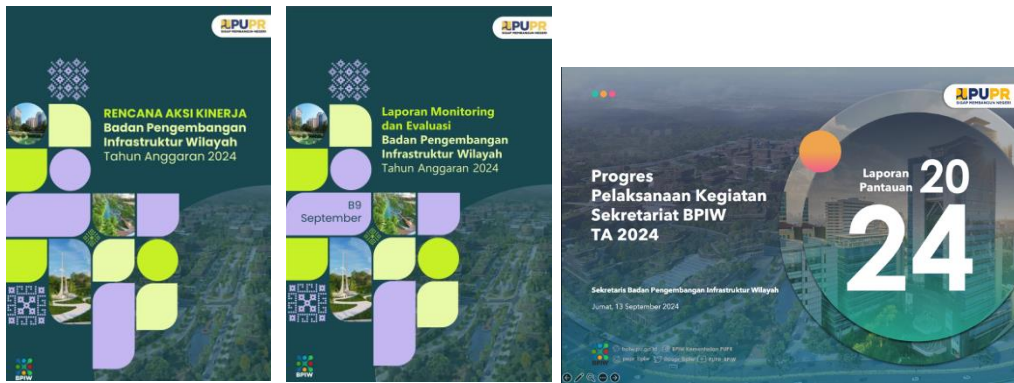
Gambar 3.5 Bukti Dukung Kepedulian Seluruh Pegawai Terhadap Informasi Dalam Laporan Kinerja



3.6.3 Analisis Penyesuaian Aktivitas Untuk Mencapai Kinerja Terhadap Informasi Dalam Laporan Kinerja Berkala

Informasi mengenai kemajuan hasil pelaksanaan kegiatan, serta permasalahan dan rekomendasi digunakan oleh BPIW sebagai dasar penyesuaian rencana pelaksanaan kegiatan selama tahun 2024. Penyesuaian dimaksud dilakukan dalam rangka mencapai target yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja BPIW yang kemudian dituangkan Rencana Aksi Kinerja dan Revisi Rencana Aksi. Untuk memantau capaian kinerja tersebut, BPIW menyusun Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja dan Laporan Pantauan Pelaksanaan Anggaran per bulan yang kemudian disampaikan kepada pimpinan sebagai dasar pertimbangan pengambilan keputusan.

Gambar 3.6 Bukti Dukung Penyesuaian Aktivitas Untuk Mencapai Kinerja Terhadap Informasi Dalam Laporan Kinerja Berkala



3.6.4 Analisis Penyesuaian Penggunaan Anggaran Untuk Mencapai Kinerja Terhadap Informasi Dalam Laporan Kinerja Berkala

Informasi mengenai kemajuan hasil pelaksanaan kegiatan, deviasi antara rencana dengan realisasi fisik dan keuangan, serta permasalahan dan rekomendasi digunakan oleh BPIW sebagai dasar penyesuaian pagu dan prognosis anggaran selama tahun 2024. Penyesuaian dimaksud antara lain berupa pergeseran anggaran internal untuk memenuhi kebutuhan Belanja Pegawai dan Belanja Operasional sehingga realisasi penyerapan anggaran dapat lebih optimal. Dalam rangka penyesuaian penggunaan anggaran, BPIW melakukan 36 kali Revisi DIPA selama tahun 2024.

Gambar 3.7 Bukti Dukung Penyesuaian Penggunaan Anggaran Untuk Mencapai Kinerja Terhadap Informasi Dalam Laporan Kinerja Berkala



3.6.5 Analisis Pencapaian Keberhasilan Kinerja Berdasarkan Informasi dalam Laporan Kinerja

Analisis dalam Laporan Kinerja terkait keberhasilan pencapaian target kinerja digunakan sebagai bahan evaluasi dalam penentuan strategi untuk mencapai target kinerja di tahun berikutnya. Evaluasi terhadap capaian kinerja BPIW juga dilakukan dalam rangka evaluasi AKIP internal di BPIW dimana hasilnya berupa Berita Acara Kesepakatan Hasil Evaluasi yang ditandatangani oleh pimpinan BPIW.

3.6.6 Analisis Penyesuaian Perencanaan Kinerja Berdasarkan Informasi Dalam Laporan Kinerja

Muatan dalam Laporan Kinerja Tahun 2023 digunakan sebagai masukan dalam penyesuaian perencanaan kinerja tahun 2024 dalam rangka perbaikan kinerja, baik dalam hal pencapaian target maupun efisiensi pelaksanaan kegiatan. Muatan dimaksud antara lain berupa isu strategis, rencana kerja, capaian kinerja, realisasi anggaran, permasalahan dan rekomendasi, kemajuan hasil pelaksanaan kegiatan, serta deviasi antara rencana serta realisasi fisik dan keuangan.

3.6.7 Analisis Perubahan Budaya Kinerja Organisasi Berdasarkan Informasi Dalam Laporan Kinerja

Informasi dalam laporan kinerja mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi salah satunya dapat dilihat dalam proses Manajemen Risiko. Manajemen risiko merupakan faktor penting yang mempengaruhi peningkatan kinerja organisasi melalui komitmen dan budaya organisasi dalam pencapaian tujuan organisasi, dimana manajemen risiko sendiri dilakukan berdasarkan pada pengendalian terhadap risiko- risiko yang muncul dan berpotensi menghambat pencapaian tujuan organisasi. Profil risiko yang disusun oleh BPIW telah mempertimbangkan sasaran kinerja organisasi dan evaluasi terhadap kinerja organisasi yang termuat dalam laporan kinerja di tahun sebelumnya.

Gambar 3.8 Bukti Dukung Perubahan Budaya Kinerja Organisasi Berdasarkan Informasi Dalam Laporan Kinerja





4

Penutup

4

Penutup

4.1 Simpulan Umum

Laporan Kinerja BPIW Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program sesuai dengan Revisi Rencana Strategis BPIW 2020-2024. Laporan Kinerja ini menjadi bentuk pengukuran dan evaluasi kinerja BPIW pada tahun terakhir Renstra BPIW 2020-2024, sebagai lanjutan atas pengukuran dan evaluasi kinerja di tahun sebelumnya.

BPIW mempunyai tugas yaitu melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan rencana terpadu program pembangunan infrastruktur PUPR berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPIW didukung oleh 5 (lima) Unit Kerja yang meliputi Sekretariat BPIW, Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I, Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah II, dan Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah III.

Pada tahun 2024 terdapat beberapa isu strategis yang menjadi perhatian dalam pelaksanaan kegiatan BPIW diantaranya: 1) Perencanaan Jangka Panjang dan Menengah Kementerian PUPR Mendukung Target Perencanaan Nasional; 2) Kebijakan Teknis dan Strategi Perkotaan Nasional; 3) Penetapan RPIW melalui Keputusan Menteri PUPR dan Pengembangan Rencana Kawasan Prioritas; 4) Pembangunan Pariwisata Terintegrasi dan Berkelanjutan; 5) Penyelenggaraan Keterpaduan dan Sinkronisasi Program Tahunan Infrastruktur PUPR; 6) Keterpaduan dan Sinkronisasi Program Pembangunan Infrastruktur PUPR dalam Mendukung Penanganan Kemiskinan Ekstrem dan Stunting; 7) Kebermanfaatan dan Keberfungsian Infrastruktur PUPR Terbangun; 8) Penguatan Peran BPIW melalui Perumusan SOTK dan Struktur Kinerja; 9) Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Mendukung Penyusunan Rencana dan Program Pengembangan Infrastruktur Wilayah; dan 10) Partisipasi BPIW dalam 10th World Water Forum

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Revisi Tahun 2024 capaian kinerja BPIW diukur melalui

1. IKSS Tingkat Keselarasan Dukungan Infrastruktur di Kawasan Strategis dengan target 82,5%;
2. IKSP 1 Tingkat Pemanfaatan Kebijakan, Strategi Perencanaan dan Pemrograman dengan target 100%;
3. IKSP 2 Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya dengan target 94,58%;
4. SK- 1 Meningkatnya Pelaksanaan Perencanaan dan Pemrograman Pembangunan Infrastruktur dengan 4 (empat) IKSK; dan
5. SK-2 Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dengan 6 (enam) IKSK.

Pada tahun 2024, BPIW didukung oleh SDM sebanyak 291 orang yang terdiri atas 163 laki-laki dan 128 perempuan. Komposisi SDM BPIW berdasarkan jenis pegawai terdiri atas 193 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), 81 orang, Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN), dan 15 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Selain melalui SDM, pada tahun ini BPIW memiliki alokasi anggaran yang tertuang pada Pagu DIPA BPIW TA 2024 terakhir sebesar Rp223.265.585.000 yang dapat mendukung seluruh pelaksanaan kegiatan perencanaan dan pemrograman, hingga evaluasi kebermanfaatan.

Dalam rangka perbaikan pelaksanaan kinerja, BPIW terus melakukan upaya perbaikan melalui penyesuaian kegiatan berdasarkan rekomendasi hasil evaluasi Inspektorat Jenderal atas implementasi AKIP BPIW tahun 2023. BPIW pada tahun 2024 telah mengupayakan untuk dapat menindaklanjuti 7 dari 9 rekomendasi yang disampaikan oleh Inspektorat Jenderal. Sebagai upaya perbaikan, BPIW juga telah mengukur hasil capaian kinerja dengan target sebagaimana yang tertuang pada Perjanjian Kinerja

Revisi. Berdasarkan hasil perbandingan target dan realisasi diketahui bahwa capaian IKSS, IKSP, dan IKSK BPIW telah melebihi target yang telah ditetapkan kecuali pada IKSP 1-2 dan IKSK 2-2.

Sementara, berdasarkan realisasi anggaran BPIW TA 2024 sebesar Rp211.199.801.000 (94,60%). Adanya sisa anggaran diantaranya karena adanya beberapa kegiatan yang belum sepenuhnya optimal dan *self-blocking* penghematan sisa perjalanan dinas pada akun 524113 (Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota), 524114 (Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota), dan 524119 (Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota)

Seluruh informasi dalam Laporan Kinerja BPIW tersebut menjadi bagian yang tidak terlepas dalam pelaksanaan kegiatan BPIW sepanjang tahun 2024. Laporan Kinerja telah menjadi perhatian pimpinan, menjadi kepedulian pegawai, digunakan sebagai dasar penyesuaian aktivitas dan anggaran, sebagai bentuk evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja, penyesuaian perencanaan kinerja dan perubahan budaya organisasi.

4.4.1 Faktor Pendukung Keberhasilan

Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian target kinerja BPIW tahun 2024 dijabarkan sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis (IKSS - Tingkat Keselarasan Dukungan Infrastruktur di Kawasan Strategis)

Faktor Eksternal IKSS

- a. Peran Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah yang mendorong sinergi dan kolaborasi K/L baik pusat maupun daerah dalam mendukung pembangunan infrastruktur yang tepat sasaran, efisien, produktif, dan berdampak.
- b. Peran Menteri PU dalam mendorong Rakorbangwil sebagai wadah untuk memperkuat kerja sama lintas K/L dalam mendukung target nasional dan optimalisasi infrastruktur terbangun.
- c. K/L mitra dalam memberikan dukungan data dan informasi dalam rangka penyusunan program keterpaduan infrastruktur PU pada kawasan prioritas. Serta Pemerintah Daerah dalam memberikan dukungan data dan informasi serta pendampingan kunjungan lapangan dalam rangka penyusunan program keterpaduan infrastruktur PU pada kawasan prioritas.
- d. Peran pimpinan unit organisasi Kementerian PU dalam mendukung penyusunan program keterpaduan infrastruktur PUPR melalui internalisasi dalam organisasi serta penyediaan data dan informasi untuk kepentingan analisis prioritas program.

Faktor Internal IKSS

- a. RPIW Provinsi yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri menjadi salah satu pertimbangan dalam penyusunan program keterpaduan infrastruktur PU pada kawasan prioritas. Sehingga penapisan program dan kawasan dapat lebih baik dengan dasar perencanaan yang komprehensif untuk mendukung skenario pembangunan.
- b. Optimalisasi pemanfaatan Sistem Informasi Pemrograman (SIPro) dalam membantu proses keterpaduan pemrograman infrastruktur PU, mulai dari perencanaan, pemrograman hingga evaluasi. Selain itu, SIPro juga digunakan dalam proses digitalisasi Rencana Pembangunan Infrastruktur Wilayah (RPIW) dan mendukung interoperabilitas data dengan sistem informasi pemrograman lainnya antar unit organisasi teknis.

2. Sasaran Program – (IKSP 1-1 Tingkat Pemanfaatan Kebijakan, Strategi Perencanaan dan Pemrograman)

Faktor Eksternal IKSP 1-1

- a. Peran pemerintah daerah dalam mendukung data dan informasi dalam penanganan kawasan. Pemerintah daerah termasuk dinas terkait baik di seluruh provinsi, kabupaten dan kota dapat melakukan komunikasi dan kerjasama yang baik untuk mendukung pelaksanaan kegiatan. Dukungan pelaksanaan kegiatan dapat terlihat pada saat pelaksanaan survei/kunjungan lapangan serta pengumpulan data pendukung analisis infrastruktur kawasan.
- b. Peran masyarakat di daerah menjadi penting dalam hal pelaksanaan survei lapangan dan pengumpulan data. Masyarakat dapat memberikan informasi yang baik dan membantu dalam hal memberikan informasi mengenai permasalahan yang dihadapi terkait dengan pemanfaatan

infrastruktur kawasan serta potensi-potensi yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan infrastruktur di wilayah tersebut di masa depan.

- c. Peran pihak swasta pada beberapa kawasan menjadi penting khususnya dalam dukungan data dan informasi. Beberapa kawasan khusus seperti kawasan industri atau kawasan pariwisata dikelola langsung oleh pihak swasta, namun tetap mendukung secara maksimal pada saat melakukan kunjungan lapangan serta dukungan data dan informasi yang dibutuhkan.
- d. Peran pimpinan unit organisasi khususnya Ditjen Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya, Perumahan, Pembiayaan Infrastruktur PUPR dalam memberikan masukkan substansi, pengumpulan data dan informasi penyusunan rencana infrastruktur PUPR. Serta Sekretariat Jenderal dalam mendorong penetapan RPIW menjadi Keputusan Menteri.

Faktor Internal IKSP 1-1

- a. Kebijakan Kepala BPIW dalam memberikan dukungan agar RPIW dapat memiliki *legal standing* yang lebih kuat dengan ditetapkan oleh Menteri PUPR sehingga dapat menjadi acuan bagi pembangunan infrastruktur kedepan.
- b. Penyusunan RPIW yang lebih rinci mendorong terwujudnya rencana yang lebih implementatif diterjemahkan dalam program pembangunan khusus kawasan-kawasan prioritas yang diyakini memiliki dampak yang signifikan bagi pengembangan wilayah.

3. Sasaran Kegiatan 1 (Meningkatnya Pelaksanaan Perencanaan dan Pemrograman Pembangunan Infrastruktur PUPR)

Faktor Eksternal SK 1

- a. Peran unit organisasi Kementerian PUPR dalam mendukung ketercapaian target yang telah ditetapkan dalam Renstra Kementerian PUPR 2020-2024.
- b. Peran K/L mitra dalam memberikan dukungan data dan informasi dalam rangka penyusunan program keterpaduan infrastruktur PUPR pada kawasan prioritas. Data dan informasi yang diberikan meliputi profil kawasan, kebutuhan dukungan infrastruktur PUPR, serta sinkronisasi penangan kawasan dan pelaksanaan program PUPR dan non PUPR.

Faktor Internal SK 1

- a. Kebijakan Kepala BPIW dalam memberikan dukungan agar RPIW dapat memiliki *legal standing* yang lebih kuat dengan ditetapkan oleh Menteri PUPR sehingga dapat menjadi acuan bagi pembangunan infrastruktur kedepan
- b. RPIW Provinsi menjadi salah satu pertimbangan dalam penyusunan program keterpaduan infrastruktur PUPR pada kawasan prioritas. Sehingga penapisan program dan kawasan dapat lebih baik dengan dasar perencanaan yang komprehensif untuk mendukung skenario pembangunan.

4. Sasaran Program – (IKSP 1-2 Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya) dan Sasaran Kegiatan 2 (Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan Pengembangan Infrastruktur Wilayah)

Faktor Eksternal IKSP 1-2 dan SK 2

- a. Sekretariat Jenderal terus melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi terkait tata Kelola dan layanan dukungan manajemen seluruh unit organisasi dan unit kerja di lingkungan Kementerian PUPR, terutama terkait tata naskah dinas, kearsipan, pengelolaan keuangan, perbendaharaan, pelaksanaan anggaran, penatausahaan BMN, konsultasi produk hukum dan pendampingan advokasi hukum, komunikasi publik, data dan informasi, kepegawaian, serta implementasi SAKIP.
- b. Sekretariat Jenderal bersama Inspektorat Jenderal melakukan koordinasi dengan BPKP secara intensif melakukan pemantauan serta evaluasi pemenuhan *Area of Improvement* (AoI) guna meningkatkan penilaian Tingkat Maturitas SPIP baik tingkat Unit Organisasi maupun tingkat Kementerian.
- c. Koordinasi intensif dengan BPSDM terkait pengelolaan kinerja pegawai, diklat, workshop, beasiswa dan bentuk pengembangan pegawai lainnya.

Faktor Internal IKSP 1-2 dan SK 2

- a. Sosialisasi peraturan dan kebijakan untuk seluruh aspek layanan Sekretariat BPIW kepada seluruh pegawai di lingkungan BPIW yang dilakukan secara berkala, serta didukung oleh pegawai pelaksana

yang kompeten dalam memberikan dukungan manajemen yang optimal kepada seluruh Unit Kerja di BPIW;

- b. Koordinasi secara aktif dan intensif dengan mitra kerja yang terkait layanan Dukungan Manajemen, baik di internal Kementerian PUPR yang terdiri dari Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan BPSDM, serta dengan pihak eksternal seperti Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian PAN dan RB, BPKP dan lain sebagainya;
- c. Komunikasi dan koordinasi yang baik disertai dengan upaya seluruh Unit Kerja di lingkungan BPIW dalam mendorong peningkatan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku;
- d. Pengelolaan dokumen pendukung kinerja serta ketersediaan pedoman teknis dalam rangka pemberian layanan secara optimal.

4.4.2 Permasalahan dan Faktor Penyebab Kegagalan

Beberapa kendala yang dihadapi BPIW dalam pelaksanaan kegiatan dan pencapaian sasaran pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Serangan siber terhadap Pusat Data Nasional sebagai server Kementerian PUPR berpengaruh terhadap proses perencanaan dan pemrograman yang berbasis aplikasi/*website*

1. Sasaran Strategis (IKSS - Tingkat Keselarasan Dukungan Infrastruktur di Kawasan Strategis)

Permasalahan IKSS

- a. RPJMN 2025-2029 masih dalam proses penyusunan, sehingga belum ada arahan definitif sebagai acuan penyusunan program tahunan dan arahan prioritas kawasan tahunan pada periode kedepan yang dibutuhkan khususnya dalam pelaksanaan Rapat Koordinasi Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (Rakorbangwil).
- b. Pelaksanaan Rakorbangwil dilakukan pada masa transisi pemerintahan menghadapi berbagai tantangan. Salah satu kendala utamanya adalah kurangnya partisipasi aktif dari K/L yang seharusnya terlibat. Hal ini disebabkan oleh ketidakpastian di internal K/L dan situasi transisi seringkali menyebabkan prioritas K/L bergeser, sehingga fokus terhadap forum seperti Rakorbangwil menjadi kurang optimal.
- c. Beberapa K/L belum memiliki siklus perencanaan program sesuai kerangka waktu T-2 (dua tahun sebelum tahun pelaksanaan), menyebabkan ketersediaan data awal yang terbatas untuk kebutuhan sinkronisasi.
- d. Ketidakeragaman data program dari Rencana Aksi RPIW dan dokumen perencanaan di luar BPIW (perencanaan sektoral, nasional, dan daerah) yang memerlukan iterasi terlebih dahulu, menghambat proses digitalisasi untuk kebutuhan penyusunan Memorandum Program.

2. Sasaran Program – (IKSP 1-1 Tingkat Pemanfaatan Kebijakan, Strategi Perencanaan dan Pemrograman)

Permasalahan IKSP 1-1

- a. Belum pedoman yang dapat menjadi acuan dalam perumusan Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah (RPIW) Kawasan Prioritas sebagai rincian dari RPIW Provinsi.
- b. Pengumpulan data untuk RPIW Kawasan Prioritas terhambat akibat terbatasnya ketersediaan data dan informasi hingga tingkat yang kecamatan dan data spasial historis yang lebih rinci.

3. Sasaran Kegiatan 1 (Meningkatnya Pelaksanaan Perencanaan dan Pemrograman Pembangunan Infrastruktur PUPR)

Permasalahan SK 1

- a. Capaian IKSK 1-1 sangat bergantung pada capaian kinerja organisasi, sehingga kontrol Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional terbatas dengan mengawal kinerja agar dapat terus sesuai dalam menjawab target yang telah ditetapkan dalam Renstra Kementerian PUPR 2020-2024.

4. Sasaran Program – (IKSP 1-2 Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya) dan Sasaran Kegiatan 2 (Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan Pengembangan Infrastruktur Wilayah)

Faktor Kegagalan IKSP dan SK 2

- a. Adanya perubahan acuan penilaian angka capaian, dimana Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan Serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran baru ditetapkan pada 23 Desember 2023 dimana pada saat itu telah ditetapkan DIPA TA 2024. Hal ini mengakibatkan RO yang memiliki SBK tidak seluruhnya memenuhi ketentuan, sehingga capaian kinerja belum optimal;
- b. Waktu penerbitan persetujuan penghapusan BMN dari Pengguna Barang (Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR) yang belum sesuai dengan target;
- c. Adanya pembaharuan Aplikasi SIMAN dari V1 ke V2 menghambat proses usulan penghapusan BMN dikarenakan adanya periode migrasi data yang mengakibatkan tertundanya seluruh proses pengelolaan BMN yang harus diusulkan melalui aplikasi SIMAN;
- d. Proses pembahasan muatan/substansi peraturan perundang-undangan yang disusun membutuhkan waktu yang cukup lama;
- e. Proses pematangan konsep peraturan membutuhkan waktu melebihi ketentuan dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Evaluasi Produk Hukum (maksimal 10 hari kerja).

4.2 Rekomendasi dan Tindak Lanjut

Berangkat dari permasalahan yang dihadapi, maka berikut adalah rekomendasi dan tindak lanjut secara umum yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja pada tahun selanjutnya

1. Sasaran Strategis (IKSS - Tingkat Keselarasan Dukungan Infrastruktur di Kawasan Strategis)

- a. Memperkuat penyusunan rencana pembangunan jangka panjang infrastruktur PU oleh BPIW sehingga dokumen tersebut dapat menjadi acuan pada saat penyusunan program dan kawasan prioritas Rakorbangwil disaat belum ditetapkannya arahan definitif perencanaan nasional jangka menengah atau disaat kondisi transisi pemerintahan.
- b. Mendorong keterlibatan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan dalam Rapat Koordinasi lintas K/L yang memiliki peran penting sebagai pengarah dan koordinator utama dalam hal kebijakan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah. Keterlibatan tersebut, dalam Rapat Koordinasi lintas K/L diharapkan dapat mendorong koordinasi antar K/L berjalan lebih efisien dan efektif dan memastikan keputusan yang diambil mencerminkan kebutuhan strategis dari K/L yang terlibat.
- c. Meningkatkan koordinasi antara Kementerian PU dan K/L lain dalam perencanaan. Melalui koordinasi yang lebih intens dan memandu K/L yang belum siap untuk mengikuti kerangka waktu T-2. Sehingga data dan informasi yang dibutuhkan untuk sinkronisasi program dapat dikumpulkan tepat waktu pada saat proses sinkronisasi program yang dilakukan oleh BPIW.
- d. Standardisasi metadata program infrastruktur PU dalam dokumen perencanaan dan pemrograman BPIW termasuk perencanaan di luar BPIW (perencanaan sektoral, nasional, dan daerah) untuk mempermudah transformasi digital dan meningkatkan efektivitas pengolahan data. Terkait aplikasi/*website* yang terserang siber diperlukan peningkatan *backup* data dan pengamanan data perencanaan dan pemrograman BPIW.
- e. Menyusun pedoman untuk RPIW Kawasan Prioritas sebagai rincian dari RPIW Provinsi untuk mengurangi ketidakseragaman substansi antar pusat wilayah.

1. Sasaran Program – (IKSP 1-1 Tingkat Pemanfaatan Kebijakan, Strategi Perencanaan dan Pemrograman)

- a. Percepatan penyesuaian substansi RPIW untuk 38 sesuai dengan arah kebijakan nasional sehingga dokumen perencanaan dan pemrograman yang disusun oleh BPIW dapat menjadi acuan Pembangunan infrastruktur oleh seluruh Unit Organisasi di Kementerian PU.
- b. Penyusunan pedoman dan penetapan *positioning* RPIW Kawasan Prioritas agar dapat dibedakan dengan RPIW Provinsi dan mengurangi ketidakseragaman substansi antar pusat wilayah.

2. Sasaran Kegiatan 1 (Meningkatnya Pelaksanaan Perencanaan dan Pemrograman Pembangunan Infrastruktur PUPR)

- a. Melakukan konsolidasi terkait capaian unit organisasi yang telah ditargetkan dalam Renstra Kementerian PUPR 2020-2024, sehingga perhitungan nilai capaian dapat dilakukan tepat waktu dan pada periode selanjutnya diperlukan perumusan indikator kinerja yang tidak bergantung atas capaian kinerja Unit Organisasi lain.

3. Sasaran Program – (IKSP 1-2 Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya) dan Sasaran Kegiatan 2 (Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan Pengembangan Infrastruktur Wilayah)

- a. Terhambatnya proses penghapusan BMN diakibatkan terdapat kendala pada proses penerbitan persetujuan dari Pengguna Barang (Sekretariat Jenderal) dan adanya periode migrasi data BMN yang dilakukan pada aplikasi SIMAN (Sistem Aplikasi Manajemen Aset Negara)
- b. Terdapat 1 (satu) dari 3 (tiga) produk hukum yang menjadi target, tidak dapat terselesaikan hingga akhir tahun 2024, yaitu produk hukum terkait dengan standar kompetensi pengembangan infrastruktur wilayah (PIW). Proses penyusunan produk hukum standar kompetensi PIW belum dapat berjalan utamanya dikarenakan perlu terlebih dahulu dibentuk jabatan fungsional baru, yaitu jabatan fungsional bidang pengembangan infrastruktur wilayah, sebagai rujukannya. Inisiasi jabatan fungsional baru tersebut telah dimulai pada tahun 2024 namun akan lebih difokuskan pada tahun 2025.
- c. Belum terpenuhinya target kinerja IKSK 2-5 pada tahun 2024 dikarenakan faktor eksternal yaitu adanya perubahan tata cara penilaian capaian kinerja perencanaan anggaran dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan Serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran yang baru ditetapkan pada 23 Desember 2023, setelah penetapan DIPA TA 2024. Hal ini mengakibatkan RO yang memiliki SBK tidak seluruhnya memenuhi ketentuan.
- d. Memastikan penetapan dan publikasi Renstra BPIW dan Unit Kerja 2025-2029 secara tepat waktu.
- e. Meningkatkan keikutsertaan pegawai dalam pelatihan kompetensi Manajemen Risiko >90% serta mengkomunikasikan kebijakan Manajemen Risiko dan kegiatan pengendalian kepada seluruh pegawai BPIW.
- f. Mempertimbangkan rencana tindak pengendalian (RTP) sebagai informasi dalam pengambilan keputusan strategis organisasi.
- g. Menetapkan proses bisnis unit organisasi, standar kompetensi pegawai, serta prosedur pendelegasian wewenang yang jelas.
- h. Memastikan deviasi antara pelaksanaan dengan rencana yang tercantum pada Halaman III DIPA tidak melebihi 5% dan mengoptimalkan penyerapan anggaran secara proporsional setiap bulan berdasarkan target, rencana kegiatan, dan rencana penarikan dana yang telah disusun.
- i. Meningkatkan kualitas dan kelengkapan data dan informasi BPIW, serta penguatan tim pengelola SPBE di lingkungan BPIW.
- j. Melakukan evaluasi terhadap prosedur dan media permohonan data dan informasi, untuk meningkatkan kemudahan pengguna dalam melakukan permohonan data dan informasi.



20
24




Lampiran

Lampiran

Lampiran I. Perjanjian BPIW Tahun 2024

1. Perjanjian Kinerja Menteri PUPR Awal (SS BPIW)



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini:


Nama : M. Basuki Hadimuljono
Jabatan : Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Kebhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 15 Januari 2024

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT



M. BASUKI HADIMULJONO


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NO (1)	SASARAN STRATEGIS (2)	NO (3)	INDIKATOR KINERJA (4)	TARGET (5)
1	Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur sumber daya air	1.	Persentase penyediaan air baku untuk air bersih di wilayah sungai kewenangan Pusat	69,32%
		2.	Persentase peningkatan perlindungan banjir di WS kewenangan pusat	63,23%
		3.	Kapasitas tampung per kapita	63,87 m ³ /kapita
		4.	Volume layanan air untuk meningkatkan produktivitas irigasi	30.133 m ³ /tahun/hektar
2	Meningkatnya konektivitas jaringan jalan nasional	1.	Waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau	2,13 Jam/100 km
3	Meningkatnya penyediaan akses perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak, aman, dan terjangkau	1.	Persentase peningkatan pelayanan infrastruktur permukiman yang layak dan aman melalui pendekatan <i>smart living</i>	91,88%
		2.	Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni	59,79%
4	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional	1.	Tingkat pemenuhan kebutuhan SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional	3,40%
		2.	Persentase lulusan pendidikan vokasi yang kompeten dan siap kerja	90,00%
5	Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian PUPR dan tugas teknis lainnya	1.	Tingkat kualitas tata kelola Kementerian PUPR	87,81%
		2.	Tingkat pemenuhan investasi/pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan yang didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif	100,00%
		3.	Persentase kualitas pengawasan intern dalam penyelenggaraan infrastruktur	91,00%
		4.	Indeks pengembangan kompetensi SDM Aparatur PUPR	85,00%
		5.	Tingkat keselarasan dukungan infrastruktur di kawasan strategis	82,50%
		6.	Tingkat keandalan sumber daya konstruksi	76,00%

Program:
 1 Program Ketahanan Sumber Daya Air
 2 Program Infrastruktur Konektivitas
 3 Program Perumahan dan Kawasan Permukiman
 4 Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi
 5 Program Dukungan Manajemen


Anggaran
Rp 147.373.850.075.000,00

Jakarta, 15 Januari 2024
MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT



M. BASUKI HADIMULJONO

2. Perjanjian Kinerja Menteri PUPR Akhir (SS BPIW)



REVISI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : M. Basuki Hadimuljono
Jabatan : Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat


berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Kebahagiaan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 31 Juli 2024

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

M. Basuki Hadimuljono
M. BASUKI HADIMULJONO



REVISI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NO	SABARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur sumber daya air	1.	Persentase penyediaan air baku untuk air bersih di wilayah sungai kewenangan pusat	69,14%
		2.	Persentase peningkatan perlindungan banjir di wilayah sungai kewenangan pusat	63,23%
		3.	Kapasitas tampung per kapita	60,76 m ³ /kapita
		4.	Volume layanan air untuk meningkatkan produktivitas ligasi	30.133 m ³ /tahun/hektar
2.	Meningkatnya konektivitas jaringan jalan nasional	1.	Waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau	2,14 jam/100 km
		2.	Waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau	2,14 jam/100 km
3.	Meningkatnya penyediaan akses perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak, aman dan terjangkau	1.	Persentase peningkatan pelayanan infrastruktur permukiman yang layak dan aman melalui pendekatan <i>smart living</i>	91,06%
		2.	Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni	89,79%
4.	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional	1.	Tingkat pemenuhan kebutuhan SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional	3,4%
		2.	Persentase lulusan pendidikan vokasi yang kompeten dan siap kerja	90%
5.	Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian PUPR dan tugas teknis lainnya	1.	Tingkat kualitas tata kelola Kementerian PUPR	87,81%
		2.	Tingkat pemenuhan investasi/pembayaran infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan yang didukung sistem, kebijakan, dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif	100%
		3.	Persentase kualitas pengawasan intern dalam penyelenggaraan infrastruktur	91%
		4.	Indeks pengembangan kompetensi SDM Aparatur PUPR	85%
		5.	Tingkat keselarasan dukungan infrastruktur di kawasan strategis	82,50%
		6.	Tingkat keandalan sumber daya konstruksi	76%

Program:
1. Program Ketahanan Sumber Daya Air
2. Program Infrastruktur Konektivitas
3. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman
4. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi
5. Program Dukungan Manajemen

Anggaran
Rp 162.652.236.288.000,00

Jakarta, 31 Juli 2024

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

M. Basuki Hadimuljono
M. BASUKI HADIMULJONO

3. Perjanjian Kinerja BPIW Awal (SP BPIW)



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Yudha Mediawan
 Jabatan : Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : M. Basuki Hadimuljono
 Jabatan : Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pihak pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
- Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua



M. BASUKI HADIMULJONO

Jakarta, 15 Januari 2024

Pihak Pertama



YUDHA MEDIAWAN


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

SASARAN PROGRAM/INDIKATOR SASARAN PROGRAM (1)	TARGET (2)
SP Meningkatkan dukungan manajemen Kementerian PUPR dan tugas teknis lainnya	
1. Tingkat pemanfaatan kebijakan, strategi perencanaan dan pemrograman	100,00%
2. Tingkat kualitas dukungan manajemen Kementerian PUPR dan tugas teknis lainnya	94,58%

Program:
Program Dukungan Manajemen

Anggaran
Rp 143.564.190.000,00

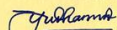
MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT



M. BASUKI HADIMULJONO

Jakarta, 15 Januari 2024

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
INFRASTRUKTUR WILAYAH



YUDHA MEDIAWAN

4. Perjanjian Kinerja BPIW Akhir (SP BPIW)



REVISI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Yudha Mediawan
 Jabatan : Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : M. Basuki Hadimuljono
 Jabatan : Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pihak pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
- Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua



M. BASUKI HADIMULJONO

Jakarta, 31 Juli 2024

Pihak Pertama



YUDHA MEDIAWAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

REVISI

SASARAN PROGRAM/INDIKATOR SASARAN PROGRAM	TARGET
(1)	(2)
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN	
SP Meningkatkan dukungan manajemen Kementerian PUPR dan tugas teknis lainnya	
1. Tingkat pemanfaatan kebijakan, strategi perencanaan, dan pemrograman	100%
2. Tingkat kualitas dukungan manajemen Kementerian PUPR dan tugas teknis lainnya	94,58%

Program:
Program Dukungan Manajemen

Anggaran
Rp 184.261.356.000,00

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT



M. BASUKI HADIMULJONO

Jakarta, 31 Juli 2024


KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
INFRASTRUKTUR WILAYAH



YUDHA MEDIAWAN

5. Perjanjian Kinerja Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional Akhir (SK BPIW)

REVISI AKHIR



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
PUSAT PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH NASIONAL
BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zevi Azzaino
 Jabatan : Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Yudha Mediawan
 Jabatan : Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah

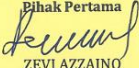
Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Jakarta, 31 Desember 2024

Pihak Pertama



ZEVI AZZAINO

Pihak Kedua



YUDHA MEDIAWAN

REVISI AKHIR

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

PUSAT PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH NASIONAL - BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)
Program Dukungan Manajemen		
SP. Meningkatkan Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	Tingkat Pemanfaatan Kebijakan, Strategi Perencanaan dan Pemrograman	100,00%
Kegiatan Pengembangan Infrastruktur Wilayah		
SK. Meningkatkan Pelaksanaan Perencanaan dan Pemrograman Pembangunan Infrastruktur PUPR	Tingkat kesesuaian kebijakan dan strategi perencanaan dan pemrograman infrastruktur PUPR	85,00%

Keterangan Kegiatan

1. Pengembangan Infrastruktur Wilayah

2. Dukungan Manajemen Pengembangan Infrastruktur Wilayah


Anggaran

Rp 76.477.974.000

Rp 3.790.000.000

Rp **80.267.974.000**


KEPALA BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH



YUDHA MEDIAWAN


JAKARTA, 31 DESEMBER 2024

KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH NASIONAL,



ZEVI AZZAINO

6. Perjanjian Kinerja Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR I Akhir (SK BPIW)



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
PUSAT PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PUPR WILAYAH I
BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Boby Ali Azhari
 Jabatan : Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**


Nama : Yudha Mediawan
 Jabatan : Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah

Selaku atasan langsung **pihak pertama**, Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pihak pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
- Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

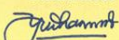
Pihak Pertama



BOBY ALI AZHARI

Jakarta, Januari 2024

Pihak Kedua



YUDHA MEDIAWAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
PUSAT PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT WILAYAH I - BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN (1)	INDIKATOR KINERJA (2)	TARGET (3)
Program Dukungan Manajemen		
SP. Meningkatkan Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	Tingkat Pemanfaatan Kebijakan, Strategi Perencanaan dan Pemrograman	100,00%
Kegiatan Pengembangan Infrastruktur Wilayah		
SK. Meningkatkan Pelaksanaan Perencanaan dan Pemrograman Pembangunan Infrastruktur PUPR	Tingkat kesesuaian penanganan kawasan prioritas melalui perencanaan dan pemrograman Infrastruktur PUPR di Pulau Sumatera dan Kalimantan	100,00%

Keterangan Kegiatan

- Pengembangan Infrastruktur Wilayah
- Dukungan Manajemen Pengembangan Infrastruktur Wilayah


Anggaran

Rp 12.700.000.000

Rp 2.140.000.000

Rp **14.840.000.000**


KEPALA BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH



YUDHA MEDIAWAN

JAKARTA, JANUARI 2024


KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT WILAYAH I



BOBY ALI AZHARI

7. Perjanjian Kinerja Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR II Akhir (SK BPIW)

REVISI AKHIR



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
PUSAT PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PUPR WILAYAH II
BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Melva Eryani Marpaung
 Jabatan : Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah II

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Yudha Mediawan
 Jabatan : Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah


Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pihak pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
- Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Jakarta, 31 Desember 2024

Pihak Pertama



MELVA ERYANI MARPAUNG

Pihak Kedua



YUDHA MEDIAWAN

REVISI AKHIR

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

PUSAT PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT WILAYAH II - BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)
Program Dukungan Manajemen		
SP, Meningkatkan Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	Tingkat Pemanfaatan Kebijakan, Strategi Perencanaan dan Pemrograman	100,00%
Kegiatan Pengembangan Infrastruktur Wilayah		
SK, Meningkatkan Efektifitas Perencanaan dan Pemrograman Pembangunan Infrastruktur PUPR	Tingkat kesesuaian penanganan kawasan prioritas melalui perencanaan dan pemrograman infrastruktur PUPR di Pulau Jawa, Bali, dan Kep. Nusa Tenggara	100,00%

Keterangan Kegiatan

- Pengembangan Infrastruktur Wilayah
- Dukungan Manajemen Pengembangan Infrastruktur Wilayah


Anggaran

Rp 39.499.926.000

Rp 2.140.000.000

Rp 41.639.926.000


KEPALA BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH



YUDHA MEDIAWAN

JAKARTA, 31 DESEMBER 2024


KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT WILAYAH II,



MELVA ERYANI MARPAUNG

8. Perjanjian Kinerja Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR III Akhir (SK BPIW)

REVISI



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
PUSAT PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PUPR WILAYAH III
BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Pranoto
 Jabatan : Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah III

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Yudha Mediawan
 Jabatan : Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah

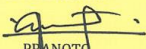
Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:


- Pihak pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
- Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 31 Juli 2024

Pihak Pertama


PRANOTO

Pihak Kedua


YUDHA MEDIAWAN

REVISI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
PUSAT PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT WILAYAH III - BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT


SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)
Program Dukungan Manajemen		
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	Tingkat Pemanfaatan Kebijakan, Strategi Perencanaan dan Perogramman	100,00%
Kegiatan Pengembangan Infrastruktur Wilayah		
SK. Meningkatnya Pelaksanaan Perencanaan dan Perogramman Pembangunan Infrastruktur PUPR	Tingkat kesesuaian penanganan kawasan prioritas melalui perencanaan dan perogramman Infrastruktur PUPR di Pulu, Sulawesi, Papua, dan Iqpw. Maluku	100,00%

Keberangan


Kegiatan

1. Pengembangan Infrastruktur Wilayah	Anggaran
2. Dukungan Manajemen Pengembangan Infrastruktur Wilayah	Rp 12.281.530.000
	Rp 2.140.000.000
	Rp 14.421.530.000

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH



YUDHA MEDIAWAN

JAKARTA, 31 JULI 2024
 KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT WILAYAH III,


PRANOTO

9. Perjanjian Kinerja Sekretariat BPIW Akhir (SK BPIW)

REVISI AKHIR



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKRETARIAT BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH
BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Benny Hermawan
 Jabatan : Sekretaris Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Yudha Mediawan
 Jabatan : Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah

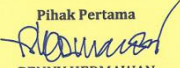
Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pihak pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
- Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

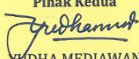
Jakarta, 31 Desember 2024

Pihak Pertama



BENNY HERMAWAN

Pihak Kedua



YUDHA MEDIAWAN

REVISI AKHIR

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

SEKRETARIAT BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH - BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT


SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)
Program Dukungan Manajemen		
SP. Meningkatkan Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya	94,58%
Kegiatan Dukungan Manajemen Pengembangan Infrastruktur Wilayah		
SK. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi tata kelola penyelenggaraan pengembangan infrastruktur wilayah	1. Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengendalian Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketertanggungjawaban	82,00%
	2. Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum	100,00%
	3. Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai	82,00%
	4. Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran	91,00%
	5. Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran	77,00%
	6. Nilai SAKIP Unit Organisasi	77,00%

Keterangan Kegiatan

1. Dukungan Manajemen Pengembangan Infrastruktur Wilayah

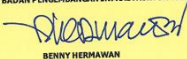
Anggaran
Rp 73.465.043.000

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH



YUDHA MEDIAWAN

JAKARTA, 31 DESEMBER 2024
 SEKRETARIS BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH,



BENNY HERMAWAN

Lampiran II. Penghargaan

1. Juara 3 Pengelolaan Media Sosial Kementerian PUPR Terbaik Tahun 2024 Tingkat Unit Organisasi
2. Juara 3 Transformasi Digital dalam Rangka Hari Bakti PU Ke-79



3. Juara 1 Lomba Menembak Kategori Senapan Angin Teleskop BR Perorangan (Perempuan) dalam rangka Hari Bakti PU ke-79
4. Juara 3 Lomba Menembak Kategori Senapan Match Perorangan dalam rangka Hari Bakti PU ke-79



5. Juara 2 Gateball Kategori Triple Mix dalam rangka Hari Bakti PU ke-79



6. Juara 3 Lomba Band Kategori Genmud dalam rangka Hari Bakti PU ke-79



Lampiran III. Pengukuran Kinerja

1. IKSS - Tingkat Keselarasan Dukungan Infrastruktur di Kawasan Strategis Berita Acara Kespakatan Program Keterpaduan

BERITA ACARA KESPAKATAN PROGRAM KETERPADUAN
Untuk Program Infrastruktur PU Tahun Anggaran 2026

Pada tanggal 18 s.d. 22 November 2024 telah dilaksanakan pertemuan koordinasi program Bidang Pekerjaan Umum tahun 2026 dalam bentuk Berita Acara Kespakatan, yang dihadiri oleh perwakilan dari:

1. Ditjen Sumber Daya Air
2. Ditjen Bina Marga
3. Ditjen Cipta Karya

Dalam Berita Acara Kespakatan ini, telah disepakati tentang koordinasi program Bidang Pekerjaan Umum tahun 2026 dalam bentuk Berita Acara Kespakatan, yang dihadiri oleh perwakilan dari:

Rahman 1 dari 10

Tangerang Selatan, 20 November 2024

[Signatures]

Dr. Ir. Yulha Muliawan, M. Des. Pjg.
Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah

Dr. Muhammad Zuhdi Fatah
Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum

Dr. Rob Arthur Lambogla, M. Si
Kepala Bidang Infrastruktur Wilayah

Dr. Bachman Arif Hidayat, M. Eng.
Kepala Bidang Infrastruktur Wilayah

R. Endra S. Almaswidi, ST., M. Sc., DEA.
Kepala Bidang Infrastruktur Wilayah

Rahman 08 dari 10

Rekapitulasi Program/Kegiatan Pembangunan Infrastruktur PU TA 2026 Hasil Rakorbangwil Tahun 2024

No	Provinsi	Ditjen Sumber Daya Air		Ditjen Bina Marga		Ditjen Cipta Karya		Total Program	Total Anggaran (Rp. Ribu)
		Program	Anggaran (Rp. Ribu)	Program	Anggaran (Rp. Ribu)	Program	Anggaran (Rp. Ribu)		
1	ACEH	5	Rp 1.368.192.052	6	Rp 355.782.484	7	Rp 622.095.671	18	Rp 2.345.969.207
2	SUMATERA UTARA	10	Rp 1.368.897.800	5	Rp 2.516.040.000	13	Rp 1.852.787.000	28	Rp 5.737.724.900
3	SUMATERA BARAT	8	Rp 143.000.000	2	Rp 25.107.692	7	Rp 663.480.000	17	Rp 831.587.692
4	RIAU	9	Rp 135.500.000	3	Rp 226.799.000	2	Rp 76.530.000	14	Rp 438.829.000
5	JAMBI	7	Rp 444.817.524	2	Rp 204.000.000	2	Rp 26.000.000	11	Rp 716.817.524
6	SUMATERA SELATAN	17	Rp 1.993.156.033	6	Rp 1.574.025.300	15	Rp 589.941.143	38	Rp 4.366.922.346
7	BENGKULU	11	Rp 1.208.581.109	2	Rp 962.877.908	1	Rp 9.530.000	14	Rp 2.172.789.107
8	LAMPUNG	10	Rp 3.432.877.610	1	Rp 1.716.380.380	4	Rp 45.000.000	15	Rp 5.254.257.990
9	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	7	Rp 840.658.060	1	Rp 357.168.840	3	Rp 91.900.000	11	Rp 1.289.726.900
10	KEPULAUAN RIAU	5	Rp 1.977.348.182	3	Rp 4.497.500.000	7	Rp 1.383.770.000	19	Rp 7.858.618.182
11	DIYAKARTA	2	Rp 478.000.000	0	Rp 0	0	Rp 0	2	Rp 478.000.000
12	JAWA BARAT	11	Rp 11.265.658.000	11	Rp 64.274.000	1	Rp 7.000.000	23	Rp 11.336.932.000
13	JAWA TENGAH	16	Rp 2.656.800.000	6	Rp 25.221.375.000	2	Rp 99.805.513	24	Rp 27.977.980.513
14	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	4	Rp 342.800.000	0	Rp 0	1	Rp 8.000.000	5	Rp 350.800.000
15	JAWA TIMUR	15	Rp 1.535.260.000	0	Rp 0	3	Rp 106.400.000	18	Rp 1.641.660.000
16	BANTEN	4	Rp 163.833.333	1	Rp 195.000.000	0	Rp 0	5	Rp 358.833.333
17	BALI	7	Rp 286.154.800	1	Rp 331.770.000	7	Rp 923.016.000	15	Rp 1.540.940.800
18	NUSA TENGGARA BARAT	9	Rp 922.000.000	1	Rp 40.000.000	6	Rp 257.800.000	16	Rp 1.220.600.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	10	Rp 89.700.000	8	Rp 45.406.901	5	Rp 156.130.000	23	Rp 291.236.901
20	KALIMANTAN BARAT	11	Rp 594.400.000	72	Rp 1.130.519.000	10	Rp 632.960.764	93	Rp 2.357.879.764
21	KALIMANTAN TENGAH	54	Rp 1.043.505.492	22	Rp 786.624.544	6	Rp 185.495.000	82	Rp 2.015.625.124
22	KALIMANTAN SELATAN	12	Rp 872.465.004	68	Rp 233.190.991	5	Rp 154.282.500	85	Rp 1.259.938.495
23	KALIMANTAN TIMUR	25	Rp 1.643.621.579	56	Rp 276.361.815	19	Rp 524.840.636	100	Rp 2.444.824.030
24	KALIMANTAN UTARA	14	Rp 443.120.000	6	Rp 437.056.050	3	Rp 124.250.000	23	Rp 1.004.426.050

Halaman 2 dari 50

No	Provinsi	Ditjen Sumber Daya Air		Ditjen Bina Marga		Ditjen Cipta Karya		Total Program	Total Anggaran (Rp. Ribu)
		Program	Anggaran (Rp. Ribu)	Program	Anggaran (Rp. Ribu)	Program	Anggaran (Rp. Ribu)		
25	SULAWESI UTARA	7	Rp 353.560.000	4	Rp 195.283.108	3	Rp 93.283.749	14	Rp 642.126.857
26	SULAWESI TENGAH	3	Rp 152.230.000	1	Rp 45.000.000	4	Rp 113.000.000	8	Rp 310.230.000
27	SULAWESI SELATAN	5	Rp 250.683.333	2	Rp 85.000.000	9	Rp 114.223.987	16	Rp 449.907.320
28	SULAWESI TENGGARA	6	Rp 162.912.500	3	Rp 26.165.000	3	Rp 28.985.280	12	Rp 218.062.780
29	GORONTALO	2	Rp 4.000.000	0	Rp 0	2	Rp 233.132.883	4	Rp 237.132.883
30	SULAWESI BARAT	1	Rp 65.500.000	0	Rp 0	4	Rp 62.918.400	5	Rp 128.418.400
31	MALUKU	11	Rp 273.750.516	2	Rp 15.278.500	4	Rp 169.955.500	17	Rp 458.984.516
32	MALUKU UTARA	7	Rp 648.860.575	2	Rp 149.097.000	12	Rp 738.745.000	21	Rp 1.536.702.575
33	PAPUA	3	Rp 14.000.000	3	Rp 120.200.000	8	Rp 67.092.000	14	Rp 201.292.000
34	PAPUA BARAT	6	Rp 92.062.000	2	Rp 280.000.000	6	Rp 36.102.400	14	Rp 408.164.400
35	PAPUA SELATAN	9	Rp 1.001.175.000	1	Rp 173.651.000	1	Rp 18.500.000	11	Rp 1.193.326.000
36	PAPUA TENGAH	4	Rp 91.000.000	1	Rp 75.000.000	5	Rp 279.773.000	10	Rp 445.773.000
37	PAPUA PEGUNINGAN	0	Rp 0	1	Rp 179.014.000	6	Rp 1.243.192.200	7	Rp 1.422.006.200
38	PAPUA BARAT DAYA	6	Rp 249.900.000	1	Rp 70.200.000	1	Rp 116.500.000	8	Rp 436.600.000
39	Jumlah	337	Rp 38.503.983.720	306	Rp 42.999.683.243	197	Rp 11.889.128.826	860	Rp 93.392.795.791

2. IKSP 1-1 Tingkat Pemanfaatan Kebijakan, Strategi Perencanaan dan Pemrograman
3. IKSK 1-2 Tingkat kesesuaian penanganan kawasan prioritas melalui perencanaan dan pemrograman infrastruktur PUPR di Pulau Sumatra dan Kalimantan
4. IKSK 1-3 Tingkat kesesuaian penanganan kawasan prioritas melalui perencanaan dan pemrograman infrastruktur PUPR di Pulau Jawa, Bali, dan Kep. Nusa Tenggara
5. IKSK 1-4 Tingkat kesesuaian penanganan kawasan prioritas melalui perencanaan dan pemrograman infrastruktur PUPR di Pulau Sulawesi, Papua, dan Kep. Maluku

Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah 38 Provinsi



6. IKSK 1-1 Tingkat Kesesuaian Kebijakan dan Strategi Perencanaan dan Pemrograman Infrastruktur PUPR

Daftar Program dalam Konsultasi Regional Tahun 2024

No	Nama Provinsi	Nama Unor	Kebutuhan Program	Kesepakatan Konreg
1	ACEH	Ditjen Cipta Karya	Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Regional (TPST)	FKW
2	ACEH	Ditjen Cipta Karya	Pembangunan TPST Skala Kota-Kabupaten Bireuen	FKB
3	ACEH	Ditjen Cipta Karya	Pembangunan TPST Skala Kota-Kota Sabang (TPA Lhok Batee)	FKB
4	ACEH	Ditjen Cipta Karya	Pembangunan TPST Skala Kota-Kab. Bener Meriah (Kawasan Burni Telong)	FKB
5	ACEH	Ditjen Perumahan	Peningkatan Kualitas RTLH milik MBR-Seluruh Kabupaten / Kota	FKS-FKB
6	SUMATERA UTARA	Ditjen Bina Marga	Preservasi Jalan Akses Medan – Berastagi	FKB
7	SUMATERA UTARA	Ditjen Bina Marga	Pelebaran Jalan Kapten Sumarsono - Helvetia	FKB
8	SUMATERA UTARA	Ditjen Bina Marga	Pelebaran Jalan Yos Sudarso (Simpang Dobi)	FKB
9	SUMATERA UTARA	Ditjen Cipta Karya	Pembangunan Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Regional Mebidangro	FKB
10	SUMATERA UTARA	Ditjen Cipta Karya	Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kawasan Kota Lama Medan Tahap II	FKB
11	SUMATERA UTARA	Ditjen Sumber Daya Air	Bangunan Pengendalian Banjir yang dibangun di Kawasan Sistem Drainase USU dan sekitarnya	FKB
12	SUMATERA UTARA	Ditjen Sumber Daya Air	Prasarana Air Baku yang dibangun (Intake Air Baku dan Jaringan Pipa Transmisi)	FKB
13	SUMATERA UTARA	Ditjen Sumber Daya Air	Bangunan Pengendalian Banjir yang dibangun di Sungai Deli	FKB
14	SUMATERA UTARA	Ditjen Sumber Daya Air	Bangunan Pengendalian Banjir yang dibangun di Sungai Selayang	FKB
15	SUMATERA UTARA	Ditjen Sumber Daya Air	Bangunan Pengendalian Banjir yang dibangun di Sungai Badera	FKB
16	SUMATERA UTARA	Ditjen Sumber Daya Air	Bangunan Pengendalian Banjir yang dibangun di Kawasan Sistem Drainase KIM dan sekitarnya	FKB
17	SUMATERA UTARA	Ditjen Perumahan	Pembangunan Rumah Susun Sewa untuk MBR-Kota Medan	FKB
18	SUMATERA UTARA	Ditjen Bina Marga	Pembangunan flyover/underpass Perlintasan Kereta Api Lima Puluh dan Indrapura	FKB
19	SUMATERA UTARA	Ditjen Bina Marga	Pelebaran Menambah Lajur / Preservasi Jalan Indrapura - Limapuluh	FKB
20	SUMATERA UTARA	Ditjen Bina Marga	Pelebaran Menambah Lajur / Preservasi Jalan Akses Kuala Tanjung	FKB
21	SUMATERA UTARA	Ditjen Bina Marga	Preservasi Jalan Akses KEK Sei Mangkei	FKB
22	SUMATERA UTARA	Ditjen Cipta Karya	Pembangunan TPST Skala Kota (melayani Kota Tebing Tinggi)	FKB
23	SUMATERA UTARA	Ditjen Cipta Karya	Pembangunan TPST Skala Kota (melayani Kawasan Kuala Tanjung dsk)	FKS-FKB
24	SUMATERA UTARA	Ditjen Cipta Karya	Pembangunan TPST Skala Kota (melayani Kawasan KEK Sei Mangkei dsk)	FKB
25	SUMATERA UTARA	Ditjen Cipta Karya	Pembangunan SPAM mendukung kawasan perkotaan sekitar KEK Sei Mangkei	FKB
26	SUMATERA UTARA	Ditjen Perumahan	Pembangunan Rumah Susun Sewa untuk MBR-Kawasan Perkotaan dan sekitar kawasan industri	FKB
27	SUMATERA UTARA	Ditjen Bina Marga	Pelebaran Jalan Menuju Standar / Preservasi Jalan Bts. Karo - Sidikalang	FKB
28	SUMATERA UTARA	Ditjen Bina Marga	Pelebaran Jalan Menambah Lajur Jalan Kaban Jahe - Berastagi	FKB
29	SUMATERA UTARA	Ditjen Bina Marga	Pelebaran Jalan Simpang Tiga Panah	FKB
30	SUMATERA UTARA	Ditjen Bina Marga	Pembangunan Jalan Siborong - Borong Bypass (penuntasan)	FKB
31	SUMATERA UTARA	Ditjen Bina Marga	Pelebaran Jalan Menuju Standar Siborong - Borong - Dolok Sanggul (Penuntasan)	FKB
32	SUMATERA UTARA	Ditjen Cipta Karya	Penataan Kawasan Pariwisata DPSP Danau Toba	FKB
33	SUMATERA UTARA	Ditjen Cipta Karya	Pembangunan TPST Skala Kota (melayani KWU Parapat - Ajibata)	FKB
34	SUMATERA UTARA	Ditjen Cipta Karya	Pembangunan TPST Skala Kota (melayani KWU Balige, Muara, dan Merek)	FKB

No	Nama Provinsi	Nama Unor	Kebutuhan Program	Kesepakatan Konreg
35	SUMATERA UTARA	Ditjen Cipta Karya	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) Skala Kota (Pembangunan IPLT)	FKB
36	SUMATERA UTARA	Ditjen Cipta Karya	Pembangunan TPST Skala Kota-Kota Gunungsitoli	FKB
37	SUMATERA UTARA	Ditjen Sumber Daya Air	Pengendalian banjir yang dibangun/ditingkatkan	FKS-FKB
38	SUMATERA UTARA	Ditjen Bina Marga	Relokasi Jalan Aek Latong (Sipirok – Batu Jomba)	FKB
39	SUMATERA UTARA	Ditjen Bina Marga	Pelebaran Jalan menuju standar Tarutung - Sibolga	FKB
40	SUMATERA UTARA	Ditjen Bina Marga	Penuntasan Akses Pelabuhan Parlimbungan Ketek (Jembatan)	FKB
41	SUMATERA UTARA	Ditjen Cipta Karya	Pembangunan TPST Skala Kota-Kab. Mandailing Natal	FKS-FKB
42	SUMATERA UTARA	Ditjen Cipta Karya	Pembangunan TPST Skala Kota-Kab. Padang Sidempuan	FKS-FKB
43	SUMATERA UTARA	Ditjen Sumber Daya Air	Daerah Irigasi yang ditingkatkan Batang Gadis (Rehabilitasi)	FKB
44	SUMATERA UTARA	Ditjen Perumahan	Pembangunan Rumah Susun untuk Kawasan Perkotaan-Sibolga, Tapanuli Tengah	FKB
45	SUMATERA UTARA	Ditjen Cipta Karya	Pembangunan TPST Skala Kota-Kec. Padang Tualang Kab. Langkat	FKB
46	SUMATERA UTARA	Ditjen Cipta Karya	Pembangunan TPST Skala Kota- Kab. Labuhanbatu Utara, Kab. Labuhanbatu Selatan, Kab. Padang Lawas Utara, Kab. Padang Lawas	FKB
47	SUMATERA UTARA	Ditjen Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni-Provinsi Sumatera Utara	FKB
48	SUMATERA BARAT	Ditjen Bina Marga	Pembangunan Fly Over Duku - BIM	FKB
49	SUMATERA BARAT	Ditjen Cipta Karya	Pembangunan SPAM (pembangunan IPA dan jaringan distribusi utama)-Padang Pariaman	FKB
50	SUMATERA BARAT	Ditjen Cipta Karya	Pembangunan SPAM (pembangunan IPA dan jaringan distribusi utama)-Pariaman	FKB
51	SUMATERA BARAT	Ditjen Cipta Karya	Pembangunan SPAM (pembangunan IPA dan jaringan distribusi utama)-Padang	FKS-FKB
52	SUMATERA BARAT	Ditjen Cipta Karya	Perluasan SPAM Padang Pariaman	FKB
53	SUMATERA BARAT	Ditjen Cipta Karya	Pembangunan TPST Kota Padang	FKB
54	SUMATERA BARAT	Ditjen Cipta Karya	Pengembangan TPST Padang Pariaman (Regional)	FKB
55	SUMATERA BARAT	Ditjen Cipta Karya	Pembangunan IPLT Pariaman	FKB
56	SUMATERA BARAT	Ditjen Cipta Karya	Pembangunan SPAM (pembangunan IPA dan jaringan distribusi utama)-Bukittinggi	FKB
57	SUMATERA BARAT	Ditjen Cipta Karya	Pembangunan TPST Bukittinggi	FKB
58	SUMATERA BARAT	Ditjen Sumber Daya Air	Pembangunan Bangunan Prasarana Air Baku di Kota Bukit Tinggi	FKB
59	SUMATERA BARAT	Ditjen Bina Marga	Pembangunan Jalan Trans Mentawai ruas Labuhan Bajau - Sigapokna	FKB
60	SUMATERA BARAT	Ditjen Bina Marga	Relokasi jalan nasional ruas Sioban - Katiet	FKB
61	SUMATERA BARAT	Ditjen Bina Marga	Pembangunan Jalan Trans Mentawai ruas Sirilanggai - Mailepet	FKB
62	SUMATERA BARAT	Ditjen Sumber Daya Air	Pembangunan Prasarana air baku Kab. Mentawai	FKB
63	SUMATERA BARAT	Ditjen Sumber Daya Air	Pembangunan Pengaman Pantai di Kabupaten Kepulauan Mentawai	FKB
64	SUMATERA BARAT	Ditjen Cipta Karya	Optimalisasi TPST Sungai Jariang	FKB
65	SUMATERA BARAT	Ditjen Sumber Daya Air	Revitalisasi Danau Maninjau	FKB
66	SUMATERA BARAT	Ditjen Cipta Karya	Pembangunan TPST Regional Payakumbuh	FKB
67	SUMATERA BARAT	Ditjen Cipta Karya	Pembangunan IPLT Sawahlunto	FKB
68	SUMATERA BARAT	Ditjen Cipta Karya	Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Regional (Perluasan TPA)	FKB
69	SUMATERA BARAT	Ditjen Sumber Daya Air	Revitalisasi Danau Singkarak	FKB
70	SUMATERA BARAT	Ditjen Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni-Provinsi Sumatera Barat	FKB
71	RIAU	Ditjen Sumber Daya Air	Pengendali Banjir dan Rob Kota Dumai	FKS-FKB

No	Nama Provinsi	Nama Unor	Kebutuhan Program	Kesepakatan Konreg
72	RIAU	Ditjen Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni-Provinsi Riau	FKS-FKB
73	JAMBI	Ditjen Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Kota Jambi	FKS-FKB
74	JAMBI	Ditjen Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Muaro Jambi	FKS-FKB
75	JAMBI	Ditjen Cipta Karya	Pembangunan SPAM Rimbo Tengah	FKS-FKB
76	JAMBI	Ditjen Cipta Karya	Pembangunan SPAM Rawang Kota Sungai Penuh	FKS-FKB
77	JAMBI	Ditjen Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Tanjung Jabung Timur	FKS-FKB
78	JAMBI	Ditjen Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Tanjung Jabung Barat	FKS-FKB
79	JAMBI	Ditjen Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Bungo	FKS-FKB
80	JAMBI	Ditjen Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Kerinci	FKS-FKB
81	JAMBI	Ditjen Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Kota Sungai Penuh	FKS-FKB
82	JAMBI	Ditjen Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Merangin	FKS-FKB
83	JAMBI	Ditjen Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Sarolangun	FKS-FKB
84	JAMBI	Ditjen Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Tebo	FKS-FKB
85	JAMBI	Ditjen Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Batanghari	FKS-FKB
86	SUMATERA SELATAN	Ditjen Bina Marga	Pembangunan Jalan/ Pembangunan Duplikasi Jembatan Air Indralaya	FKS-FKB
87	SUMATERA SELATAN	Ditjen Cipta Karya	Peningkatan SPAM Kabupaten/Kota/ Peningkatan SPAM IPA IKK Rantau Alai dan Universitas Sriwijaya	FKS-FKB
88	SUMATERA SELATAN	Ditjen Sumber Daya Air	Bangunan Pengendalian Banjir yang dibangun/ Normalisasi Sungai Bendung di Palembang	FKB
89	SUMATERA SELATAN	Ditjen Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Ogan Ilir	FKS-FKB
90	SUMATERA SELATAN	Ditjen Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Ogan Komering Ilir	FKS-FKB
91	SUMATERA SELATAN	Ditjen Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Kota Palembang	FKS-FKB
92	SUMATERA SELATAN	Ditjen Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Banyuasin	FKS-FKB
93	SUMATERA SELATAN	Ditjen Perumahan	Penyaluran Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten OKU Timur	FKS-FKB
94	SUMATERA SELATAN	Ditjen Bina Marga	Pembangunan Fly Over/ Pembangunan Fly Over Muara Enim, Ujan Mas, Gunung Megang	FKS-FKB
95	SUMATERA SELATAN	Ditjen Sumber Daya Air	Prasarana Air Baku yang ditingkatkan/ Peningkatan Prasarana Air Baku di Intake Benakat	FKS-FKB
96	SUMATERA SELATAN	Ditjen Perumahan	Penyaluran Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Muara Enim	FKS-FKB
97	SUMATERA SELATAN	Ditjen Cipta Karya	Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota/ Optimalisasi TPST Padang Karet	FKS-FKB
98	SUMATERA SELATAN	Ditjen Cipta Karya	Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota/ Pembangunan TPST di Kec. Talang Ubi	FKS-FKB
99	SUMATERA SELATAN	Ditjen Cipta Karya	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) / Pembangunan IPLT di Kec. Rawas Ulu	Tidak Terbahas
100	SUMATERA SELATAN	Ditjen Cipta Karya	Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota/ Pembangunan TPST Kab. Musi Rawas Utara	FKS-FKB
101	SUMATERA SELATAN	Ditjen Perumahan	Penyaluran Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Kota Pagar Alam	FKS-FKB
102	SUMATERA SELATAN	Ditjen Perumahan	Penyaluran Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir	FKS-FKB
103	SUMATERA SELATAN	Ditjen Perumahan	Penyaluran Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Empat Lawang	FKS-FKB
104	SUMATERA SELATAN	Ditjen Perumahan	Penyaluran Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Musi Rawas Utara	FKS-FKB
105	SUMATERA SELATAN	Ditjen Perumahan	Penyaluran Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Musi Rawas	FKS-FKB
106	SUMATERA SELATAN	Ditjen Perumahan	Penyaluran Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten OKU Selatan	FKS-FKB
107	SUMATERA SELATAN	Ditjen Perumahan	Penyaluran Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Ogan Komering Ulu	FKS-FKB
108	SUMATERA SELATAN	Ditjen Perumahan	Penyaluran Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Musi Banyuasin	FKS-FKB

No	Nama Provinsi	Nama Unor	Kebutuhan Program	Kesepakatan Konreg
109	SUMATERA SELATAN	Ditjen Perumahan	Penyaluran Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Lahat	FKS-FKB
110	SUMATERA SELATAN	Ditjen Perumahan	Penyaluran Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Kota Lubuklinggau	FKS-FKB
111	SUMATERA SELATAN	Ditjen Perumahan	Penyaluran Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Kota Prabumulih	FKS-FKB
112	BENGGKULU	Ditjen Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Kota Bengkulu	FKB
113	BENGGKULU	Ditjen Sumber Daya Air	Jaringan irigasi permukaan yang dibangun/Pembangunan Jaringan Irigasi Pulau Enggano	FKB
114	BENGGKULU	Ditjen Sumber Daya Air	Bangunan Pengamanan Pantai yang dibangun/Pembangunan Bangunan Pengaman Pesisir Pantai Pulau 3T Enggano	FKB
115	BENGGKULU	Ditjen Cipta Karya	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat Skala Kota (Pembangunan IPLT Lebong)	FKB
116	BENGGKULU	Ditjen Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Kepahiang	FKB
117	BENGGKULU	Ditjen Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Seluma	FKB
118	BENGGKULU	Ditjen Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Kaur	FKB
119	BENGGKULU	Ditjen Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Lebong	FKB
120	BENGGKULU	Ditjen Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Rejang Lebong	FKB
121	BENGGKULU	Ditjen Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Bengkulu Tengah	FKB
122	BENGGKULU	Ditjen Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Mukomuko	FKB
123	BENGGKULU	Ditjen Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Bengkulu Selatan	FKB
124	LAMPUNG	Ditjen Perumahan	Pembangunan Rumah Susun MBR Kota Bandar Lampung	FKS-FKB
125	LAMPUNG	Ditjen Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Kota Bandar Lampung	FKS-FKB
126	LAMPUNG	Ditjen Sumber Daya Air	Daerah irigasi yang ditingkatkan/Rehabilitasi Daerah Irigasi Rawa Seputih Surabaya	FKS-FKB
127	LAMPUNG	Ditjen Sumber Daya Air	Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) yang ditingkatkan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi Air Tanah	FKS-FKB
128	LAMPUNG	Ditjen Sumber Daya Air	Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) yang dibangun/Pembangunan dan Pengeboran Jaringan Irigasi Air Tanah	FKS-FKB
129	LAMPUNG	Ditjen Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Lampung Tengah	FKS-FKB
130	LAMPUNG	Ditjen Sumber Daya Air	Daerah irigasi yang ditingkatkan/Rehabilitasi Daerah Irigasi Rawa Rawajitu	FKS-FKB
131	LAMPUNG	Ditjen Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Mesuji	FKS-FKB
132	LAMPUNG	Ditjen Cipta Karya	Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota/Optimalisasi TPST Sukadana	FKS-FKB
133	LAMPUNG	Ditjen Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Lampung Timur	FKS-FKB
134	LAMPUNG	Ditjen Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Lampung Selatan	FKS-FKB
135	LAMPUNG	Ditjen Cipta Karya	Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kawasan/Optimalisasi TPST Karangrejo	FKS-FKB
136	LAMPUNG	Ditjen Cipta Karya	Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kawasan/Optimalisasi sel baru TPST Bumi Ayu	FKS-FKB
137	LAMPUNG	Ditjen Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Kota Metro	FKS-FKB
138	LAMPUNG	Ditjen Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Tulang Bawang Barat	FKS-FKB
139	LAMPUNG	Ditjen Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Pesisir Barat	FKS-FKB
140	LAMPUNG	Ditjen Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Pringsewu	FKS-FKB
141	LAMPUNG	Ditjen Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Tulang Bawang	FKS-FKB
142	LAMPUNG	Ditjen Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Pesawaran	FKS-FKB
143	LAMPUNG	Ditjen Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Way Kanan	FKS-FKB
144	LAMPUNG	Ditjen Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Tanggamus	FKS-FKB

No	Nama Provinsi	Nama Unor	Kebutuhan Program	Kesepakatan Konreg
145	LAMPUNG	Ditjen Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Lampung Utara	FKS-FKB
146	LAMPUNG	Ditjen Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Lampung Barat	FKS-FKB
147	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	Ditjen Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Kota Pangkalpinang	FKB
148	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	Ditjen Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (Kawasan Nelayan, Parit Pekir, Hos Cokroaminoto, Mantung)	FKB
149	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	Ditjen Cipta Karya	Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kawasan/Peningkatan Kapasitas TPA Jongkong	FKB
150	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	Ditjen Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Bangka Tengah	FKB
151	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	Ditjen Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Belitung	FKB
152	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	Ditjen Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Belitung Timur	FKB
153	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	Ditjen Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Bangka Barat	FKB
154	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	Ditjen Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni sekitar KPPN Bangka Selatan	FKB
155	KEPULAUAN RIAU	Ditjen Sumber Daya Air	Bangunan Pengendalian Banjir yang Dibangun (Pengendalian Banjir Kawasan Batam-Bintan)	FKS-FKB
156	KEPULAUAN RIAU	Ditjen Sumber Daya Air	Jaringan Air Baku yang Dibangun (Pembangunan Pipa Transmisi Air Baku Embung DAS Kawal)	FKB
157	KEPULAUAN RIAU	Ditjen Sumber Daya Air	Jaringan Air Baku yang Dibangun (Pembangunan Pipa Transmisi Air Baku Dam Sei Gong)	FKB
158	KEPULAUAN RIAU	Ditjen Cipta Karya	Pembangunan SPAM Sebayar	FKB
159	KEPULAUAN RIAU	Ditjen Sumber Daya Air	Bangunan Pengaman Pantai yang Dibangun- Kabupaten Natuna	FKS-FKB
160	KEPULAUAN RIAU	Ditjen Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni-Provinsi Kepulauan Riau	FKS-FKB
161	JAWA BARAT	Ditjen Sumber Daya Air	Pembangunan Bendungan Cijurey	FKB
162	JAWA BARAT	Ditjen Sumber Daya Air	Pengendalian Banjir Sungai Ciliwung	FKB
163	JAWA BARAT	Ditjen Sumber Daya Air	Pembangunan Bendungan Cibeet	FKB
164	JAWA BARAT	Ditjen Bina Marga	Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban	FKB
165	JAWA BARAT	Ditjen Sumber Daya Air	Pengendalian Banjir Sungai DAS Cisanggarung	FKB
166	JAWA BARAT	Ditjen Bina Marga	Pembangunan FO Gedebage-Soekarno hatta/perlintasan KA JI Gede bage.	Tidak Terbahas
167	JAWA BARAT	Ditjen Sumber Daya Air	Penyediaan Air Baku Kertasari	FKS-FKB
168	JAWA BARAT	Ditjen Sumber Daya Air	Pembangunan Kolam Retensi Sungai Cilember	FKB
169	JAWA BARAT	Ditjen Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Layak Huni	FKS-FKB
170	JAWA BARAT	Ditjen Sumber Daya Air	Peningkatan jaringan irigasi Lakbok Utara	FKS-FKB
171	JAWA TENGAH	Ditjen Sumber Daya Air	Bangunan Pengendalian Banjir DAS Dolok Yang Dibangun/ Ditingkatkan Kab. Demak	FKS-FKB
172	JAWA TENGAH	Ditjen Sumber Daya Air	Bangunan Pengendalian Banjir DAS Penggaron Yang Dibangun/ Ditingkatkan Kab. Demak	FKB
173	JAWA TENGAH	Ditjen Sumber Daya Air	Bangunan Pengendalian Banjir Yang Dibangun/ Ditingkatkan Kota Semarang	FKB
174	JAWA TENGAH	Ditjen Sumber Daya Air	Bangunan Pengendalian Banjir DAS Ijo Tahap II yang Dibangun/ Ditingkatkan	FKB
175	JAWA TENGAH	Ditjen Sumber Daya Air	Bangunan Pengendalian Banjir DAS Serayu yang Dibangun/ Ditingkatkan	FKS-FKB
176	JAWA TENGAH	Ditjen Sumber Daya Air	Bangunan Pengendalian Banjir DAS Tipar Tahap II yang Dibangun/ Ditingkatkan	FKB
177	JAWA TENGAH	Ditjen Sumber Daya Air	Bangunan Pengendalian Banjir DAS Citanduy yang Dibangun/ Ditingkatkan	FKS-FKB
178	JAWA TENGAH	Ditjen Perumahan	Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya-Kec. Kejar, Kec. Batur, dan Kec. Pejajaran	FKB

No	Nama Provinsi	Nama Unor	Kebutuhan Program	Kesepakatan Konreg
179	JAWA TENGAH	Ditjen Sumber Daya Air	Pembangunan Sabodam Kali Lamat	FKB
180	JAWA TENGAH	Ditjen Sumber Daya Air	Pembangunan Sabo Dam Kali Trising	FKB
181	JAWA TENGAH	Ditjen Cipta Karya	Pembangunan SPAM Gondang	FKS-FKB
182	JAWA TENGAH	Ditjen Sumber Daya Air	Revitalisasi Danau Rawa Pening	FKS-FKB
183	JAWA TENGAH	Ditjen Sumber Daya Air	Pembangunan Bendungan Cabean	FKB
184	JAWA TENGAH	Ditjen Sumber Daya Air	Bendungan Yang Dibangun/ Ditingkatkan (Bendungan Karangnongko)	FKB
185	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	Ditjen Sumber Daya Air	Detail Desain Pengendalian Banjir Lahar Dingin Gunung Merapi di Kab Sleman dan Kab Magelang (10 Sabodam)	FKB
186	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	Ditjen Bina Marga	Preservasi Jalan Ruas Yogya-Bts. Bantul (Gapura-Sp Cepit)	FKS-FKB
187	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	Ditjen Sumber Daya Air	Pembangunan Sabodam Pengendalian Banjir Lahar Dingin Gunung Merapi di Kali Opak Kab. Sleman	FKS-FKB
188	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	Ditjen Cipta Karya	Optimalisasi TPST Wukirsari	FKS-FKB
189	JAWA TIMUR	Ditjen Cipta Karya	Peningkatan SPAM Mojolagres	FKB
190	JAWA TIMUR	Ditjen Cipta Karya	Sistem Pengelolaan Persampahan Menjadi Sumber Energi Terbarukan Kab Tuban	FKB
191	JAWA TIMUR	Ditjen Sumber Daya Air	Bangunan pengaman pantai yang dibangun/ ditingkatkan Tuban - Jenu	FKB
192	JAWA TIMUR	Ditjen Sumber Daya Air	Bangunan Pengendalian banjir yang dibangun/ ditingkatkan Sungai Sidokare	FKB
193	JAWA TIMUR	Ditjen Sumber Daya Air	Bangunan Pengendalian banjir yang dibangun/ ditingkatkan Kali Lamong	FKB
194	JAWA TIMUR	Ditjen Sumber Daya Air	Bangunan Pengendalian banjir yang dibangun/ ditingkatkan Sungai Pucang	FKB
195	JAWA TIMUR	Ditjen Sumber Daya Air	Bangunan Pengendalian banjir yang dibangun/ditingkatkan Kali Brantas	FKB
196	JAWA TIMUR	Ditjen Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Kab. Mojokerto	FKB
197	JAWA TIMUR	Ditjen Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Kab. Gresik	FKB
198	JAWA TIMUR	Ditjen Sumber Daya Air	Jaringan Irigasi Permukaan dan Rawa yang dibangun / ditingkatkan DI Bondoyudo	FKB
199	JAWA TIMUR	Ditjen Sumber Daya Air	Bangunan Pengendalian banjir yang dibangun / ditingkatkan Kali Kedunglarangan	FKB
200	JAWA TIMUR	Ditjen Sumber Daya Air	Tanggul Bendung yang dibangun / ditingkatkan Kali Rejadi, Glidik, dan Muju	FKB
201	JAWA TIMUR	Ditjen Sumber Daya Air	Jaringan Irigasi Permukaan dan Rawa yang dibangun / ditingkatkan DI Molek	FKB
202	JAWA TIMUR	Ditjen Sumber Daya Air	Jaringan Irigasi Permukaan dan Rawa yang dibangun / ditingkatkan DI Pekalen	FKB
203	JAWA TIMUR	Ditjen Sumber Daya Air	Jaringan Irigasi Permukaan dan Rawa yang dibangun / ditingkatkan Tugu	FKB
204	JAWA TIMUR	Ditjen Sumber Daya Air	Jaringan Irigasi Permukaan dan Rawa yang dibangun / ditingkatkan DI Waduk Bening	FKB
205	JAWA TIMUR	Ditjen Sumber Daya Air	Jaringan Irigasi Permukaan dan Rawa yang dibangun / ditingkatkan DI Bendo	FKB
206	JAWA TIMUR	Ditjen Sumber Daya Air	Jaringan Irigasi Permukaan dan Rawa yang dibangun / ditingkatkan DI Bajulmati	FKB
207	BANTEN	Ditjen Sumber Daya Air	Pengendalian Banjir Kali Cisadane	FKS-FKB
208	BANTEN	Ditjen Sumber Daya Air	Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi DI Ciujung	FKS-FKB
209	BANTEN	Ditjen Sumber Daya Air	Peningkatan Kapasitas Sungai Cibanten	FKS-FKB
210	BANTEN	Ditjen Sumber Daya Air	Peningkatan Kapasitas Sungai Ciujung	FKS-FKB
211	BANTEN	Ditjen Sumber Daya Air	Pembangunan Daerah Irigasi Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang	FKS-FKB
212	BALI	Ditjen Bina Marga	Pembangunan Jalan dan Jembatan Bts. Kota Singaraja-Mengwitani	FKW
213	BALI	Ditjen Cipta Karya	Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Regional	Tidak Terbahas
214	BALI	Ditjen Sumber Daya Air	Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai di pesisir Kawasan Sarbagita	FKB

No	Nama Provinsi	Nama Unor	Kebutuhan Program	Kesepakatan Konreg
215	BALI	Ditjen Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni di Kab. Tabanan	FKB
216	BALI	Ditjen Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni di Kab. Gianyar	FKB
217	BALI	Ditjen Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni di Kota Denpasar	FKB
218	BALI	Ditjen Cipta Karya	Pembangunan TPST Temesi	Tidak Terbahas
219	BALI	Ditjen Cipta Karya	Pembangunan TPST Jungutbatu	Tidak Terbahas
220	BALI	Ditjen Cipta Karya	Pembangunan TPST Ped	Tidak Terbahas
221	BALI	Ditjen Cipta Karya	Peningkatan SPAM Regional Burana	Tidak Terbahas
222	BALI	Ditjen Sumber Daya Air	Revitalisasi Danau Batur	Tidak Terbahas
223	NUSA TENGGARA BARAT	Ditjen Sumber Daya Air	Penyusunan Desain Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Mamak Kakiang	FKB
224	NUSA TENGGARA BARAT	Ditjen Sumber Daya Air	Penyusunan Desain Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Batu Bulan	FKB
225	NUSA TENGGARA BARAT	Ditjen Sumber Daya Air	Penyusunan Desain Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Remening Kompleks	FKB
226	NUSA TENGGARA BARAT	Ditjen Sumber Daya Air	Penyusunan Desain Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Pengga	FKB
227	NUSA TENGGARA BARAT	Ditjen Sumber Daya Air	Penyusunan Desain Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Pandanduri-Swangi	FKB
228	NUSA TENGGARA BARAT	Ditjen Sumber Daya Air	Prasarana Jaringan Sumber Daya Air (Penuntasan Jaringan untuk layanan Daerah Irigasi di DI Rababaka Komplek)	FKB
229	NUSA TENGGARA BARAT	Ditjen Sumber Daya Air	Penyusunan Desain Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Mujur II	FKB
230	NUSA TENGGARA BARAT	Ditjen Sumber Daya Air	Penyusunan Desain Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Katon Kompleks	FKB
231	NUSA TENGGARA BARAT	Ditjen Sumber Daya Air	Penyusunan Desain Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Jurang Sate Hulu	FKB
232	NUSA TENGGARA BARAT	Ditjen Sumber Daya Air	Prasarana Jaringan Sumber Daya Air (Penanganan abrasi pantai) 3 Gili	FKB
233	NUSA TENGGARA BARAT	Ditjen Cipta Karya	Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota (Optimalisasi TPST Raberas)	Tidak Terbahas
234	NUSA TENGGARA BARAT	Ditjen Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Kota Bima	FKB
235	NUSA TENGGARA BARAT	Ditjen Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Swadaya Dompu	FKB
236	NUSA TENGGARA BARAT	Ditjen Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Sumbawa Barat	FKB
237	NUSA TENGGARA BARAT	Ditjen Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Sumbawa	FKB
238	NUSA TENGGARA BARAT	Ditjen Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Lombok Utara	FKB
239	NUSA TENGGARA BARAT	Ditjen Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Lombok Barat	FKB
240	NUSA TENGGARA BARAT	Ditjen Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Lombok Tengah	FKB
241	NUSA TENGGARA BARAT	Ditjen Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Kota Mataram	FKB
242	NUSA TENGGARA BARAT	Ditjen Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Lombok Timur	FKB

No	Nama Provinsi	Nama Unor	Kebutuhan Program	Kesepakatan Konreg
243	NUSA TENGGARA TIMUR	Ditjen Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Kab. Sumba Tengah	Tidak Terbahas
244	NUSA TENGGARA TIMUR	Ditjen Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Kab. Lembata	Tidak Terbahas
245	NUSA TENGGARA TIMUR	Ditjen Sumber Daya Air	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk JIAT	FKB
246	NUSA TENGGARA TIMUR	Ditjen Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Kab. Manggarai Timur	FKS-FKB
247	NUSA TENGGARA TIMUR	Ditjen Cipta Karya	Pembangunan TPST di Kota Kefamenanu, Kab. Timor Tengah Utara	Tidak Terbahas
248	KALIMANTAN BARAT	Ditjen Cipta Karya	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota-Kota Pontianak	Tidak Terbahas
249	KALIMANTAN BARAT	Ditjen Perumahan	Rumah Susun Sewa untuk MBR-Kota Pontianak	Tidak Terbahas
250	KALIMANTAN BARAT	Ditjen Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni-Kab. Kubu Raya	Tidak Terbahas
251	KALIMANTAN BARAT	Ditjen Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni-Kota Pontianak	Tidak Terbahas
252	KALIMANTAN BARAT	Ditjen Bina Marga	Pembangunan Jembatan Cermai	Tidak Terbahas
253	KALIMANTAN BARAT	Ditjen Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni-Kab. Bengkayang	Tidak Terbahas
254	KALIMANTAN BARAT	Ditjen Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni-Kab. Sambas	Tidak Terbahas
255	KALIMANTAN BARAT	Ditjen Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni-Kota Singkawang	Tidak Terbahas
256	KALIMANTAN BARAT	Ditjen Cipta Karya	Peningkatan/Optimalisasi SPAM Kab. Mempawah	Tidak Terbahas
257	KALIMANTAN BARAT	Ditjen Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni-Kab. Mempawah	Tidak Terbahas
258	KALIMANTAN BARAT	Ditjen Bina Marga	Pembangunan Jalan Nanga Era - Bts. Prov. Kalimantan Timur	Tidak Terbahas
259	KALIMANTAN BARAT	Ditjen Bina Marga	Pembangunan Jalan Nanga Ella Ilir - Bts. Prov. Kalimantan Tengah	Tidak Terbahas
260	KALIMANTAN BARAT	Ditjen Cipta Karya	Peningkatan/Optimalisasi SPAM Kab. Sekadau	Tidak Terbahas
261	KALIMANTAN BARAT	Ditjen Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni-Kab. Kayong Utara	Tidak Terbahas
262	KALIMANTAN BARAT	Ditjen Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni-Kab. Melawi	Tidak Terbahas
263	KALIMANTAN BARAT	Ditjen Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni-Kab. Sekadau	Tidak Terbahas
264	KALIMANTAN BARAT	Ditjen Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni-Kab. Kapuas Hulu	Tidak Terbahas
265	KALIMANTAN BARAT	Ditjen Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni-Kab. Sintang	Tidak Terbahas
266	KALIMANTAN BARAT	Ditjen Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni-Kab. Ketapang	Tidak Terbahas
267	KALIMANTAN BARAT	Ditjen Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni-Kab. Sanggau	Tidak Terbahas
268	KALIMANTAN BARAT	Ditjen Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni-Kab. Landak	Tidak Terbahas
269	KALIMANTAN TENGAH	Ditjen Bina Marga	Pelebaran Menambah Lajur Ruas Jln. A. Yani (Pangkalanbun)	FKW
270	KALIMANTAN TENGAH	Ditjen Bina Marga	Pelebaran Jalan Menuju Standar Ruas Palantaran - Kasongan	Tidak Terbahas
271	KALIMANTAN TENGAH	Ditjen Cipta Karya	Sistem Pengolahan Sampah Skala Kawasan	Tidak Terbahas
272	KALIMANTAN TENGAH	Ditjen Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni-Kotawaringin Barat	Tidak Terbahas
273	KALIMANTAN TENGAH	Ditjen Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni-Kotawaringin Timur	Tidak Terbahas
274	KALIMANTAN TENGAH	Ditjen Cipta Karya	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Skala Kota-Kab. Kapuas	Tidak Terbahas
275	KALIMANTAN TENGAH	Ditjen Cipta Karya	Peningkatan Kapasitas Sistem Pengolahan Air Minum Skala Kawasan	Tidak Terbahas
276	KALIMANTAN TENGAH	Ditjen Cipta Karya	Pembangunan Sistem Pengolahan Air Minum (SPAM/Pamsimas) (Peningkatan IPA Kap. 10 l/dt SPAM IKK Dadahup Kab. Kapuas)	Tidak Terbahas
277	KALIMANTAN TENGAH	Ditjen Cipta Karya	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Skala Kota-Kab. Pulang Pisau	Tidak Terbahas

No	Nama Provinsi	Nama Unor	Kebutuhan Program	Kesepakatan Konreg
278	KALIMANTAN TENGAH	Ditjen Sumber Daya Air	Daerah Irigasi Permukaan /Rawa yang dibangun/ditingkatkan (Optimalisasi Irigasi)	Tidak Terbahas
279	KALIMANTAN TENGAH	Ditjen Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni-Kab. Pulang Pisau	Tidak Terbahas
280	KALIMANTAN TENGAH	Ditjen Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni-Kab. Kapuas	Tidak Terbahas
281	KALIMANTAN TENGAH	Ditjen Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni-Kota Palangkaraya	Tidak Terbahas
282	KALIMANTAN TENGAH	Ditjen Bina Marga	Pembangunan Ruas BTS. KALBAR-TUMBANG SENAMANG	FKB
283	KALIMANTAN TENGAH	Ditjen Bina Marga	Pembangunan Ruas Tumbang Sanamang - Tumbang Hiran	FKB
284	KALIMANTAN TENGAH	Ditjen Cipta Karya	Pembangunan Sistem Pengolahan Persampahan (TPST)-Kabupaten Murung Raya	Tidak Terbahas
285	KALIMANTAN TENGAH	Ditjen Cipta Karya	Pembangunan Sistem Pengolahan Persampahan (TPST)-Kabupaten Barito Timur	FKB
286	KALIMANTAN TENGAH	Ditjen Cipta Karya	Pembangunan Sistem Pengolahan Persampahan Skala Kota	Tidak Terbahas
287	KALIMANTAN TENGAH	Ditjen Cipta Karya	Peningkatan Kapasitas IPA (SPAM IKK Puruk Cahu 10 l/s dan SPAM Unit Muara Laung 20 l/det)	FKB
288	KALIMANTAN TENGAH	Ditjen Cipta Karya	Pembangunan Sistem Pengolahan Air Minum Kabupaten Murung Raya	Tidak Terbahas
289	KALIMANTAN TENGAH	Ditjen Cipta Karya	Pembangunan Sistem Pengolahan Air Minum Kabupaten Gunung Mas	Tidak Terbahas
290	KALIMANTAN TENGAH	Ditjen Cipta Karya	Peningkatan Kapasitas IPA 50l/det SPAM Kuala Pembuang	Tidak Terbahas
291	KALIMANTAN TENGAH	Ditjen Cipta Karya	Pembangunan Sistem Pengolahan Air Minum (SPAM IKK Jingah 50 l/det dan SPAM BNA Muara Teweh 100 l/det)	FKB
292	KALIMANTAN TENGAH	Ditjen Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni-Kabupaten Murung Raya	Tidak Terbahas
293	KALIMANTAN TENGAH	Ditjen Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni-Kabupaten Barito Timur	Tidak Terbahas
294	KALIMANTAN TENGAH	Ditjen Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni-Kabupaten Katingan	Tidak Terbahas
295	KALIMANTAN TENGAH	Ditjen Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni-Kabupaten Gunung Mas	Tidak Terbahas
296	KALIMANTAN TENGAH	Ditjen Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni-Kabupaten Lamandau	Tidak Terbahas
297	KALIMANTAN TENGAH	Ditjen Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni-Kabupaten Sukamara	Tidak Terbahas
298	KALIMANTAN TENGAH	Ditjen Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni-Kabupaten Barito Selatan	Tidak Terbahas
299	KALIMANTAN TENGAH	Ditjen Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni-Kabupaten Barito Utara	Tidak Terbahas
300	KALIMANTAN TENGAH	Ditjen Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni-Kabupaten Seruyan	Tidak Terbahas
301	KALIMANTAN SELATAN	Ditjen Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni-Tanah Bumbu	Tidak Terbahas
302	KALIMANTAN SELATAN	Ditjen Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni-Kotabaru	FKB
303	KALIMANTAN SELATAN	Ditjen Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Tapin	FKB
304	KALIMANTAN SELATAN	Ditjen Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Barito Kuala	FKB
305	KALIMANTAN SELATAN	Ditjen Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Banjar	FKB
306	KALIMANTAN SELATAN	Ditjen Sumber Daya Air	Bangunan Pengendalian banjir yang dibangun/ditingkatkan (Pembangunan/Peningkatan Bangunan Pengendalian Banjir)	Tidak Terbahas
307	KALIMANTAN SELATAN	Ditjen Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni-Banjarmasin	FKB
308	KALIMANTAN SELATAN	Ditjen Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni-Banjarmasin	FKB
309	KALIMANTAN SELATAN	Ditjen Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Balangan	FKB
310	KALIMANTAN SELATAN	Ditjen Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Tabalong	FKB
311	KALIMANTAN SELATAN	Ditjen Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Hulu Sungai Tengah	FKB
312	KALIMANTAN SELATAN	Ditjen Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Hulu Sungai Utara	FKB
313	KALIMANTAN SELATAN	Ditjen Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Hulu Sungai Selatan	FKB
314	KALIMANTAN SELATAN	Ditjen Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Tanah Laut	FKB

No	Nama Provinsi	Nama Unor	Kebutuhan Program	Kesepakatan Konreg
315	KALIMANTAN TIMUR	Ditjen Sumber Daya Air	Bangunan Pengaman Pantai yang Dibangun/Ditingkatkan-Pulau Maratua	Tidak Terbahas
316	KALIMANTAN TIMUR	Ditjen Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni-Berau	FKB
317	KALIMANTAN TIMUR	Ditjen Bina Marga	Pembangunan Jalan Lingkar Samarinda	FKW
318	KALIMANTAN TIMUR	Ditjen Cipta Karya	Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kawasan-Kota Bontang	Tidak Terbahas
319	KALIMANTAN TIMUR	Ditjen Cipta Karya	Peningkatan SPAM Kab/Kota Kota Samarinda	Tidak Terbahas
320	KALIMANTAN TIMUR	Ditjen Cipta Karya	Peningkatan SPAM Kab/Kota Kota Bontang	Tidak Terbahas
321	KALIMANTAN TIMUR	Ditjen Cipta Karya	Peningkatan SPAM Kab/Kota Kutai Kartanegara	Tidak Terbahas
322	KALIMANTAN TIMUR	Ditjen Cipta Karya	Peningkatan SPAM Kab/Kota Penajam Paser Utara	Tidak Terbahas
323	KALIMANTAN TIMUR	Ditjen Sumber Daya Air	Pembangunan Embung Aji Raden	Tidak Terbahas
324	KALIMANTAN TIMUR	Ditjen Sumber Daya Air	Bangunan Pengamanan Pantai yang Dibangun (Pembangunan Pengaman Pantai)	FKB
325	KALIMANTAN TIMUR	Ditjen Sumber Daya Air	Bangunan Pengendalian banjir yang dibangun (Pembangunan bangunan Pengendalian Banjir)-Kota Balikpapan	FKB
326	KALIMANTAN TIMUR	Ditjen Sumber Daya Air	Bangunan Pengendalian banjir yang dibangun (Pembangunan bangunan Pengendalian Banjir)-Kota Samarinda	FKB
327	KALIMANTAN TIMUR	Ditjen Sumber Daya Air	Bangunan Pengendalian banjir yang dibangun (Pembangunan bangunan Pengendalian Banjir)-Kota Bontang	Tidak Terbahas
328	KALIMANTAN TIMUR	Ditjen Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni-Kutai Kartanegara	FKB
329	KALIMANTAN TIMUR	Ditjen Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni-Kota Bontang	FKB
330	KALIMANTAN TIMUR	Ditjen Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni-Kota Balikpapan	FKB
331	KALIMANTAN TIMUR	Ditjen Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni-Kota Samarinda	FKB
332	KALIMANTAN TIMUR	Ditjen Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni-Penajam Paser Utara	FKB
333	KALIMANTAN TIMUR	Ditjen Sumber Daya Air	Revitalisasi Danau Kaskade Mahakam (Melintang, Semayang, dan Jempang)	FKB
334	KALIMANTAN TIMUR	Ditjen Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni-Kutai Barat	FKB
335	KALIMANTAN TIMUR	Ditjen Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni-Paser	FKB
336	KALIMANTAN TIMUR	Ditjen Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni-Mahakam Ulu	FKB
337	KALIMANTAN TIMUR	Ditjen Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni-Kutai Timur	Tidak Terbahas
338	KALIMANTAN UTARA	Ditjen Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni-Kecamatan Tanjung Selor	Tidak Terbahas
339	KALIMANTAN UTARA	Ditjen Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni-Kec. Tarakan Utara, Kec. Tarakan Tengah, Kec. Tarakan Barat, Kec. Tarakan Timur	FKB
340	KALIMANTAN UTARA	Ditjen Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni-Kabupaten Malinau	FKB
341	KALIMANTAN UTARA	Ditjen Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni-Kabupaten Tana Tidung	FKB
342	SULAWESI UTARA	Ditjen Cipta Karya	Pembangunan SPAM sekitar Kawasan KEK/KI Bitung (Bagian dari SPAM Regional BIMATARA)	FKB
343	SULAWESI UTARA	Ditjen Cipta Karya	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota Sekitar KEK/KI Bitung	FKB
344	SULAWESI UTARA	Ditjen Cipta Karya	Penyediaan air minum /Pulau Bangka, Pulau Gangga, Pulau Kinabuhuta, Pulau Talise	FKB
345	SULAWESI UTARA	Ditjen Cipta Karya	Peningkatan SPAM Kab. Minahasa Utara khususnya KEK Likupang	FKB
346	SULAWESI UTARA	Ditjen Cipta Karya	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat-Kota Tomohon	FKB
347	SULAWESI UTARA	Ditjen Cipta Karya	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat-Kab. Minahasa	FKB
348	SULAWESI UTARA	Ditjen Sumber Daya Air	Revitalisasi Danau Tondano	FKB
349	SULAWESI UTARA	Ditjen Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni-Kota Tomohon	Tidak Terbahas
350	SULAWESI UTARA	Ditjen Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni-Kota Manado	FKB

No	Nama Provinsi	Nama Unor	Kebutuhan Program	Kesepakatan Konreg
351	SULAWESI UTARA	Ditjen Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni-Kota Bitung	FKB
352	SULAWESI UTARA	Ditjen Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni-Kab. Minahasa Utara	FKB
353	SULAWESI UTARA	Ditjen Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni-Kab. Minahasa	FKB
354	SULAWESI UTARA	Ditjen Bina Marga	Peningkatan Kapasitas Jalan LINGKAR KOTA MANADO (MORR I)/ Penanganan Bottleneck terowongan	FKB
355	SULAWESI UTARA	Ditjen Bina Marga	Pelebaran menuju standar Tomohon-Kawangkoan	FKB
356	SULAWESI UTARA	Ditjen Bina Marga	Pembangunan Jalan Lingkar Kota Manado (MORR) 3 Kalasey-Winangun	FKB
357	SULAWESI UTARA	Ditjen Cipta Karya	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota-Kota Bitung	FKB
358	SULAWESI UTARA	Ditjen Cipta Karya	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat-Kab. Minahasa Utara	FKB
359	SULAWESI UTARA	Ditjen Cipta Karya	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat - Kota Manado	FKB
360	SULAWESI UTARA	Ditjen Sumber Daya Air	Prasarana air baku yang dibangun/ditingkatkan untuk Kabupaten Minahasa Utara	FKB
361	SULAWESI UTARA	Ditjen Sumber Daya Air	Prasarana air baku yang dibangun/ditingkatkan untuk Kota Tomohon	FKB
362	SULAWESI UTARA	Ditjen Sumber Daya Air	Prasarana air baku yang dibangun/ditingkatkan untuk Kota Manado	FKB
363	SULAWESI UTARA	Ditjen Sumber Daya Air	Prasarana air baku yang dibangun/ditingkatkan untuk Kota Bitung	FKB
364	SULAWESI UTARA	Ditjen Sumber Daya Air	Prasarana air baku yang dibangun/ditingkatkan untuk Kabupaten Minahasa	FKB
365	SULAWESI UTARA	Ditjen Perumahan	Penyediaan Rumah Susun Sewa untuk MBR-Kota Manado	FKB
366	SULAWESI UTARA	Ditjen Perumahan	Penyediaan Rumah Susun Sewa untuk MBR-Kota Bitung	FKB
367	SULAWESI UTARA	Ditjen Cipta Karya	Pembangunan SPAM Kabupaten-Kab. Bolaang Mongondow	FKB
368	SULAWESI TENGAH	Ditjen Bina Marga	Pelebaran jalan menuju standar ruas Bahodopi-Bts.Sultra	Tidak Terbahas
369	SULAWESI TENGAH	Ditjen Bina Marga	Pelebaran jalan menuju standar ruas Bungku-Bahodopi	Tidak Terbahas
370	SULAWESI TENGAH	Ditjen Cipta Karya	Penataan Kawasan Sekitar KI Desa Bahodopi	Tidak Terbahas
371	SULAWESI TENGAH	Ditjen Cipta Karya	Penataan Kawasan Sekitar KI Desa Keurea	Tidak Terbahas
372	SULAWESI TENGAH	Ditjen Cipta Karya	Penataan Kawasan Sekitar KI Desa Bahomakmur	Tidak Terbahas
373	SULAWESI TENGAH	Ditjen Cipta Karya	Penataan Kawasan Sekitar KI Desa Fatufia	Tidak Terbahas
374	SULAWESI TENGAH	Ditjen Cipta Karya	Sistem Pengelolaan Persampahan (TPST)-Kec. Bahodopi	FKS-FKB
375	SULAWESI TENGAH	Ditjen Cipta Karya	Pembangunan SPAM Kabupaten -Kab. Morowali	Tidak Terbahas
376	SULAWESI TENGAH	Ditjen Cipta Karya	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota -Kab. Morowali	Tidak Terbahas
377	SULAWESI TENGAH	Ditjen Cipta Karya	Optimalisasi SPAM Kabupaten untuk kawasan perkotaan-Kab. Morowali	Tidak Terbahas
378	SULAWESI TENGAH	Ditjen Sumber Daya Air	Prasarana air baku yang dibangun/ditingkatkan-Kec. Bahodopi	Tidak Terbahas
379	SULAWESI TENGAH	Ditjen Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni-Kab. Morowali	Tidak Terbahas
380	SULAWESI TENGAH	Ditjen Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni-Kab. Sigi	Tidak Terbahas
381	SULAWESI TENGAH	Ditjen Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni-Kab. Donggala	Tidak Terbahas
382	SULAWESI TENGAH	Ditjen Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni-Kab. Tojo Una-una	Tidak Terbahas
383	SULAWESI TENGAH	Ditjen Cipta Karya	Sistem Pengelolaan Persampahan (TPST)-Kecamatan Duyu, Kota Palu	Tidak Terbahas
384	SULAWESI TENGAH	Ditjen Cipta Karya	Optimalisasi SPAM Kabupaten untuk kawasan perkotaan-Kab. Poso	Tidak Terbahas
385	SULAWESI TENGAH	Ditjen Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni-Kab. Morowali Utara	Tidak Terbahas
386	SULAWESI TENGAH	Ditjen Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni-Kab. Banggai Laut	Tidak Terbahas
387	SULAWESI TENGAH	Ditjen Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni-Kab. Buol	Tidak Terbahas

No	Nama Provinsi	Nama Unor	Kebutuhan Program	Kesepakatan Konreg
388	SULAWESI TENGAH	Ditjen Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni-Kab. Parigi Moutong	Tidak Terbahas
389	SULAWESI TENGAH	Ditjen Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni-Kab. Tolitoli	Tidak Terbahas
390	SULAWESI TENGAH	Ditjen Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni-Kab. Poso	Tidak Terbahas
391	SULAWESI TENGAH	Ditjen Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni-Kab. Banggai	Tidak Terbahas
392	SULAWESI TENGAH	Ditjen Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni-Kab. Banggai Kepulauan	Tidak Terbahas
393	SULAWESI SELATAN	Ditjen Cipta Karya	Pembangunan SPAM Kabupaten-Kab. Wajo	Tidak Terbahas
394	SULAWESI SELATAN	Ditjen Sumber Daya Air	Revitalisasi Danau Tempe	Tidak Terbahas
395	SULAWESI SELATAN	Ditjen Sumber Daya Air	Rehabilitasi jaringan irigasi DI Saddang	Tidak Terbahas
396	SULAWESI SELATAN	Ditjen Sumber Daya Air	Pembangunan jaringan irigasi DI Gilitreng	Tidak Terbahas
397	SULAWESI SELATAN	Ditjen Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni-Kab. Wajo	Tidak Terbahas
398	SULAWESI SELATAN	Ditjen Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni-Kab. Pinrang	Tidak Terbahas
399	SULAWESI SELATAN	Ditjen Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni-Kab. Sidenreng Rappang	Tidak Terbahas
400	SULAWESI SELATAN	Ditjen Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni-Kab. Bone	Tidak Terbahas
401	SULAWESI SELATAN	Ditjen Perumahan	Penyediaan Akses Rumah Layak Huni-Kab. Bantaeng	Tidak Terbahas
402	SULAWESI SELATAN	Ditjen Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni-Kab. Toraja Utara	Tidak Terbahas
403	SULAWESI SELATAN	Ditjen Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni-Kab. Selayar, Kab. Tana Toraja; dan Toraja Utara	Tidak Terbahas
404	SULAWESI SELATAN	Ditjen Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni-Kab. Tana Toraja	Tidak Terbahas
405	SULAWESI SELATAN	Ditjen Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni-Kab. Kep. Selayar	Tidak Terbahas
406	SULAWESI SELATAN	Ditjen Bina Marga	Pembangunan Jalan Mamminasata Bypass	Tidak Terbahas
407	SULAWESI SELATAN	Ditjen Cipta Karya	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat Skala Kota (IPLT)-Kab. Gowa	Tidak Terbahas
408	SULAWESI SELATAN	Ditjen Cipta Karya	Sistem Pengelolaan Sampah Skala Kota (TPST)-Kab. Maros	Tidak Terbahas
409	SULAWESI SELATAN	Ditjen Cipta Karya	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota (IPLT)	Tidak Terbahas
410	SULAWESI SELATAN	Ditjen Cipta Karya	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat Skala Kota (IPLT)-Kab. Takalar	Tidak Terbahas
411	SULAWESI SELATAN	Ditjen Sumber Daya Air	Bangunan Pengendalian banjir yang dibangun Sungai Tallo	Tidak Terbahas
412	SULAWESI SELATAN	Ditjen Sumber Daya Air	Pembangunan Bendungan Jenelata	Tidak Terbahas
413	SULAWESI SELATAN	Ditjen Sumber Daya Air	Prasarana air baku yang dibangun pada Bendungan Pamukkulu	Tidak Terbahas
414	SULAWESI SELATAN	Ditjen Perumahan	Penyediaan Rumah Susun Sewa untuk MBR-Kab. Gowa	Tidak Terbahas
415	SULAWESI SELATAN	Ditjen Perumahan	Penyediaan Rumah Susun Sewa untuk MBR-Kota Makassar	Tidak Terbahas
416	SULAWESI SELATAN	Ditjen Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni-Kab. Gowa	Tidak Terbahas
417	SULAWESI SELATAN	Ditjen Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni-Kab. Takalar	Tidak Terbahas
418	SULAWESI SELATAN	Ditjen Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni-Kota Makassar	Tidak Terbahas
419	SULAWESI SELATAN	Ditjen Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni-Kab. Maros	Tidak Terbahas
420	SULAWESI SELATAN	Ditjen Cipta Karya	Sistem Pengelolaan Sampah Skala Kawasan (TPS3R)	Tidak Terbahas
421	SULAWESI SELATAN	Ditjen Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni-Malili	Tidak Terbahas
422	SULAWESI SELATAN	Ditjen Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni-Nuha	Tidak Terbahas
423	SULAWESI SELATAN	Ditjen Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni-Kota Palopo	Tidak Terbahas
424	SULAWESI SELATAN	Ditjen Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni-Kota Parepare	Tidak Terbahas

No	Nama Provinsi	Nama Unor	Kebutuhan Program	Kesepakatan Konreg
425	SULAWESI SELATAN	Ditjen Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni-Kab. Luwu	Tidak Terbahas
426	SULAWESI SELATAN	Ditjen Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni-Kab. Luwu Utara	Tidak Terbahas
427	SULAWESI SELATAN	Ditjen Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni-Kab. Luwu Timur	Tidak Terbahas
428	SULAWESI SELATAN	Ditjen Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni-Kab. Enrekang	Tidak Terbahas
429	SULAWESI SELATAN	Ditjen Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni-Kab. Soppeng	Tidak Terbahas
430	SULAWESI SELATAN	Ditjen Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni-Kab. Pangkajene dan Kepulauan	Tidak Terbahas
431	SULAWESI SELATAN	Ditjen Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni-Kab. Barru	Tidak Terbahas
432	SULAWESI SELATAN	Ditjen Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni-Kab. Sinjai	Tidak Terbahas
433	SULAWESI SELATAN	Ditjen Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni-Kab. Bulukumba	Tidak Terbahas
434	SULAWESI SELATAN	Ditjen Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni-Kab. Jeneponto	Tidak Terbahas
435	SULAWESI TENGGARA	Ditjen Cipta Karya	Sistem Pengelolaan Persampahan (TPST)-Kab. Wakatobi	FKB
436	SULAWESI TENGGARA	Ditjen Cipta Karya	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota-Kab. Wakatobi	FKB
437	SULAWESI TENGGARA	Ditjen Sumber Daya Air	Bangunan Pengamanan Pantai yang dibangun/ditingkatkan -Kab. Wakatobi	FKB
438	SULAWESI TENGGARA	Ditjen Sumber Daya Air	Prasarana air baku yang dibangun di KSPN Wakatobi	FKB
439	SULAWESI TENGGARA	Ditjen Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni-Kab. Wakatobi	FKB
440	SULAWESI TENGGARA	Ditjen Cipta Karya	Sistem Pengelolaan Persampahan (TPST)-Kec. Morosi, Kec. Kapoiala, dan Kec. Bondoala, Kab. Konawe	FKB
441	SULAWESI TENGGARA	Ditjen Cipta Karya	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota-Kec. Morosi, Kec. Kapoiala, dan Kec. Bondoala, Kab. Konawe	FKB
442	SULAWESI TENGGARA	Ditjen Sumber Daya Air	Bangunan Pengendalian banjir yang dibangun/ditingkatkan-Kab. Konawe	FKB
443	SULAWESI TENGGARA	Ditjen Sumber Daya Air	Prasarana air baku yang dibangun-Kab. Konawe	FKB
444	SULAWESI TENGGARA	Ditjen Perumahan	Penyediaan rumah susun sewa untuk MBR di Kota Kendari	FKB
445	SULAWESI TENGGARA	Ditjen Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni-Kec. Morosi, Kec. Kapoiala, dan Kec. Bondoala, Kab. Konawe	FKB
446	SULAWESI TENGGARA	Ditjen Bina Marga	Pembangunan Jalan Akses Kendari New Port	FKB
447	SULAWESI TENGGARA	Ditjen Cipta Karya	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Regional	FKB
448	SULAWESI TENGGARA	Ditjen Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni-Kota Kendari	FKB
449	SULAWESI TENGGARA	Ditjen Cipta Karya	Sistem Pengelolaan Persampahan (TPST)-Konawe Kepulauan	FKS-FKB
450	SULAWESI TENGGARA	Ditjen Cipta Karya	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat Skala Kota-Muna	FKB
451	SULAWESI TENGGARA	Ditjen Cipta Karya	Pembangunan SPAM 4 kecamatan (Kecamatan Tirawuta, Loea, Ladongi, Dangia Kabupaten Kolaka Timur)	FKB
452	SULAWESI TENGGARA	Ditjen Cipta Karya	Sistem Pengelolaan Persampahan (TPST)-Buton Selatan	FKS-FKB
453	SULAWESI TENGGARA	Ditjen Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni-Kota Baubau	FKB
454	SULAWESI TENGGARA	Ditjen Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni-Kab. Muna Barat	FKB
455	SULAWESI TENGGARA	Ditjen Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni-Kab. Konawe Kepulauan	FKB
456	SULAWESI TENGGARA	Ditjen Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni-Kab. Kolaka Timur	FKB
457	SULAWESI TENGGARA	Ditjen Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni-Kab. Konawe Utara	FKB
458	SULAWESI TENGGARA	Ditjen Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni-Kab. Kolaka Utara	FKB
459	SULAWESI TENGGARA	Ditjen Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni-Kab. Konawe Selatan	FKB
460	SULAWESI TENGGARA	Ditjen Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni-Kab. Bombana	FKB
461	SULAWESI TENGGARA	Ditjen Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni-Kab. Muna	FKB

No	Nama Provinsi	Nama Unor	Kebutuhan Program	Kesepakatan Konreg
462	SULAWESI TENGGARA	Ditjen Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni-Kab. Buton	FKB
463	SULAWESI TENGGARA	Ditjen Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni-Kab. Buton Selatan	FKB
464	SULAWESI TENGGARA	Ditjen Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni-Kab. Buton Tengah	FKB
465	SULAWESI TENGGARA	Ditjen Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni-Kab. Buton Utara	FKB
466	SULAWESI TENGGARA	Ditjen Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni-Kab. Kolaka	FKB
467	GORONTALO	Ditjen Cipta Karya	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kawasan Limboto	Tidak Terbahas
468	GORONTALO	Ditjen Cipta Karya	Sistem Pengelolaan Sampah Skala Kota (TPST)-Kab. Gorontalo	Tidak Terbahas
469	GORONTALO	Ditjen Perumahan	Penyediaan Akses Rumah Layak Huni-Kab. Gorontalo	FKB
470	GORONTALO	Ditjen Cipta Karya	Optimalisasi SPAM Perkotaan-Kab. Pohuwato	Tidak Terbahas
471	GORONTALO	Ditjen Sumber Daya Air	Penanganan banjir sungai Randangan	Tidak Terbahas
472	GORONTALO	Ditjen Sumber Daya Air	Daerah irigasi yang dibangun/ditingkatkan D.I. Randangan	Tidak Terbahas
473	GORONTALO	Ditjen Cipta Karya	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota Gorontalo	Tidak Terbahas
474	GORONTALO	Ditjen Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni-Kota Gorontalo	FKB
475	GORONTALO	Ditjen Cipta Karya	Sistem Pengelolaan Sampah Skala Kota (TPST)-Kab. Bone Bolango	FKB
476	GORONTALO	Ditjen Cipta Karya	Sistem Pengelolaan Sampah Skala Kota (TPST)-Kab. Gorontalo Utara	FKB
477	GORONTALO	Ditjen Cipta Karya	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kabupaten-Kab. Gorontalo Utara	Tidak Terbahas
478	GORONTALO	Ditjen Cipta Karya	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kabupaten-Kab. Bone Bolango	Tidak Terbahas
479	GORONTALO	Ditjen Cipta Karya	Pembangunan Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kabupaten	Tidak Terbahas
480	GORONTALO	Ditjen Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni-Kab. Bone Bolango	Tidak Terbahas
481	GORONTALO	Ditjen Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni-Kab. Boalemo	FKB
482	GORONTALO	Ditjen Perumahan	Penyediaan Akses Rumah Layak Huni-Kab. Gorontalo Utara	Tidak Terbahas
483	GORONTALO	Ditjen Perumahan	Penyediaan Akses Rumah Layak Huni-Kab. Bone Bolango	Tidak Terbahas
484	GORONTALO	Ditjen Perumahan	Penyediaan Akses Rumah Layak Huni-Kab. Boalemo	Tidak Terbahas
485	GORONTALO	Ditjen Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni-Kab. Gorontalo Utara	Tidak Terbahas
486	SULAWESI BARAT	Ditjen Cipta Karya	Sistem Pengelolaan Persampahan (TPST)-Kab. Mamuju	FKB
487	SULAWESI BARAT	Ditjen Cipta Karya	Sistem Pengelolaan Persampahan (TPST)-Kab. Polewali Mandar	FKB
488	SULAWESI BARAT	Ditjen Sumber Daya Air	Jaringan irigasi yang dibangun/ditingkatkan D.I. Maloso	FKB
489	SULAWESI BARAT	Ditjen Sumber Daya Air	Jaringan irigasi yang dibangun/ditingkatkan D.I. Kalukku	FKB
490	SULAWESI BARAT	Ditjen Sumber Daya Air	Bangunan pengendali banjir yang dibangun-Kab.Polewali Mandar	FKB
491	SULAWESI BARAT	Ditjen Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni-Kab. Polewali Mandar	FKB
492	SULAWESI BARAT	Ditjen Cipta Karya	Optimalisasi SPAM Kabupaten (PKW Majene)	FKS-FKB
493	SULAWESI BARAT	Ditjen Cipta Karya	Sistem Pengelolaan Persampahan (TPST)-Kab. Majene	FKB
494	SULAWESI BARAT	Ditjen Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni-Kab Majene	FKB
495	SULAWESI BARAT	Ditjen Cipta Karya	Optimalisasi SPAM Kota	FKB
496	SULAWESI BARAT	Ditjen Perumahan	Penyediaan Rumah Susun untuk MBR-Kab. Mamuju	FKB
497	SULAWESI BARAT	Ditjen Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni-Kab. Mamuju	FKB
498	SULAWESI BARAT	Ditjen Cipta Karya	Sistem pengelolaan air limbah domestik setempat-Kab. Mamuju Tengah	FKB

No	Nama Provinsi	Nama Unor	Kebutuhan Program	Kesepakatan Konreg
499	SULAWESI BARAT	Ditjen Cipta Karya	Sistem pengelolaan air limbah domestik setempat-Kab. Pasangkayu	FKB
500	SULAWESI BARAT	Ditjen Cipta Karya	Sistem pengelolaan air limbah domestik setempat-Kab. Mamasa	FKS-FKB
501	SULAWESI BARAT	Ditjen Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni-Kab. Pasangkayu	FKB
502	SULAWESI BARAT	Ditjen Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni-Kab. Mamuju Tengah	FKB
503	SULAWESI BARAT	Ditjen Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni-Kab. Mamasa	FKB
504	SULAWESI BARAT	Ditjen Perumahan	Penyediaan Rumah Susun untuk MBR-Kab. Mamasa	FKB
505	MALUKU	Ditjen Cipta Karya	Pembangunan SPALD-T Skala Permukiman (IPAL)-Sirimau	Tidak Terbahas
506	MALUKU	Ditjen Cipta Karya	Perluasan SPAM Kabupaten/Kota-Sirimau	Tidak Terbahas
507	MALUKU	Ditjen Cipta Karya	Perluasan SPAM Kabupaten/Kota-Nusaniwe	Tidak Terbahas
508	MALUKU	Ditjen Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni-Kota Ambon	FKB
509	MALUKU	Ditjen Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni-Kab. Maluku Tenggara	FKB
510	MALUKU	Ditjen Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni-Kota Tual	FKB
511	MALUKU	Ditjen Cipta Karya	Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota/Kawasan (TPST)-Tanimbar Selatan	Tidak Terbahas
512	MALUKU	Ditjen Sumber Daya Air	Pembangunan Penyediaan Air Baku di Kepulauan Tanimbar	FKB
513	MALUKU	Ditjen Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni-Kab. Kep Tanimbar	FKB
514	MALUKU	Ditjen Sumber Daya Air	Pembangunan Embung-Klis, Kec. Moa Lakor	FKB
515	MALUKU	Ditjen Sumber Daya Air	Pembangunan Embung-Werwaru, Kec. Moa Lakor	FKB
516	MALUKU	Ditjen Sumber Daya Air	Pembangunan Embung-Kaiwatu, Kec. Moa Lakor	FKB
517	MALUKU	Ditjen Sumber Daya Air	Pembangunan Embung-Tounwawan, Kec. Moa Lakor	FKB
518	MALUKU	Ditjen Sumber Daya Air	Pembangunan Bendungan Bomaki	FKB
519	MALUKU	Ditjen Cipta Karya	Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota/Kawasan (TPST)-P. Wetar	Tidak Terbahas
520	MALUKU	Ditjen Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni-Kab. MBD	FKB
521	MALUKU	Ditjen Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni-Kab. Maluku Tengah	FKB
522	MALUKU	Ditjen Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni-Kab. SBT	FKB
523	MALUKU	Ditjen Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni-Kab. SBB	FKB
524	MALUKU	Ditjen Sumber Daya Air	Pembangunan Intake Air Baku	FKB
525	MALUKU	Ditjen Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni-Kabupaten Kepulauan Aru	FKB
526	MALUKU	Ditjen Cipta Karya	Peningkatan SPAM Kabupaten/Kota-Tual: Kec. Dullah Selatan	Tidak Terbahas
527	MALUKU	Ditjen Bina Marga	Pembangunan Jalan Trans Pulau 3T-Ruas Air Nanang - Werinama (Kab. Seram Bagian Timur)	FKB
528	MALUKU	Ditjen Cipta Karya	Pembangunan SPAM Kabupaten/Kota-Kec. Kota Masohi	Tidak Terbahas
529	MALUKU	Ditjen Cipta Karya	Pembangunan SPAM Kabupaten/Kota-Kec. Bula	FKB
530	MALUKU	Ditjen Sumber Daya Air	Rehabilitasi, operasional dan pemeliharaan (OP) dan optimalisasi jaringan irigasi DI Way Leman	FKB
531	MALUKU	Ditjen Sumber Daya Air	Peningkatan Jaringan Saluran Suplesi D.I. Way Apu System	FKB
532	MALUKU	Ditjen Sumber Daya Air	Pembangunan Jaringan Irigasi D.I. Way Apu System	FKB
533	MALUKU	Ditjen Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni-Kab. Buru	FKB
534	MALUKU UTARA	Ditjen Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni-Kota Ternate	Tidak Terbahas
535	MALUKU UTARA	Ditjen Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni-Kota Tidore Kepulauan	Tidak Terbahas

No	Nama Provinsi	Nama Unor	Kebutuhan Program	Kesepakatan Konreg
536	MALUKU UTARA	Ditjen Bina Marga	Pembangunan Jalan-Ruas Maba-Bicoli-Tapeleo-Patani-Sif	FKB
537	MALUKU UTARA	Ditjen Cipta Karya	Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota/Kawasan (TPST)-Kec. Weda Tengah, Kec. Weda, Kec. Weda Utara	Tidak Terbahas
538	MALUKU UTARA	Ditjen Cipta Karya	Pembangunan SPALD-T Skala Permukiman (IPAL)-Kec. Weda Utara	Tidak Terbahas
539	MALUKU UTARA	Ditjen Cipta Karya	Pembangunan SPALD-T Skala Permukiman (IPAL)-Kec. Weda Tengah	Tidak Terbahas
540	MALUKU UTARA	Ditjen Cipta Karya	Pembangunan SPALD-T Skala Permukiman (IPAL)-Kec. Weda	Tidak Terbahas
541	MALUKU UTARA	Ditjen Sumber Daya Air	Pembangunan Sarana Prasarana Penanggulangan Bencana Banjir	FKB
542	MALUKU UTARA	Ditjen Cipta Karya	Peningkatan SPAM Kabupaten/Kota-Desa Kawassi Baru dan SPAM IKK Obi Selatan	Tidak Terbahas
543	MALUKU UTARA	Ditjen Bina Marga	Peningkatan Jalan	Tidak Terbahas
544	MALUKU UTARA	Ditjen Bina Marga	Pembangunan Jembatan	FKS-FKB
545	MALUKU UTARA	Ditjen Cipta Karya	Peningkatan SPAM Kabupaten	Tidak Terbahas
546	MALUKU UTARA	Ditjen Cipta Karya	Peningkatan SPAM Kabupaten/Kota-KEK Morotai	Tidak Terbahas
547	MALUKU UTARA	Ditjen Cipta Karya	Peningkatan SPAM Kabupaten/Kota-Pulau Morotai	Tidak Terbahas
548	MALUKU UTARA	Ditjen Cipta Karya	Pembangunan SPAM Kabupaten/Kota-Halmahera Selatan	Tidak Terbahas
549	MALUKU UTARA	Ditjen Cipta Karya	Peningkatan SPAM Kabupaten/Kota-Pulau Bacan	Tidak Terbahas
550	MALUKU UTARA	Ditjen Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni-Pulau Bacan	FKS-FKB
551	MALUKU UTARA	Ditjen Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni-Kabupaten Kepulauan Sula	Tidak Terbahas
552	PAPUA BARAT	Ditjen Bina Marga	Pembangunan Jalan Mameh - Wendesi	Tidak Terbahas
553	PAPUA BARAT	Ditjen Cipta Karya	Pembangunan SPAM Kab. Fak Fak-Kab. Fakfak	Tidak Terbahas
554	PAPUA BARAT	Ditjen Cipta Karya	Pembangunan SPAM Kab. Teluk Bintuni	Tidak Terbahas
555	PAPUA BARAT	Ditjen Cipta Karya	Pembangunan TPST Kab. Manokwari Selatan	FKS-FKB
556	PAPUA BARAT	Ditjen Cipta Karya	Pembangunan SPAM Kab. Manokwari	Tidak Terbahas
557	PAPUA BARAT	Ditjen Cipta Karya	Peningkatan IPAL Kab. Teluk Bintuni	Tidak Terbahas
558	PAPUA BARAT	Ditjen Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni di Kab. Teluk Wondama	Tidak Terbahas
559	PAPUA BARAT	Ditjen Perumahan	Pembangunan Rumah Susun MBR di Kab. Teluk Wondama	Tidak Terbahas
560	PAPUA BARAT	Ditjen Perumahan	Pembangunan Rumah Susun MBR di Kab. Manokwari	Tidak Terbahas
561	PAPUA BARAT	Ditjen Perumahan	Pembangunan Rumah Susun MBR di Kab. Pegunungan Arfak	Tidak Terbahas
562	PAPUA BARAT	Ditjen Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni di Kab. Pegunungan Arfak	Tidak Terbahas
563	PAPUA BARAT	Ditjen Perumahan	Pembangunan Rumah Susun MBR di Kab. Manokwari Selatan	Tidak Terbahas
564	PAPUA BARAT	Ditjen Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni di Kab. Manokwari Selatan	Tidak Terbahas
565	PAPUA BARAT	Ditjen Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni di Kab. Manokwari	Tidak Terbahas
566	PAPUA BARAT	Ditjen Perumahan	Pembangunan Rumah Susun MBR di Kab. Teluk Bintuni	Tidak Terbahas
567	PAPUA BARAT	Ditjen Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni di Kab. Kaimana	Tidak Terbahas
568	PAPUA BARAT	Ditjen Perumahan	Pembangunan Rumah Susun MBR di Kab. Kaimana	Tidak Terbahas
569	PAPUA BARAT	Ditjen Perumahan	Pembangunan Rumah Susun MBR di Kab. Fak-fak	FKS-FKB
570	PAPUA BARAT	Ditjen Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni di Kab. Teluk Bintuni	Tidak Terbahas
571	PAPUA BARAT	Ditjen Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni di Kab. Fak-fak	Tidak Terbahas
572	PAPUA BARAT DAYA	Ditjen Cipta Karya	Penataan Bangunan Kawasan Destinasi Wisata di KTA Waisai	FKS-FKB

No	Nama Provinsi	Nama Unor	Kebutuhan Program	Kesepakatan Konreg
573	PAPUA BARAT DAYA	Ditjen Sumber Daya Air	Prasarana Bidang Sumber Daya Air dan Irigasi/ Pembangunan Air Baku di Kawasan Ekonomi Khusus Kab. Sorong Tahap III	Tidak Terbahas
574	PAPUA BARAT DAYA	Ditjen Sumber Daya Air	Prasarana Bidang Sumber Daya Air dan Irigasi/ Peningkatan Kapasitas Intake dan Pipa Transmisi SPAM Regional Kab & Kota Sorong	Tidak Terbahas
575	PAPUA BARAT DAYA	Ditjen Sumber Daya Air	Prasarana Bidang Sumber Daya Air dan Irigasi/ Rehabilitasi Intake Air Baku SPAM Regional Sorong Tahap II	Tidak Terbahas
576	PAPUA BARAT DAYA	Ditjen Sumber Daya Air	Penyediaan Air Baku di Kab. Sorong	Tidak Terbahas
577	PAPUA BARAT DAYA	Ditjen Bina Marga	Pembangunan Jalan Perumahan ASN	Tidak Terbahas
578	PAPUA BARAT DAYA	Ditjen Bina Marga	Peningkatan Jalan Akses Belakang Kantor Gubernur	Tidak Terbahas
579	PAPUA BARAT DAYA	Ditjen Bina Marga	Pembangunan Jalan Utama Kawasan Kantor Gubernur	Tidak Terbahas
580	PAPUA BARAT DAYA	Ditjen Bina Marga	Pembangunan Jalan Nasional (Bandara-Kantor Gubernur)	Tidak Terbahas
581	PAPUA BARAT DAYA	Ditjen Bina Marga	Pembangunan Jalan Akses Pusat Pemerintahan Provinsi Papua Barat Daya	Tidak Terbahas
582	PAPUA BARAT DAYA	Ditjen Sumber Daya Air	Prasarana Bidang Sumber Daya Air dan Irigasi / Pembangunan Sumur Bor Air Tanah Sorong	Tidak Terbahas
583	PAPUA BARAT DAYA	Ditjen Perumahan	Bantuan PSU untuk Rumah Milik-Kota Sorong	Tidak Terbahas
584	PAPUA BARAT DAYA	Ditjen Perumahan	Pembangunan Rumah Susun ASN Pemprov Papua Barat Daya (1 tower, 4 lantai type 36)-Kota Sorong	Tidak Terbahas
585	PAPUA BARAT DAYA	Ditjen Perumahan	Pembangunan Rumah Susun ASN PUPR (1 tower, 3 lantai type 45)-Kota Sorong	Tidak Terbahas
586	PAPUA BARAT DAYA	Ditjen Perumahan	Pembangunan Rumah Susun TNI AL (1 tower, 3 lantai type 36)-Kota Sorong	Tidak Terbahas
587	PAPUA BARAT DAYA	Ditjen Perumahan	Memenuhi Kebutuhan Rumah Layak Huni di Kab. Sorong Selatan	Tidak Terbahas
588	PAPUA BARAT DAYA	Ditjen Perumahan	Memenuhi Kebutuhan Rumah Layak Huni di Kab. Raja Ampat	Tidak Terbahas
589	PAPUA BARAT DAYA	Ditjen Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni di Kota Sorong	Tidak Terbahas
590	PAPUA BARAT DAYA	Ditjen Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni di Kab. Sorong	Tidak Terbahas
591	PAPUA BARAT DAYA	Ditjen Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni di Kab. Raja Ampat	Tidak Terbahas
592	PAPUA BARAT DAYA	Ditjen Perumahan	Memenuhi Kebutuhan Rumah Layak Huni di Kab. Tambrauw	Tidak Terbahas
593	PAPUA BARAT DAYA	Ditjen Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni di Kab. Sorong Selatan	Tidak Terbahas
594	PAPUA BARAT DAYA	Ditjen Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni di Kab. Maybrat	Tidak Terbahas
595	PAPUA BARAT DAYA	Ditjen Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni di Kab. Tambrauw	Tidak Terbahas
596	PAPUA	Ditjen Perumahan	Peningkatan Kualitas RTLH Kab.Biak Numfor	Tidak Terbahas
597	PAPUA	Ditjen Perumahan	Peningkatan Kualitas RTLH Kab. Jayapura	Tidak Terbahas
598	PAPUA	Ditjen Perumahan	Peningkatan Kualitas RTLH Kab. Keerom	Tidak Terbahas
599	PAPUA	Ditjen Cipta Karya	Pemugaran Pemukiman Kumuh Kawasan Kampung Baru - Snerbo Kab. Biak Numfor	FKS-FKB
600	PAPUA	Ditjen Cipta Karya	Pemugaran Pemukiman Kumuh Kawasan Benpo - Yernures Kab. Biak Numfor	FKS-FKB
601	PAPUA	Ditjen Perumahan	Peningkatan Kualitas RTLH Kab. Sarmi	Tidak Terbahas
602	PAPUA	Ditjen Perumahan	Peningkatan Kualitas RTLH Kota Jayapura	Tidak Terbahas
603	PAPUA	Ditjen Perumahan	Peningkatan Kualitas RTLHa Kab.Kep. Yapen	Tidak Terbahas
604	PAPUA	Ditjen Perumahan	Peningkatan Kualitas RTLH Kab. Mamberamo Raya	Tidak Terbahas
605	PAPUA	Ditjen Perumahan	Peningkatan Kualitas RTLH Kab. Supiori	FKS-FKB
606	PAPUA	Ditjen Perumahan	Peningkatan Kualitas RTLH Kab. Waropen	Tidak Terbahas
607	PAPUA TENGAH	Ditjen Sumber Daya Air	Pembangunan Jaringan Air Baku Kab. Nabire	Tidak Terbahas
608	PAPUA TENGAH	Ditjen Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Kab. Nabire	Tidak Terbahas

No	Nama Provinsi	Nama Unor	Kebutuhan Program	Kesepakatan Konreg
609	PAPUA TENGAH	Ditjen Sumber Daya Air	Pembangunan Jaringan Air Baku Kab. Mimika	Tidak Terbahas
610	PAPUA TENGAH	Ditjen Bina Marga	Pembangunan Jembatan Kali Musairo Atas	Tidak Terbahas
611	PAPUA TENGAH	Ditjen Bina Marga	Pembangunan Jembatan Kali Korowa Atas	Tidak Terbahas
612	PAPUA TENGAH	Ditjen Bina Marga	Pembangunan Jembatan Kali Bumi Bawah	Tidak Terbahas
613	PAPUA TENGAH	Ditjen Bina Marga	Jembatan Akses Menuju Bandara Baru	Tidak Terbahas
614	PAPUA TENGAH	Ditjen Bina Marga	Pembangunan Jalan Alternatif Ibu Kota PPT – Bandara Karadiri	Tidak Terbahas
615	PAPUA TENGAH	Ditjen Bina Marga	Peningkatan Jalan Lingkungan Ibukota PPT	Tidak Terbahas
616	PAPUA TENGAH	Ditjen Bina Marga	Pembangunan Jalan Waroki Bandara Baru (2 Jalur Rigid)	Tidak Terbahas
617	PAPUA TENGAH	Ditjen Bina Marga	Pembangunan Jalan Kali Bumi – Bandara Karadiri	Tidak Terbahas
618	PAPUA TENGAH	Ditjen Cipta Karya	Pembangunan Gedung kantor MRP Provinsi Papua Tengah	Tidak Terbahas
619	PAPUA TENGAH	Ditjen Cipta Karya	Pembangunan Gedung Kantor Gubernur Provinsi Papua Tengah	Tidak Terbahas
620	PAPUA TENGAH	Ditjen Cipta Karya	Pembangunan Gedung kantor DPRD Provinsi Papua Tengah	Tidak Terbahas
621	PAPUA TENGAH	Ditjen Sumber Daya Air	Pengaman Pantai Cemara (Ujung Kawasan Bandara Baru Nabire)	Tidak Terbahas
622	PAPUA TENGAH	Ditjen Sumber Daya Air	Pembangunan Sumur Air Tanah dan Air Baku Kawasan Perkantoran Provinsi Papua Tengah dan Kawasan Bandara Baru Nabire	Tidak Terbahas
623	PAPUA TENGAH	Ditjen Perumahan	Rumah Susun ASN Pemprov 2 Tower, 4 Lantai, T.36-Kab. Nabire	Tidak Terbahas
624	PAPUA TENGAH	Ditjen Perumahan	Bantuan PSU untuk Rumah Milik-Kab. Nabire	Tidak Terbahas
625	PAPUA TENGAH	Ditjen Bina Marga	Pembangunan Jalan Beoga – Ilaga	Tidak Terbahas
626	PAPUA TENGAH	Ditjen Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Kab. Deiyai	FKS-FKB
627	PAPUA TENGAH	Ditjen Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Kab. Mimika	FKS-FKB
628	PAPUA TENGAH	Ditjen Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Kab. Dogiyai	FKS-FKB
629	PAPUA PEGUNUNGAN	Ditjen Bina Marga	Jalan Akses Kantor Gubernur Yogora-Walesi STA 0+000 – STA 0+525	Tidak Terbahas
630	PAPUA PEGUNUNGAN	Ditjen Bina Marga	Jalan Akses Kantor Gubernur Yogora-Walesa STA 0+525 – STA 2+840	Tidak Terbahas
631	PAPUA PEGUNUNGAN	Ditjen Bina Marga	Pembangunan Jalan Habema – Mugi	Tidak Terbahas
632	PAPUA PEGUNUNGAN	Ditjen Cipta Karya	Pembangunan Gedung MRP Provinsi Papua Pegunungan	Tidak Terbahas
633	PAPUA PEGUNUNGAN	Ditjen Cipta Karya	Pembangunan Gedung DPRD Provinsi Papua Pegunungan	Tidak Terbahas
634	PAPUA PEGUNUNGAN	Ditjen Cipta Karya	Pembangunan Kantor Gubernur Provinsi Papua Pegunungan	Tidak Terbahas
635	PAPUA PEGUNUNGAN	Ditjen Perumahan	Bantuan PSU untuk Rumah Milik-Kab. Jayawijaya	Tidak Terbahas
636	PAPUA PEGUNUNGAN	Ditjen Perumahan	Rumah Susun ASN Pemprov (1 Tower, 3 Lantai, T.36)-Kab. Jayawijaya	Tidak Terbahas
637	PAPUA PEGUNUNGAN	Ditjen Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Kab. Pegunungan Bintang	Tidak Terbahas
638	PAPUA PEGUNUNGAN	Ditjen Perumahan	Rumah Khusus ASN-Kab. Jayawijaya	Tidak Terbahas
639	PAPUA PEGUNUNGAN	Ditjen Bina Marga	Pembangunan Jalan Benawa – Kp. Ruja	Tidak Terbahas
640	PAPUA PEGUNUNGAN	Ditjen Bina Marga	Pembangunan Jalan Kp. Ruja – Mamberamo Tengah	Tidak Terbahas

No	Nama Provinsi	Nama Unor	Kebutuhan Program	Kesepakatan Konreg
641	PAPUA PEGUNUNGAN	Ditjen Bina Marga	Pembangunan Jalan Elelim – Benawa	Tidak Terbahas
642	PAPUA PEGUNUNGAN	Ditjen Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Kab. Jayawijaya	FKS-FKB
643	PAPUA PEGUNUNGAN	Ditjen Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Kab. Mamberamo Tengah	Tidak Terbahas
644	PAPUA PEGUNUNGAN	Ditjen Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Kab. Nduga	Tidak Terbahas
645	PAPUA PEGUNUNGAN	Ditjen Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Kab. Lanny Jaya	Tidak Terbahas
646	PAPUA PEGUNUNGAN	Ditjen Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Kab. Yahukimo	Tidak Terbahas
647	PAPUA SELATAN	Ditjen Sumber Daya Air	Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa Tanah Miring, Kab. Merauke	FKS-FKB
648	PAPUA SELATAN	Ditjen Sumber Daya Air	Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa Semangga, Kab. Merauke	FKS-FKB
649	PAPUA SELATAN	Ditjen Bina Marga	Dalam Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Papua Selatan (Penanganan Akses Jalan Menuju Pusat Pemerintahan Provinsi Papua Selatan)	Tidak Terbahas
650	PAPUA SELATAN	Ditjen Bina Marga	Simpang Kuda Mati (Merauke) – Simpang Kuprik (Penanganan Akses Jalan Menuju Pusat Pemerintahan Provinsi Papua Selatan)	Tidak Terbahas
651	PAPUA SELATAN	Ditjen Bina Marga	Simpang Kuprik - Kampung SP 9 - SP 3 Salor (Penanganan Akses Jalan Menuju Pusat Pemerintahan Papua Selatan)	Tidak Terbahas
652	PAPUA SELATAN	Ditjen Sumber Daya Air	Fasilitas Penunjang Intake dan Rumah Pompa Booster Air Baku SA Sungai Maro	Tidak Terbahas
653	PAPUA SELATAN	Ditjen Sumber Daya Air	Pembangunan Sumur Bor untuk Penyediaan Air Baku di Lokasi Pusat Pemerintahan Provinsi Papua Selatan	Tidak Terbahas
654	PAPUA SELATAN	Ditjen Sumber Daya Air	Pembangunan Lanjutan Pengaman Pantai Lampu Satu Kab. Merauke (Lanjutan)	Tidak Terbahas
655	PAPUA SELATAN	Ditjen Sumber Daya Air	Pembangunan Saluran Pengendali Banjir Markas KOREM dan Rumah Sakit	Tidak Terbahas
656	PAPUA SELATAN	Ditjen Sumber Daya Air	Pembangunan Pengendali Banjir Kota Merauke (Lanjutan)	Tidak Terbahas
657	PAPUA SELATAN	Ditjen Perumahan	Bantuan PSU untuk Rumah Milik DOB-Kab. Merauke	Tidak Terbahas
658	PAPUA SELATAN	Ditjen Perumahan	Pembangunan Rumah Khusus Jabatan-Kab. Merauke	Tidak Terbahas
659	PAPUA SELATAN	Ditjen Perumahan	Pembangunan Rumah Susun ASN Pemprov 2 Tower, 4 Lantai, T.36-Kab. Merauke	Tidak Terbahas
660	SUMATERA UTARA	Ditjen Sumber Daya Air	Penyediaan Air Baku	FKB
661	SULAWESI TENGAH	Ditjen Cipta Karya	Penataan Ruang Terbuka Hijau	Tidak Terbahas
662	SULAWESI TENGAH	Ditjen Perumahan	Pembangunan Rumah Susun Pekerja KI Morowali	Tidak Terbahas
663	SULAWESI TENGGARA	Ditjen Bina Marga	Pembangunan Jembatan Kec. Anggalomoare (Tabanggele - Pebunoocha)	FKB
664	SULAWESI TENGGARA	Ditjen Bina Marga	Pembangunan Jalan Pintas Kawasan Industri ke Kendari	FKB
665	SULAWESI TENGGARA	Ditjen Bina Marga	Pembangunan Jalan Abeli Sawah - Tabanggele	Tidak Terbahas
666	MALUKU UTARA	Ditjen Bina Marga	Pengembangan Jalan Weda - Sagea	Tidak Terbahas
667	MALUKU UTARA	Ditjen Bina Marga	Penambahan Alternatif Akses Maba ke KI Weda	Tidak Terbahas
668	MALUKU UTARA	Ditjen Bina Marga	Pelebaran Jalan Lukulamo - Lelilef	Tidak Terbahas
669	MALUKU UTARA	Ditjen Cipta Karya	Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Publik	Tidak Terbahas
670	MALUKU UTARA	Ditjen Cipta Karya	Penataan Alun-Alun Kawasan Lelilef	Tidak Terbahas
671	MALUKU UTARA	Ditjen Sumber Daya Air	Penyediaan Air Baku Kawasan Sekitar KI Weda	Tidak Terbahas
672	MALUKU UTARA	Ditjen Perumahan	Pembangunan Rumah Susun Pekerja KI Weda	FKS-FKB
673	MALUKU UTARA	Ditjen Bina Marga	Pengembangan Jalan Pulau	Tidak Terbahas

No	Nama Provinsi	Nama Unor	Kebutuhan Program	Kesepakatan Konreg
674	MALUKU UTARA	Ditjen Cipta Karya	Sistem Pengelolaan Persampahan	Tidak Terbahas
675	MALUKU UTARA	Ditjen Cipta Karya	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Tidak Terbahas
676	PAPUA BARAT DAYA	Ditjen Bina Marga	Pengembangan Jalan KTA Misool	Tidak Terbahas
677	PAPUA BARAT DAYA	Ditjen Bina Marga	Pengembangan Jalan KTA Waisai	Tidak Terbahas
678	PAPUA BARAT DAYA	Ditjen Cipta Karya	Sistem Pengelolaan Persampahan	Tidak Terbahas
679	PAPUA BARAT DAYA	Ditjen Cipta Karya	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Tidak Terbahas

Lampiran IV. Berita Acara Kesepakatan Capaian Kinerja

Berita Acara Kesepakatan Capaian Kinerja Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Tahun 2024


Dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja BPIW Tahun 2024, sebagai bagian dari perwujudan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, disepakati capaian kinerja sebagai berikut:

Sasaran Kinerja/ Indikator Kinerja	Metode Pengukuran	Target (%)	Realisasi (%)	Kinerja (%)
SS Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya				
IKSS- Tingkat Keselarasan Dukungan Infrastruktur di Kawasan Strategis	Diperoleh dari jumlah Kawasan yang disepakati untuk didukung bersama oleh K/L terkait dibandingkan dengan jumlah kawasan $IKSS = \frac{a}{b} \times 100\%$ Ket: IKSS = Indikator Kinerja Sasaran Strategis a = Jumlah kawasan yang disepakati untuk didukung bersama oleh K/L terkait b = Jumlah prioritas kawasan yang ditargetkan dalam dokumen perencanaan	82,5	88,35	107,09
SP Meningkatnya Dukungan Manajemen Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya				
IKSP 1-1 Tingkat Pemanfaatan Kebijakan, Strategi Perencanaan dan Pemrograman	Tingkat Pemanfaatan Kebijakan, Strategi Perencanaan dan Pemrograman dikatakan tercapai apabila $IKSP = \frac{a}{b} \times 100\%$ Ket: IKSP = Indikator Kinerja Sasaran Program a = Jumlah kawasan yang ditangani dengan perencanaan dan pemrograman infrastruktur PUPR b = Jumlah Kawasan	100	100	100
IKSP 1-2 Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya	(Mendukung Indikator Sasaran Program Kesekretariatan Kementerian PUPR)	94,58	97,55	103,14
SK-1 Meningkatnya Pelaksanaan Perencanaan dan Pemrograman Pembangunan Infrastruktur PUPR				
IKSK 1-1 Tingkat Kesesuaian Kebijakan dan Strategi Perencanaan dan Pemrograman Infrastruktur PUPR	Tingkat Pemanfaatan Kebijakan, Strategi Perencanaan dan Pemrograman dikatakan tercapai apabila: <u>Sub Indikator-1 (30%):</u> $IKSK1 - 1 = \frac{a}{b} \times 100\%$ Ket: IKSK1-1= Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (Sub Indikator 1) a = capaian Renstra PUPR b = target Renstra Unor PUPR <u>Sub Indikator-2 (70%):</u> $IKSK1 - 2 = \frac{c}{d} \times 100\%$ Ket: IKSK1-2= Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (Sub Indikator 2) c = jumlah program arahan yang menjadi Format Kegiatan Wajib dan Format Kegiatan Pembangunan Baru pada Konsultasi Regional d = jumlah program Rakorbangwil	85	89,01	104,7

Sasaran Kinerja/ Indikator Kinerja	Metode Pengukuran	Target (%)	Realisasi (%)	Kinerja (%)
	IKSK1-2= Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (Sub Indikator 2) c = jumlah program arahan yang menjadi Format Kegiatan Wajib dan Format Kegiatan Pembangunan Baru pada Konsultasi Regional d = jumlah program program Rakorbangwil			
	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 2 dihitung dari jumlah kawasan yang ditangani perencanaan dan pemrograman infrastrukturnya dibandingkan dengan jumlah kawasan, dikali 100%.			
IKSK 1-2 Tingkat Kesesuaian Penanganan Kawasan Prioritas melalui Perencanaan dan Pemrograman Infrastruktur PUPR di Pulau Sumatra dan Kalimantan	$IKSK2 = \frac{e1}{f1} \times 100\%$ Ket: IKSK2 = Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (Wilayah I) e1 = Jumlah kawasan yang ditangani dengan perencanaan dan pemrograman infrastruktur PUPR di Pulau Sumatra dan Kalimantan f1 = Jumlah Kawasan Prioritas di Pulau Sumatra dan Kalimantan	100	100	100
	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 3 dihitung dari jumlah kawasan yang ditangani perencanaan dan pemrograman infrastrukturnya dibandingkan dengan jumlah kawasan, dikali 100%.			
IKSK 1-3 Tingkat Kesesuaian Penanganan Kawasan Prioritas melalui Perencanaan dan Pemrograman Infrastruktur PUPR di Pulau Jawa, Bali dan Kep. Nusa Tenggara	$IKSK2 = \frac{e2}{f2} \times 100\%$ Ket: IKSK2 = Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (Wilayah II) e2 = Jumlah kawasan yang ditangani dengan perencanaan dan pemrograman infrastruktur PUPR di Pulau Jawa, Bali, dan Kep. Nusa Tenggara f2 = Jumlah Kawasan Prioritas di Pulau Jawa, Bali, dan Kep. Nusa Tenggara	100	100	100

Sasaran Kinerja/ Indikator Kinerja	Metode Pengukuran	Target (%)	Realisasi (%)	Kinerja (%)
IKSK 1-3 Tingkat Kesesuaian Penanganan Kawasan Prioritas melalui Perencanaan dan Pemrograman Infrastruktur PUPR di Pulau Sulawesi, Papua dan Kep. Maluku	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 4 dihitung dari jumlah kawasan yang ditangani perencanaan dan pemrograman infrastrukturnya dibandingkan dengan jumlah kawasan, dikali 100%.			
	$IKSK2 = \frac{e3}{f3} \times 100\%$			
	Ket: IKSK2 = Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (Wilayah III)	100	100	100
	e3 = Jumlah kawasan yang ditangani dengan perencanaan dan pemrograman infrastruktur PUPR di Pulau Sulawesi, Papua, dan Kep. Maluku			
	f3 = Jumlah Kawasan Prioritas di Pulau Sulawesi, Papua, dan Kep. Maluku			

Sekretaris Badan
Pengembangan Infrastruktur
Wilayah


Benny Hermawan, S.T., M.Sc.
NIP 196812161997031001

Kepala Pusat Pengembangan
Infrastruktur Wilayah Nasional


Ir. Zevi Azzaino, M.Sc., Ph.D.
NIP 196705091996031003

Kepala Pusat Pengembangan
Infrastruktur PU Wilayah I


Bobby Ali Amari, S.T., M.Sc.
NIP 197007271998031003

Kepala Pusat Pengembangan
Infrastruktur PU Wilayah II


Dr. Melva Eryani Marpaung, S.T., MUM
NIP 196709021997032001

Kepala Pusat Pengembangan
Infrastruktur PU Wilayah III


Prandito, S.T., M.Dev.Plg.
NIP 197108181998031003

Menetapkan.

Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah


Dr. Ir. Yudha Mediawan, M.Dev.Plg.
NIP 196610211992031003

Lampiran V. Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan







Kementerian Pekerjaan Umum
Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah
Tahun 2024